HIMPUNAN KEPUTUSAN

MUSYAWARAH NASIONAL VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2011



DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
Surabaya, 8 – 9 MARET 2011

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
DEWAN
PIMPINAN
PUSAT
LDII

HIMPUNAN KEPUTUSAN

MUSYAWARAH NASIONAL VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2011

(MUNAS VII LDII TAHUN 2011)

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
LDII
Surabaya, 8 – 9 MARET 2011

MUNAS VII LDII TAHUN 2011

TEMA:

MENINGKATKAN PENGEMBANGAN SDM PROFESIONAL RELIGIUS MENUJU INDONESIA SEJAHTERA, DEMOKRATIS, BERKEADILAN DAN BERMARTABAT

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan mengucapkan kalimat syukur *alhamdu lillahi robbil 'alamin*, kita panjatkan puji syukur kehadirat Alloh *Subhanahu wa Ta'ala* karena atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita dan atas hidayah dan izin-Nya, kita dapat menyelenggarakan Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia (MUNAS VII LDII) di Surabaya pada tanggal 8 – 9 Maret 2011 sesuai rencana, tanpa menemui kendala yang berarti. Begitu pula, terhadap segala ilham dan inspirasi yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga kita dapat mengambil keputusan dan ketetapan sebagai bentuk pembelajaran organisasi (*learning organization*) seluruh warga LDII dalam menyikapi perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sangat dinamis.

Sebagai institusi tertinggi dalam pengambilan keputusan organisasi, keputusan dan ketetapan yang dihasilkan dalam MUNAS VII LDII perlu dikodifikasi dan dituangkan dalam buku seperti ini. Secara internal, keputusan dan ketetapan yang tertuang dalam Buku MUNAS VII LDII ini, hendaknya menjadi landasan dan pedoman bagi segenap jajaran Lembaga

Dakwah Islam Indonesia dalam menjalankan roda organisasi. Roh, filosofi dan cara pandang (paradigma) yang terkandung dalam setiap keputusan dan ketetapan tersebut sepatutnya menginspirasi seluruh jajaran organisasi mulai dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Pengurus Cabang sampai pada Pengurus Anak Cabang. Dengan demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan selama masa bakti 2011 – 2016 merupakan penjabaran dari keputusan dan ketetapan MUNAS VII LDII Tahun 2011.

Bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya seperti pemerintah, organisasi kemasyarakatan lainnya termasuk dunia usaha, kehadiran Buku MUNAS VII LDII ini diharapkan dapat memberi manfaat paling tidak dalam dua tataran, yaitu:

Pertama, buku ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber informasi yang obyektif tentang Lembaga Dakwah Islam Indonesia mulai dari visi, misi, strategi, program dan kegiatan-kegiatannya. Melalui unsur-unsur organisasi tersebut, diharapkan terbentuk persepsi yang utuh tentang LDII, khususnya pada bagaimana strategi dakwahnya, paham keagamaannya, paham kemasyarakatannya, juga perannya dalam pendidikan dakwah keagamaan, pendidikan kemasyarakatan, dan upayanya dalam menjaga keseimbangan dunia dan akhirat. Dengan demikian, para *stakeholder* LDII dapat memiliki informasi dan persepsi yang lebih simetris.

Kedua, buku MUNAS VII LDII diharapkan dapat menjadi bahan kajian, khususnya dari perspektif *system thinking* dan *learning organization*. Melalui ketetapan dan keputusan MUNAS VII LDII tersebut, para *stakeholder* dapat menelusuri bagaimana hubungan dan keterkaitan antar keputusan dan ketetapan itu terjalin secara sistematis dan sistemik untuk mengusung Tema MUNAS VII LDII Tahun 2011 yaitu "*Meningkatkan Pengembangan SDM Profesional Religius Menuju Indonesia Sejahtera, Demokratis, Berkeadilan dan Bermartabat*." Jika didalami, *stakeholder* pun dapat menelusuri dinamika yang terjadi sebelum keputusan dan ketetapan itu disetujui.

Bagaimana sebuah ide muncul, diinkubasi, dikombinasi dan kemudian ditetapkan.

Akhirnya, semoga kehadiran Buku MUNAS VII LDII ini dapat memainkan peranannya sebagaimana telah diuraikan di atas, dan semoga Alloh *Subhanahu wa Ta'ala* senantiasa memberi perlindungan, pertolongan, kekuatan serta hidayah-Nya kepada kita semua. Amien.

وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Jakarta, 4 April 2011

Dewan Pimpinan Pusat
Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Prof. DR. Ir. KH. Abdullah Syam, MSc.
Ketua Umum

DAFTAR ISI

		Halaman
Kata Pengantar		v
Daftar Isi		ix
KEPUTUSAN MUNAS VII LDII		
1.	**NOMOR KEP-01/MUNAS VII LDII/III/2011** Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia	1
2.	**NOMOR KEP-02/MUNAS VII LDII/III/2011** Tentang Jadwal Acara Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia	21
3.	**NOMOR KEP-03/MUNAS VII LDII/III/2011** Tentang Komposisi dan Personalia Pimpinan Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia	31
4.	**NOMOR KEP-04/MUNAS VII LDII/III/2011** Tentang Peraturan Tata Tertib dan Tata Cara Pemilihan Langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2011-2016 dan Pembentukan Formatur Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia	35
5.	**NOMOR KEP-05/MUNAS VII LDII/III/2011** Tentang Pembentukan Komisi-Komisi Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia	49

6. **NOMOR KEP-06/MUNAS VII LDII/III/2011** 55
Tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia

7. **NOMOR KEP-07/MUNAS VII LDII/III/2011** 117
Tentang Rencana Strategi Lembaga Dakwah Islam Indonesia 2011 – 2016

8. **NOMOR KEP-08/MUNAS VII LDII/III/2011** 183
Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Lembaga Dakwah Islam Indonesia

9. **NOMOR KEP-09/MUNAS VII LDII/III/2011** 207
Tentang Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2005 – 2011

10. **NOMOR KEP-10/MUNAS VII LDII/III/2011** 235
Tentang Pernyataan Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia

11. **NOMOR KEP-11/MUNAS VII LDII/III/2011** 243
Tentang Pemilihan Langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia

12. **NOMOR KEP-12/MUNAS VII LDII/III/2011** 249
Tentang Pembentukan Formatur

13. **NOMOR KEP-13/MUNAS VII LDII/III/2011** 255
Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2011-2016

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA 263

1. **NOMOR KEP-001/DPP LDII/III/2011** 265
   Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2011–2016

2. **NOMOR KEP-077/DPP LDII/XII/2010** 275
   Tentang Penyelenggaraan Musyawaroh Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011

3. **NOMOR KEP-078/DPP LDII/XII/2010** 281
   Tentang Susunan Personalia Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011

4. **Nomor KEP-081//DPP LDII/I/2011** 307
   Tentang Perubahan Atas Tema dan Tanggal Penyelenggaraan Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011

LAMPIRAN-LAMPIRAN 313

Sambutan

1. Laporan Ketua Panitia Pelaksana MUNAS VII pada Upacara Pembukaan Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011 315

2. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia pada Upacara Pembukaan Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011 321

3. Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat: Prof. DR. Umar Shihab pada Upacara Pembukaan Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011 333

4. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Periode 2011 – 2016 pada Upacara Penutupan Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011 339

Tausiah dan Pengarahan

1. Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat : Prof. DR Umar Shihab
"*Taswiyatul Manhaj dan Tansiqul Harokah*" 347

2. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama : Prof. Dr. Said Agil Siraj
"*Tausiah*" 353

3. Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah : Prof.Dr. H.A. Malik Fajar
"*Dimensi Pendidikan Agama sebagai Penguat Solidaritas Sosial*" 365

4. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga : DR. Andi Alfian Malarangeng
"*Pengarahan*" 369

5. Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur : H. Saifulloh Yusuf
"*Pengarahan*" 373

6. Presiden Direktur Bank Syariah Mandiri: Yuslam Fauzi
"*Perbankan Syariah dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ummat*" 379

7. Deputi I. Poldagri, Kemenko Polhukam : Mayjen TNI Amirrudin Usman, SIP.
"*Persoalan Sosial yang Berdampak Gangguan pada Keamanan dan Ketertiban*" 395

8. Guru Besar Universitas Airlangga, Surabaya: Prof. DR. Kacung Marijan
"Civil Society *dalam Proses Demokrasi*" 401

9. Ketua Departemen Kepemudaan dan Remaja, Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia: H. Daud Poliradja
"*Sambutan*" 409

Lain-lain

1. Surat Tanda Terima Pemberitahuan dari Mabes Polri 411

2. Galeri Foto – MUNAS VII LDII Tahun 2011 417

3. Daftar liputan media tentang MUNAS VII LDII Tahun 2011 437

4. CD Video Dokumentasi Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011 441

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

NOMOR : KEP-01/MUNAS VII LDII/III/2011

Tentang:

PERATURAN TATA TERTIB
MUSYAWARAH NASIONAL VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUSYAWARAH NASIONAL VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi dalam penyelenggaraan kewenanganya maka diselenggarakan Musyawarah Nasional VII yang penyelenggaraannya ditetapkan pada tanggal 8-9 Maret 2011 di Surabaya.

b. Bahwa untuk mengatur prosedur penyelenggaraan sesuai kontitusi

organisasi dalam mencapai tujuan yang optimal penyelenggaraan Musyawarah Nasional VII perlu ditetapkan Tata Tertib Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

c. Bahwa sesuai saran, masukan dan pendapat dari peserta MUNAS VII LDII yang membahas Keputusan tentang Peraturan Tata Tertib MUNAS VII.

d. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan suatu keputusan Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

Mengingat :

1. Undang–undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Undang–undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.
3. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan.
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia hasil MUNAS VI LDII Tahun 2005 di Jakarta.
6. Hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) LDII Tahun 2010.

7. Hasil - hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LDII Tahun 2000.
8. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-77/DPP LDII/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 tentang Penyelenggaraan MUNAS VII LDII Tahun 2011.
9. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-78/DPP LDII/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 tentang Susunan Personalia Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana MUNAS VII LDII Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2011.

Pasal 1

Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia (MUNAS VII LDII) secara lengkap dan terinci adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 2

Peraturan Tata Tertib seperti dimaksud dalam pasal 1 adalah merupakan pedoman dan pegangan yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta dalam melakukan kegiatan-kegiatan rapat selama MUNAS VII LDII.

Pasal 3

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 9 Maret 2011
4 Rabi'ul Tsani 1432

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Selaku

PIMPINAN SEMENTARA
MUSYAWARAH NASIONAL VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Ketua Umum,	Sekretaris Jenderal,
Prof. DR. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc.	**H. Muhamad Sirot, S.H.**

Lampiran : KEPUTUSAN MUNAS VII LDII TAHUN 2011
Nomor : KEP-01/MUNAS VII LDII/III/2011
Tanggal : 9 Maret 2011
4 Rabi'ul Tsani 1432

PERATURAN TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2011

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Tata Tertib ini, yang dimaksud dengan :

a. **Alat-alat Kelengkapan MUNAS VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia** terdiri atas Pimpinan MUNAS VII, Komisi dan Formatur sebagai sarana atau lembaga yang dibentuk untuk kelancaran pelaksanaan MUNAS VII, yang pembentukannya melalui Rapat Paripurna.

b. **Dewan Pimpinan Daerah** adalah Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

c. **Dewan Pimpinan Pusat** adalah Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

d. **MUNAS VII** adalah Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 18 dan Pasal 27 ayat (1) Lembaga Dakwah Islam Indonesia, yang berlangsung tanggal 8 - 9 Maret 2011 (*3 – 4 Rabi'ul Tsani 1432 H*) di Surabaya.

e. **Organisasi** adalah organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

f. **Penasihat** adalah Dewan Penasihat Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

g. **Peninjau** adalah peninjau MUNAS VII sebagaimana dimaksud Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

h. **Peserta** adalah peserta MUNAS VII sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

i. **Rapat Komisi** adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh Peserta, Peninjau dan Komisi yang bersangkutan.

j. **Rapat Paripurna** adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh Peserta dan Peninjau.

k. **Rapat Pimpinan MUNAS VII** adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan MUNAS VII.

BAB II
LANDASAN DAN DASAR

Pasal 2

Landasan dan dasar penyelenggaraan MUNAS VII adalah :

1. Anggaran Dasar Lembaga Dakwah Islam Indonesia, khususnya ketentuan Pasal 18 tentang kewenangan dan kewajiban Dewan Pimpinan Pusat menyelenggarakan Musyawarah Nasional.
2. Anggaran Dasar Lembaga Dakwah Islam Indonesia, khususnya ketentuan Pasal 27 ayat (1), tentang bentuk

permusyawaratan adalah rapat-rapat Organisasi dan Musyawarah Nasional yang diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali, dan penyelenggaraannya ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

3. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor : KEP-02/RAPIMNAS LDII/IV/2010 tanggal 11 April 2010 mengenai penundaan penyelenggaraan MUNAS VII dan perpanjangan masa bakti Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

4. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia No. Kep-077/DPP LDII/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 tentang penyelenggaraan MUNAS VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011.

5. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia No. Kep-078/DPP LDII/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 tentang susunan personalia panitia pengarah dan panitia pelaksana MUNAS VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

(1) MUNAS VII merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, yang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pada ketentuan perundangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia, serta Peraturan Tata Tertib ini.

(2) MUNAS VII diselenggarakan untuk :
   (a) Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
   (b) Menetapkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

(c) Menetapkan Program Umum dan Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
(d) Merumuskan sikap Organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan keagamaan.
(e) Memilih Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
(f) Menetapkan Formatur MUNAS VII.
(g) Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

BAB IV
PESERTA, PENINJAU DAN UNDANGAN

Pasal 4

(1) MUNAS VII dihadiri oleh peserta, peninjau dan undangan.

(2) Peserta MUNAS VII terdiri atas :
(a) Dewan Penasihat.
(b) Dewan Pimpinan Pusat.
(c) Unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, masing-masing ditetapkan sebanyak 2 (dua) orang.
(d) Unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, masing-masing ditetapkan sebanyak 1 (satu) orang.

(3) Peninjau MUNAS VII terdiri atas :
(a) Unsur Dewan Penasihat Daerah masing-masing 1 (satu) orang.
(b) Unsur Badan dan/atau Lembaga, dan Organisasi Otonom di lingkungan Lembaga Dakwah Islam Indonesia, masing-masing ditetapkan sebanyak 1 (satu) orang.
(c) Unsur perwakilan Pondok Pesantren yang diundang oleh Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
(d) Perseorangan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

(4) Undangan adalah pihak-pihak yang diundang oleh Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia untuk menghadiri pembukaan dan/atau penutupan MUNAS VII, terdiri atas :
   (a) Pejabat dan Instansi Pemerintah.
   (b) Para pengamat, dari dalam dan luar negeri.
   (c) Undangan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Pasal 5

(1) Setiap Peserta dari tingkat Pusat wajib membawa surat undangan dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

(2) Setiap Peserta dari unsur Dewan Pimpinan Daerah wajib membawa surat undangan dan surat mandat dari Dewan Pimpinan Daerah masing-masing.

(3) Setiap Peninjau dari unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan Tata tertib ini wajib membawa surat undangan dan surat mandat dari Lembaga terkait masing-masing.

(4) Setiap Undangan wajib membawa surat undangan dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

(5) Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA, PENINJAU DAN UNDANGAN

Pasal 6

(1) Peserta mempunyai :
   (a) Hak bicara.
   (b) Hak suara, yang pengaturannya adalah sebagai berikut:

(i) Dewan Penasihat Tingkat Pusat 1 (satu) suara.
(ii) Dewan Pimpinan Pusat 7 (tujuh) suara.
(iii) Unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, masing-masing 3 (tiga) suara.
(iv) Unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota, masing-masing 1 (satu) suara.

(c) Suara sah adalah suara yang disampaikan oleh peserta yang diberi mandat oleh jenjang struktur Dewan Pimpinan sesuai dengan tingkatannya.
(d) Peninjau hanya mempunyai hak bicara.
(e) Undangan tidak mempunyai hak bicara dan hak suara.

Pasal 7

Peserta berhak mengajukan usul perubahan terhadap rancangan materi MUNAS VII yang disiapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pokok-pokok usulan perubahan dapat dikemukakan dalam Rapat Paripurna atau Rapat Komisi.

Pasal 8

(1) Peserta dan Peninjau berhak mengajukan pendapat, saran dan tanggapan, baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat-rapat.

(2) Pendapat, saran dan tanggapan yang diajukan harus disusun secara singkat dan jelas, serta disampaikan / ditujukan kepada Pimpinan Rapat.

Pasal 9

Pemandangan umum disampaikan dalam Rapat Paripurna oleh masing-masing unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.

Pasal 10

(1) Setiap Peserta dan Peninjau berkewajiban untuk :
(a) Mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini.
(b) Menghadiri Rapat Paripurna dan Rapat Komisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini.

(2) Peserta, Peninjau dan undangan wajib memelihara kelancaran dan ketertiban MUNAS VII.

BAB VI
ALAT-ALAT KELENGKAPAN MUNAS VII

Pasal 11
U m u m

Alat-alat kelengkapan MUNAS VII adalah :

a. Pimpinan MUNAS VII.
b. Komisi-komisi; dan
c. Formatur.

Pasal 12
P i m p i n a n

(1) Pimpinan MUNAS VII dipilih dari dan oleh Peserta.

(2) Sebelum Pimpinan MUNAS VII sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih, MUNAS VII dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat yang bertindak sebagai Pimpinan Sementara MUNAS VII.

(3) Tugas Pimpinan Sementara adalah memimpin Rapat Paripurna untuk :
   (a) Menetapkan Peraturan Tata Tertib MUNAS VII.
   (b) Menetapkan Jadwal Acara MUNAS VII.
   (c) Memilih dan menetapkan Pimpinan MUNAS VII.

(4) Pimpinan MUNAS VII merupakan satu-kesatuan yang bersifat kolektif, terdiri atas :
   (a) 2 (dua) orang dari Dewan Pimpinan Pusat.
   (b) 5 (lima) orang, yang mewakili Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, yang terdiri atas :
      (i) 1 (satu) orang wakil dari wilayah Sumatera.
      (ii) 1 (satu) orang wakil dari wilayah Jawa dan Bali.
      (iii) 1 (satu) orang wakil dari wilayah Kalimantan.
      (iv) 1 (satu) orang wakil dari wilayah Sulawesi.
      (v) 1 (satu) orang wakil dari wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

(5) Peserta MUNAS VII dari unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi mengusulkan nama-nama calon anggota Pimpinan MUNAS VII kepada pimpinan sementara.

(6) Pimpinan sementara mengumumkan nama-nama calon anggota pimpinan MUNAS VII sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan menjadi Pimpinan MUNAS VII.

(7) Komposisi Pimpinan MUNAS VII terdiri atas :
(a) 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota.
(b) 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap Anggota.
(c) 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota.
(d) 1 (satu) orang Wakil Sekretaris merangkap Anggota.
(e) 3 (tiga) orang Anggota.

(8) Pembagian tugas di antara unsur Pimpinan MUNAS VII ditetapkan oleh Pimpinan MUNAS VII.

Pasal 13

(1) Wewenang Pimpinan MUNAS VII adalah :
(a) Memimpin Rapat Paripurna dan Rapat Pimpinan MUNAS VII.
(b) Menjaga kelancaran dan ketertiban MUNAS VII.

(2) Pimpinan MUNAS VII dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Panitia MUNAS VII.

Pasal 14
K o m i s i

(1) Komisi MUNAS VII terdiri atas :
Komisi A : Bidang Organisasi.
Komisi B : Bidang Program.
Komisi C : Bidang SDM.
Komisi D : Bidang Laporan Pertanggungjawaban
Komisi E : Bidang Pernyataan dan Rekomendasi MUNAS VII.

(2) Bila dipandang perlu, Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk sub-Komisi.

Pasal 15

(1) Setiap Peserta dan Peninjau wajib menjadi anggota salah satu Komisi, kecuali Pimpinan MUNAS VII.
(2) Keanggotaan Komisi ditetapkan berdasarkan permintaan Peserta dan Peninjau, dengan perimbangan yang diatur oleh Panitia MUNAS VII.

Pasal 16

(1) Komposisi Pimpinan Komisi terdiri atas :
    a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota.
    b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota.
    c. 3 (tiga) orang Anggota.
(2) Pimpinan Komisi dipilih dari dan oleh Peserta dalam Rapat Komisi.
(3) Sebelum Pimpinan Komisi terpilih, maka Pimpinan MUNAS VII menjadi Pimpinan Sementara Komisi untuk memilih Pimpinan Komisi.
(4) Pembagian tugas di antara unsur-unsur Pimpinan Komisi diatur secara musyawarah.
(5) Pimpinan Komisi merupakan satu-kesatuan yang bersifat kolektif.

Pasal 17

(1) Komisi bertugas memusyawarahkan dan mengambil keputusan mengenai bidang yang menjadi tugas Komisi yang bersangkutan.
(2) Laporan Komisi disusun oleh Pimpinan Komisi berdasarkan pendapat, saran dan tanggapan Anggota Komisi.
(3) Apabila dipandang perlu, Pimpinan Komisi dapat meminta beberapa orang Anggota Komisi untuk membantu menyusun laporan tersebut.

Pasal 18

Komisi memberikan laporan dalam Rapat Paripurna mengenai hasil kerjanya untuk disahkan sebagai keputusan MUNAS VII.

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi dibantu oleh Panitia MUNAS VII.

(2) Pembicaraan dalam Rapat Komisi disusun dalam risalah rapat.

Pasal 20

F o r m a t u r

Pembentukan Formatur MUNAS VII, tugas dan kewenangannya akan diatur tersendiri dalam keputusan MUNAS VII.

BAB VII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 21

(1) Dewan Pimpinan Pusat masa bakti 2005 - 2011 menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Rapat Paripurna.

(2) Penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Peserta melalui pemandangan umum dalam Rapat Paripurna.

(3) Pemandangan umum disampaikan oleh unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.

(4) Setelah melalui proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat masa bakti 2005 – 2011 akan dibahas dalam Rapat Komisi yang dibentuk khusus untuk itu, dan selanjutnya dibahas dalam Rapat Paripurna MUNAS VII guna

memperoleh pengesahan atas penerimaan laporan dimaksud.

BAB VIII
RAPAT-RAPAT DAN QUORUM

Pasal 22

Jenis-jenis rapat adalah :

a. Rapat Paripurna.
b. Rapat Pimpinan MUNAS VII.
c. Rapat Komisi.
d. Rapat-rapat lain sesuai kebutuhan yang disahkan oleh pimpinan MUNAS VII.

Pasal 23

(1) Setiap rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Peserta.

(2) Rapat Paripurna untuk mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan untuk memilih Ketua Umum dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Peserta.

Pasal 24

(1) Sebelum menghadiri rapat, setiap Peserta dan Peninjau wajib menandatangani daftar hadir dan menyerahkan kartu hadir, atau memperlihatkan tanda Peserta atau Peninjau kepada Panitia MUNAS VII.

(2) Tepat pada waktu yang ditentukan, Pimpinan Rapat membuka Rapat.

(3) Setelah dibuka, apabila belum mencapai quorum, maka Pimpinan Rapat bertindak sesuai ketentuan Pasal 25 Peraturan Tata Tertib ini.

Pasal 25

(1) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Peraturan Tata Tertib ini tidak tercapai, maka rapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) menit.

(2) Apabila rapat telah ditunda selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan quorum belum tercapai juga, maka rapat ditunda kembali paling lama 30 (tiga puluh) menit.

(3) Apabila setelah melalui 2 (dua) kali penundaan dan quorum belum tercapai juga, maka Pimpinan Rapat dapat meneruskan rapat dan rapat dinyatakan sah.

Pasal 26

(1) Setelah rapat dinyatakan telah memenuhi quorum atau sah, Pimpinan Rapat menjelaskan secara singkat pokok acara rapat dan masalahnya.

(2) Pimpinan Rapat memberikan kesempatan maksimal 3 (tiga) menit kepada setiap Peserta dan Peninjau MUNAS VII untuk menyampaikan pandangannya dalam setiap rapat dengan menggunakan hak dan kewajibannya secara tertib.

(3) Pimpinan Rapat dapat menentukan urutan dan lamanya Peserta dan Peninjau MUNAS VII untuk berbicara.

(4) Pimpinan Rapat dapat memperingatkan pembicara yang menyimpang dari pokok pembicaraan, dan meminta agar yang bersangkutan kembali kepada pokok pembicaraan semula.

(5) Apabila Ketua dan/atau Pimpinan Rapat hendak berbicara selaku Peserta, maka untuk sementara fungsi Ketua

dan/atau Pimpinan Rapat diserahkan kepada anggota Pimpinan Rapat yang lain.

Pasal 27

(1) Pimpinan Rapat mencatat pendapat dan/atau usul yang diajukan oleh Peserta dan Peninjau MUNAS VII.

(2) Apabila Pimpinan Rapat menganggap bahwa pendapat Peserta dan/atau Peninjau MUNAS VII belum jelas, kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengulanginya dengan singkat dan jelas.

(3) Pimpinan Rapat mengambil kesimpulan berdasarkan pendapat-pendapat yang diajukan dalam rapat.

Pasal 28

(1) Peserta dan Peninjau MUNAS VII dapat berbicara dalam Rapat Paripurna dan Rapat Komisi.

(2) Pimpinan Rapat mendaftar dan mengatur Peserta dan Peninjau MUNAS VII yang akan berbicara.

(3) Peserta dan Peninjau MUNAS VII dapat berbicara setelah mendapat izin dari Pimpinan Rapat.

Pasal 29

(1) Peserta dan Peninjau dapat mengadakan interupsi maksimal selama 2 (dua) menit untuk:
   (a) Meminta penjelasan tentang pokok materi yang dibicarakan.
   (b) Mengajukan usul tentang tata cara pembahasan materi mengenai hal yang sedang dibicarakan.
   (c) Menjelaskan hal yang menyangkut pembicaraan mengenai dirinya.

(2) Pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dan (c) tidak diadakan perdebatan.

Pasal 30

Apabila Peserta dan Peninjau dalam menggunakan hak bicara melanggar Peraturan Tata Tertib ini, maka Pimpinan Rapat akan melakukan tindakan sebagai berikut :

a. Memberikan peringatan.
b. Membatalkan hak bicara untuk sebagian atau seluruhnya. atau
c. Memerintahkan untuk meninggalkan ruangan rapat.

Pasal 31

Apabila dianggap perlu, Pimpinan Rapat dapat menunda rapat (*scorsing*) dengan persetujuan Peserta yang hadir yang lamanya tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) menit.

Pasal 32

(1) Rapat-rapat pada dasarnya bersifat tertutup kecuali dinyatakan terbuka oleh Pimpinan Rapat.

(2) Materi pembicaraan dalam rapat tertutup hanya boleh diumumkan oleh Pimpinan Rapat atau Panitia Pengarah MUNAS VII.

(3) Atas usul Pimpinan Rapat atau Peserta, rapat dapat memutuskan bahwa pembicaraan dalam rapat tertutup bersifat rahasia.

(4) Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dipegang teguh oleh semua peserta.

Pasal 33

Setiap rapat dibuat risalah lengkap yang antara lain memuat :

a. Tempat, jenis dan acara rapat.
b. Hari, tanggal rapat dan jam permulaan, serta penutupan rapat.
c. Nama Ketua dan Sekretaris Rapat.
d. Nama-nama Peserta dan Peninjau yang hadir.
e. Nama-nama pembicara dan pendapat masing-masing.
f. Keterangan-keterangan tentang keputusan dan/atau kesimpulan rapat.

BAB IX
TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 34

(1) Pengambilan keputusan diusahakan sedapat mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Setelah musyawarah untuk mencapai mufakat yang diupayakan dengan sungguh-sungguh tidak berhasil, maka keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

(3) Keputusan yang diambil dengan pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah peserta yang hadir, kecuali keputusan untuk mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta untuk pemilihan Ketua Umum.

(4) Pengambilan keputusan mengenai perubahan dan penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta yang hadir.

Pasal 35

Setiap keputusan, baik hasil mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak harus diterima dan dilaksanakan dengan kesungguhan, keikhlasan, kejujuran dan penuh tanggungjawab.

BAB X
LAIN-LAIN

Pasal 36

Materi MUNAS VII disiapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

(1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini diputuskan oleh MUNAS VII.
(2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 9 Maret 2011
4 Rabi'ul Tsani 1432

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Selaku

PIMPINAN SEMENTARA
MUSYAWARAH NASIONAL VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Ketua Umum,	Sekretaris Jenderal,
Prof. DR. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc.	H. Muhamad Sirot, S.H.

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

NOMOR : KEP-02/MUNAS VII LDII/III/2011

Tentang:

JADWAL ACARA
MUSYAWARAH NASIONAL VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUSYAWARAH NASIONAL VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi, telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 8 - 9 Maret 2011 di Surabaya.

b. Bahwa sesuai saran, masukan dan pendapat dari peserta MUNAS VII LDII yang membahas Keputusan tentang Jadwal Acara MUNAS VII.

c. Bahwa untuk menunjang agar pelaksanaan MUNAS berjalan dengan tertib, lancar dan sukses perlu ditetapkan suatu Jadwal Acara Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011.

Mengingat : 1. Undang–undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.

2. Undang–undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.

3. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan.

5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia hasil MUNAS VI LDII Tahun 2005 di Jakarta.

6. Hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) LDII Tahun 2010.

7. Hasil - hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LDII Tahun 2000.

8. Keputusan MUNAS LDII No. 01/MUNAS VII LDII/III/2011 tentang Peraturan Tata Tertib MUNAS VII LDII Tahun 2011.

9. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-77/DPP LDII/XII/2010

tanggal 14 Desember 2010 tentang penyelenggaraan MUNAS VII LDII Tahun 2011.

10. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-78/DPP LDII/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 tentang Susunan Personalia panitia Pengarah dan panitia pelaksana MUNAS VII LDII Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG JADWAL ACARA MUSYAWARAH NASIONAL VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2011.

KESATU : Jadwal Acara MUNAS VII LDII TAHUN 2011 di Surabaya secara lengkap dan terinci adalah seperti tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Jadwal Acara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman dalam menyelenggarakan MUNAS VII LDII Tahun 2011.

KETIGA : untuk menyesuaikan terhadap perkembangan keadaan dan kebutuhan maka dapat diadakan perubahan Jadwal Acara tersebut dalam diktum KESATU dengan persetujuan MUNAS VII LDII Tahun 2011.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 9 Maret 2011
4 Rabi'ul Tsani 1432

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Selaku

PIMPINAN SEMENTARA
MUSYAWARAH NASIONAL VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Ketua Umum, **Sekretaris Jenderal,**

Prof. DR. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc. **H. Muhamad Sirot, S.H.**

Lampiran : KEPUTUSAN MUNAS VII LDII TAHUN 2011
Nomor : KEP-02/MUNAS VII LDII/III/2011
Tanggal : 9 Maret 2011
4 Rabi'ul Tsani 1432

JADWAL ACARA
MUSYAWARAH NASIONAL VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2011

Hari I:

Tgl	Acara	Kegiatan	Waktu	PIC
Selasa, 08 Maret 2011	Upacara Pembukaan	1. Registrasi Peserta	07.00 – 08.30	OC
		2. Penjelasan Panitia Pelaksana	08.30 – 08.45	OC
		3. Pembukaan	08.45 – 09.00	Drs. H. Dicky Sunaryo
		4. Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an	09.00 – 09.15	Ustadz H. Sutrisno
		5. Lagu Indonesia Raya	09.15 – 09.25	Drs. H. Sumarman, MPd
		6. Laporan Ketua Panitia Pelaksana	09.25 – 09.35	Ir. H. Chriswanto Santoso, MSc
		7. Sambutan Ketua Umum DPP LDII Sekaligus Peresmian Pembukaan	09.35 – 10.05	Prof. DR. KH. Abdullah Syam, M.Sc
		8. Sambutan Gubernur Jawa Timur	10.05 – 10.45	DR. H. Soekarwo MHum
		9. Tausiah Ketua Umum PB NU	10.45 – 11.45	Prof. DR. KH. Said Agil Siroj, MA
		10. Pembacaan Doa	11.45 – 12.00	KH. Abdusshomad Buchori
		ISHOMA	12.00 – 13.00	OC
	Pengarahan	Pengarahan I. Ketua BNPT- Irjen Pol Ansyad Mbai: "***Partisipasi Ormas dalam penanggulangan terorisme***"	13.00 -13.45	Moderator : 1. Ir. H. Prasetyo Sunaryo, MT. 2. Drs. H. Hidayat Nahwi Rasul.

Hari I: Lanjutan

Tgl	Acara	Kegiatan	Waktu	PIC
Selasa, 08 Maret 2011	Pengarahan	Pengarahan II. Menegpora - DR. Andi Alfian Malarangeng: "***Aspek Penting dalam Pembetukan Pemuda berkualitas sebagai Generasi penerus***"	13.45 -14.45	Moderator : 1. Ir. H. Rathoyo Rasdan, MBA 2. Ir. H. Adityo Handoko, MM
	Pengarahan	Pengarahan III. Mekopolhukam - Marsekal TNI AU Pur. Djoko Sujanto: "***Persoalan Sosial yang berdampak gangguan pada keamanan dan ketertiban***"	14.45-15.45	Moderator : 1. Ir. H. Teddy Suratmaji, M.Sc. 2. Drs. H. Iskandar Siregar
	Coffee Break dan Sholat		15.45-16.15	OC
	Pengarahan	Pengarahan IV. Ketua PP Muhammadiyah - Prof. Drs. H. Malik Fajar, M.Sc.: "***Dimensi Pendidikan Agama sebagai penguat solidaritas sosial***"	16.15-17.00	Moderator : 1. DR. Ir. H. Shobar Wiganda, M.Agr.Sc. 2. H. M. Sirot, SH
	Pengarahan	Pengarahan V. Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah - Mulyaman Hadad: "Prospek Penerapan Ekonomi Syariah di Indonesia"	17.00-17.45	Moderator : 1. H. Achmad Kuncoro, SE, MBA. 2. H. Ashar Budiman, SE
	ISHOMA		17.45 -18.15	OC
	Pengarahan	Pengarahan VI. MUI Pusat: "***Aktualisasi Taswiyatul Manhaj dan Tansiqul harokah sebagai instrumen ukhuwah***"	18.15 – 19.00	Moderator : 1. Ir. H. Zainal A. Abbas 2. H. Hasim Nasution, SE.

Hari II:

Tgl	Acara	Kegiatan	Waktu	PIC
Rabu, 09 Maret 2011	Persiap-an	Absensi Peserta	07.00 – 08.30	OC
	Penga-rahan	Pengarahan VII. Prof. DR. Ramlan Surbakti: "***Peran Ormas Dalam Peningkatan Kinerja Demokrasi***"	08.30 – 09.15	Moderator : 1. Ir. H. P. Sunaryo, MT. 2. H. Suhartono Riyadi, MBA.
	Sidang Paripur-na (SP) I	1. Tata Tertib 2. Jadwal Acara 3. Penetapan Pimpinan Sidang MUNAS VII	09.15 – 11.00	DPP LDII & SC (Pimp Sidang Sementara)
	SP. II	1. Pembahasan & Penetapan Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum dan Formatur		1. Pimpinan Sidang MUNAS VII
		2. Pertanggungjawaban Ketua Umum DPP LDII Masa Bakti 2005 – 2011	11.00 – 12.15	2. Prof. DR. KH. Abdullah Syam, M.Sc.
		3. Pandangan Umum DPD LDII Provinsi se-Indonesia		3. Pimpinan Sidang MUNAS VII
		ISHOMA	12.15 - 13.15	OC
	SP. III	4. Pandangan Umum DPD LDII Provinsi se Indonesia	13.15 – 14.15	4. Pimpinan Sidang MUNAS VII
		5. Tanggapan Atas Pandangan Umum		5. Prof. DR. KH. Abdullah Syam, M.Sc.
	SP. IV	1. Penjelasan Materi MUNAS VII	14.15 – 16.00	Pimpinan Sidang MUNAS VII
		2. Sidang Komisi A, B, C, D & E		
		3. Pengesahan Hasil Sidang Komisi		

Hari II: Lanjutan

Tgl	Acara	Kegiatan	Waktu	PIC
Rabu, 09 Maret 2011	ISHOMA/Coffee Break		16.00 – 16.45	OC
	SP. V	1. Pemilihan Langsung Ketua Umum DPP LDII Masa Bakti 2011 – 1016	16.45 – 18.00	1. Pimpinan Sidang MUNAS VII
	ISHOMA		18.00 – 19.00	OC
	Lanjutan SP. V	2. Pembentukan Formatur	19.00 – 20.30	Pimpinan Sidang MUNAS VII
		3. Pernyataan Berakhirnya Kepengurusan DPP LDII Masa Bakti 2005 – 2011		
		4. Rapat Formatur		
		5. Pengumuman Hasil Rapat Formatur		
		6. Penyerahan Panji LDII kepada Ketua Umum Terpilih		
	Upacara Penutup-an	1. Pembukaan	20.30 – 21.15	Drs. H. D. Sunaryo
		2. Pembacaan Pernya-taan MUNAS VII		Peserta MUNAS VII
		3. Laporan Panitia Pelaksana		OC
		4. Sambutan Ketua Umum DPP LDII 2011 – 2016, Sekaligus kata-kata Penutupan		Ketua Umum DPP LDII
		5. Pembacaan Doa		H. Purwadi, SH

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 9 Maret 2011
4 Rabi'ul Tsani 1432

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Selaku

PIMPINAN SEMENTARA
MUSYAWARAH NASIONAL VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Ketua Umum,	Sekretaris Jenderal,
Prof. DR. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc.	H. Muhamad Sirot, S.H.

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

NOMOR : KEP-03/MUNAS VII LDII/III/2011

Tentang:

KOMPOSISI DAN PERSONALIA
PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUSYAWARAH NASIONAL VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi (LDII) telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 8-9 Maret 2011 di Surabaya.

b. bahwa untuk memimpin persidangan, menjaga ketertiban, kelancaran rapat-rapat selama Musyawarah Nasional VII

Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011, perlu ditetapkan Pimpinan Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011.

c. bahwa Pimpinan Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011 dipilih oleh dan dari peserta Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

d. bahwa sesuai saran, masukan dan pendapat dari peserta MUNAS VII LDII yang membahas Keputusan tentang Komposisi dan Personalia Pimpinan MUNAS VII.

e. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan keputusan tentang Komposisi dan Personalia Pimpinan Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Tahun 2011.

Mengingat : 1. Undang–undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.

2. Undang–undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.

3. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan.

5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia hasil MUNAS VI LDII Tahun 2005 di Jakarta.
6. Hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) LDII Tahun 2010.
7. Hasil - hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LDII Tahun 2000.
8. Keputusan MUNAS LDII No. 01/MUNAS VII LDII/III/2011 tentang Peraturan Tata Tertib MUNAS VII LDII Tahun 2011.
9. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-77/DPP LDII/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 tentang penyelenggaraan MUNAS VII LDII Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG KOMPOSISI DAN PERSONALIA PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2011

KESATU : Komposisi dan Personalia Pimpinan Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Ketua merangkap anggota : Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc.
Wakil Ketua merangkap anggota : Prof. DR. Sc. Agr. Ir. H. Jamsari, MP.
Sekretaris merangkap anggota: Drs. H. Muh. Hidayat Nahwi Rasul
Wakil Sekretaris merangkap anggota: Prof.

DR. H. Singgih Tri Sulistyono, M.Hum.
Anggota: Ir. H. Muhammad Nurchozim
Anggota: Ir.H. Muh. Y. Andi Koddang, M.S.
Anggota : Ir. H. Abdullah A. Karim, M.Si.

KEDUA : Pimpinan Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011 sebagaimana dimaksud diktum kesatu merupakan satu kesatuan pimpinan yang kolektif.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 9 Maret 2011
4 Rabi'ul Tsani 1432

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Selaku

PIMPINAN SEMENTARA
MUSYAWARAH NASIONAL VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Ketua Umum, **Sekretaris Jenderal,**

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LDII

Prof. DR. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc. **H. Muhamad Sirot, S.H.**

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

NOMOR : KEP-04/MUNAS VII LDII/III/2011

Tentang:

PERATURAN TATA TERTIB DAN TATA CARA
PEMILIHAN LANGSUNG KETUA UMUM
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
MASA BAKTI 2011 – 2016
DAN PEMBENTUKAN FORMATUR
MUSYAWARAH NASIONAL VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUSYAWARAH NASIONAL VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi dalam penyelenggaraan kewenanganya maka diselenggarakan Musyawarah

Nasional VII yang penyelenggaraannya ditetapkan pada tanggal 8-9 Maret 2011 di Surabaya.

b. bahwa Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) merupakan sarana mewujudkan demokratisasi dalam menentukan kepengurusan organisasi, yaitu dengan melakukan pemilihan secara langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan Pembentukan Formatur Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

c. bahwa untuk melakukan pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud pada butir b diatas diperlukan adanya Peraturan Tata Tertib dan Tata Cara Pemilihan Langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2011 – 2016 dan Pembentukan Formatur Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

d. bahwa sesuai saran, masukan dan pendapat dari peserta MUNAS VII LDII yang membahas Keputusan tentang Peraturan Tata Tertib dan Tata Cara Pemilihan Langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2011 – 2016 dan Pembentukan Formatur Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

e. bahwa Peraturan Tata Tertib dan Tata Cara Pemilihan Langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2011 – 2016 dan Pembentukan Formatur Musyawarah

Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir c diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Mengingat : 1. Undang–undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.

2. Undang–undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.

3. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan.

5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia hasil MUNAS VI LDII Tahun 2005 di Jakarta.

6. Hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) LDII Tahun 2010.

7. Hasil - hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LDII Tahun 2000.

8. Keputusan MUNAS LDII No. 01/MUNAS VII LDII/III/2011 tentang Peraturan Tata Tertib MUNAS VII LDII Tahun 2011.

9. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-77/DPP LDII/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 tentang penyelengga-

raan MUNAS VII LDII Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DAN TATA CARA PEMILIHAN LANGSUNG KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA MASA BAKTI 2011 – 2016 DAN PEMBENTUKAN FORMATUR MUSYAWARAH NASIONAL VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA.

Pasal 1

Peraturan Tata Tertib dan Tata Cara Pemilihan Langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2011 – 2016 dan Pembentukan Formatur Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia (selanjutnya disebut Tata Tertib Pemilihan Langsung) secara lengkap dan terinci adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 2

Tata Tertib Pemilihan Langsung seperti dimaksud dalam pasal 1 adalah merupakan pedoman dan pegangan yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta dalam melakukan kegiatan pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2011 – 2016 secara langsung, serta membentuk Formatur yang akan bertugas menyusun dan menentukan komposisi Personil Dewan Penasehat dan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Pasal 3

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 9 Maret 2011
4 Rabi'ul Tsani 1432

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc.
Ketua Merangkap Anggota

Prof. DR. Sc. Agr. Ir. H. Jamsari, MP.
Wakil Ketua Merangkap Anggota

Drs. H. Muh. Hidayat Nahwi Rasul
Sekretaris Merangkap Anggota

Prof. DR. H. Singgih Tri Sulistyono, M.Hum.
Wakil Sekretaris Merangkap Anggota

Ir. H. Muh. Yasaf Andi Koddang, M.S.
Anggota

Ir. H. Muhammad Nurchozim
Anggota

Ir. H. Abdullah A. Karim, M.Si.
Anggota

Lampiran : KEPUTUSAN MUNAS VII LDII TAHUN 2011
Nomor : KEP-04/MUNAS VII LDII/III/2011
Tanggal : 9 Maret 2011
4 Rabi'ul Tsani 1432

PERATURAN TATA TERTIB DAN TATA CARA PEMILIHAN LANGSUNG KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA MASA BAKTI 2011 - 2016 DAN PEMBENTUKAN FORMATUR MUSYAWARAH NASIONAL VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) MUNAS VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia berketetapan untuk melakukan pemilihan langsung KETUA UMUM Dewan Pimpinan Pusat guna membangun soliditas bagi penggerak utama Organisasi agar tercapai tujuan secara optimal.

(2) Seluruh ketentuan Tata Tertib MUNAS VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan MUNAS VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-01/MUNAS VII LDII/III/2011 berlaku pula dalam proses pemilihan langsung KETUA UMUM Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2011-2016 sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib.

(3) Istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Tata Tertib ini memiliki arti dan maksud yang sama dengan istilah-istilah yang terdapat dalam Tata Tertib MUNAS VII

Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan MUNAS VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-01/MUNAS VII LDII/III/2011.

BAB II
TATA CARA PEMILIHAN KETUA UMUM

Pasal 2

(1) Pemilihan KETUA UMUM dilakukan oleh Peserta secara langsung, bebas dan rahasia.

(2) Pemilihan KETUA UMUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tahap, kecuali dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Tata Tertib dan Tata Cara Pemilihan Langsung Ketua Umum.

Pasal 3

(1) Setiap Calon KETUA UMUM dianggap sah, apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
   a. Bertaqwa kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, berakhlaqul karimah, berprestasi, berdedikasi tinggi dan loyal kepada Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
   b. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau tindak pidana yang diancam hukuman minimal 5 (lima) tahun.
   c. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
   d. Terpilih melalui MUNAS VII.
   e. Telah berperan aktif pada Lembaga Dakwah Islam Indonesia sedikitnya selama 5 (lima) tahun berturut-turut.
   f. Pernah menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus Dewan Pimpinan Daerah Provinsi selama 1 (satu) periode penuh.

c. Memperoleh dukungan tertulis dalam MUNAS VII sedikitnya oleh 30 % (tiga puluh persen) suara DPD LDII Provinsi.

(2) Nama Calon KETUA UMUM disampaikan secara tertulis oleh Calon atau perwakilan yang bersangkutan, dengan melampirkan pernyataan kesediaan yang bersangkutan dan semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan MUNAS VII, untuk selanjutnya dilakukan proses verifikasi oleh Pimpinan MUNAS VII dan dibantu oleh Panitia MUNAS VII.

(3) Pimpinan MUNAS VII mengumumkan Calon KETUA UMUM yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2).

(4) Masing-masing Peserta yang memiliki hak suara dapat memberikan dukungan kepada 1 (satu) Calon KETUA UMUM sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) dengan mengisi surat dukungan yang disediakan oleh Panitia.

Pasal 4

(1) Calon KETUA UMUM yang diumumkan oleh Pimpinan MUNAS VII telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Tata Tertib ini, akan masuk dalam pemilihan tahap I.

(2) Calon KETUA UMUM yang memperoleh dukungan lebih dari 30 % (tiga puluh persen) suara DPD LDII Provinsi pada pemilihan tahap I, selanjutnya akan masuk dalam pemilihan tahap II.

(3) Calon KETUA UMUM yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan tahap II akan ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Paripurna sebagai KETUA UMUM terpilih.

Pasal 5

(1) Apabila dalam proses verifikasi hingga pengumuman oleh Pimpinan MUNAS VII sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Tata Tertib ini hanya terdapat 1 (satu) Calon KETUA UMUM; atau

(2) Apabila dalam pelaksanaan pemilihan tahap I sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Tata Tertib ini hanya terdapat 1 (satu) Calon KETUA UMUM yang memperoleh syarat dukungan lebih dari 30 % (tiga puluh persen) suara DPD LDII Provinsi, maka ditawarkan pada sidang paripurna untuk ditetapkan sebagai calon tunggal.

(3) Apabila sidang paripurna telah menetapkan calon tunggal sebagaimana ayat (1) dan (2) maka langsung ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Umum terpilih.

BAB III
PEMBENTUKAN FORMATUR

Pasal 6

(1) Formatur MUNAS VII dipilih dalam Rapat Paripurna.

(2) KETUA UMUM terpilih bertindak sebagai Ketua Formatur, dibantu oleh 6 (enam) orang sebagai Anggota Formatur.

(3) Calon Anggota Formatur sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) diusulkan sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri atas 4 (empat) unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dan 2 (dua) orang dari unsur Dewan Penasihat Pusat. Sedangkan dari unsur DPD yaitu :
   a. 1 (satu) orang wakil dari wilayah Sumatera.
   b. 1 (satu) orang wakil dari wilayah Jawa dan Bali.
   c. 1 (satu) orang wakil dari wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
   d. 1 (satu) orang wakil dari wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Diusulkan kepada Pimpinan MUNAS VII untuk dimusyawarahkan dan dipilih.

(4) Ketua Formatur beserta 6 (enam) orang Anggota Formatur MUNAS VII disahkan menjadi Formatur MUNAS VII dalam Rapat Paripurna.

(5) Formatur MUNAS VII diberi mandat penuh untuk menentukan komposisi dan susunan personil Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Penasihat Tingkat Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2011 – 2016.

(6) Komposisi dan susunan personil Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Penasihat Tingkat Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2011 - 2016 ditetapkan dalam keputusan Formatur MUNAS VII.

(7) Formatur menyampaikan laporan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna.

(8) Dalam hal Formatur MUNAS VII belum dapat menyelesaikan komposisi, personalia Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Penasihat Tingkat Pusat pada akhir penutupan MUNAS VII, maka Formatur MUNAS VII harus menyelesaikannya selambat–lambatnya 15 (lima belas) hari setelah selesainya MUNAS VII.

BAB IV
BERAKHIRNYA KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA MASA BAKTI 2005-2011

Pasal 7

Segera setelah terpilihnya Formatur MUNAS VII LDII Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Tata Tertib ini, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2005 - 2011 dinyatakan berakhir oleh Pimpinan MUNAS VII.

BAB V
PERSYARATAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Pasal 8

(1) Untuk dapat dipilih menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
   a. Bertaqwa kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, berakhlaqul karimah, berprestasi, berdedikasi tinggi dan loyal kepada Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
   b. Telah aktif secara terus-menerus menjadi Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun.
   c. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau tindak pidana yang diancam hukuman minimal 5 (lima) tahun.
   d. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

(2) Dalam hal khusus, guna kepentingan perjuangan organisasi, Formatur dapat menetapkan seseorang yang telah terbukti loyalitasnya untuk menjadi Pengurus di luar persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan kemampuan, kecakapan dan kesungguhannya sesuai jabatan kepengurusan yang akan dipangkunya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini diputuskan oleh MUNAS VII.

(2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 9 Maret 2011
4 Rabi'ul Tsani 1432

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc.
Ketua Merangkap Anggota

Prof. DR. Sc. Agr. Ir. H. Jamsari, MP.
Wakil Ketua Merangkap Anggota

Drs. H. Muh. Hidayat Nahwi Rasul
Sekretaris Merangkap Anggota

Prof. DR. H. Singgih Tri Sulistyono, M.Hum.
Wakil Sekretaris Merangkap Anggota

Ir. H. Muh. Yasaf Andi Koddang, M.S.
Anggota

Ir. H. Muhammad Nurchozim
Anggota

Ir. H. Abdullah A. Karim, M.Si.
Anggota

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

NOMOR : KEP-05/MUNAS VII LDII/III/2011

Tentang:

PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI
MUSYAWARAH NASIONAL VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUSYAWARAH NASIONAL VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 8-9 Maret 2011 di Surabaya.
b. bahwa berbagai pembahasan materi yang akan diputuskan dalam Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011 agar dapat dibahas

secara luas dan mendalam, maka perlu dibentuk Komisi-komisi Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011.

c. bahwa sesuai saran, masukan dan pendapat dari peserta MUNAS VII LDII yang membahas Keputusan tentang Pembentukan Komisi-komisi Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
d. bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan suatu keputusan tentang pembentukan Komisi-komisi Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011.

Mengingat :

1. Undang–undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Undang–undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.
3. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan.
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia hasil MUNAS VI LDII Tahun 2005 di Jakarta.
6. Hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) LDII Tahun 2009.
7. Hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) LDII Tahun 2010.
8. Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LDII Tahun 2000.

9. Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LDII Tahun 2007.
10. Keputusan MUNAS LDII No. 01/MUNAS VII LDII/III/2011 tentang Peraturan Tata Tertib MUNAS VII LDII Tahun 2011.
11. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-077/DPP LDII/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 tentang Penyelenggaraan MUNAS LDII.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI MUSYAWARAH NASIONAL VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2011.

KESATU : **Komisi Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011 meliputi :**

Komisi A Bidang Organisasi, dengan ruang lingkup tugas pembahasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Komisi B Bidang Program, dengan ruang lingkup tugas pembahasan tentang Program Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2011 – 2016.

Komisi C Bidang SDM, dengan ruang lingkup tugas Pembahasan Rencana Strategi Pengembangan Sumberdaya Manusia.

Komisi D Bidang Pertanggungjawaban, dengan ruang lingkup tugas pembahasan

tentang laporan pertanggung-jawaban Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2005 – 2011.

Komisi E dengan ruang lingkup tugas pembahasan tentang Pernyataan MUNAS VII LDII Tahun 2011 serta masalah-masalah lain terkait yang dianggap perlu.

KEDUA : Komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas memusyawarahkan dan mengambil keputusan mengenai hal-hal dalam ruang lingkup tugasnya.

KETIGA : Jumlah dan rincian anggota masing-masing komisi sebagaimana dimaksud diktum KESATU ditentukan oleh pimpinan MUNAS VII dengan memperhatikan azas pemerataan peserta Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011.

KEEMPAT : Pimpinan Komisi-komisi Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011 dipilih dari dan oleh anggota komisi yang merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan terdiri atas Ketua Komisi, Wakil Ketua Komisi, dan Sekretaris Komisi.

KELIMA : Komisi-komisi sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Paripurna Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011.

KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 9 Maret 2011
4 Rabi'ul Tsani 1432

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc.
Ketua Merangkap Anggota

Prof. DR. Sc. Agr. Ir. H. Jamsari, MP.
Wakil Ketua Merangkap Anggota

Drs. H. Muh. Hidayat Nahwi Rasul
Sekretaris Merangkap Anggota

Prof. DR. H. Singgih Tri Sulistyono, M.Hum.
Wakil Sekretaris Merangkap Anggota

Ir. H. Muh. Yasaf Andi Koddang, M.S.
Anggota

Ir. H. Muhammad Nurchozim
Anggota

Ir. H. Abdullah A. Karim, M.Si.
Anggota

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

NOMOR: KEP-06/MUNAS VII LDII/III/2011

Tentang

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUSYAWARAH NASIONAL VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011 sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
b. bahwa seiring perkembangan dan perubahan sosial yang begitu cepat terjadi yang sedang dihadapi bangsa

Indonesia di era reformasi ini, dianggap perlu untuk mengadakan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, agar peran aktif Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam pembangunan bangsa dan negara dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan Kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan.
5. Pasal 27 ayat (2) huruf (b) angka (i) Anggaran Dasar Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2005 tanggal 13 Mei 2005.
6. Keputusan Musyarawah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-03/MUNAS VII LDII/III/2011

tentang Komposisi dan Personalia Pimpinan Musyarawah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Memperhatikan: Saran, masukan, dan pendapat para narasumber dan peserta Musyarawah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011 dalam pembahasan Keputusan tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

KESATU: Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia secara lengkap tertuang dalam naskah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang telah diubah dan menjadi lampiran serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Kepada Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan Musyawarah Daerah diberi waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan untuk menyesuaikan keputusan-keputusannya dengan Keputusan ini, yang dituangkan dalam keputusan Rapat Pimpinan Daerah.

KETIGA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 9 Maret 2011
4 Rabi'ul Tsani 1432

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc.
Ketua Merangkap Anggota

Prof. DR. Sc. Agr. Ir. H. Jamsari, MP.
Wakil Ketua Merangkap Anggota

Drs. H. Muh. Hidayat Nahwi Rasul
Sekretaris Merangkap Anggota

Prof. DR. H. Singgih Tri Sulistyono, M.Hum.
Wakil Sekretaris Merangkap Anggota

Ir. H. Muh. Yasaf Andi Koddang, M.S.
Anggota

Ir. H. Muhammad Nurchozim
Anggota

Ir. H. Abdullah A. Karim, M.Si.
Anggota

Lampiran: Kep MUNAS VII LDII Tahun 2011
Nomor : KEP-06/MUNAS VII LDII/III/2011
Tanggal : 9 Maret 2011
4 Rabi'ul Tsani 1432

MOTTO

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِيْ أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ الآية* سورة يوسف ١٠٨

Artinya: "*Katakanlah Muhammad, inilah jalanku (agamaku), aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (manusia) ke jalan Allah dengan hujjah yang nyata...*" (QS. Yusuf: 108).

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ الآية*
سورة النحل ١٢٥

Artinya: "*Ajaklah (semua manusia) kepada Jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan jalan yang lebih baik...*" (QS. An-Nahl: 125).

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ * سورة آل عمران ١٠٤

Artinya: "*Dan hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan yang mengajak kepada kebajikan dan menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.*" (QS. Ali Imron 104)

قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوْا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّيْ عَامِلٌ...الآية * سورة الأنعام ١٣٥

Artinya: "*Katakanlah Muhammad, wahai kaumku beramallah kamu sekalian atas tempat kamu sekalian (semaksimal kemampuanmu), sesungguhnya aku orang yang beramal...*" (QS. Al-An'am: 135).

قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ * سورة البقرة 139

Artinya: "*Katakanlah Muhammad, apakah kalian membantah kepadaku dalam urusan Allah, sedangkan Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kalian, dan bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian, dan kami adalah orang-orang yang mukhlis kepada Allah.*" (QS. Al-Baqarah: 139)

MUKADIMAH

Sebagai kelanjutan perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, serta sebagai pelaksanaan dan pengamalan Pancasila dalam mencapai cita-cita bangsa Indonesia sesuai Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka Lembaga Dakwah Islam Indonesia dengan ini memandang partisipasi dan kemitraan dari segenap lapisan masyarakat Indonesia adalah suatu keniscayaan.

Sadar akan keniscayaan demikian, Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang didirikan pada tanggal 1 Juli 1972 di Surabaya, Jawa Timur, sebagai kelanjutan organisasi Lembaga Karyawan Dakwah Islam Indonesia berdasarkan Ketetapan Musyawarah Besar (MUBES) IV tanggal 19 November 1990 yang didirikan dengan Akta Protokoler Notariat Mudijomo, S.H., sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Mudijomo, S.H. tanggal 3 Januari 1972, Akta Perubahan Untung Darnosoewirjo, S.H. tanggal 3 Januari 1972, dan terakhir kali diubah dengan Akta Notaris Gunawan Wibisono, S.H. tanggal 27 September 2007, dengan ini menegaskan bahwa tercapainya cita-cita bangsa Indonesia tersebut hanya dapat terwujud dan berkelanjutan manakala seluruh komponen bangsa dan seluruh potensi yang ada, termasuk ummat Islam, sepenuhnya bersama-sama membangun dan mewujudkan masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan sosial, baik material maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Bahwa kelahiran dan peran serta Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang dilandasi oleh semangat melaksanakan ajaran agama Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits melalui pelaksanaan ibadah *mahdhoh* dan *ghoiru mahdhoh* sebagai

bukti kedudukan insani terhadap *Al-Khaliq* untuk beribadah semata-mata kepada-Nya, menjalankan tugas sebagai hamba Allah untuk memakmurkan bumi secara profesional berbasis religius, sinergitas dan komplementaritas, berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan yang welas asih dan berkeadilan, serta membangun komunitas masyarakat madani (*civil society*) yang kompetitif (*fastabiq al-khair*), sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas peradaban, kehidupan, harkat dan martabat manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka dalam pelaksanaan ibadah-ibadah tersebut tidak boleh lepas dari fungsi dan peran Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai suatu majelis dan atau badan (*learning organization*) yang mengolah khasanah keagamaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas dasar kesadaran tersebut dan guna menghimpun segala potensi bangsa dalam meningkatkan kualitas hidup, sumberdaya manusia, dan peran serta masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Lembaga Dakwah Islam Indonesia dengan ini menyatakan diri sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

ANGGARAN DASAR
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan:

1. Organisasi adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau disingkat LDII sebagai kelanjutan organisasi sosial kemasyarakatan Lembaga Karyawan Dakwah Islam Indonesia yang didirikan pada tanggal 1 Juli 1972 di Surabaya, Jawa Timur.

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau disingkat AD/ART adalah aturan dasar tertinggi yang mengikat pengurus Organisasi serta anggota tetap maupun anggota tidak tetap dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam Organisasi.

3. Peraturan Organisasi atau disingkat PO adalah aturan pelaksanaan Organisasi yang merinci lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang ada dan/atau belum diatur dalam AD/ART Organisasi.

4. Anggota adalah pengurus Organisasi serta anggota tetap maupun tidak tetap yang menjalankan hak dan kewajiban Organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.

5. Pengurus adalah anggota tetap yang terpilih dalam musyawarah tertinggi pada tiap tingkat kepengurusan Organisasi untuk mencapai maksud dan tujuan Organisasi.

6. Majelis adalah organ yang dibentuk Pengurus untuk melaksanakan ibadah *mahdhoh* dan *ghoiru mahdhoh* Organisasi serta dapat membuat keputusan.

7. Badan adalah organ yang dibentuk Pengurus untuk melaksanakan tugas pokok keorganisasian Organisasi serta dapat membuat keputusan.

8. Kelompok Kerja atau disingkat Pokja adalah organ yang dibentuk Pengurus untuk melaksanakan tugas khusus Organisasi.

9. Kelompok Kepakaran adalah organ yang dibentuk Pengurus untuk menjalankan tugas khusus sesuai kepakarannya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

10. Organisasi Otonom adalah organisasi yang dibentuk oleh Pengurus di tingkat Pusat dan dapat mengatur rumah tangga sendiri dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Organisasi.

11. Pondok Pesantren adalah pondok pesantren yang mempunyai hubungan fungsional dengan Organisasi.

12. Lembaga Lain adalah lembaga selain Pondok Pesantren yang mempunyai hubungan afiliasi dengan Organisasi yang dapat menjadi Peninjau dalam musyawarah dan/atau rapat-rapat Organisasi sesuai tingkat kepengurusannya masing-masing.

13. Organisasi Sejenis adalah organisasi atau badan hukum yang mempunyai kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1985, yang sesuai dengan tujuan, upaya, dan prinsip dakwah Organisasi, yang berhak diberikan kepadanya seluruh atau sebahagian kekayaan Organisasi jika Organisasi ini dinyatakan bubar demi hukum.

Bagian Kedua
Nama, Status, Waktu, dan Kedudukan

Pasal 2

(1) Organisasi ini bernama Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau disingkat LDII.

(2) Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelanjutan Organisasi sosial kemasyarakatan Lembaga Karyawan Dakwah Islam Indonesia yang didirikan pada tanggal 1 Juli 1972 di Surabaya, Jawa Timur, sesuai amanat ketetapan Musyawarah Besar IV Lembaga Karyawan Dakwah Islam Indonesia yang telah diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 19 November 1990.

(3) Lembaga Dakwah Islam Indonesia berbentuk badan hukum sebagaimana diputuskan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia serta terdaftar di Kementerian Dalam Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Lembaga Dakwah Islam Indonesia didirikan sejak tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 4

Lembaga Dakwah Islam Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Asas, Maksud, dan Tujuan

Pasal 5

Lembaga Dakwah Islam Indonesia berasaskan Pancasila.

Pasal 6

Lembaga Dakwah Islam Indonesia didirikan dengan maksud untuk menghimpun seluruh potensi bangsa yang memiliki persamaan cita-cita, wawasan, dan tujuan, sehingga memiliki satu visi dan persepsi dalam menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 7

Lembaga Dakwah Islam Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas peradaban, hidup, harkat dan martabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta turut serta dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila yang diridhoi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Bagian Keempat

Sifat, Fungsi, dan Tugas

Pasal 8

Lembaga Dakwah Islam Indonesia merupakan wahana bagi pendidikan dakwah keagamaan dan lembaga pendidikan kemasyarakatan dalam arti luas dan terpadu, bersifat independen, mandiri, terbuka, moderat, majemuk, dan setara (*egaliter*), guna mewujudkan kebahagiaan hidup berdasarkan keselarasan, keserasian, serta keseimbangan dunia dan akhirat.

Pasal 9

Lembaga Dakwah Islam Indonesia berfungsi sebagai wadah berhimpun bagi kaum muslimin, muslimat, mubaligh, mubalighot, da'i dan da'iat dalam beramal sholih, melaksanakan ibadah *mahdhoh* dan *ghoiru mahdhoh* (ibadah sosial) dalam rangka mengabdikan segenap kemampuan untuk kemaslahatan ummat, kemajuan bangsa Indonesia khususnya, dan alam semesta pada umumnya.

Pasal 10

Lembaga Dakwah Islam Indonesia bertugas melaksanakan dakwah Islam dengan berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadits dengan segenap aspek pengamalan dan penghayatan beragama sehingga dapat memberikan hikmah dan dorongan untuk mewujudkan tujuan Organisasi.

Bagian Kelima
Upaya dan Prinsip Dakwah

Pasal 11

Untuk mencapai tujuan dan fungsinya, Lembaga Dakwah Islam Indonesia berupaya untuk:

a. menguatkan dan mengembangkan fungsi internal dan eksternal Organisasi, termasuk membangun hubungan dan kerjasama dengan instansi/lembaga dalam negeri maupun luar negeri.

b. meningkatkan sumberdaya manusia, baik berupa kualitas sumberdaya insani yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sumberdaya pembangunan yang beretos kerja produktif dan profesional, maupun kemampuan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan dan berkemampuan manajemen.

c. memberdayakan dan menggerakkan potensi sumberdaya insani yang memiliki kompetensi informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemampuan untuk beramal sholih dengan aktif melakukan pengabdian masyarakat di bidang sosial budaya, hukum, ekonomi dan politik.

d. menumbuhkembangkan kegiatan usaha dan kewirausahaan dalam rangka pengembangan ekonomi ummat sesuai tuntutan kebutuhan di sektor formal maupun informal melalui usaha bersama, koperasi, maupun bentuk badan usaha lainnya.

e. mendorong pembangunan masyarakat madani (*civil society*) yang kompetitif, dengan tetap mengembangkan dan meningkatkan sikap:
   1. persaudaraan [*ukhuwwah*] sesama ummat manusia, komunitas muslim, serta bangsa dan negara.
   2. kepekaan dan kesetiakawanan sosial.
   3. kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam rangka membangun dan memperkuat karakter bangsa; dan
   4. berperan aktif sebagai katalisator dalam dinamika peradaban masyarakat dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah agama; serta

f. meningkatkan advokasi, penyadaran, dan pemberdayaan masyarakat tentang pentingnya supremasi hukum, Kewajiban Asasi manusia (KAM), Hak Asasi Manusia (HAM), dan Tanggung Jawab Asasi Manusia (TAM), serta penanggulangan terhadap ancaman kepentingan publik dan perusakan lingkungan.

Pasal 12

(1) Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam melaksanakan dakwahnya memiliki prinsip-prinsip dakwah untuk mencapai tujuan organisasi.

(2) Prinsip-prinsip Dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 13

Kedaulatan Lembaga Dakwah Islam Indonesia berada di tangan Anggota dan dilaksanakan menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14

(1) Setiap Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia memiliki hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama.

(2) Keanggotaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia bersifat sukarela dan tidak mengikat, serta terbuka untuk setiap Warga Negara Indonesia yang:
   a. beragama Islam, beriman dan bertaqwa kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* Tuhan yang Maha Esa.
   b. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
   c. menyatakan diri dengan sukarela menjadi Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
   d. menerima, menyetujui dan sanggup taat terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia, seluruh keputusan musyawarah dan rapat-rapat, serta Peraturan Organisasi; dan
   e. bersedia mengikuti segala kegiatan sesuai dengan program kerja Organisasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

BAB III
KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu
Tingkat Kepengurusan

Pasal 15

Lembaga Dakwah Islam Indonesia memiliki tingkat kepengurusan sebagai berikut:

a. Kepengurusan di tingkat Nasional, selanjutnya disebut Dewan Pimpinan Pusat atau disingkat DPP.

b. Kepengurusan di tingkat Provinsi, selanjutnya disebut Dewan Pimpinan Wilayah atau disingkat DPW.

c. Kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Dewan Pimpinan Daerah atau disingkat DPD.

d. Kepengurusan di tingkat Kecamatan, selanjutnya disebut Pimpinan Cabang atau disingkat PC; dan

e. Kepengurusan di tingkat Desa/Kelurahan, selanjutnya disebut Pimpinan Anak Cabang atau disingkat PAC.

Pasal 16

(1) Lembaga Dakwah Islam Indonesia dapat membentuk perwakilan di luar negeri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perwakilan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Bagian Kedua
Wewenang dan Kewajiban Pengurus

Paragraf 1
Dewan Pimpinan Pusat

Pasal 17

Dewan Pimpinan Pusat adalah badan pelaksana tertinggi Organisasi yang bersifat kolektif di tingkat Nasional.

Pasal 18

Dewan Pimpinan Pusat berwenang:

a. menentukan kebijakan Organisasi di tingkat Nasional sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa, keputusan Rapat Pimpinan Nasional, dan Peraturan Organisasi.

b. mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Wilayah.

c. menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah.

d. memberikan penghargaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga; dan

e. membentuk organisasi otonom sesuai kebutuhan.

Pasal 19

Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban:

a. melaksanakan seluruh kebijakan Organisasi sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Musyawarah dan Rapat di tingkat Nasional, dan Peraturan Organisasi; dan

b. memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa.

Paragraf 2
Dewan Pimpinan Wilayah

Pasal 20

Dewan Pimpinan Wilayah adalah badan pelaksana tertinggi Organisasi yang bersifat kolektif di tingkat Provinsi.

Pasal 21

Dewan Pimpinan Wilayah berwenang:

a. menentukan kebijakan Organisasi di tingkat Provinsi sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Musyawarah dan Rapat baik tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi, dan Peraturan Organisasi.

b. mengusulkan hasil ketetapan Musyawarah Wilayah/ Musyawarah Wilayah Luar Biasa tentang komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Wilayah untuk mendapatkan persetujuan Dewan Pimpinan Pusat.

c. mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah; dan

d. menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 22

Dewan Pimpinan Wilayah berkewajiban:

a. melaksanakan seluruh kebijakan Organisasi di tingkat Provinsi sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Musyawarah dan Rapat tingkat Nasional maupun tingkat Wilayah, dan Peraturan Organisasi.

b. mengesahkan hasil ketetapan Musyawarah Wilayah/ Musyawarah Wilayah Luar Biasa tentang komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Wilayah sesuai persetujuan Dewan Pimpinan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b.

c. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat; dan

d. memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Wilayah/Musyawarah Wilayah Luar Biasa.

Paragraf 3

Dewan Pimpinan Daerah

Pasal 23

Dewan Pimpinan Daerah adalah badan pelaksana tertinggi Organisasi yang bersifat kolektif di tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 24

Dewan Pimpinan Daerah berwenang:

a. menentukan kebijakan Organisasi di tingkat Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Musyawarah dan Rapat baik tingkat Nasional, Wilayah maupun Daerah, dan Peraturan Organisasi.

b. mengusulkan hasil ketetapan Musyawarah Daerah/ Musyawarah Daerah Luar Biasa tentang komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah untuk mendapatkan persetujuan Dewan Pimpinan Wilayah.

c. mengesahkan komposisi dan personalia Pimpinan Cabang; dan

d. menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Cabang.

Pasal 25

Dewan Pimpinan Daerah berkewajiban:

a. melaksanakan seluruh kebijakan Organisasi di tingkat Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Musyawarah dan Rapat tingkat Nasional, Wilayah maupun Daerah, dan Peraturan Organisasi.

b. mengesahkan hasil ketetapan Musyawarah Daerah/ Musyawarah Daerah Luar Biasa tentang komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah sesuai persetujuan Dewan Pimpinan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b.

c. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan Dewan Pimpinan Wilayah; dan

d. memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Daerah/Musyawarah Daerah Luar Biasa.

Paragraf 4
Pimpinan Cabang

Pasal 26

Pimpinan Cabang adalah badan pelaksana tertinggi Organisasi yang bersifat kolektif di tingkat Kecamatan.

Pasal 27

Pimpinan Cabang berwenang:

a. menentukan kebijakan Organisasi di tingkat Kecamatan sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Musyawarah dan Rapat baik tingkat Pusat, Wilayah, Daerah maupun Kecamatan, dan Peraturan Organisasi.

b. mengusulkan hasil ketetapan Musyawarah Cabang/ Musyawarah Cabang Luar Biasa tentang komposisi dan personalia Pimpinan Cabang untuk mendapatkan persetujuan Dewan Pimpinan Daerah.

c. mengesahkan komposisi dan personalia Pimpinan Anak Cabang; dan

d. menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Anak Cabang.

Pasal 28

Pimpinan Cabang berkewajiban:

a. melaksanakan seluruh kebijakan Organisasi di tingkat Kecamatan sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Musyawarah dan Rapat tingkat Nasional, Wilayah, Daerah maupun Kecamatan, dan Peraturan Organisasi.

b. mengesahkan hasil ketetapan Musyawarah Cabang/ Musyawarah Cabang Luar Biasa tentang komposisi dan personalia Pimpinan Cabang sesuai persetujuan Dewan

Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b.

c. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan Dewan Pimpinan Daerah; dan

d. memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Cabang/Musyawarah Cabang Luar Biasa.

Paragraf 5
Pimpinan Anak Cabang

Pasal 29

Pimpinan Anak Cabang adalah badan pelaksana tertinggi Organisasi yang bersifat kolektif di tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 30

Pimpinan Anak Cabang berwenang:

a. menentukan kebijakan Organisasi di tingkat Desa/Kelurahan sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Musyawarah dan Rapat baik tingkat Pusat, Wilayah, Daerah, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan, dan Peraturan Organisasi; dan

b. mengusulkan hasil ketetapan Musyawarah Anak Cabang/ Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa tentang komposisi dan personalia Pimpinan Anak Cabang untuk mendapatkan persetujuan Pimpinan Cabang.

Pasal 31

Pimpinan Cabang berkewajiban:

a. melaksanakan seluruh kebijakan Organisasi di tingkat Desa/Kelurahan sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Musyawarah dan Rapat tingkat Nasional, Wilayah, Daerah,

Kecamatan maupun Desa/Kelurahan, dan Peraturan Organisasi.

b. mengesahkan hasil ketetapan Musyawarah Anak Cabang/ Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa tentang komposisi dan personalia Pimpinan Anak Cabang sesuai persetujuan Pimpinan Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b.

c. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan Pimpinan Cabang; dan

d. memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Anak Cabang/Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa.

Paragraf 6
Dewan Penasihat

Pasal 32

(1) Lembaga Dakwah Islam Indonesia memiliki Dewan Penasihat yang dibentuk sesuai tingkatan masing-masing, kecuali untuk tingkat Pimpinan Cabang dan Pimpinan Anak Cabang dapat dibentuk sesuai kebutuhan.

(2) Dewan Penasihat berfungsi memberi saran, nasihat, dan pertimbangan atas kebijakan Organisasi yang bersifat strategis yang akan ditetapkan oleh Pengurus sesuai tingkatan masing-masing.

(3) Saran, nasihat, dan pertimbangan yang disampaikan Dewan Penasihat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus sesuai tingkatan masing-masing.

(4) Ketua Dewan Penasihat ditetapkan oleh Formatur Musyawarah Nasional, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, dan Musyawarah Anak Cabang sesuai tingkatan masing-masing.

(5) Ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak berlaku dalam hal Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) di mana Dewan Penasihat menjalankan fungsi sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Badan Hukum; dan

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penasihat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 7
Majelis, Badan, dan Kelompok Kerja

Pasal 33

(1) Pengurus sesuai tingkatannya dapat membentuk Majelis, Badan, Kelompok Kerja, dan/atau Kelompok Kepakaran untuk melaksanakan tugas-tugas Organisasi dalam bidang tertentu.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Majelis, Badan, Kelompok Kerja, dan Kelompok Kepakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 8
Organisasi Otonom

Pasal 34

(1) Lembaga Dakwah Islam Indonesia dapat membentuk Organisasi Otonom sebagai pelaksana kebijakan Organisasi yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan strategis dalam rangka memperkuat pelaksanaan program dan kegiatan Organisasi.

(2) Pembentukan Organisasi Otonom diusulkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan ditetapkan dalam Rapat Pimpinan Nasional.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Otonom diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 9
Kerjasama Hubungan Antar Lembaga

Pasal 35

(1) Lembaga Dakwah Islam Indonesia dapat menjalin kerjasama hubungan antar lembaga dengan instansi pemerintah dan/atau non-pemerintah maupun lembaga independen dan/atau swasta dalam rangka memperoleh manfaat bagi kedua belah pihak, sepanjang diperkenankan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kerjasama hubungan antar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam posisi sederajat dan mandiri, salah satu pihak tidak dapat mencampuri urusan internal organisasi pihak lainnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama hubungan antar lembaga diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV
MUSYAWARAH DAN RAPAT

Bagian Kesatu
Musyawarah dan Rapat Tingkat Nasional

Pasal 36

(1) Musyawarah dan rapat-rapat tingkat Nasional terdiri atas:
   a. Musyawarah Nasional.
   b. Musyawarah Nasional Luar Biasa.
   c. Rapat Pimpinan Nasional.
   d. Rapat Kerja Nasional.
   e. Rapat Koordinasi Nasional; dan
   f. Rapat-rapat lain sesuai kebutuhan.

(2) Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi yang diselenggarakan sedikitnya sekali dalam 5 (lima) tahun, dengan kewenangan:
   a. menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
   b. menetapkan Program Umum/Rencana Strategi Organisasi.
   c. memilih dan menetapkan Ketua Umum.
   d. menetapkan Formatur Musyawarah Nasional untuk menyusun Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat dan menetapkan Dewan Penasihat Tingkat Pusat.
   e. menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat; dan
   f. menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

(3) Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah Musyawarah Nasional yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa oleh Dewan Pimpinan Pusat atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Dewan Pimpinan Wilayah, karena alasan-alasan sebagai berikut:

   a. Dewan Pimpinan Pusat melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.
   b. Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Nasional; dan/atau
   c. Organisasi dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa lainnya.

(4) Dalam hal Dewan Pimpinan Pusat tidak mampu menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Musyawarah nasional Luar Biasa diselenggarakan oleh suatu Presidium yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Dewan Pimpinan Wilayah.

(5) Musyawarah Nasional Luar Biasa memiliki kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Nasional.

(6) Dewan Pimpinan Pusat wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut.

(7) Rapat Pimpinan Nasional adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi setingkat di bawah Musyawarah Nasional dan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat sesuai kebutuhan.

(8) Rapat Kerja Nasional adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Nasional dan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.

(9) Rapat Koordinasi Nasional adalah rapat yang diadakan untuk menyelaraskan pelaksanaan program Organisasi, baik pada bidang tertentu maupun lintas bidang, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua
Musyawarah dan Rapat Tingkat Wilayah

Pasal 37

(1) Musyawarah dan rapat-rapat tingkat Wilayah terdiri atas:
   a. Musyawarah Wilayah.
   b. Musyawarah Wilayah Luar Biasa.
   c. Rapat Pimpinan Wilayah.
   d. Rapat Kerja Wilayah.
   e. Rapat Koordinasi Wilayah; dan
   f. Rapat-rapat lain sesuai kebutuhan.

(2) Musyawarah Wilayah adalah pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi di tingkat Provinsi yang diselenggarakan sedikitnya sekali dalam 5 (lima) tahun, dengan kewenangan:
   a. menetapkan Program Kerja Wilayah.
   b. memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah.

c. menetapkan Formatur Musyawarah Wilayah dan menetapkan Dewan Penasihat tingkat Wilayah.
d. menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Wilayah; dan
e. menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

(3) Musyawarah Wilayah Luar Biasa adalah Musyawarah Wilayah yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa oleh Dewan Pimpinan Pusat atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Dewan Pimpinan Daerah, karena alasan-alasan sebagai berikut:

a. Dewan Pimpinan Wilayah melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.
b. Dewan Pimpinan Wilayah tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Wilayah; dan/atau
c. Kepemimpinan Dewan Pimpinan Wilayah dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa lainnya.

(4) Musyawarah Wilayah Luar Biasa memiliki kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Wilayah.

(5) Dewan Pimpinan Wilayah wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Wilayah Luar Biasa tersebut.

(6) Rapat Pimpinan Wilayah adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi setingkat di bawah Musyawarah Wilayah dan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah sesuai kebutuhan.

(7) Rapat Kerja Wilayah adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Wilayah dan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.

(8) Rapat Koordinasi Wilayah adalah rapat yang diadakan untuk menyelaraskan pelaksanaan program, baik pada bidang tertentu maupun lintas bidang, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Musyawarah dan Rapat Tingkat Daerah

Pasal 38

(1) Musyawarah dan rapat-rapat tingkat Daerah terdiri atas:
   a. Musyawarah Daerah.
   b. Musyawarah Daerah Luar Biasa.
   c. Rapat Pimpinan Daerah.
   d. Rapat Kerja Daerah.
   e. Rapat Koordinasi Daerah; dan
   f. Rapat-rapat lain sesuai kebutuhan.

(2) Musyawarah Daerah adalah pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi di tingkat Kabupaten/Kota yang diselenggarakan sedikitnya sekali dalam 5 (lima) tahun, dengan kewenangan:
   a. menetapkan Program Kerja Daerah.
   b. memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah.
   c. menetapkan Formatur Musyawarah Daerah dan menetapkan Dewan Penasihat tingkat Daerah.
   d. menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah; dan
   e. menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

(3) Musyawarah Daerah Luar Biasa adalah Musyawarah Daerah yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa oleh Dewan Pimpinan Wilayah atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Dewan Pimpinan Cabang dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Pusat, karena alasan-alasan sebagai berikut:

a. Dewan Pimpinan Daerah melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.
b. Dewan Pimpinan Daerah tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Daerah; dan/atau
c. Kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa lainnya.

(4) Musyawarah Daerah Luar Biasa memiliki kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Daerah.

(5) Dewan Pimpinan Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa tersebut.

(6) Rapat Pimpinan Daerah adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi setingkat di bawah Musyawarah Daerah dan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah sesuai kebutuhan.

(7) Rapat Kerja Daerah adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Daerah dan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.

(8) Rapat Koordinasi Daerah adalah rapat yang diadakan untuk menyelaraskan pelaksanaan program, baik pada bidang tertentu maupun lintas bidang, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat
Musyawarah dan Rapat Tingkat Cabang

Pasal 39

(1) Musyawarah dan rapat-rapat tingkat Cabang terdiri atas:
a. Musyawarah Cabang; dan
b. Rapat Pimpinan Cabang.

(2) Musyawarah Cabang adalah pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi di tingkat Kecamatan yang diselenggarakan sedikitnya sekali dalam 5 (lima) tahun, dengan kewenangan:
a. menetapkan Program Kerja Cabang.
b. memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Cabang.
c. menetapkan Formatur Musyawarah Cabang dan menetapkan Dewan Penasihat tingkat Cabang.
d. menilai pertanggungjawaban Pimpinan Cabang; dan
e. menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

(3) Rapat Pimpinan Cabang adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi setingkat di bawah Musyawarah Cabang dan diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang sesuai kebutuhan.

(4) Rapat Pimpinan Cabang berwenang menyelesaikan masalah-masalah dan mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas.

Bagian Kelima
Musyawarah dan Rapat Tingkat Anak Cabang

Pasal 40

(1) Musyawarah dan rapat-rapat tingkat Anak Cabang terdiri atas:
a. Musyawarah Anak Cabang; dan
b. Rapat Pimpinan Anak Cabang.

(2) Musyawarah Anak Cabang adalah pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi di tingkat Desa/Kelurahan yang diselenggarakan sedikitnya sekali dalam 5 (lima) tahun, dengan kewenangan:
a. menetapkan Program Kerja Anak Cabang.
b. memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Anak Cabang.
c. menetapkan Formatur Musyawarah Anak Cabang dan menetapkan Dewan Penasihat tingkat Anak Cabang.

d. menilai pertanggungjawaban Pimpinan Anak Cabang; dan
e. menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

(3) Rapat Pimpinan Anak Cabang adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi setingkat di bawah Musyawarah Anak Cabang dan diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Cabang sesuai kebutuhan.

(4) Rapat Pimpinan Anak Cabang berwenang menyelesaikan masalah-masalah dan mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Anak Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas.

Bagian Keenam
Kuorum dan Pengambilan Keputusan

Pasal 41

Musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada Bab IV adalah sah apabila dihadiri oleh 1/2 (setengah) dari jumlah peserta, kecuali:

a. dalam hal musyawarah mengambil keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar, maka Musyawarah harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta yang diundang, dan keputusan harus diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta yang hadir; dan
b. Dalam hal musyawarah mengambil keputusan tentang pemilihan Pengurus, sekurang-kurangnya disetujui oleh lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah peserta yang hadir.

Pasal 42

Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila ini tidak mungkin, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada Bab ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V
KEKAYAAN DAN KEUANGAN

Pasal 44

Kekayaan dan keuangan Organisasi dapat diperoleh dari:

a. modal pertama pada waktu Organisasi didirikan.
b. sumbangan yang sifatnya tetap atau tidak tetap dan tidak mengikat.
c. sodaqoh, wasiat, hibah dan *athiyah* dari orang per orang, masyarakat, lembaga baik instansi pemerintah maupun swasta; dan
d. dana-dana yang diperoleh dari usaha lain yang sah.

BAB VI
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 45

(1) Lembaga Dakwah Islam Indonesia dapat dibubarkan jika tidak mempunyai kekuatan hidup lagi atau tidak adanya kemampuan untuk melanjutkan kegiatannya.

(2) Keputusan untuk membubarkan Lembaga Dakwah Islam Indonesia dianggap sah bilamana mendapat persetujuan sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara peserta dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan untuk itu.

(3) Jika Lembaga Dakwah Islam Indonesia dibubarkan, maka dengan mengindahkan ketentuan perundangan yang berlaku, Dewan Pimpinan Pusat beserta tim likuidasi yang dibentuk berkewajiban menyelesaikan (membereskan) hutang-piutang Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan

mengawasi serta menyalurkan sisa kekayaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsi dalam Anggaran Dasar ini.

(4) Tim likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Pusat bersama Dewan Penasihat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Peraturan dan kelengkapan Organisasi yang ada tetap berlaku sepanjang belum diadakan perubahan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

(1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Organisasi.

(2) Anggaran Dasar ini berlaku pada tanggal ditetapkannya.

ANGGARAN RUMAH TANGGA
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

BAB I
KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu
Jenis Keanggotaan

Pasal 1

(1) Keanggotaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia terdiri atas:
   a. Anggota Tetap, selanjutnya disebut Anggota; dan
   b. Anggota Tidak Tetap, selanjutnya disebut Warga.

(2) Anggota adalah Pengurus dan/atau Pengurus yang sudah purnatugas dari kepengurusan Organisasi, yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar.

(3) Warga adalah anggota yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersedia mengikuti kegiatan dakwah keagamaan dan pendidikan kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Organisasi.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 2

Setiap Anggota berkewajiban untuk:

(1) menghayati dan melaksanakan prinsip-prinsip Dakwah Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

(2) memiliki keterikatan baik secara formal maupun moral, menjunjung tinggi nama baik, kehormatan, dan tujuan Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

(3) mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia, keputusan Musyawarah Nasional, serta hal-hal lainnya yang ditetapkan oleh Pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

(4) mengikuti secara aktif pelaksanaan program dan kegiatan Lembaga Dakwah Islam Indonesia; dan

(5) secara sukarela memberikan shodaqoh, sumbangan dan bantuan untuk keperluan Organisasi.

Pasal 3

Setiap Anggota berhak:

a. memperoleh perlakuan yang sama dari Organisasi.

b. memperoleh pelayanan, pendidikan dan pelatihan, perlindungan serta bimbingan dari Organisasi.

c. memperoleh penghargaan dari Organisasi sesuai prestasinya.

d. melakukan pembelaan diri terhadap keputusan yang dikeluarkan Organisasi terhadap dirinya.

e. menghadiri rapat anggota, mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan usul dan saran yang bersifat membangun; dan

f. memilih dan dipilih menjadi Pengurus atau memegang jabatan lain yang dipercayakan Organisasi kepadanya.

Pasal 4

Setiap Warga berhak:

a. memperoleh perlakuan yang sama dari Organisasi.

b. Memperoleh pelayanan, pendidikan dan pelatihan, perlindungan serta bimbingan dari Organisasi.

c. memperoleh penghargaan dari Organisasi sesuai prestasinya; dan

d. dapat dipilih menjadi Anggota setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Organisasi.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Keanggotaan

Pasal 5

(1) Anggota berhenti karena:
a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.
b. diberhentikan; atau
c. meninggal dunia.

(2) Anggota dapat diberhentikan karena:
a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota.
b. melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah Nasional dan atau Rapat Pimpinan Nasional.
c. melaksanakan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan keputusan dan atau kebijaksanaan Pengurus Organisasi; dan/atau
d. melakukan perbuatan tercela dan/atau tindak pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap.

(3) Pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi dan melalui proses administrasi pemberian sanksi disiplin secara bertahap, berupa:
a. teguran lisan.
b. teguran tertulis.
c. sangsi administratif.
d. berhenti sementara sebagai Anggota; dan
e. berhenti sebagai Anggota.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku jika Anggota diberhentikan secara langsung oleh

Dewan Pimpinan Pusat setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Kehormatan dan Dewan Penasihat.

Bagian Keempat
Prosedur Tetap Keanggotaan

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur tetap atau tata cara menjadi anggota, perlindungan hak, pelaksanaan kewajiban, dan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB II
KEPENGURUSAN DAN PEMBIDANGAN

Bagian Kesatu
Kepengurusan

Pasal 7

(1) Dewan Pimpinan Pusat adalah pimpinan kolektif di tingkat Nasional yang menerima mandat Musyawarah Nasional, sebagai pemimpin dan pemegang tanggung jawab tertinggi, baik ke dalam maupun ke luar Organisasi.

(2) Susunan Dewan Pimpinan Pusat terdiri atas:
   a. Ketua Umum.
   b. Ketua-ketua.
   c. Sekretaris Umum.
   d. Wakil-wakil Sekretaris Umum.
   e. Bendahara Umum.
   f. Wakil-wakil Bendahara Umum.
   g. Ketua-ketua Departemen; dan
   h. Anggota Departemen.

Pasal 8

(1) Dewan Pimpinan Wilayah adalah pimpinan kolektif yang menerima mandat Musyawarah Wilayah, sebagai

pemimpin dan pemegang tanggungjawab baik ke dalam maupun ke luar Organisasi di tingkat Provinsi.

(2) Dalam hal Dewan Pimpinan Wilayah oleh karena belum dapat menyelenggarakan Musyawarah Wilayah atau baru dibentuk untuk pertama kalinya, maka susunan Dewan Pimpinan Wilayah ditetapkan secara langsung dengan keputusan Dewan Pimpinan Pusat.

(3) Susunan Dewan Pimpinan Wilayah terdiri atas:
a. Ketua.
b. Wakil-wakil Ketua.
c. Sekretaris.
d. Wakil-wakil sekretaris.
e. Bendahara.
f. Wakil-wakil bendahara.
g. Ketua-ketua Biro; dan
h. Anggota Biro.

Pasal 9

(1) Dewan Pimpinan Daerah adalah pimpinan kolektif yang menerima mandat Musyawarah Daerah, sebagai pemimpin dan pemegang tanggungjawab baik ke dalam maupun ke luar Organisasi di tingkat Kabupaten/kota.

(2) Dalam hal Dewan Pimpinan Daerah oleh karena belum dapat menyelenggarakan Musyawarah Daerah atau baru dibentuk untuk pertama kalinya, maka susunan Dewan Pimpinan Daerah ditetapkan secara langsung dengan keputusan Dewan Pimpinan Wilayah.

(3) Susunan Dewan Pimpinan Daerah terdiri atas:
a. Ketua.
b. Wakil-wakil Ketua.
c. Sekretaris.
d. Wakil-wakil sekretaris.
e. Bendahara.
f. Wakil-wakil bendahara.
g. Ketua-ketua Bagian; dan
h. Anggota Bagian.

Pasal 10

(1) Pimpinan Cabang adalah pimpinan kolektif yang menerima mandat Musyawarah Cabang, sebagai pemimpin dan pemegang tanggungjawab baik ke dalam maupun ke luar Organisasi di tingkat Kecamatan.

(2) Dalam hal Pimpinan Cabang oleh karena belum dapat menyelenggarakan Musyawarah Cabang atau baru dibentuk untuk pertama kalinya, maka susunan Pimpinan Cabang ditetapkan secara langsung dengan keputusan Dewan Pimpinan Daerah.

(3) Susunan Pimpinan Cabang terdiri atas:
   a. Ketua.
   b. Wakil-wakil Ketua.
   c. Sekretaris.
   d. Wakil-wakil sekretaris.
   e. Bendahara.
   f. Wakil-wakil bendahara; dan
   g. Seksi-seksi.

Pasal 11

(1) Pimpinan Anak Cabang adalah pimpinan kolektif yang menerima mandat Musyawarah Anak Cabang, sebagai pemimpin dan pemegang tanggungjawab baik ke dalam maupun ke luar Organisasi di tingkat Desa/Kelurahan.

(2) Dalam hal Pimpinan Anak Cabang oleh karena belum dapat menyelenggarakan Musyawarah Anak Cabang atau baru dibentuk untuk pertama kalinya, maka susunan Pimpinan Anak Cabang ditetapkan secara langsung dengan keputusan Dewan Pimpinan Daerah.

(3) Susunan Pimpinan Anak Cabang terdiri atas:
   a. Ketua.
   b. Wakil Ketua.
   c. Sekretaris.
   d. Wakil sekretaris.
   e. Bendahara.
   f. Wakil bendahara; dan

g. Sub-subseksi.

Bagian Kedua
Pembidangan

Pasal 12

Untuk menguatkan dan mengembangkan fungsi internal dan eksternal Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a Anggaran Dasar, struktur kepengurusan Lembaga Dakwah Indonesia dibagi dalam jenjang pembidangan hierarkis sebagai berikut:

a. Departemen, untuk struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat.
b. Biro, untuk struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah.
c. Bagian, untuk struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah.
d. Seksi, untuk struktur kepengurusan Pimpinan Cabang; dan
e. Subseksi, untuk struktur kepengurusan Pimpinan Anak Cabang.

Pasal 13

Struktur Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat terdiri atas 11 (sebelas) Departemen, yakni:

a. Departemen Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi.
b. Departemen Pendidikan Agama dan Dakwah.
c. Departemen Pendidikan Umum dan Pelatihan.
d. Departemen Pengabdian Masyarakat.
e. Departemen Pemuda, Kepanduan, Olahraga, dan Seni Budaya.
f. Departemen Hubungan antar Lembaga dan Hubungan Luar Negeri.
g. Departemen Komunikasi, Informasi dan Media.
h. Departemen Litbang, IPTEK, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.
i. Departemen Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat.
j. Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia; dan

k. Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 14

(1) Struktur Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah terdiri atas 11 (sebelas) Biro, yakni:
   a. Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi.
   b. Biro Pendidikan Agama dan Dakwah.
   c. Biro Pendidikan Umum dan Pelatihan.
   d. Biro Pengabdian Masyarakat.
   e. Biro Pemuda, Kepanduan, Olahraga, dan Seni Budaya.
   f. Biro Hubungan antar Lembaga dan Hubungan Luar Negeri.
   g. Biro Komunikasi, Informasi dan Media.
   h. Biro Litbang, IPTEK, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.
   i. Biro Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat.
   j. Biro Hukum dan Hak Azasi Manusia; dan
   k. Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga.

(2) Dalam hal pembidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat terpenuhi, Dewan Pimpinan Wilayah dapat menyesuaikan struktur biro sesuai kebutuhan tugas pokok dan fungsi Organisasi di Wilayahnya.

Pasal 15

(1) Struktur Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah terdiri atas 11 (sebelas) Bagian, yakni:
   a. Bagian Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi.
   b. Bagian Pendidikan Agama dan Dakwah.
   c. Bagian Pendidikan Umum dan Pelatihan.
   d. Bagian Pengabdian Masyarakat.
   e. Bagian Pemuda, Kepanduan, Olahraga, dan Seni Budaya.
   f. Bagian Hubungan antar Lembaga dan Hubungan Luar Negeri.
   g. Bagian Komunikasi, Informasi dan Media.
   h. Bagian Litbang, IPTEK, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.

i. Bagian Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat.
j. Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia; dan
k. Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga.

(2) Dalam hal pembidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat terpenuhi, Dewan Pimpinan Daerah dapat menyesuaikan struktur biro sesuai kebutuhan tugas pokok dan fungsi Organisasi di Daerahnya.

Pasal 16

Pimpinan Cabang dapat membentuk Seksi-seksi sesuai kebutuhan di Cabangnya dengan mengacu pada pembidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

Pimpinan Anak Cabang dapat membentuk Sub-subseksi sesuai kebutuhan di Anak Cabangnya dengan mengacu pada pembidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

Pasal 18

(1) Perwakilan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Anggaran Dasar adalah Perwakilan Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau nama lain yang berada di luar negeri di negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Perwakilan Luar Negeri dibentuk dan struktur kepengurusan disusun sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perwakilan Luar Negeri diatur oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Bagian Ketiga
Syarat dan Ketentuan Pengurus

Pasal 19

Setiap Anggota dapat dipilih menjadi Pengurus dengan syarat sebagai berikut:

a. bertaqwa kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, berakhlaqul kalimah, berprestasi, berdedikasi tinggi, dan loyal pada Organisasi.

b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau tindak pidana yang diancam hukuman pidana minimal 5 (lima) tahun.

c. bersedia aktif dan sanggup bekerjasama secara kolektif; dan

d. terpilih melalui Musyawarah sesuai tingkatan kepengurusan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

Setiap Anggota yang telah memenuhi syarat untuk menjadi Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus pula telah memenuhi syarat sebagai berikut:

a. terbukti telah aktif berperan serta mengabdi bagi Organisasi sedikitnya selama 5 (lima) tahun berturut-turut untuk dapat menjadi Pengurus di tingkat Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah; atau

b. terbukti telah aktif berperan serta mengabdi bagi Organisasi sedikitnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut untuk dapat menjadi Pengurus di tingkat Dewan Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Anak Cabang.

Pasal 21

Setiap Anggota yang telah memenuhi syarat untuk menjadi Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dipilih menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

a. pernah menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah selama 1 (satu) periode; dan

b. memperoleh dukungan dalam Musyawarah Nasional berupa pencalonan oleh sedikitnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara Wilayah.

Pasal 22

(1) Setiap Anggota yang telah memenuhi syarat untuk menjadi Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dipilih menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, Ketua Dewan Pimpinan Daerah, Ketua Pimpinan Cabang, atau Ketua Pimpinan Anak Cabang, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
   a. telah aktif menjadi pengurus sekurang-kurangnya selama 1 (satu) periode pada tingkatan yang bersangkutan atau satu tingkat di bawahnya; dan
   b. memperoleh dukungan dalam Musyawarah sesuai tingkatannya berupa pencalonan oleh sedikitnya 15 % (lima belas persen) dari jumlah suara Wilayah.

(2) Syarat Pencalonan sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk Pimpinan Cabang dan Pimpinan Anak Cabang.

Bagian Keempat
Jabatan Antar Waktu

Pasal 23

(1) Kekosongan jabatan dalam suatu masa bakti kepengurusan dapat terjadi karena Pengurus yang bersangkutan:
   a. meninggal dunia.
   b. mengundurkan diri; atau

c. diberhentikan.

(2) Apabila terjadi kekosongan jabatan maka jabatan tersebut diisi oleh pejabat sementara yang disebut sebagai Pejabat Antar Waktu, diusulkan oleh Pengurus lainnya kepada pimpinan Pengurus setingkat di atasnya dan ditetapkan dalam rapat pleno Pengurus setingkat di atasnya itu hingga diselenggarakan Musyawarah sesuai tingkatannya.

(3) Dalam hal penggantian jabatan antar waktu karena suatu sebab tertentu tidak dapat dilaksanakan, maka pimpinan Pengurus setingkat di atasnya dapat mengesahkan Pejabat Antar Waktu untuk melanjutkan masa jabatan Pengurus yang digantikannya.

(4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua Umum, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, Ketua Dewan Pimpinan Daerah, Ketua Pimpinan Cabang, atau Ketua Pimpinan Anak Cabang karena berhalangan tetap, maka ditunjuk Pelaksana Tugas untuk melaksanakan Musyawarah Luar Biasa sesuai tingkatannya.

(5) Masa jabatan Pejabat Antar Waktu adalah hingga berakhirnya masa jabatan Pengurus yang digantikannya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pengisian kekosongan Jabatan Antar Waktu diatur dalam Peraturan Organisasi.

Bagian Kelima
Mutasi Pengurus

Pasal 24

(1) Dewan Pimpinan menurut tingkatannya dapat melakukan mutasi personil kepengurusan pada masa bakti kepengurusannya untuk mengoptimalkan kinerja Organisasi.

(2) Perubahan komposisi mutasi personil kepengurusan diusulkan oleh Ketua dan unsur sekretaris sesuai tingkatan dari kepengurusan yang ada.

(3) Mutasi personil kepengurusan dilakukan dengan terlebih dahulu:
   a. menilai optimalisasi kinerja personil dan/atau pertimbangan lain dalam rapat pleno pada masing-masing tingkat kepengurusan; dan
   b. dikecualikan dari maksud ayat (3) huruf a, mutasi dapat dilakukan secara langsung oleh Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh pertimbangan Majelis Kehormatan dan Dewan Penasihat.

(4) Rapat Pleno yang dilakukan khusus untuk mutasi personil kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dihadiri oleh sedikitnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah kepengurusan dan Dewan Penasehat sesuai tingkat kepengurusan.

(5) Perubahan komposisi mutasi personil kepengurusan ditetapkan sesuai dengan tingkat kewenangan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Anggaran Dasar.

BAB III
DEWAN PENASIHAT

Pasal 25

(1) Dewan Penasihat merupakan suatu badan yang bersifat kolektif, yang susunan dan personalianya ditetapkan oleh Formatur Musyawarah sesuai tingkatan masing-masing.

(2) Anggota Dewan Penasihat diangkat dari Pengurus yang telah purna dari struktur kepengurusan dan/atau tokoh-tokoh di lingkungan Organisasi yang dipandang mampu melaksanakan tugas dan jabatan sebagai Dewan Penasihat.

(3) Jumlah anggota Dewan Penasihat adalah sebagai berikut:
   a. Dewan Penasihat Tingkat Pusat, sebanyak-banyaknya berjumlah 15 (lima belas) orang.
   b. Dewan Penasihat tingkat Wilayah, sebanyak-banyaknya berjumlah 13 (tigabelas) orang.
   c. Dewan Penasihat tingkat daerah, sebanyak-banyaknya berjumlah 11 (sebelas) orang; dan
   d. Dewan Penasihat pada tingkat Cabang dan Anak Cabang disesuaikan dengan kebutuhan Organisasi.

(4) Dewan Penasihat berhak:
   a. baik secara perorangan maupun secara kolektif memberikan pertimbangan, saran, dan nasihat kepada Pengurus sesuai tingkatannya masing-masing, baik diminta ataupun pun tidak; dan
   b. menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan sesuai tingkatan masing-masing.

(5) Mekanisme dan tata kerja Dewan Penasihat ditetapkan oleh Dewan Penasihat.

BAB IV
MAJELIS, BADAN, KELOMPOK KERJA DAN KELOMPOK KEPAKARAN

Pasal 26

(1) Majelis dan/atau Badan dapat dibentuk Pengurus pada setiap tingkatan sesuai dengan kebutuhan, dan berfungsi untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Organisasi.

(2) Kelompok Kerja dapat dibentuk Pengurus pada setiap tingkatan sesuai dengan kebutuhan, dan berfungsi sebagai sarana penunjang pelaksanaan program Organisasi.

(3) Kelompok Kepakaran dapat dibentuk Pengurus pada setiap tingkatan sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) Komposisi kepengurusan Majelis, Badan, Kelompok Kerja, dan Kelompok Kepakaran ditetapkan oleh Dewan Pimpinan dengan jumlah dan personil sesuai kebutuhan Organisasi sesuai tingkatannya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Majelis, Badan, Kelompok Kerja, dan Kelompok Kepakaran diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB V
ORGANISASI OTONOM

Pasal 27

(1) Organisasi Otonom dapat dibentuk pada setiap tingkatan kepengurusan sesuai dengan kebutuhan, dan berfungsi untuk menjalankan kepentingan strategis Organisasi.

(2) Organisasi Otonom berhak:
   a. menentukan dan mengatur struktur kepengurusan menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Otonom tersebut dengan tetap berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia; dan
   b. mengelola dan melaksanakan kegiatan Organisasi Otonom tersebut sesuai bidang dan/atau kelompok strategisnya masing-masing, dan dalam pelaksanaannya dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pimpinan Lembaga Dakwah Islam Indonesia sesuai tingkatannya.

(3) Organisasi Otonom berkewajiban:
   a. menyesuaikan asas, tujuan, dan fungsinya sesuai dengan asas, tujuan, dan fungsi Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
   b. berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia; dan
   c. melaporkan setiap Keputusan Musyawarah Organisasi Otonom kepada Dewan Pimpinan Lembaga Dakwah Islam Indonesia sesuai tingkatan kepengurusannya.

(4) Organisasi Otonom memiliki keleluasaan dalam menjalankan program kerjanya selama tidak bertentangan dengan kebijakan-kebijakan Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Otonom diatur dalam Peraturan Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

BAB VI
KERJASAMA DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Pasal 28

(1) Kerjasama dan hubungan antar lembaga dengan berbagai lembaga negara, berbagai lembaga pemerintah, berbagai lembaga non-pemerintah, berbagai lembaga independen, berbagai lembaga pendidikan umum maupun agama, dan/atau berbagai lembaga swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Anggaran Dasar, dilakukan melalui pelaksanaan program di semua tingkatan Organisasi dalam bentuk:

a. pelaksanaan program-program kerja Organisasi.
b. pelaksanaan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
c. pelaksanaan rekruitmen kepemimpinan kelembagaan, termasuk lembaga legislatif, eksekutif dan berbagai lembaga lainnya; dan
d. hal-hal lain yang dianggap perlu.

(2) Kerjasama dan hubungan antar lembaga dengan lembaga swasta dan/atau lembaga negara asing hanya dapat dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dan hubungan antar lembaga diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB VII
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Bagian Kesatu
Musyawarah dan Rapat-Rapat Nasional

Pasal 29

(1) Musyawarah Nasional atau disingkat MUNAS dihadiri oleh:
   a. Peserta, terdiri atas:
      1. Dewan Penasihat Pusat.
      2. Dewan Pimpinan Pusat.
      3. unsur Dewan Pimpinan Wilayah.
      4. unsur Dewan Pimpinan Daerah; dan
      5. unsur Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat.
   b. Peninjau, terdiri atas:
      1. unsur Dewan Penasihat Wilayah.
      2. unsur Pimpinan Majelis, Badan, dan/atau POKJA tingkat Pusat.
      3. unsur Pimpinan Majelis, Badan, POKJA, dan/atau Organisasi Otonom tingkat Wilayah; dan
      4. unsur Pondok Pesantren dan Lembaga Lain yang ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat; dan
   c. Undangan, terdiri atas:
      1. perwakilan institusi; dan
      2. perorangan.

(2) Jumlah peserta, peninjau, dan undangan MUNAS ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

(3) Pimpinan MUNAS dipilih dari dan oleh Peserta.

(4) Sebelum pimpinan MUNAS terpilih, Dewan Pimpinan Pusat bertindak selaku pimpinan sementara MUNAS.

Pasal 30

Musyawarah Nasional Luar Biasa atau disingkat MUNASlub diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 29.

Pasal 31

(1) Rapat Pimpinan Nasional atau disingkat Rapimnas dihadiri oleh:
   a. Peserta, terdiri atas:
      1. Dewan Penasihat Pusat.
      2. Dewan Pimpinan Pusat.
      3. unsur Dewan Pimpinan Wilayah.
      4. unsur Dewan Pimpinan Daerah; dan
      5. unsur Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat.
   b. Peninjau, terdiri atas:
      1. unsur Dewan Penasihat Wilayah.
      2. unsur Pimpinan Majelis, Badan, dan/atau POKJA tingkat Pusat.
      3. unsur Pimpinan Majelis, Badan, POKJA, dan/atau Organisasi Otonom tingkat Provinsi; dan
      4. unsur Pondok Pesantren dan Lembaga Lain yang ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
   c. Undangan, terdiri atas:
      1. perwakilan institusi; dan
      2. perorangan

(2) Jumlah peserta, peninjau dan undangan Rapimnas ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 32

(1) Rapat Kerja Nasional atau disingkat Rakernas dihadiri oleh:
   a. Peserta, terdiri atas:
      1. Dewan Pimpinan Pusat.
      2. unsur Dewan Pimpinan Wilayah.
      3. unsur Dewan Pimpinan Daerah; dan
      4. unsur Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat.
   b. Peninjau, terdiri atas:
      1. Dewan Penasihat Pusat.
      2. unsur Dewan Penasihat Wilayah.
      3. unsur Pimpinan Majelis, Badan, dan/atau POKJA tingkat Pusat.
      4. unsur Pimpinan Majelis, Badan, POKJA, dan/atau Organisasi Otonom tingkat Wilayah; dan
      5. unsur Pondok Pesantren dan Lembaga Lain yang ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

c. Undangan, terdiri atas:
   1. perwakilan institusi; dan
   2. perorangan.

(2) Jumlah peserta, peninjau dan undangan Rakernas ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 33

(1) Rapat Koordinasi Nasional atau disingkat Rakornas dihadiri oleh:
   a. unsur Dewan Pimpinan Pusat.
   b. unsur Dewan Pimpinan Wilayah.
   c. unsur Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat sesuai dengan bidangnya; dan
   d. unsur Pimpinan Majelis, Badan, dan/atau Pokja tingkat Pusat sesuai dengan bidangnya.

(2) Jumlah peserta, peninjau dan undangan Rakornas ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Bagian Kedua
Musyawarah dan Rapat-Rapat Wilayah

Pasal 34

(1) Musyawarah Wilayah atau disingkat Muswil dihadiri oleh:
   a. Peserta, terdiri atas:
      1. unsur Dewan Pimpinan Pusat.
      2. unsur Dewan Pimpinan Wilayah.
      3. unsur Dewan Pimpinan Daerah; dan
      4. unsur Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Provinsi.
   b. Peninjau, terdiri atas:
      1. Dewan Penasihat Wilayah.
      2. unsur Pimpinan Majelis, Badan, dan/atau POKJA tingkat Wilayah.
      3. unsur Pimpinan Majelis, Badan, POKJA, dan/atau Organisasi Otonom tingkat Daerah; dan
      4. unsur Pondok Pesantren dan/atau unsur Lembaga Lain yang ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
   c. Undangan, terdiri atas:

1. perwakilan institusi; dan
2. perorangan.

(2) Jumlah peserta, peninjau, dan undangan Muswil ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

(3) Pimpinan Muswil dipilih dari dan oleh Peserta.

(4) Sebelum pimpinan Muswil terpilih, Dewan Pimpinan Wilayah bertindak selaku pimpinan sementara Muswil.

Pasal 35

Musyawarah Wilayah Luar Biasa atau disingkat Muswilub diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 34.

Pasal 36

(1) Rapat Pimpinan Wilayah atau disingkat Rapimwil dihadiri oleh:
   a. Peserta, terdiri atas:
      1. unsur Dewan Pimpinan Pusat.
      2. unsur Dewan Pimpinan Wilayah.
      3. unsur Dewan Pimpinan Daerah; dan
      4. unsur Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Provinsi.
   b. Peninjau, terdiri atas:
      1. Dewan Penasihat Wilayah; dan
      2. unsur Pimpinan Majelis, Badan, dan/atau POKJA tingkat Wilayah.
      3. unsur Pimpinan Majelis, Badan, POKJA, dan/atau Organisasi Otonom tingkat Daerah; dan
      4. Unsur Pondok Pesantren dan/atau unsur Lembaga Lain yang ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
   c. Undangan, terdiri atas:
      1. perwakilan institusi; dan
      2. perorangan.

(2) Jumlah peserta dan peninjau Rapimwil ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

Pasal 37

(1) Rapat Kerja Wilayah atau disingkat Rakerwil dihadiri oleh:

a. Peserta, terdiri atas:
   1. unsur Dewan Pimpinan Pusat.
   2. unsur Dewan Pimpinan Wilayah.
   3. unsur Dewan Pimpinan Daerah; dan
   4. unsur Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah.
b. Peninjau, terdiri atas:
   1. Dewan Penasihat Wilayah.
   2. unsur Pimpinan Majelis, Badan, dan/atau POKJA tingkat Wilayah.
   3. unsur Pimpinan Majelis, Badan, POKJA, dan/atau Organisasi Otonom tingkat Daerah; dan
   4. Unsur Pondok Pesantren dan/atau unsur Lembaga Lain yang ditentukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.
c. Undangan, terdiri atas:
   1. perwakilan institusi; dan
   2. perorangan.

(2) Jumlah peserta dan peninjau Rakerwil ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

Pasal 38

(1) Rapat Koordinasi Wilayah atau disingkat Rakorwil dihadiri oleh:
   a. unsur Dewan Pimpinan Wilayah.
   b. unsur Dewan Pimpinan Daerah.
   c. unsur Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah sesuai bidangnya; dan
   d. unsur Pimpinan Majelis, Badan, dan/atau POKJA tingkat Wilayah sesuai bidangnya.

(2) Jumlah peserta Rakorwil ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

Bagian Ketiga
Musyawarah dan Rapat-Rapat Daerah

Pasal 39

(1) Musyawarah Daerah atau disingkat Musda dihadiri oleh:
   a. Peserta terdiri atas:
      1. unsur Dewan Pimpinan Wilayah.
      2. unsur Dewan Pimpinan Daerah.

3. unsur Pimpinan Cabang.
4. unsur Pimpinan Anak Cabang; dan
5. unsur Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Kabupaten/Kota.

b. Peninjau terdiri atas:
1. Dewan Penasihat Daerah.
2. unsur Pimpinan Majelis, Badan, dan/atau POKJA tingkat Daerah; dan
3. Unsur Pondok Pesantren dan/atau unsur Lembaga Lain yang ditentukan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

c. Undangan terdiri atas:
1. perwakilan institusi; dan
2. perorangan.

(2) Jumlah peserta, peninjau dan undangan Musda ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

(3) Pimpinan Musyawarah Daerah dipilih dari dan oleh Peserta.

(4) Sebelum terpilihnya pimpinan Musda, Dewan Pimpinan Daerah bertindak selaku pimpinan sementara Musda.

Pasal 40

Musyawarah Daerah Luar Biasa atau disingkat Musdalub diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 39.

Pasal 41

(1) Rapat Pimpinan Daerah atau disingkat Rapimda dihadiri oleh:

a. Peserta, terdiri atas:
1. unsur Dewan Pimpinan Wilayah.
2. unsur Dewan Pimpinan Daerah.
3. unsur Pimpinan Cabang.
4. unsur Pimpinan Anak Cabang; dan
5. unsur Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah.

b. Peninjau, terdiri atas:
1. Dewan Penasihat Daerah.
2. unsur Pimpinan Majelis, Badan, dan/atau POKJA tingkat Daerah; dan

3. Unsur Pondok Pesantren dan/atau unsur Lembaga Lain yang ditentukan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

c. Undangan, terdiri atas:
   1. perwakilan institusi; dan
   2. perorangan.

(2) Jumlah Peserta dan Peninjau Rapimda ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 42

(1) Rapat Kerja Daerah atau disingkat Rakerda dihadiri oleh:

a. Peserta terdiri atas:
   1. unsur Dewan Pimpinan Wilayah.
   2. unsur Dewan Pimpinan Daerah.
   3. unsur Pimpinan Cabang.
   4. unsur Pimpinan Anak Cabang; dan
   5. unsur Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah.
b. Peninjau, terdiri atas:
   1. Dewan Penasihat Daerah.
   2. unsur Pimpinan Majelis, Badan, dan/atau POKJA tingkat Daerah; dan
   3. Unsur Pondok Pesantren dan/atau unsur Lembaga Lain yang ditentukan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
c. Undangan, terdiri atas:
   1. perwakilan institusi; dan
   2. perorangan.

(2) Jumlah Peserta dan Peninjau Rakerda ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 43

(1) Rapat Koordinasi Daerah atau disingkat Rakorda dihadiri oleh:
   a. unsur Dewan Pimpinan Daerah.
   b. unsur Pimpinan Cabang.
   c. unsur Pimpinan Anak Cabang.
   d. unsur Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah sesuai bidangnya; dan
   e. unsur Pimpinan Majelis, Badan dan/atau POKJA tingkat Daerah sesuai bidangnya.

(2) Jumlah Peserta Rakorda ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Bagian Ketiga
Musyawarah dan Rapat-Rapat Cabang

Pasal 44

(1) Musyawarah Cabang atau disingkat Muscab dihadiri oleh:
   a. Peserta, terdiri atas:
      1. unsur Dewan Pimpinan Daerah.
      2. Pimpinan Cabang.
      3. unsur Pimpinan Anak Cabang; dan
      4. unsur Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang.
   b. Peninjau, terdiri atas:
      1. unsur Dewan Penasihat Pimpinan Cabang; dan
      2. unsur Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Anak Cabang.

(2) Jumlah Peserta dan Peninjau Muscab ditetapkan oleh Pimpinan Cabang.

(3) Pimpinan Muscab dipilih dari dan oleh Peserta.

(4) Sebelum terpilihnya pimpinan Muscab, Pimpinan Cabang bertindak selalu pimpinan sementara Muscab.

Pasal 45

(1) Rapat Pimpinan Cabang atau disingkat Rapimcab dihadiri oleh:
   a. Peserta, terdiri atas:
      1. unsur Dewan Pimpinan Daerah.
      2. Pimpinan Cabang.
      3. unsur Pimpinan Anak Cabang; dan
      4. unsur Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang.
   b. Peninjau, terdiri atas:
      1. unsur Dewan Penasihat Pimpinan Cabang; dan

2. unsur Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Anak Cabang.

(2) Jumlah Peserta dan Peninjau Rapimcab ditetapkan oleh Pimpinan Cabang.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam Bab ini diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB VIII
KEKAYAAN DAN KEUANGAN

Pasal 47

(1) Sumbangan yang tidak mengikat yang diperoleh dari bantuan dan/atau sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b Anggaran Dasar tidak mensyaratkan sesuatu apapun kepada dan bagi Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

(2) Usaha-usaha lain yang halal dan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d Anggaran Dasar adalah usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariat dan hukum negara.

BAB IX
ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 48

(1) Lembaga Dakwah Islam Indonesia memiliki atribut yang meliputi panji-panji, lambang, *hymne*, mars, dan seragam organisasi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai atribut Organisasi diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB X
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 49

(1) Pembubaran Lembaga Dakwah Islam Indonesia dapat diterima apabila diusulkan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Pusat oleh 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah yang sah di seluruh Indonesia.
(2) Dewan Pimpinan Pusat sudah harus menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya usul pembubaran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap memenuhi kuorum dan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah yang sah di seluruh Indonesia.
(4) Keputusan mengenai pembubaran Lembaga Dakwah Islam Indonesia dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Apabila Lembaga Dakwah Islam Indonesia dibubarkan, maka segala kekayaan yang dimiliki dihibahkan kepada Organisasi Sejenis.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

(1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dalam Peraturan Organisasi dan keputusan-keputusan Organisasi.

(2) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 9 Maret 2011
4 Rabi'ul Tsani 1432

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc.
Ketua Merangkap Anggota

Prof. DR. Sc. Agr. Ir. H. Jamsari, MP.
Wakil Ketua Merangkap Anggota

Drs. H. Muh. Hidayat Nahwi Rasul
Sekretaris Merangkap Anggota

Prof. DR. H. Singgih Tri Sulistyono, M.Hum.
Wakil Sekretaris Merangkap Anggota

Ir. H. Muh. Yasaf Andi Koddang, M.S.
Anggota

Ir. H. Muhammad Nurchozim
Anggota

Ir. H. Abdullah A. Karim, M.Si.
Anggota

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
NOMOR : KEP-07/MUNAS VII LDII/III/2011

Tentang

RENCANA STRATEGI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
2011-2016

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUSYAWARAH NASIONAL VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi memiliki tugas dan wewenang untuk mengubah dan menetapkan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
b. bahwa Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia menganggap perlu menetapkan Rencana Strategi seiring dengan perkembangan kemajuan dan arah yang terus berlangsung.

c. bahwa dengan kemajuan yang telah dicapai Lembaga Dakwah Islam Indonesia diperlukan adanya rencana strategis penyesuaian dan perubahan sehingga peran aktif Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam pembangunan bangsa dan negara dapat dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan.
d. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan suatu keputusan tentang Rencana Strategi LDII Periode 2011-2016.

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan, Papan Nama dan Lambang Organisasi.
e. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia hasil Musyawarah Nasional VII LDII Tahun 2005 di Jakarta.
f. Hasil Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2000.
g. Hasil Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2004.
h. Hasil Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2007.
i. Hasil Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2009.
j. Keputusan Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: 01/MUNAS VII LDII/III/2011 tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah

Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Memperhatikan

1. Pidato Pengarahan dan pokok-pokok pikiran dari pembicara pada Rapat Paripurna pertama pada Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011.
2. Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2005 – 2010.
3. Hasil Sidang Komisi B Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang membahas tentang Rencana Strategi Lembaga Dakwah Islam Indonesia 2011-2016.
4. Pemandangan umum, usul serta saran peserta Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA 2011-2016.

KESATU : Mengesahkan Rencana Strategi Lembaga Dakwah Islam Indonesia 2011-2016.

KEDUA : Naskah Rencana Strategi Lembaga Dakwah Islam Indonesia 2011-2016 sebagaimana diktum KESATU selengkapnya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini:

KETIGA : Penyesuaian skala prioritas terhadap Rencana Strategi Lembaga Dakwah Islam Indonesia 2011-2016 dilaksanakan secara penuh selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 9 Maret 2011
4 Rabi'ul Tsani 1432

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc.
Ketua Merangkap Anggota

Prof. DR. Sc. Agr. Ir. H. Jamsari, MP.
Wakil Ketua Merangkap Anggota

Drs. H. Muh. Hidayat Nahwi Rasul
Sekretaris Merangkap Anggota

Prof. DR. H. Singgih Tri Sulistyono, M.Hum.
Wakil Sekretaris Merangkap Anggota

Ir. H. Muh. Yasaf Andi Koddang, M.S.
Anggota

Ir. H. Muhammad Nurchozim
Anggota

Ir. H. Abdullah A. Karim, M.Si.
Anggota

Lampiran : KEPUTUSAN MUNAS VII LDII TAHUN 2011
Nomor : KEP-07/MUNAS VII LDII/III/2011
Tanggal : 9 Maret 2011
4 Rabi'ul Tsani 1432

RENCANA STRATEGI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA 2011-2016

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUKADIMAH

Bahwa Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan damai.

Bahwa dalam mencapai tujuan tersebut dalam kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia penerapannya harus benar-benar selaras hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama manusia, dan alam sekitarnya yang memiliki kemantapan keseimbangan dalam kehidupan lahiriah dan batiniah. Selain itu mempunyai jiwa yang dinamis dan semangat kebersamaan dalam mencermati dan menyikapi arus reformasi di berbagai bidang serta perkembangan lingkungan strategi yang bersifat nasional, regional, dan global.

Bahwa upaya pembangunan bidang agama, kualitas beragama, dan kualitas manusia Indonesia menghadapi tantangan yang lebih berat, hal ini karena pada abad ke-21 yang lebih dikenal sebagai era globalisasi versi 3.0, terjadi transformasi mendasar dalam kehidupan manusia dan hubungan antar bangsa di dunia yang tidak hanya didorong oleh negara dan perusahaan multinasional, tetapi bahkan oleh individu-individu yang memiliki akses terhadap teknologi komunikasi dan informasi. Era ini ditandai oleh fenomena kehidupan: mudahnya melakukan komunikasi dan mengakses informasi, kebijakan memacu investasi telah mendorong masuknya modal, teknologi, dan manajemen ke suatu Negara, kesepakatan negara-negara melakukan perdagangan bebas, telah berdampak pada semakin kaburnya batas suatu negara. Era ini disamping membuka berbagai peluang juga sangat potensial menimbulkan berbagai permasalahan atau dampak negatif terhadap kualitas manusia terutama kualitas akhlaknya.

Selain globalisasi versi 3.0, dewasa ini kecenderungan untuk berkehidupan yang lebih demokratis terus bergulir bahkan semakin cepat. Negara-negara yang kurang demokratis semakin terpinggirkan dalam pergaulan international kendatipun negara-negara ini memiliki kesejahteraan yang tinggi. Argumentasinya yaitu tidaklah wajar *(fair)* mempertukarkan 'kemerdekaan manusia' dengan kesejahteraan. Kecenderungan global dan regional ini juga berimbas pada lingkup nasional. Di Indonesia, kehidupan demokratis menjadi semakin menguat, memberikan ruang gerak yang cukup lebar kepada masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri, menjadikan peranan pemerintah lebih tergantikan oleh peran masyarakat. Pemerintah menjadi lebih mendorong peran masyarakat ke depan.

Kecenderungan (*trend*) demokratisasi yang sangat memberikan peran kepada masyarakat dengan sendirinya mengurangi peranan pemerintah, membawa tantangan tersendiri dalam konteks masyarakat Indonesia yang masih dibawah garis kemiskinan. Di samping itu, Indonesia yang berada di wilayah yang rawan bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, kebakaran hutan, letusan gunung berapi

dan lain-lain, secara kumulatif menimbulkan kompleksitas penanganan pembangunan bangsa.

Dalam konteks ini, maka dibutuhkan peran aktif masyarakat dalam menangani kondisi tersebut di atas dan segala dampaknya. Kualitas masyarakat yang dibutuhkan adalah masyarakat yang memiliki tingkat kepedulian yang tinggi dan profesionalisme yang memadai dalam menangani problematika pembangunan di Indonesia serta sebagai mitra kerja pemerintah.

Bahwa LDII dalam peransertanya membantu program-program pemerintah untuk mewujudkan tujuan nasional senantiasa konsisten melakukan amal nyata melalui upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia (SDM profesional religius). Hal ini dilakukan dengan melalui dakwah, baik *bil-qolam, bil-kalam* maupun *bil-hal,* supaya tersedia sumberdaya manusia yang mampu berkiprah di era globalisasi versi 3.0 dan di era demokrasi, yaitu sumberdaya manusia yang memiliki kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terpeliharanya kerukunan di antara sesama ummat beragama dan pemerintah, sebagaimana digariskan dalam Angaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi LDII.

Bahwa berhasilnya tujuan dan peran serta Lembaga Dakwah Islam Indonesia diperlukannya adanya keikutsertaan dan rasa tanggungjawab segenap ummat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, sebagai memenuhi panggilan:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. (سورة يوسف 108)

Artinya: "*Katakanlah Muhammad, inilah jalan-ku (agama-ku), aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (manusia) ke jalan Allah dengan hujjah yang nyata, dan Maha Suci Allah, dan aku tidak tergolong orang-orang yang musyrik.*" (QS. Yusuf: 108).

ادْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ...الآية. (سورة النحل 125)

Artinya: "*Ajaklah (semua manusia) kepada Jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan jalan yang lebih baik...*" (QS. An-Nahl: 125).

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ. (سورة آل عمران 104)

Artinya: "*Dan hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan yang mengajak kepada kebajikan dan menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.*" (QS. Ali Imron: 104).

قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوْا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ...الآية.(سورة الأنعام 135)

Artinya: "*Katakanlah Muhammad, wahai kaumku beramal-lah kamu sekalian atas tempat kamu sekalian (semaksimal kemampuanmu) sesungguhnya aku orang yang beramal, ...*" (QS. Al An'am: 135).

قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُوْنَ. (سورة البقرة 139)

Artinya: "*Katakanlah Muhammad apakah kalian membantah kepadaku dalam urusan Allah, sedangkan Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kalian dan bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian dan kami adalah orang-orang yang mukhlis kepada Allah.*" (QS. Al Baqarah: 139).

Bahwa pendirian Negara Republik Indonesia memiliki dimensi religius yang sangat kental sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Dalam dimensi

religius tersebut, para pendiri negara menetapkan empat tujuan bernegara yakni melindungi tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Bahwa Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai organisasi kemasyarakatan yang bernafaskan Islam dan sarat dengan dimensi religius, dituntut untuk turut berpartisipasi aktif dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas. Agar partisipasi dapat berlangsung efektif dan efisien, organisasi dan manajemen Lembaga Dakwah Islam Indonesia terus berupaya untuk dinamis dan moderen tanpa meninggalkan dimensi religius yang menjadi landasannya bahkan meneruskan upaya yang signifikan dalam pencapaian sistem nilai *(value system)* yang menjadi atribut masyarakat **profesional religius**.

Sebagai masyarakat yang **profesional religius** selalu berupaya menjadi manusia Indonesia yang melaksanakan ibadah kepada Allah, menjalankan tugas sebagai hamba Allah untuk memakmurkan bumi dan membangun masyarakat madani berbasis tabiat jujur, amanah, kerja keras dan hemat, rukun, kompak dan kerjasama yang baik.

Dalam rangka aktualisasi ibadah untuk memakmurkan bumi, LDII melaksanakan dakwah *bil-hal* antara lain dengan melaksanakan program penghijauan dengan semangat untuk menangkal pemanasan bumi dan perubahan iklim. LDII dengan slogan programnya ***LDII Go Green*** mengharapkan agar masyarakat Islam mendapatkan kesempatan melaksanakan penghijauan sebagai shadaqah jariyah:

Sebagaimana sabda Rasulallah SAW:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيْمَةٌ، إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ * رواه البخاري في كتاب المزارعة

Artinya: "*Tak ada seorang muslim yang menanam pohon atau menanam tanaman, lalu burung memakannya atau manusia atau hewan, kecuali ada baginya menjadi shadaqah.*"

Berdasarkan sabda Rasulallah SAW. tersebut, kita meyakini bahwa menanam pohon itu merupakan shadaqah. Maka gerakan penghijauan menjadi *shadaqah* dan menjadi ibadah bagi orang yang melaksanakannya, apalagi penghijauan itu akan merupakan faktor penting dalam menangkal pemanasan global *(global warming)* dan perubahan iklim *(climate change)*.

Dalam kerangka itu, Rencana Strategi ini disusun sebagai instrumen manajemen yang akan membantu seluruh jajaran organisasi untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal, efektif dan efisien supaya dapat menjadi kinerja organisasi, kinerja bangsa dan negara menuju tujuan bernegara yang telah dirumuskan oleh para pendiri negara kita.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dewasa ini tengah menghadapi proses transformasi sebagai akibat dari perkembangan lingkungan strategi internal dan eksternal. Secara eksternal, transformasi dipicu dan dipacu oleh globalisasi, perkembangan teknologi, dan semangat liberalisasi. Ketiga faktor ini pada akhirnya telah mendorong terjadinya perubahan besar dalam kehidupan ekonomi, politik, pemerintahan, dan sosial budaya. Perubahan tersebut ternyata telah membawa pula perubahan pada pengelolaan segala aspek kehidupan politik, pemerintahan dan sosial budaya. Pada gilirannya, perubahan ini menuntut pula perubahan terhadap organisasi kemasyarakatan, termasuk Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

Pada saat yang bersamaan, secara internal, masyarakat dan pemerintah Indonesia juga dihadapkan pada krisis multi dimensi baik dalam aspek politik, ekonomi, hukum, pendidikan, kamtibmas, maupun aspek sosial dan budaya. Untuk itu LDII berperanserta secara aktif dengan menjabarkan program-programnya sebagai berikut:

Pertama, lebih meningkatkan dan menguatkan manajemen internal organisasinya, agar peran yang dimainkannya tidak bertentangan (*contra-productive*) dengan tujuan dakwah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam bahwa Islam sebagai *rahmatan lil-'alamiin* dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits dan sebagai warganegara yang baik sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Kedua, LDII tetap proaktif terhadap perubahan-perubahan lingkungan strategi di sekelilingnya. Dalam kondisi sedemikian rupa maka dakwah harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih komprehensif dengan berpandangan pada *capacity and trust based*, sehingga penyusunan Rencana Strategi LDII ke depan mengarah pada pelaksanaan kebijakan yang diuraikan dalam Program Kerja Lima Tahunan (Renstra 2011-2016).

Bahwa LDII sebenarnya memahami perubahan lingkungan strategi tersebut, dan telah mengambil langkah proaktif dengan melaksanakan keputusan-keputusan yang dihasilkan Rakernas Tahun 2007, Rapimnas Tahun 2009 dan Rapimnas Tahun 2010.

Untuk itu, LDII memandang perlu melanjutkannya melalui penyusunan Rencana Strategi (Renstra) periode 2011-2016 sebagai cetak biru dan acuan dalam pengembangan organisasi secara komprehensif. Dengan demikian diharapkan Renstra ini dapat mengarahkan seluruh potensi organisasi secara fokus, agar setiap sumberdaya yang dipergunakannya dapat menghasilkan kinerja yang optimal sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara tepat guna, dan memperkuat tercapainya tujuan pembangunan bangsa dan negara.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Anggaran Dasar LDII, maka LDII mempunyai tugas sebagai berikut:

"Melaksanakan dakwah agama Islam dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadits dengan segenap aspek pengamalannya dan penghayatan beragama agar dapat memberikan hikmah dan dorongan untuk mewujudkan tujuan organisasi."

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, LDII melaksanakan fungsi sebagai berikut :

a. Melaksanakan dakwah Islam secara berkesinambungan, komprehensif dan terprogram dengan menggunakan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber materi utama dakwah.
b. Mendorong nilai-nilai agama Islam dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika masyarakat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

c. Mendorong peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat Islam dalam mengamalkan Pancasila sebagai ideologi negara.
d. Mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat Islam secara merata di seluruh wilayah Indonesia dan masyarakat Islam Indonesia yang berada di luar negeri.
e. Mendorong peningkatan kualitas SDM masyarakat Islam melalui peningkatan akses ke sumber-sumber pendidikan, pelatihan dan program pengembangan lainnya.
f. Mendorong partisipasi aktif masyarakat Islam dalam pembangunan bangsa dan negara.
g. Meningkatkan kerukunan sosial antar dan inter ummat beragama, suku dan kelompok masyarakat lainnya melalui dialog dan kerjasama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi dan saling menghormati.

II. ANALISIS PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGI

Dengan memperhatikan perkembangan strategi baik tingkat global, regional maupun nasional yang mempengaruhi eksistensi LDII dalam menjalankan perannya sebagai ormas, maka kondisi ormas Islam saat ini dan yang diharapkan dapat diidentifikasi dan dirumuskan sebagai berikut:

A. Kondisi Saat Ini

Substansi sebuah ormas terbentuk dari tiga unsur yakni kelembagaan, manajemen dan sumberdaya manusia. Kelembagaan meliputi struktur organisasi dan unsur nilai yang menjadi landasan pendirian organisasi itu. Manajemen meliputi proses, sistem dan prosedur yang diterapkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sumberdaya merupakan bahan utama organisasi dan sumberdaya manusialah yang memproses sumberdaya lainnya guna menghasilkan kinerja organisasi. Pada kondisi kekinian, ketiga unsur tersebut dipotret sebagai berikut :

1. Kelembagaan

a. Globalisasi telah melahirkan berbagai lembaga internasional seperti APEC, AFTA, WTO dan berbagai lembaga internasional lainnya yang bergerak diberbagai bidang, ternyata belum sepenuhnya diikuti perubahan kelembagaan ormas Islam baik dalam perubahan arah organisasi yang lebih mengglobal dan seharusnya memanfatkan peluang yang terkandung dalam perubahan di tingkat internasional itu, maupun dalam dinamika internal organisasi yang seharusnya lebih menekankan efisiensi dan efektifitas sebagai ciri suatu lembaga moderen.

b. Terjadinya berbagai perubahan paradigma seperti perubahan sentralisasi menjadi desentralisasi. Di sisi lain luasnya wilayah Indonesia dan gencarnya pemekaran wilayah baik provinsi, kabupaten/kota, kecamatan maupun kelurahan/desa, mengakibatkan ormas harus menambah struktur dan personal kepengurusan mengikuti pemekaran tersebut, sehingga perlu meningkatkan kemampuan pengendaliannya.

c. Perkembangan implementasi paradigma tersebut di atas serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, menuntut spesialisasi baru dan bervariasi yang memerlukan departemen khusus untuk menanganinya. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan program-program yang disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Manajemen

2.1. Manajemen Organisasi

a. Manajemen ormas dalam wujud sistem dan proses manajemen, baik dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pembiayaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian maupun pelaporan kurang terpenuhinya prinsip-prinsip organisasi moderen secara optimal.

b. Manajemen pembiayaan kegiatan belum memiliki sistem dan kebijakan yang terpadu untuk mencapai sinergi yang optimal dalam memobilisasi dan mengendalikan sumber-sumber pendanaan.
c. Sistem dan proses pengawasan dan pelaporan serta pengarsipan belum terkoordinasi dengan baik dan belum memberikan adanya jaminan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan.

2.2. Manajemen Informasi

a. Data dan informasi sebagai bahan utama dalam pengambilan keputusan manajemen organisasi belum dikelola secara optimal dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
b. Aset yang tak nampak (*intangible asets*) seperti data, informasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh anggota organisasi belum sepenuhnya dikelola secara optimal, sehingga asset tersebut lebih merupakan milik individu daripada milik organisasi.
c. Otomasi manajemen melalui pemanfaatan teknologi informasi pada setiap level organisasi belum sepenuhnya diterapkan sehingga kecepatan (*speed*) dan ketepatan (*accuracy*) proses pengambilan keputusan secara optimal dan pelayanan belum terfasilitasi.

3. Sumberdaya

3.1. Sumberdaya Manusia

a. Keadaan dan masalah yang dihadapi di bidang sumberdaya manusia adalah populasi penganut Islam yang mencapai 85% dari keseluruhan penduduk Indonesia, belum memiliki persepsi yang sama terhadap peran dan tanggungjawab dalam pembangunan masyarakat Islam yang adil, damai dan sejahtera. Kondisi ini mengakibatkan program-program yang dikembangkan di tengah masyarakat menjadi saling tidak sinergis. Padahal, secara kualitatif potensi tersebut sangat besar dan kuantitatif angkatan kerja yang cukup signifikan.

b. Pada umumnya masyarakat Islam masih menunjukkan kualitas yang masih kurang dalam hal memahami ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits maupun pengetahuan dari pendidikan umum.
c. Penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dan bahasa asing oleh masyarakat Islam masih tergolong rendah, sehingga mereka belum mampu memenuhi kebutuhan interaksi antara bangsa guna memanfaatkan peluang-peluang global.
d. Masih lemahnya minat, semangat dan keterampilan kewirausahaan masyarakat dalam menangkap dan memanfaatkan peluang-peluang ekonomi. Secara mendasar masalahnya telah diketahui yaitu lemahnya pengkaderan wirausaha muda (*young entrepreneurship*) yang selama ini tidak menjadi prioritas dalam pembinaan pemuda.
e. Masih lemahnya agenda pengembangan SDM perlu mendapat perhatian. Pengembangan SDM masih kurang seimbang antara pencapaian tujuan membangun keterampilan profesi dan keterampilan non-teknis yang sifatnya personal. Keterampilan profesi (*hard skill*) lebih dominan dilakukan dan mengalahkan pentingnya pendidikan yang bersifat keterampilan intra dan interpersonal (*soft skill*).
f. Pengembangan SDM belum fokus pada pembentukan karakter pemimpin profesional religius yang memiliki enam tabiat luhur. Pengembangan SDM Profesional Religius ditetapkan tersendiri dalam MUNAS VII LDII.

3.2. Sumberdaya Lainnya

a. Sumberdaya domestik seperti sumberdaya alam, budaya dan sosial memiliki potensi yang bermanfaat bagi masyarakat Islam. Namun kebijakan, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ini belum optimal terutama dalam konteks peningkatan kesejahteraan.
b. Kegiatan dan peluang berusaha merupakan sumberdaya ekonomi yang potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam. Namun, tingkat akses

masyarakat Islam terhadap pemanfaatan sumberdaya tersebut tergolong masih rendah.

c. Akses terhadap permodalan yang berbasis syariah belum sepenuhnya terbuka lebar bagi masyarakat Islam sehingga pemanfaatannya dalam meningkatkan kesempatan berusaha belum optimal.

B. Kondisi yang Diharapkan

Dengan mengacu pada kondisi ormas saat ini yang telah diuraikan di atas, maka kondisi ormas Islam yang diharapkan, sesuai dengan arah pembangunan nasional, secara rinci dijabarkan dan divisualisasikan sebagai berikut :

1. Kelembagaan

a. Struktur kelembagaan ormas pada semua jenjang bersifat ramping, terbuka, akomodatif dimana terdapat kejelasan kewenangan dan tanggungjawab, yang dapat menjamin pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan organisasi yang efektif dan efisien, berkeseimbangan antara hubungan pusat dan daerah, serta mampu mewujudkan strategi-strategi yang bersifat global.

b. Struktur kelembagaan ormas yang sepenuhnya menerapkan prinsip '*structure follows strategy*' sehingga semua permasalahan organisasi pada setiap jenjang/ tingkatan dapat terfasilitasi penyelesaiannya oleh struktur yang ada.

c. Perlunya penataan ulang kelembagaan ormas terutama di tingkat daerah (provinsi, kabupaten/kota) untuk melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan dari pusat sebagai wujud penyesuaian penerapan kebijakan otonomi daerah.

d. Perlunya restrukturisasi kelembagaan yang dapat mengakomodir strategi pengendalian sebagai konsekwensi melebarnya rentang kendali. Dalam hal ini pendayagunaan ICT menjadi urgen dan merupakan salah satu solusi.

e. Perlunya mengoptimalkan prinsip dan fungsi departementalisasi urusan agar pelaksanaan kegiatan dapat lebih fokus dan terkelompokkan dengan benar, termasuk pembagian fungsi lini dan perbantuan pada urusan-urusan organisasi.
f. Perlunya perluasan fungsi kelembagaan ormas guna pembangunan citra Islam yang dewasa ini mengalami kemerosotan.

2. Manajemen

2.1. Manajemen Organisasi

a. Penerapan prinsip-prinsip manajemen moderen sehingga kegiatan ormas Islam dapat berlangsung efektif, efisien, akuntabel dan simpel serta transparan mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pembiayaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.
b. Manajemen berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan masyarakat Islam baik di pusat maupun daerah yang mantap, serasi, dan terpadu.
c. Manajemen pembiayaan kegiatan yang memiliki sistem dan kebijakan yang terpadu untuk mencapai sinergi yang optimal dalam mobilisasi, pemanfaatan, dan pengendalian sumber-sumber pembiayaan dari masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan berbagai lembaga internasional.
d. Sistem, proses pengawasan dan pelaporan serta pengarsipan yang terkoordinasi dengan baik dan mampu memberikan jaminan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan, dengan mendayagunakan *Electronic Filing System (EFS)*.

2.2 Manajemen Informasi

a. Data dan informasi sebagai bahan utama dalam pengambilan keputusan manajemen organisasi dikelola secara moderen dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga tingkat kecepatan dan ketepatan pengelolaan dapat lebih optimal.

b. Aset yang tak nampak (*intangible asets*) seperti data, informasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh anggota dan/atau warga organisasi perlu dikelola secara optimal agar aset tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja organisasi secara optimal dalam rangka peningkatan kontribusi organisasi terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
c. Otomasi manajemen melalui pemanfaatan teknologi informasi pada setiap level organisasi perlu diterapkan sehingga kecepatan (*speed*) dan ketepatan (*accuracy*) proses pengambilan keputusan secara optimal dan pelayanan dapat terfasilitasi.

3. Sumberdaya

3.1 Sumberdaya Manusia

a. Sumberdaya manusia dari masyarakat Islam yang populasinya mencapai 85 % dari keseluruhan penduduk Indonesia diupayakan untuk memiliki persepsi yang sama terhadap peran dan tanggungjawab dalam pembangunan masyarakat Islam, agar upaya pembangunan masyarakat Islam yang adil, damai dan sejahtera dapat berjalan lancar. Di samping itu, potensi angkatan kerja dan generasi muda dapat memberi kontribusi kinerja yang nyata terhadap pembangunan bangsa.
b. Masyarakat Islam memiliki tingkat pengetahuan yang komprehensif dan merata terhadap sumber ajaran Islam yakni Al-Qur'an dan Al-Hadits. Hal yang sama juga diharapkan terjadi pada pendidikan formal dan non-formal mereka secara umum.
c. Masyarakat Islam menguasai teknologi komunikasi dan informasi serta bahasa asing, sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan interaksi antara bangsa dalam memanfaatkan peluang-peluang global, pemasaran, investasi dan pemulihan dan peningkatan citra paradaban bangsa dalam masyarakat dunia.
d. Masyarakat Islam yang mempunyai semangat dan keterampilan kewirausahaan dalam menangkap dan memanfaatkan peluang-peluang ekonomi. Secara

mendasar dimulai dengan kegiatan wirausaha muda (*young entrepreneurship*) dalam program prioritas pembinaan pemuda.

e. Pengembangan SDM sudah fokus pada pembentukan pemimpin profesional religius yang memiliki enam tabiat luhur. Pengembangan SDM Profesional Religius ditetapkan tersendiri dalam MUNAS VII LDII.

3.2 Sumberdaya lainnya

a. Sumberdaya domestik seperti sumberdaya alam, budaya dan sosial perlu dikelola secara profesional sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
b. Akses terhadap kegiatan dan peluang berusaha perlu ditingkatkan agar masyarakat Islam khususnya dan masyarakat luas pada umumnya dapat memanfaatkannya secara optimal.
c. Akses terhadap permodalan yang berbasis syariah juga perlu dibuka lebar bagi masyarakat sehingga pemanfaatannya dalam meningkatkan kesempatan berusaha dapat difasilitasi.
d. Pemanfaatan sumberdaya domestik seperti sumberdaya alam, budaya dan sosial dalam memajukan tingkat keadilan dan kesejahteraan masyarakat Islam khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

III. VISI DAN MISI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

A. Visi

Sejalan dengan tugas pokok, fungsi dan analisis pekembangan lingkungan strategis di atas, maka Lembaga Dakwah Islam Indonesia menetapkan visi sebagai berikut :

Menjadi organisasi dakwah Islam profesional yang mampu mewujudkan manusia Indonesia yang tekun beribadah kepada Allah SWT, berakhlakul karimah, memakmurkan bumi, dan membangun masyarakat madani yang

kompetitif berbasis tabiat jujur, amanah, kerja keras dan hemat, rukun, kompak dan kerjasama yang baik.

B. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi Lembaga Dakwah Islam Indonesia adalah:

Memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa dan negara melalui dakwah, pengkajian, pemahaman dan penerapan ajaran Islam yang dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan dan terintegrasi sesuai peran, posisi, tanggung jawab profesi sebagai komponen bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mendorong semangat ummat Islam untuk mendapatkan ridho Allah dengan mengamalkan Al-Qur'an dan Al-Hadits dalam berbagai segi kehidupan dengan dilandasi akhlakul karimah.
2. Meningkatkan kompetensi pengelola dan sasaran dakwah dengan mengembangkan potensi penguasaan IPTEK secara seimbang untuk kemaslahatan kehidupan dunia dan akhirat.
3. Meningkatkan upaya pelaksanaan prosedur dan tata kerja organisasi moderen yang terukur dengan efektif dan efisien.
4. Meningkatkan kontribusi kepada negara, bangsa dan agama dalam upaya pengamalan falsafah Pancasila, pelestarian UUD-RI 1945 dan mempertahankan tetap tegaknya NKRI.
5. Meningkatkan motivasi masyarakat berperanserta dalam penegakan demokrasi yang bermartabat dalam upaya penegakkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*.

Strategi untuk pencapaian Misi tersebut, akan dilakukan upaya-upaya sebagaimana diuraikan dalam Pasal 12 Anggaran Dasar LDII dan untuk periode 2011-2016 strategi pencapaian melalui penetapan Kebijakan Program pada Renstra 2011-2016.

C. Nilai-Nilai

Dalam menjalankan misi guna mencapai visinya, LDII mengembangkan nilai-nilai yang menjadi fondasi bagi setiap kegiatan dan menjadi motivasi utama bagi setiap anggota dan warganya dalam beraktivitas baik internal maupun eksternal organisasi. Nilai-nilai LDII adalah sebagai berikut :

1. Memiliki sikap dasar dan paham keagamaan yang bersumberkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits dengan tujuan untuk membangun kemaslahatan bagi seluruh ummat manusia.
2. Memiliki wawasan nasional dan cinta tanah air untuk menempatkan tujuan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945.
3. Memiliki hati yang terbuka untuk bersikap toleran dan tenggang rasa dalam menghadapi perbedaan pandangan.
4. Memiliki sikap adil, jujur, amanah dan welas asih dalam menjalani perannya baik sebagai individu maupun sebagai warga Negara.
5. Memiliki kompetensi untuk menyeimbangkan tindakan dan perilakunya dalam menjalankan pengabdian kepada Allah, berinteraksi dengan sesama ummat manusia, dan memperlakukan lingkungan hidup dengan bijak.
6. Memiliki kompetensi untuk bersifat moderat dalam merumuskan pendapat, pemikiran dan perbuatan.
7. Memiliki integritas, keberanian dan konsistensi dalam menyuarakan kebenaran meskipun dalam situasi yang sulit.
8. Memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi proses pengambilan keputusan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat.
9. Memiliki komitmen untuk mendukung dan menjalankan keputusan-keputusan organisasi.

Wujud yang lebih konkrit dalam penerapan nilai-nilai tersebut di atas tercermin pada **SDM yang Profesional Religius** (Professional Religius) khususnya dengan mengaktualisasikan unsur *soft skill* berupa 6 (enam) tabiat luhur dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun 6 (enam) tabiat luhur tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. **Jujur (الصِّدْقُ)**
   Kejujuran (*sidiq*) adalah cerminan sebuah kepribadian yang sehat, ibarat bunga adalah melati, putih, bersih, indah dan menebarkan bau harum disekitarnya, dan semua orang tentu senang melihat dan ingin menciumnya.

Firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ * سورة التوبة 119

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian berada bersama orang-orang yang jujur.*" (QS. Al. Baqarah: 119).

Sabda Rasulallah SAW:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيْقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِيْ إِلَى الْفُجُوْرِ، وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب

Artinya: *"Tetapilah kejujuran, sesungguhnya jujur itu menunjukkan kepada perbuatan baik, dan sesungguhnya perbuatan baik itu menunjukkan kepada surga, dan tidak henti-hentinya seseorang berbuat jujur dan bersungguh-sungguh berusaha jujur, sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang ahli jujur, dan jauhilah dusta, sesungguhnya dusta itu menunjukkan pada neraka dan tidak henti-hentinya seseorang itu berdusta dan bersungguh-sungguh untuk dusta, sehingga ditulis di sisi Allah sebagai pendusta."*

2. **Amanah (اَلْأَمَانَةُ)**
   Amanah adalah sikap pribadi seseorang yang bisa dipercaya, dan menjaga kepercayaannya itu, tidak berkhianat (tidak merusak kepercayaan) dan menyampaikan hak kepada yang berhak menerima.

Firman Allah :

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا...الآية * سورة النساء 58

Artinya: *"Sesungguhnya Allah memerintah kepada kalian untuk menyampaikan amanat-amanat kepada ahlinya ....."* (QS. An-Nisa': 58).

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَخُوْنُوا اللهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ * سورة الأنفال 27

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan (janganlah) mengkhianati amanat-amanat (yang dipercayakan pada) kalian, sedangkan kalian mengetahuinya."* (QS. Al-Anfal: 27).

Dan juga sabda Rasulallah SAW :

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ * رواه أبو داود في كتاب البيوع, صحيح

Artinya: *"Sampaikanlah amanat pada orang yang mempercayaimu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu."*

3. **Kerja keras dan hemat (اَلْمُجْهِدُ الْمُزْهِدُ)**
   Kerja keras baik urusan dunia maupun urusan akhirat dan hemat adalah sikap pribadi yang mencerminkan senang bekerja keras, semangat, penuh motivasi untuk mencapai keberhasilan dan *kurup*.

Sebagaimana sabda Rasulallah SAW:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُزْهِدُ الْمُجْهِدُ * رواه أحمد في مسنده

Artinya: *"Sungguh beruntung orang yang hidup hemat dan mempersungguh (kerja keras baik urusan dunia maupun urusan akhirat)."*

ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ وَازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ رواه ابن ماجه في كتاب الزهد, صحيح

Artinya: *"Berhati-hatilah dalam urusan dunia, maka Allah mencintaimu, dan berhati-hatilah (termasuk tidak tamak) terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia, maka mereka menyukaimu."*

4. **Rukun (التَّآلُفُ)**
   Kerukunan merupakan nikmat Allah yang sangat mahal harganya, yang dapat langsung dinikmati orang-orang iman dalam kehidupan mereka di dunia setelah mendapat hidayah Allah, sebagaimana Firman Allah :

...وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا... الآية * سورة آل عمران 103

Artinya: "*...Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian, ketika itu kalian bermusuhan kemudian Allah mempersatukan hati kalian sehingga kalian menjadi bersaudara sebab nikmat-Nya...*" (QS. Ali Imrom: 103).

Bibit rukun yang telah tertanam di hati orang iman ini terus tumbuh berkembang menuju kesempurnaan yang akhirnya terwujud sebagaimana digambarkan dalam sabda Rasulallah SAW :

تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى* رواه البخاري في كتاب الأدب

Artinya: "*Engkau (Nu'man) melihat orang-orang iman di dalam saling menyayangi, menyenangi dan saling mengasihi mereka sebagaimana sekujur tubuh bila salah satu anggotanya sakit maka seluruh tubuhnya ikut merasakan sakit, yaitu dengan tidak bisa tidur dan demam.*"

Untuk mewujudkan sikap rukun sesama ummat maka seseorang harus memiliki hati yang taqwa, hati yang bersih, dan lisan yang jujur, serta saling menolong, sebagaimana hadits berikut ini:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: كُلُّ مَخْمُوْمِ الْقَلْبِ، صَدُوْقِ اللِّسَانِ، قَالُوْا: صَدُوْقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ، فَمَا مَخْمُوْمُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ، لاَ إِثْمَ فِيْهِ، وَلاَ بَغْيَ، وَلاَ غِلَّ، وَلاَ حَسَدَ * رواه ابن ماجه في كتاب الزهد, صحيح

Artinya: *Dari Abdullah bin Amer, dia berkata: ditanyakan pada Rasulallah SAW., "Manusia manakah yang paling utama? Beliau menjawab: Tiap-tiap orang yang memiliki hati yang bersih dan lisan yang jujur. Mereka (para sahabat) berkata lisan yang jujur kami mengetahuinya, apakah yang dimaksud dengan hati yang bersih? Beliau menjawab: Hati yang taqwa, yang bersih, yang tidak ada dosa di dalamnya, juga tidak ada durhaka, dendam, dan dengki."*

وَاللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ * رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار

Artinya: *"Allah menolong hamba-Nya selagi hamba itu menolong saudaranya."*

kerukunan adalah faktor utama dalam membentuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

5. **Kompak (الْمُوَاسَاةُ التَّعَاوُنِيَّةُ)**
   Dalam kegiatan-kegiatan yang telah jadi komitmen organisasi, dikerjakan bersama-sama, seiya sekata, dengan giat, senang, gembira, satu kata dengan perbuatan.

Sesama orang iman harus saling memperkuat sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran dan Al-Hadits di bawah ini :

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيْلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوْصٌ الصف 4

Artinya: "*Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dengan berbaris, seakan sesungguhnya mereka itu bangunan yang tersusun kokoh.*" (QS. Ash-Shof: 4).

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا, وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ * رواه البخاري في كتاب المظالم والغصب

Artinya: *"Orang iman terhadap orang iman yang lain sebagaimana bangunan yang bagian-bagiannya saling memperkuat. Dan Nabi menganyam jari-jarinya (ngapurancang)."*

6. **Kerjasama yang baik (حُسْنُ التَّعَاوُنِ)**
   Pentingnya kerjasama yang baik telah lama disadari oleh pakar organisasi dan manajemen, dimana dikatakan bahwa inti manajemen adalah bagaimana mengelola kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi.

Kerjasama yang baik adalah perintah Allah, sebagaimana Firman-Nya :

...وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ... الآية*

سورة المائدة 2

Artinya: "*...Dan tolong menolonglah kalian atas kebaikan dan ketaqwaan dan jangan tolong menolong atas dosa dan permusuhan....*" (QS. Al-Maidah: 2)

Dan sabda Rasulallah SAW:

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا, وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ *رواه

البخاري في كتاب المظالم والغصب

Artinya: *"Orang iman terhadap orang iman yang lain sebagaimana bangunan yang bagian-bagiannya saling memperkuat. Dan Nabi menganyam jari-jarinya (ngapurancang)."*

IV. TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Panjang

1. Tujuan Jangka Panjang

Sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsi LDII maka tujuan jangka panjang yang ingin dicapai adalah :

Meningkatkan kualitas peradaban, hidup, harkat dan martabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta turut serta dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa guna terwujudnya masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila, serta diridhoi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Tujuan Jangka Panjang tersebut dapat dirinci dalam Sasaran dan Indikator Sasaran dan kemudian dalam jangka pendek atau program kerja lima tahunan (Rencana Strategi) ditetapkan beberapa kebijakan, program dan tujuan program.

2. Sasaran Jangka Panjang

1) Meningkatnya kegiatan dakwah Islam secara merata di seluruh tanah air.

Indikator sasaran dalam meningkatkan kegiatan dakwah di seluruh tanah air adanya keberhasilan dari upaya pengembangan yang harus dilakukan antara lain (i) meningkatkan legitimasi dan sosialisasi LDII, membangun mekanisme dan tata kerja yang baik, mengambangkan SDM berkualitas, mengembangkan prasarana dan sarana dan menyediakan pendanaan yang memadai baik dana internal LDII maupun sumber pendanaan dari fihak eksternal yang tidak mengikat; melaksanakan advokasi dan sosialisasi tentang tugas pokok dan fungsi serta program kerja organisasi, dengan memanfaatkan ICT; menata Sistem Informasi Manajemen (SIM) LDII dengan memanfaatkan ICT; menyediakan pusat informasi, rancang bangun *software* dan rumah produksi (*production house*) dalam penganekaragaman materi dakwah hasil olahan seni dan kreativitas dakwah berbasis ICT.

2) Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat: (a) Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Islam secara merata, (b) Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Al-Hadits dan referensi lain yang bersumber dari ajaran Islam.

Indikator sasaran yang akan dicermati adalah beberapa keberhasilan dari upaya (i) pengembangan sistem penyelenggaraan pendidikan keagamaan secara baik berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits yang terprogram dan berkelanjutan dengan pelayanan yang holistik pada seluruh tingkatan umur (cabe rawit, muda-mudi, usia dewasa, dan

lanjut usia), (ii) adanya peningkatan kuantitas dan kualitas dakwah Islam untuk masyarakat Islam di seluruh pelosok tanah air Indonesia, sehingga masyarakat lebih mampu meningkatkan kualitas keagamaannya; (iii) adanya peningkatan jumlah dan penyebaran program pendidikan formal dan non-formal yang berkualitas untuk menyangga calon peserta didik yang tidak mampu secara fisik maupun ekonomi; (iv) tersedianya sumberdaya manusia yang profesional religius sehingga mampu mengakses pasar kerja dan atau dunia usaha yang semakin berkembang dan berubah setiap saat.

3) Meningkatnya kapasitas partisipasi pembangunan.

Indikator sasaran yang harus kita cermati adalah (i) terselenggaranya kerjasama yang berbasis kesetaraan dan saling menguntungkan, serta terbangunnya pola kemitraan dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM) melalui berbagai upaya peningkatan pemanfaatan sumberdaya LDII. (ii) adanya manfaat yang diambil dari penerapan konsep pengarus-utamaan gender sehingga ada peningkatan kontribusi yang setara dan berkeadilan bagi muslimah khususnya dalam penerapan fungsi sosok ibu dalam pembinaan karakter bangsa yang merupakan prioritas pembangunan nasional. (iv) adanya peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial terhadap masyarakat miskin, korban bencana alam dan masyarakat yang kurang beruntung lainnya; (v) terbangunnya peran serta masyarakat dalam peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat. (vi) Adanya kepedulian terhadap peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup baik itu buatan maupun alami.

4) Meningkatnya kerukunan beragama dan kesetia-kawanan sosial.

Indikator sasaran yang harus kita cermati adalah antara lain (i) terbangunnya berbagai program kerjasama dan persaudaraan, program peningkatan wawasan kebangsaan dan rasa kebanggaan nasional, dan program peningkatan kesadaran,

kepekaan dan kesetiakawanan sosial secara berencana dan berkelanjutan dalam peningkatan ukhuwah Islamiah, wathoniah dan basyariah. (ii) terselenggaranya kehidupan beragama yang baik terutama (a) dalam hal kerukunan diantara sesama ummat beragama dan pemerintah (tri-kerukunan ummat beragama), (b) pemberdayaan kehidupan beragama untuk membangun masyarakat madani yang maju, berkeadilan dan sejahtera yang diridhoi oleh Allah SWT.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Pendek

Tujuan dan sasaran jangka pendek tersebut adalah tujuan yang ingin dicapai pada periode lima tahun (2011-2016), sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

1) Mengembangkan sarana dan prasarana organisasi dan kualitas SDM melalui kegiatan yang fokus pada pengembangan administrasi organisasi dalam upaya mencapai tujuan dakwah dan pengembangan SDM (Kepemimpinan berkarakter dan berakhlaqul karimah).

Indikator sasaran yang ingin dicapai adalah adanya perkembangan pembuatan sarana dan prasarana organisasi dan kualitas SDM melalui kegiatan yang fokus pada pengembangan administrasi organisasi.

2) Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia.

Indikator sasaran meliputi kegiatan-kegiatan yang harus dapat diselenggarakan dengan baik dalam (i) Pengembangan kepemimpinan berkarakter, (ii) Peningkatan qualitas SDM yang berkhlakul karimah menuju perwujudan SDM yang profesional religius, dan (iii) Pembinaan generasi penerus. Secara rinci kegiatan ini dapat dilihat pada Lampiran Matrik 2. Keterkaitan antara kebijakan, tujuan dan sasaran program.

3) Mengembangkan dan menerapkan konsep dakwah dengan berbasis pada perencanaan yang baik dan berkelanjutan (menyusun berbagai buku pedoman).

Indikator sasaran keberhasilan dalam mempersiapkan dan menerapkan berbagai pedoman (i) Penyusunan Pedoman Ibadah (ii) Penyusunan Pedoman Dakwah Islam, (iii) Menerapkan Penyusunan Konsep Dakwah berbasis "*Mother Functionality Education Centered*" (Pendidikan dengan fokus perhatian pada fungsi sosok ibu); (iv) Pengembangan Buku Pedoman/Narasi Besar "Meningkatkan Upaya Pengembangan SDM Profesional Religius", (v) Menerapkan Konsep Penanganan Bencana (*Disaster Management*), (vi) Menerapkan Konsep Penghijauan Nasional LDII *Go Green* pada tataran yang lebih luas termasuk *Teen Go Green*, (vii) Menerapkan Konsep Koperasi Mandiri ummat berbasis Ekonomi Syariah, (viii) Menerapkan Konsep Penerapan ICT dan Konsep Internet Sehat, (ix) Mengembangan pembinaan kepemudaan, antara lain kaderisasi.

4) Mengembangkan Kelembagaan.

Indikator sasaran yang diharapkan adalah adanya pengembangan kelembagaan pada kelembagaan organisasi kemasyarakatan LDII berupa beberapa majelis/forum antara lain *Majelis Istinbath wal Irsyad* (مجلس الاستنباط والإرشاد), majelis guru, forum komunikasi pondok pesantren, organisasi otonom kepemudaan dan olah raga, forum komunikasi penyelenggara dan bimbingan haji, badan tentang ekonomi syariah, pusat pengembangan ICT dan pencitraan, lembaga konsultasi dan bantuan hukum, kelompok kerja yang mewadahi relawan, kelompok kerja himpunan pengusaha, kelompok kerja kepakaran, dan kelompok kerja pemberdayaan perempuan.

2. Tahap Pelaksanaan

1) Meningkatkan kerjasama dalam upaya penciptaan lingkungan yang lebih kondusif untuk pelaksanaan dakwah Islam.

Indikator sasaran adanya kerjasama dalam hal: meningkatkan aksesibilitas kepada sumber pendanaan di sektor formal pemerintah, (ii) adanya sosialisai internal dan eksternal tentang kepastian hukum tentang legalitas LDII, (iii) adanya penciptaan iklim yang kondusif dalam berbagai pelaksanaan metode dakwah, (iv) peningkatan kemampuan LDII sebagai fasilitator, penengah, dan pelaksana konsep hubungan ormas dan pemerintah, (v) adanya upaya meneruskan kegiatan yang telah berjalan pada 2005-2010.

2) Membangun komitmen semangat dan tanggungjawab dalam peningkatan kualitas SDM organisasi pada setiap level organisasi.

Indikator sasaran adanya peningkatan kualitas SDM dengan indikator (i) adanya peningkatan komitmen pengabdian kepada organisasi antara lain melalui pelatihan SDM, *Benchmarking*, Tata Kelola Organisasi, (ii) adanya hasil peningkatan kualitas SDM dalam penyelenggaraan penerapan ICT untuk *monitoring* dan evaluasi di semua level organisasi: Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, (iii) adanya hasil peningkatan kualitas SDM menuju pembentukan SDM yang Profesional Religius, (iv) adanya hasil peningkatan kualitas SDM Pemberdaya Usaha Kredit Mikro melalui usaha bersama mengarah pada model koperasi yang berbadan hukum, pengayaan modal usaha dan pengayaan sistem usaha dan jenis usaha, (v) adanya hasil pembinaan Sosok Ibu (*Mother Funtionality Education Centered*) dalam rangka pembangunan karakter bangsa yang baik dan ummat Islam yang taqwa, cerdas, kreatif dan produktif.

3) Meningkatkan Peran Serta Sosial dan Kemasyarakat sebagai Peningkatan Kapasitas LDII dalam Partisipasi Pembangunan.

Indikator sasaran yang ingin dikembangkan adalah (i) meningkatkan kapasitas LDII berpartisipasi dalam pembangunan, (ii) berkembangnya program yang merupakan kemasan kegiatan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, (iii) adanya program kegiatan dakwah

berdasarkan pendekatan solutif (iv) pengembangan kegiatan dakwah menciptakan kapasitas protektif

4) Membangun harmonisasi dukungan struktural dan membangun sistem pengelolaan informasi berbasis ICT yang terarah dan profesional dalam pelaksanaan dakwah LDII.

Indikator sasaran yang ngin dicapai adalah adanya upaya pengembangan (i) advokasi dan kemitraan dengan pemerintah, (ii) adanya percepatan pertumbuhan ekonomi ummat (UB) dengan pengembangan kesepakatan *service level agreement* dengan pemerintah (peningkatan akses kepada lembaga keuangan syari'ah), (iii) adanya upaya pengembangan ekonomi mandiri dengan koperasi yang berbadan hukum sebagai *sebagai trading house* yang profesional, (iv) adanya upaya pengembangan/pembenahan kurikulum pesantren, pelatihan Da'i Bersertifikat dan lain sebagainya yang dianggap perlu, (v) adanya Penerapan ICT dalam hal pengembangan intensitas dan kualitas dakwah (penggunaan ICT Sehat) dan termasuk diseminasi informasi bisnis dalam pengembangan usaha bersama dan pengembangan koperasi mandiri ummat.

5) Meningkatkan kerukunan beragama dan kesetia-kawanan sosial.

Indikator sasaran yang ingin dicapai adalah adanya upaya peningkatan kerukunan dan kesetiakawanan sosial melalui (i) berbagai program kerjasama dan persaudaraan, program peningkatan wawasan kebangsaan dan rasa kebanggaan nasional, dan program peningkatan kesadaran, kepekaan dan kesetia-kawanan sosial secara berencana dan berkelanjutan dalam peningkatan ukhuwah Islamiah, wathoniah dan insaniah/basyariah. (ii) terselenggaranya kehidupan beragama yang baik terutama a) dalam hal kerukunan inter dan antar sesama ummat beragama dan pemerintah (tri-kerukunan ummat beragama), b) pemberdayaan kehidupan beragama untuk membangun masyarakat madani yang maju, berkeadilan dan sejahtera yang diridhoi oleh Allah SWT

V. CARA UNTUK MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Program Kerja Lima Tahunan (Renstra) merupakan batu pencatan *(mile stones)* untuk mencapai Visi dan Misi Organisasi. Program Kerja Lima Tahunan disebut juga sebagai **Program Kerja Jangka Pendek** yang mempunyai tujuan dan sasaran jangka pendek sebagaimana telah diuraikan pada Bab IV di atas.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka pendek tersebut maka ditetapkan berbagai **Kebijakan Program** berupa kumpulan kegiatan yang secara sistematis dan terpadu akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan oleh satu departemen atau lebih yang sesuai dengan kompetensi departemen dalam organisasi kemasyarakatan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi organisasi.

A. *Kebijakan*

Adapun Kebijakan Program sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

1. Kebijakan peningkatan kinerja organisasi: pada tahap persiapan ini dilakukan upaya mengembangkan sarana dan prasarana organisasi yang diperlukan dalam kegiatan dakwah.
2. Kebijakan peningkatan kualitas sumberdaya manusia: mempersiapkan atau menyusun pedoman-pedoman pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam peningkatan kualitas SDM.
3. Kebijakan peningkatan pengembangan konsep: mempersiapkan atau menyusun pedoman-pedoman yang diperlukan dalam melaksanakan dakwah.
4. Kebijakan penguatan kelembagaan: mempersiapkan adanya penbentukan kelembagaan yang akan berfungsi untuk penguatan struktur organisasi dalam melaksanakan dakwah.

b. Tahap Pelaksanaan

1. Kebijakan untuk membangun kerjasama dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pelaksanaan dakwah Islam.
2. Kebijakan untuk membangun komitmen semangat dan tanggungjawab dalam peningkatan kualitas SDM organisasi pada setiap level organisasi.
3. Kebijakan peningkatan peran serta sosial dan kemasyarakat sebagai peningkatan kapasitas LDII dalam partisipasi pembangunan.
4. Kebijakan harmonisasi dukungan struktural dan membangun sistem pengelolaan informasi berbasis ICT yang terarah dan profesional dalam pelaksanaan dakwah LDII
5. Kebijakan peningkatan kerukunan hidup inter dan antar ummat beragama

B. Program

Program-program yang akan dilaksanakan pada periode 2011-2016, adalah sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan

1. Program pengembangan data sarana prasarana dan administrasi organisasi.

Program ini bertujuan untuk melengkapi kelengkapan data dan perbaikan administrasi organisasi antara lain : (i) Pembuatan *database* aset fisik organisasi, (ii) Registrasi Administrasi Organisasi (kepengurusan lengkap per provinsi pada semua level: DPD Prov, Kabupaten/Kota, PC/PAC, (iii) Pembuatan *database* informasi tentang lokasi, data foto tentang masjid, pondok pesantren, rumah jujugan (dengan alamat dan no, telepon), (iv) Pendataan alamat tokoh-tokoh seluruh *stakeholder* LDII di pusat: pemerintah, tokoh politik, tokoh agama, tokoh adat, pimpinan ormas Islam lain, (v) Pengembangan pembangunan sarana dan prasarana: masjid, mushola, poskestren, pondok-pondok pesantren, (vi)

Pembangunan rumah produksi dalam upaya pengembangan promosi dakwah LDII melalui pemanfaatan ICT, (vii) Pengadaan fasilitas olah raga.

2. **Program peningkatan kualitas sumberdaya manusia.**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengurus organisasi yang terdiri atas upaya pengembangan kepemimpinan berkarakter, peningkatan penerapan akhlakul karimah, dan meningkatkan pembinaan generasi penerus

Banyak hal yang dapat dilakukan antara lain (i) melaksanakan pendidikan dan pelatihan pengembangan kepemimpinan berkarakter (pendidikan kepanduan, materi etika, pemahaman dan penerapan falsaah Pancasila dan UUD 1945 dalam kontribusi pada pembangunan bangsa dan tugas tanggungjawab serta kontribusinya pada bela bangsa, negara dan agama, (ii) melaksanakan pendidikan dan pelatihan penerapan akhlaqul karimah atau berbudiluhur (membangun akhlak yang baik melalui penerapan konsep pemanfaatan fungsi-fungsi sosok ibu). (iii) Melaksanakan pengembangan pencapaian program Tri-Sukses (berilmu, berakhlaqul karimah, dan mandiri ekonomi) dalam pembinaan generasi penerus, (iv) Penerapan Tri-Sukses dalam seluruh tahapan kehidupan sebagai dasar menuju SDM yang **Profesional Religius** (yang berilmu, berakhlaqul karimah, dan mandiri) yang merupakan strategi utama (*grand strategy*) pembinaan SDM.

3. **Program pengembangan dan penerapan konsep dakwah dengan berbasis pada perencanaan pelaksanaan dakwah.**

Program ini bertujuan antara lain (i) melaksanakan penyusunan buku pedoman ibadah dan penerapannya, (ii) melaksanakan penyusunan buku pedoman dakwah dan penerapannya, (iii) melaksanakan penyusunan konsep dakwah berbasis pemanfaatan fungsi-funfsi sosok ibu (*Mother Functionality Education Centered*) dan *road map* penerapannya, (iv) menyusun dan menerapkan konsep penanganan bencana (*disaster management*), menyusun dan

menerapkan konsep penghijauan nasional LDII *Go Green* pada tataran yang lebih luas dan *road map* penerapannya, (v) Menyusun dan menerapkan konsep koperasi mandiri ummat berbasis ekonomi syariah dan road map penerapannya, (vi) menyusun dan menerapkan sistem informasi manajemen berbasis ICT dan *road map* penerapannya , (vii) menyusun dan menerapkan konsep internet sehat, dan penyelenggaraan rumah produksi (*Production House*).

4. Program Penguatan Kelembagaan.

Program ini bertujuan untuk membentuk berbagai majelis, forum, lembaga dan berbagai hal kelengkapan kelembagaan untuk memperkuat kinerja organisasi dalam melaksanakan dakwah, yaitu membentuk dan mengembangkan fungsi *Majelis Istinbath wal Irsyad* (مجلس الاستنباط والإرشاد), Majelis Guru/Pengajar, Forum Komunikasi Pondok Pesantren LDII, Lembaga Otonom Kepemudaan dan Olah Raga, Forum Komunikasi Pembimbing Haji (FKPH), Lembaga Otonom Ekonomi Syariah, Kelembagaan sistem informasi manajemen (SIM) berbasis ICT, lembaga bantuan hukum, lembaga yang mengembangkan fungsi relawan LDII, lembaga yang mengembangkan fungsi ekonomi syari'ah, lembaga kepakaran dan lembaga pemberdayaan perempuan.

b. Tahap Pelaksanaan .

1. Program peningkatan kerjasama dalam upaya penciptaan lingkungan yang kondusif dengan fokus pada pengembangan kegiatan dakwah yang mendapatkan dukungan lingkungan external yang kondusif.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan berbagai upaya kerjasama dan sosialisasi tentang keberadaan LDII dalam rangka pengembangan lingkungan dan iklim, antara lain (i) meningkatkan kerjasama dengan meningkatkan upaya aksesibilitas pendanaan di sektor formal pemeritah dan upaya

meningkatkan kontribusi LDII di berbagai bidang pembangunan (ii) sosialisai internal dan eksternal tentang kepastian hukum legalitas yang ada dan peningkatannya: advokasi dan promosi LDII, (iii) meningkatkan kemampuan LDII sebagai fasilitator, penengah, dan pelaksana konsep hubungan ormas dan pemerintah yang *win-win solution* berdasarkan konsep dasar Islam sebagai *rahmatan lil alamiin* dan lain-lain.

2. **Program penguatan komitmen peningkatan kualitas SDM penyelenggara organisasi pada berbagai level organisasi.**

Program ini bertujuan antara lain (i) meningkatkan kualitas SDM untuk mampu melakukan: *benchmarking*, tata kelola organisasi melalui *roadshow* dan kolaborasi, (ii) meningkatkan kualitas SDM untuk mampu menerapkan ICT dengan analisis dan monitoring pada pelaksanaaan ICT di semua level organisasi: terutama Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, (iii) meningkatkan kualitas SDM untuk mampu menyelenggarakan rumah produksi (*production house*) untuk menghasilkan sarana dakwah, (iv) meningkatkan kualitas SDM pemberdaya usaha mikro mengarah pada model koperasi yang berbadan hukum, pengayaan modal usaha dan pengayaan sistem dan jenis usaha, (v) meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan, seminar dan lokakarya pembinaan fungsi sosok ibu (*Mother Funtionality Education Centered*) dalam rangka pembangunan karakter bangsa yang baik dan ummat Islam yang taqwa, cerdas, kreatif dan produktif, (vi) meningkatkan keberhasilan upaya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), (vii) Meningkatkan kepedulian sosial kemasyarakatan dengan melatih relawan bencana untuk menjadi pelaksana bimbingan psikologis pada korban bencana.

3. **Program peningkatan peran serta sosial dan kemasyarakatan sebagai peningkatan kapasitas LDII dalam partisipasi pembangunan.**

Program ini bertujuan untuk pemberdayaan potensi LDII sebagai mitra kerja pemerintah melaksanakan pembangunan, antara lain dengan (i) mengembangkan kegiatan yang

merupakan kemasan yang memenuhi kebutuhan dan pengembangan persepsi positif masyarakat terhadap LDII (Narasi Besar LDII), (ii) mengembangkan Sumberdaya Manusia profesional religius (*professional religious*) yang mampu melaksanakan kelancaran ibadah *mahdhoh* dan *ghoiru mahdhoh*, (iii) mengembangkan SDM dalam hal (a) Pembangunan karakter bangsa melalui usaha karakter building: bina kesehatan ibu lahir dan batin sebelum dan setelah melahirkan, pendidikan usia dini dan setelah dewasa diarahkan pada pendidikan falsafah/ideologi bangsa dan pendidikan bela bangsa, (b) mengembangkan karakter masyasakat yang mempunyai semangat bekerja keras dan tirakat banter, sebagai ikon dan jargon pendidikan moral warga LDII yang perlu disosialisasikan sehingga diteladani masyarakat pada umumnya, (c) mengembangkan etos kehidupan menuju keteladanan insani yang baik: guru teladan, karyawan teladan, dan lain-lain, mengembangkan SDM yang mampu menangani program penanganan kesenjangan ekonomi masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan (*poverty alleviation*) yang merupakan kegiatan yang tak pernah sepi dan harus dipilih sebagai kegiatan prioriotas bangsa Indonesia, (d) mengembangkan etika untuk peningkatan kehidupan bertetangga yang baik (realisasi kepemimpinan berkarakter dan berakhlaqul karimah pada tingkat rumah tangga) dan (e) mengembangkan kesehatan masyarakat melalui program-program terarah dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah dan/atau ormas Islam lain, (f) meningkatkan kegiatan pembinaan pemuda melalui program bidang kewirausahaan muda (*Young Entrepreneurship*), bidang kepramukaan, bidang keolahragaan dan bidang pembinaan generasi muda, (g) mengembangkan kegiatan dakwah berdasarkan pendekatan solutif antara lain dengan melalui pelaksanaan dakwah *bil-hal*, dan (h) Mengembangkan kegiatan dakwah untuk menciptakan kapasitas protektif terhadap martabat bangsa termasuk perlindungan masyarakat dengan membangun lembaga bantuan hukum.

4. Program harmonisasi dukungan struktural dan membangun sistem pengelolaan informasi berbasis ICT

yang terarah dan profesional dalam pelaksanaan dakwah LDII.

Program ini bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan dakwah dengan meningkatkan konsolidasi, peningkatan upaya kearah pertumbuhan kesejahteraan ummat dan pemanfaatan sistem informasi manajemen (SIM) berbasis ICT dalam kegiatan dakwah.

Kegiatan dalam program ini antara lain (i) mengembangkan harmonisasi kegiatan dengan konsolidasi internal orgasnisasi bulanan, tiga bulanan dan enam bulanan bagi seluruh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), (ii) mengembangkan percepatan pertumbuhan kersejahteraan ummat, mengeradikasi tingkat kesenjangan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kompetensi kualitas SDM yang sehat, kreatif dan produktif melalui pengembangan ekonomi mandiri ummat, (iii) mengembangkan kesepakatan *service level agreement* dengan pemerintah untuk pelayanan usaha kecil dan menengah melalui kredit modal kerja dengan model ekonomi syariah, (iv) mengembangkan ekonomi mandiri dengan inisiasi pemberdayakan UB/koperasi wkonomi madiri ummat sebagai *trading house* yang profesional, (v) mengembangkan advokasi dan program aksi: pembenahan kurikulum pesantren, pelatihan Da'i Bersertifikat MUI, Depdiknas, atau Kementerian Agama, (vi) mengembangkan pelaksanaan konsep dakwah dengan konsentrasi pembinaan kepada sosok Ibu (*Mother Funtionality Education Centered*) dalam rangka penmbangunan karakter bangsa yang baik dan ummat Islam yang taqwa, cerdas, kreatif dan produktif, (vii) mengembangkan program aksi penanganan bencana yang baik pada setiap tahapan, (viii) mengembangkan program pembangunan sistem informasi manajemen (SIM) dan (ix) penyelenggaraan rumah produksi (*production house*) untuk berbagai kegiatan dakwah.

5. **Program peningkatan kerukunan beragama dan kesetiakawanan sosial.**

Program ini bertujuan untuk (i) meningkatkan ukhuwah Islamiah, wathoniah dan insaniah/basyariah, (ii) meningkatkan harmonisasi dalam melaksanakan dakwah Islam menciptakan ukhuwah islamiyah dan persaudaraan yang lebih baik: baik pada level pribadi-pribadi dan ormas-ormas maupun pada tingkat pemerintahan, (iii) Meningkatkan kerjasama yang baik secara rukun dan kompak dan meningkatkan penyelesaian permasalahan secara musyawarah dan mufakat dengan tujuan untung menguntungkan para fihak; (iv) meningkatkan kerjasama ummat seagama mapun antar ummat beragama antara lain: (a) meningkatkan kegiatan kerjasama dalam rangka menjaga kerukunan ummat, (b) meningkatkan kerjasama dalam bentuk MOU maupun secara tidak tertulis dalam kepedulian sosial: menghadapi masalah kesenjangan ekonomi masyarakat (kemiskinan), penanganan bahaya narkotika, penanganan bencana alam dan lain-lain.

C. Kegiatan.

Setelah selesai MUNAS VII LDII akan dilaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dalam rangka menyusun program kerja tahunan (Renja). Penyusunan kegiatan tahunan selama periode tahun 2011-2016 yang ditetapkan dalam RAKERNAS tersebut akan menjadi bahan acuan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LDII dan Dewan Pimpinan Daerah LDII Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kegiatan program kerja tahunannya.

Program-program yang merupakan rencana implementasi kegiatan dakwah LDII sebagaimana diuraikan dalam Renstra (2011-2016) langsung dilaksanakan sejak Keputusan MUNAS ditetapkan tanpa menunggu pelaksanaan Rakernas. Pada saat Rakernas akan disusun (1) program aksi untuk mencapai sasaran program (*planned actions to acieve objectives*) dari program-program yang direncanakan pada Renstra 2011-2016, (2) penetapan indikator keberhasilan program dan (3) tingkat keberhasilan yang diinginkan dan waktu pelaksanaan (*time line*) yang diperlukan.

Lampiran 1. Rencana Strategi LDII 2011-2016

Visi

Menjadi organisasi dakwah Islam profesional yang mampu mewujudkan manusia Indonesia yang tekun beribadah kepada Allah SWT, berakhlakul karimah, memakmurkan bumi, dan membangun masyarakat madani yang kompetitif berbasis tabiat jujur, amanah, kerja keras dan hemat, rukun, kompak dan kerjasama yang baik

Misi

Memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa dan negara melalui dakwah, pengkajian, pemahaman dan penerapan ajaran Islam yang dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan dan terintegrasi sesuai peran, posisi, tanggung jawab profesi sebagai komponen bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

MATRIKS 1.
Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Panjang dengan Kebijakan, Program serta Tujuan Jangka Pendek

A. Tahap Persiapan

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	
	Uraian	Indikator		Nama Program	Tujuan
Peningkatkan kualitas peradaban, hidup, harkat dan martabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta turut dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa guna terwujudnya masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila, yang diridhoi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*	1. Meningkatnya kegiatan dakwah Islam secara merata di seluruh tanah air	1. Terbentuknya Organisasi LDII yang *legitimate* dan terakreditasi dengan baik diberbagai level pemerintahan di seluruh Indonesia (Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa) 2. Terbangunnya mekanisme dan prosedur kerja organisasi pada seluruh tingkatan organisasi (DPP, Dewan Pimpinan Wilayah [DPW] Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah [DPD] Kab/Kota, PC dan PAC 3. Tersedianya SDM organisasi yang handal untuk memutar roda orgasisasi moderen LDII 4. Tersedianya prasarana dan sarana kerja organisasi yang lebih memadai 5. Tersedianya dana dari sumber resmi yang tidak mengikat;	1. Kebijakan peningkatan kinerja organisasi	1. Program Pengembangan fisik dan administrasi organisasi : Pembuatan *database* aset fisik organisasi (1) Registrasi administrasi organisasi (kepengurusan lengkap per provinsi pada semua level : DPW Prov, DPD Kab/Kota, PC/PAC (2) Pembuatan *database* informasi tentang lokasi, data photo tentang masjid, pondok pesantren, rumah jujugan dengan alamat dan nomor telepon (3) Pendataan alamat tokoh-tokoh seluruh *stakeholders* LDII di pusat : pemerintah, tokoh politik, tokoh agama, tokoh adat, dan pimpinan ormas Islam lain (4) Pembentukan dan *launching* Pusat Pengkajian Pendampingan Pengembangan Organisai dan SDM (*Center of Excellent*) di Rumah Besar /Kantor Pusat LDII Senayan : Rumusan program–program pengkajian, pendampi-	Program dan tujuan dapat dilihat pada Matriks 2

MATRIKS 1
(Lanjutan)

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	
	Uraian	Indikator		Nama Program	Tujuan
		6. Terlaksananya advokasi dan sosialisasi melalui kegiatan penerangan dan publikasi (media cetak dan elektronik) tentang tugas pokok dan fungsi serta program kerja organisasi; 7. Tertatanya sistem informasi managemen LDII melalui pembangunan jejaring komunikasi dan informasi (*hardware* dan *software*) yang mampu mengkondisikan persepsi masyarakat luas secara positif dan kondusif untuk mengungkit (*leverage*) kinerja organisasi LDII di seluruh wilayah		ngan, pelatihan dan program aksi (5) Pengembangan pembangunan sarana dan prasarana : masjid, mushola, poskestren, pondok pesantren. (6) Pembangunan rumah produksi dalam upaya pengembangan promosi dakwah LDII melalui pemanfaatan ICT. (7) Pengadaan fasilitas olah raga (lapangan bola, tenis lapangan, bola voli, tenis meja, *jogging court*) dan ruang fitnes	
	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat : • Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Islam secara merata • Meningkatnya pemahaman dan	1. Adanya sistem penyelenggaraan pendidikan keagamaan secara baik berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits 2. Adanya peningkatan kuantitas dan kualitas dakwah Islam untuk masyarakat Islam di seluruh pelosok tanah air Indonesia, sehingga masyarakat lebih mampu meningkatkan aksesibilitas terhadap materi dakwah 3. Adanya peningkatan jumlah dan penyebaran program pendidikan	2. Kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, meliputi : i. Pengembangan kepemimpinan berkarakter ii. Peningkatan penerapan akhlakul karimah	2. Program pengembangan SDM melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan forum-forum diskusi pada berbagai tingkatan sehingga mampu untuk melakukan kegiatan dakwah, sebagai berikut: (1) Pendidikan dan pelatihan pengembangan kepemimpinan berkarakter (materi etika, Pancasila, UUD 1945) (2) Pendidikan dan pelatihan penerapan akhlaq berbudi luhur	Program dan tujuan dapat dilihat pada Matriks 2

MATRIKS 1.
(Lanjutan)

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	
	Uraian	Indikator		Nama Program	Tujuan
	penerapan nilai-nilai Islam yang berasal dari sumber-sumber ajaran Islam yang murni	formal dan non-formal yang berkualitas untuk menyangga calon peserta didik yang tidak mampu secara fisik maupun ekonomi terhadap fasilitas pendidikan pemerintah; 4. Tersedianya Sumberdaya Manusia yang ahli (*specialist*) dan profesional yang mempunyai keunggulan kompetitif sehingga mampu akses ke pasar kerja yang semakin berkembang dan berubah setiap saat;	iii. Pembinaan generasi penerus	(ahklak yang baik, penerapan konsep pemanfaatan sosok ibu). (3) Pendidikan pelatihan penerapan konsep Bina Cabe Rawir, PPG dan Cinta Alam Indonesia, dan lain-lain (4) Pengembangan Pemanfaatan Berbagai Metode Dakwah	
			3. Kebijakan peningkatan pengembangan konsep dan road map	3. Program pengembangan dan penerapan konsep dakwah dengan berbasis pada perencanaan (Penyusunan buku atau *road map*) (1) Penyusunan buku pedoman ibadah (2) Penyusunan buku pedoman dakwah (3) Menerapkan konsep dakwah berbasis *Green Dakwah* (4) Program pengembangan dakwah *bil qolam*	Program dan tujuan dapat dilihat pada Matriks 2

MATRIKS 1.
(Lanjutan)

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	
	Uraian	Indikator		Nama Program	Tujuan
				(5) Menerapkan konsep dakwah berbasis " *Mother Functionality Education Centered*" (6) Menerapkan konsep penanganan bencana (*disaster manajemen)* (7) Menerapkan Konsep Penghijauan Nasional LDII Go Green pada tataran yang lebih luas (8) Menerapkan Konsep Koperasi Mandiri Umat berbasis Ekonomi Syariah. Menerapkan ICT dan Konsep Internet Sehat.	
			4. Kebijakan Penguatan Kelembagaan	(1) Program pembentukan *Majelis Istinbath wal Irsyad*, dan sosialisasinya, (2) Program pembentukan Majelis Guru/Pengajar (3) Program pembentukan Forum Komunikasi Pondok Pesantren LDII (4) Program pembentukan organisasi otonom kepemudaan dan olah raga (5) Program pembentukan Forum Komunikasi Pembimbing Haji (FKPH)	Program dan tujuan dapat dilihat pada Matriks 2

MATRIKS 1.
(Lanjutan)

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	
	Uraian	Indikator		Nama Program	Tujuan
				(6) Program pembentukan organisasi ekonomi syariah (7) Membangun ICT dan sistem informasi manajemen (SIM) (8) Program pembentukan lembaga bantuan hukum (9) Program pembentukan relawan LDII (10) Program pembentukan KADIN syariah (11) Program pembentukan kelompok kerja kepakaran *(12)* Program pembentukan kelompok pemberdayaan perempuan	

MATRIKS 1.
(Lanjutan)

B. Tahap Pelaksanaan

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	
	Uraian	Indikator		Nama Program	Tujuan
			1. Kebijakan Peningkatan Kerjasama dalam Upaya Penciptaan lingkungan yang kondusif, (Fokus pada lingkungan dan pengembangan kegiatan dakwah yang mendapatkan dukungan lingkungan eksternal yang kondusif) .	1. Program pembangunan komitmen yang fokus pada pembenahan kualitas kompetensi SDM penyelenggara oganisasi 2. Program pembangunan struktur yang suportif, yaitu fokus pada harmonisasi dukungan struktural organisasi dan membangun sistem pengelolaan informasi yang terarah dan profesional dalam pelaksanaan dakwah LDII 3. Program modernisasi pelaksanaan dakwah, yaitu fokus pada peningkatan kualitas kompetensi dan intensitas pelaksanaan dakwah dalam pencapaian peningkatan kinerja LDII	Program dan tujuan dapat dilihat pada Matriks 2
			2. Kebijakan Peningkatan kualitas SDM penyelenggara organisasi pada berbagai level organisasi	4. Program Peningkatan Komitmen Bersama tentang Peningkatan Kualitas SDM : (1) penyelenggaraan peningkatan komitmen pengabdian pada organisasi : pelatihan SDM, *benchmarking* tata kelola organisasi melalui *road show* dan kolaborasi, (2) penyelenggaraan penerapan ICT dengan analisis dan	Program dan tujuan dapat dilihat pada Matriks 2

MATRIKS 1.
(Lanjutan)

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	
	Uraian	Indikator		Nama Program	Tujuan
				monitoring pada pelaksanaan ICT di semua level organisasi terutama di Pusat (DPP), Provinsi (DPW) dan Kabupaten/ Kota (DPD) (3) penyiapan SDM pemberdaya usaha mikro melalui usaha bersama mengarah pada model koperasi yang berbadan hukum, pengayaan modal usaha dan pengayaan sistem dan jenis usaha, (4) pembinaan sosok ibu (*Mother Funtionality Education Centered*) dalam rangka pembangunan karakter bangsa yang baik dan umat Islam yang taqwa, cerdas, kreatif dan produktif: (5) Pembinaan pemuda : kewirausahaan muda, kepramukaan, keolahragaan dan pembinaan generasi muda pada umumnya.	
	3. Meningkatnya kapassitas partisipasi pembangunan	1. Terselenggaranya kerjasama yang saling menguntungkan dan terbangunnya pola kemitraan melalui berbagai upaya peningkatan	3. Kebijakan peningkatan peran serta sosial dan kemasyarakatan	1. Program pengembangan kegiatan yang merupakan kemasan yang memenuhi kebutuhan dan persepsi masyarakat :	Program dan tujuan dapat dilihat pada Matriks 2

MATRIKS 1.
(Lanjutan)

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	
	Uraian	Indikator		Nama Program	Tujuan
		pemanfaatan sumberdaya LDII dan mitra kerja secara bersinergi dengan baik untuk meningkatkan kinerja organisasi. 2. Adanya manfaat yang diambil dari penerapan konsep pengarusutamaan gender sehingga ada peningkatan kontribusi yang setara dan berkeadilan bagi wanita Islam (muslimah) dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan nasional. 3. Adanya peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial terhadap masyarakat miskin, korban bencana alam dan masyarakat yang kurang beruntung lainnya. 4. Terbangunnya peranserta masyarakat dalam peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat. 5. Adanya kepedulian terhadap peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup baik itu buatan maupun alami.	sebagai peningkatan kapasitas LDII dalam partisipasi pembangunan	(1) penanganan kesenjangan ekonomi masyarakat (*poverty alleviation*) merupakan kegiatan yang tak pernah sepi dan harus dipilih sebagai kegiatan prioriotas, (2) pengembangan ekonomi mandiri. 2. Program pengembangnan kegiatan dakwah berdasarkan pendekatan solutif (dakwah *bil- hal*) (1) penanganan bencana berdasarkan pelayanan prima terhadap penanganan masalah dengan konsep yang benar pada tahapan mitigasi, penanganan tanggap darurat, penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi (2) penanganan pelaksanaan hewan qurban sebagai alat dalam dakwah *bil-hal* (3) penanganan pelaksanaan penghijauan nasional (4) penanganan masalah serapan air dengan pengembangan program biopori, dan lain-lain	

MATRIKS 1.
(Lanjutan)

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	
	Uraian	Indikator		Nama Program	Tujuan
				3. Program pengembangan kegiatan dakwah menciptakan kondisi yang secara langsung maupun tidak langsung membangun LDII menjadi kelembagaan mempunyai kapasitas protektif : (1) Pengembangan lembaga bantuan hukum (2) Pengembangan pelatihan dakwah bersertifikat (kerjasama dengan MUI, Kementrian Agama atau Universitas Islam) (3) Pelestarian kegiatan cinta alam Indonesia untuk bina pemuda sebagai generus bangsa	
	4. Meningkatnya kerukunan beragama dan kesetiakawanan sosial.	1. Terbangunnya berbagai program kerjasama dan persaudaraan, program peningkatan wawasan kebangsaan dan rasa kebanggaan nasional, dan program peningkatan kesadaran, kepekaan dan kesetia-kawanan sosial secara berencana dan berkelanjutan dalam peningkatan *ukhuwah Islamiah*, *wathoniah* dan *insaniah/basyariah*	4. Kebijakan peningkatan kerukunan hidup inter dan antar umat beragama	1. Program peningkatan ukhuwah *islamiah*, *wathoniah* dan *insaniah/basyariah* 2. Program peningkatan kerjasama lintas agama	Program dan tujuan dapat dilihat pada Matriks 2

MATRIKS 1.
(Lanjutan)

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	
	Uraian	Indikator		Nama Program	Tujuan
		2. terselenggaranya kehidupan beragama yang baik terutama : 1) dalam hal kerukunan diantara inter dan antar umat beragama serta pemerintah (tri-kerukunan umat beragama) 2) pemberdayaan kehidupan beragama untuk membangun masyarakat madani yang maju, berkeadilan, maju dan sejahtera yang diridhoi oleh Allah SWT			

MATRIKS 2.
Keterkaitan Kebijakan, Program dan Tujuan Program

A. Tahapan Persiapan

Kebijakan	Program	Tujuan Program
1.Kebijakan pengembangan sarana prasarana	1. Program pengembangan sarana prasarana;	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dakwah: • *Database* asset fisik organisasi • Registrasi administrasi organisasi • *Database* informasi tentang lokasi, data photo tentang masjid, pondok pesantren, rumah jujugan dengan alamat dan no. telepon • Alamat tokoh-tokoh seluruh *stakeholders* LDII di pusat : tokoh pemerintah, tokoh politik, tokoh agama, tokoh adat, pimpinan ormas Islam lain • Pusat Pengkajian Pendampingan dan Pengembangan Organisai dan SDM (*center of excellent*) • Pembangunan sarana dan prasarana : masjid, mushola, poskestren, pondok-pondok pesantren. • Pembangunan rumah produksi • Pengadaan fasilitas olah raga (lapangan bola, tenis lapangan, bola poli, tenis meja, *jogging court* dan ruang fitnes) 2. Menyusun program pembuatan *standard operating procedure* (SOP) termasuk SOP pengembangan institusi sebagai berikut : - SOP pengembangan organisasi kepemudaan LDII - SOP pengembangan organisasi perempuan LDII - SOP pelatihan (berbagai pelatihan: da'I, kepemudaan, kewanitaan) - SOP penyelenggaraan rumah produksi (*production house*) Dan lain-lain yang diperlukan
2.Kebijakan peningkatan kualitas SDM penyelenggara organisasi pada berbagai level organisasi	2. Program pengembangan SDM melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan forum-forum diskusi pada berbagai tingkatan sehingga mampu untuk melakukan kegiatan dakwah	(1) Melaksankan pendidikan dan pelatihan pengembangan kepemimpinan berkarakter (materi etika, Pancasila, UUD 1945) (2) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penerapan akhlaqul karimah atau berbudi luhur (membangun akhlak yang baik melalui penerapan konsep pemanfaatan fungsi sosok ibu) (3) Melaksanakan pendidikan pelatihan penerapan konsep Bina Cabe Rawir, PPG dan cinta alam indonesia, dan lain-lain

MATRIKS 2.
(Lanjutan)

Kebijakan	Program	Tujuan Program
		(4) Melaksanakan pengembangan pencapaian progrram tri-sukses
3. Kebijakan persiapan pengembangan penerapan kegiatan dakwah berbasis perencanaan	3. Program Pengembangan dan penerapan konsep dakwah dengan berbasis pada perencanaan	Tujuan Program: (1) Melaksanakan penyusunan buku pedoman ibadah dan penerapannya (2) Melaksanakan penyusunan buku pedoman dakwah dan penerapannya (3) Melaksanakan penyusunan konsep dakwah berbasis pemanfaatan fungsi-fungsi sosok ibu (*mother functionality education centered*) dan *road map* penerapannya. (4) Menerapkan konsep penanganan bencana (disaster manajemen) (5) Menerapkan konsep penghijauan nasional LDII *Go Green* pada tataran yang lebih luas penerapannya (6) Menerapkan konsep koperasi mandiri umat berbasis ekonomi syariah dan *road map* penerapannya (7) Menyusun sistem informasi manajemen berbasis ICT dan *road map* penerapannya (8) Menyusun konsep dan penerapan internet sehat, dan rumah produksi (*production house*)
4. Kebijakan penguatan kelembagaan	1. Program penguatan kelembagaan	(1) Membentuk *Majelis Istinbath wal Irsyad* (2) Membentuk majelis guru/pengajar (3) Membentuk Forum Komunikasi Pondok Pesantren LDII (4) Membentuk organisasi otonom (Banom) kepemudaan dan olah raga (5) Membentuk Forum Komunikasi Pembimbing Haji (FKPH) (6) Membentuk organisasi otonom ekonomi syariah (7) Membangun ICT dan sistem informasi manajemen (SIM) (8) Membentuk lembaga bantuan hukum (9) Membentukan relawan LDII (10) Membentukan kelembagaan ekonomi syariah (11) Membentuk kelompok kepakaran (12) Membentuk kelompok pemberdayaan perempuan forum komunikasi pondok pesantren LDII

MATRIKS 2.
(Lanjutan)

B. Tahapan Pelaksanaan

Kebijakan	Program	Tujuan Program
1. Kebijakan peningkatan kerjasama dalam upaya penciptaan lingkungan yang kondusif (fokus pada lingkungan dan iklim kegiatan dakwah yang positif bagi lingkungan eksternal)	1. Program pengembangan aktivitas dakwah dengan melalui penciptaan lingkungan kondusif, yaitu fokus pada lingkungan dan iklim kegiatan dakwah yang ramah	(1) Meningkatkan kerjasama dengan upaya pencitraan dengan meningkatkan jumlah upaya aksesibilitas pendanaan di sektor formal pemerintah (dana kopontren, dana *Go Green*, dana pelatihan SDM) untuk peningkatan dakwah bil-hal dan upaya kontribusi LDII di berbagai bidang pembangunan (2) Sosialisai internal dan eksternal tentang kepastian hukum serta legalitas yang ada dan peningkatannya : advokasi dan promosi LDII (3) Melaksanakan budiluhur dalam menciptakan iklim yang konsdusif dalam berbagai pelaksanaan metode dakwah (dakwah *bi-lisan*, dakwah *bil-qolam* dan dakwah *bil-hal*) dengan seminar atau lokakarya (4) Melaksanakan konsep bermasyarakat dengan upaya peningkatan kemampuan LDII sebagai fasilitator, penengah, dan pelaksana konsep hubungan ormas dan pemerintah yang *win-win solution* berdasarkan konsep dasar Islam sebagai *rahmatan lil alamin* (5) Menyukseskan program lanjutan yang telah dilansir pada periode 2005-2010, antara lain:pembinaan cabe rawit (PPG; program penghijauan *Go Green*; fasilitasi kelancaran mudik lebaran dan posko-posko) (6) Program lanjugtan klarifikasi dan komunikasi dengan pemerintah dan ormas lain : silaturahim, audiensi dengan MUI dan *stakeholder* lainnya, gelar jumpa pers, aktivitas ibadah seperti malam qodar, *qiyamu lail* di Masjid Istiqlal, takbir akbar, tebar daging qurban, majalah Nuansa, pelaksanaan seminar-seminar , lokakarya, dan pelatihan-pelatihan
2.Kebijakan peningkatan kualitas SDM penyelenggara organisasi pada berbagai level organisasi	1. Program peningkatan kualitas SDM : (1) Program pelatihan SDM untuk mampu melakukan *benchmarking* tata kelola organisasi melalui *roadshow* dan kolaborasi, (2) Program pelatihan penerapan ICT dengan analisis dan *mo-*	(1) Meningatkan kualitas SDM untuk mampu melakukan *benchmarking* tata kelola organisasi melalui *roadshow* dan kolaborasi (2) Meningatkan kualitas SDM penerapan ICT dengan analisis dan *monitoring* pada pelaksanaaan ICT di semua level organisasi : terutama Pusat (DPP), Provinsi (DPW) dan Kabupaten/Kota (DPD) (3) Meningatkan kualitas SDM penyelenggaraan rumah produksi (*production house)* untuk menghasilkan saeana dakwah (4) Meningatkan kualitas SDM pemberdaya usaha mikro mengarah pada model koperasi berbadan hukum, pengayaan modal usaha dan pengayaan sistem dan jenis usaha

MATRIKS 2.
(Lanjutan)

Kebijakan	Program	Tujuan Program
	nitoring pada pelaksanaaan ICT di semua level organisasi: terutama Pusat (DPP), Provinsi (DPW) dan Kabupaten/ Kota (DPD) (3) Program pelatihan penyelenggaraan rumah produksi (*production house*) untuk menghasilkan sarana dakwah (4) Program penyiapan SDM pemberdaya usaha mikro mengarah pada model koperasi yang berbadan hukum, pengayaan modal usaha dan pengayaan sistem dan jenis usaha (5) Program pelatihan, seminar dan lokakarya pembinaan fungsi sosok ibu (*mother funtionality education centered)* (6) Program pendidikan usia dini • Pendidikan sejak usia dini (konseling, pembinaan, pengembangan pendidikan usia dini) • Menyusun buku manual PAUD	(5) Meningatkan kualitas SDM melalui pelatihan, seminar dan lokakarya pembinaan fungsi sosok ibu (*mother funtionality education centered*) dalam rangka pembangunan karakter bangsa yang baik dan umat Islam yang taqwa, cerdas, kreatif dan produktif: (6) Meningkatkan keberhasilan upaya pendidikan usia dini (7) Meningkatkan kepedulian sosial kemasyarakatan , melatih relawan bencana untuk menjadi pelaksana bimbingan psikologis pada korban bencana (8) Mengembangkan berbagai upaya ke arah pembentukan enam kemampuan yaitu dengan memiliki tabiat jujur, amanah dan kerja keras dan hemat, rukun, kompak dan kerjasama yang baik : (i) Memfungsikan seluruh elemen organisasi sebagaimana tertuang pada AD/ART agar mampu menggerakkan keseluruhan komponen (ii) Menetapkan strategi yang mengakomodir perkembangan lingkungan strategi yang semakin demokratis dan global, dan merumuskan program-program pengembangan sumberdaya manusia (iii)Menetapkan indikator-indikator kompetensi untuk menilai masing-masing dimensi enam tabiat luhur (iv)Melaksanakan *assessment* kemampuan enam tabiat luhur (v) Meningkatkan semangat berinvestasi finansial untuk melaksanakan program pembangunan prasarana, sarana, dan kesehatan, kesejahteraan termasuk keamanan dalam menciptakan situasi yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya enam tabiat luhur

MATRIKS 2.
(Lanjutan)

Kebijakan	Program	Tujuan Program
	• Seminar pedagogi dan psikologi serta penerapannya dalam PAUD • Pelatihan dan pemberdayaan peturba perempuan untuk realisasi program PAUD • Memnfaatkan wadah organisasi komunitas remaja dan mendukung materi acaranya • Melibatkan lima unsur penggerak pendidikan (PPG) untuk setiap kegiatan • Program aksi ibu peduli Balita (IPB) (7) Program pelatihan bimbingan (*counseling*) relawan bencana (pelatihan psikologi untuk relawan) (8) Program pengembangan SDM kearah pembentukan SDM yang memiliki 6 tabiat luhur	
3. Kebijakan peningkatan peran serta sosial dan kemasyarakat sebagai pening-	3. Program peningkatan peran serta sosial dan kemasyarakat sebagai peningkatan kapasitas LDII dalam partisipasi pembangunan	3. 1. Mengembangkan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan persepsi masyarakat : (1) Mengembangkan karakter masyasakat yang mempunyai semangant bekerja keras dan *tirakat banter* (2) Mengembangkan etos kehidupan menuju keteladanan insani yang baik : guru

MATRIKS 2.
(Lanjutan)

Kebijakan	Program	Tujuan Program
katan kapasitas LDII dalam partisipasi pembangunan	3.1. Program pengembangan kegiatan yang merupakan kemasan yang memenuhi kebutuhan dan persepsi masyarakat (1) Program pengembangan karakter masyasakat yang suka bekerja keras dan tirakat banter (2) Program pengembangan etos kehidupan menuju keteladanan insani yang baik : guru teladan, karyawan teladan dan lain-lain (3) Program penanganan kesenjangan ekonomi masyarakat (*poverty alleviation*) yang merupakan kegiatan yang tak pernah sepi dan harus dipilih sebagai kegiatan prioriotas (4) Program pengembangan etika-etika untuk peningkatan kehidupan bertetangga yang baik (5) Program pengembangan kesehatan masyarakat melalui program-program terarah: (i) Program pengurangan kema-tian ibu dan anak (ii) Program pengembangan	teladan, karyawan teladan, dan lain-lain (3) Mengembangkan penanganan kesenjangan ekonomi masyarakat *(poverty alleviation)* yang merupakan kegiatan pengentasan kemiskinan yang tak pernah sepi dan harus dipilih sebagai kegiatan prioriotas (4) Pengembangan etika-etiha untuk peningkatan kehidupan bertetangga yang baik (5) Pengembangan Kesehatan Masyarakat melalui program-program terarah: (i) Program Kesehatan dalam Mengurangi Angka Kematian Ibu saat melahirkan dan Angka Kematian Anak saat dilahirkan (ii) Program Kesehatan Mengenai Pengembangan Pola Pangan Harapan (PPH) untuk Kesehatan Masyarakat (iii) Program Bimbingan Fungsi Sosok Ibu sejak mengandung, mengurus bayi, membimbing pendidikan usia dini dan remaja/gernerasi penerus (6) Mengembangkan Pembinaan Pemuda untuk meningkatkan keikutsertaannya dalam pembangunan : (i) bidang kewirausahaan muda *(Young Entrepreneurship)* (ii) bidang kepramukaan (iii) bidang keolahragaan dan (iv) bidang pembinaan generasi muda.

MATRIKS 2.
(Lanjutan)

Kebijakan	Program	Tujuan Program
katan kapasitas LDII dalam partisipasi pembangunan	pola pangan harapan (PPH) untuk kesehatan masyarakat (iii) Program bimbingan fungsi sosok ibu sejak mengandung, mengurus bayi, membimbing pendidikan usia dini dan remaja/generasi penerus (6) Program pembinaan pemuda: (i) bidang kewirausahaan muda (*young entrepreneurship*) (ii) bidang kepramukaan (iii)bidang keolahragaan dan (iv)bidang pembinaan generasi muda	
	3.2. Program pengembangan kegiatan dakwah berdasarkan pendekatan solutif :	3.2. Mengembangkan kegiatan dakwah berdasarkan pendekatan solutif (dakwah *bil- hal*) (1) Penanganan bencana berdasarkan pelayanan prima terhadap penanganan masa-lah dengan konsep yang benar pada tahapan mitigasi, penanganan tanggap daru-rat, penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi (2) Penanganan pelaksanaan hewan qurban, (3) Penanganan masalah serapan air dengan pengembangan program biopori (4) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program LDII Go Green
	3.3. Program pengembangan kegiatan dakwah untuk menciptakan kondisi yang secara langsung maupun tidak langsung membangun LDII sebagai lembaga dengan kapasitas protektif	3.3.Mengembangkan kegiatan dakwah dengan menciptakan kodisi yang secara langsung maupun tidak langsung bahwa LDII membangun dirinya menjadi lembaga yang mempunyai kapasitas protektif : (1) pengembangan lembaga bantuan hukum, (2) melindungi masyarakat /wardga LDII, (3) membangun lembaga bantuan hukum (4) memelihara dan mempertahankan terhadap milik bersama yang sangat berharga yaitu harkat martabat bangsa dan karakter bangsa

MATRIKS 2.
(Lanjutan)

Kebijakan	Program	Tujuan Program
		(5) upaya melestarikan ilmu pengetahuan, ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadits dengan pelatihan mubaligh bersertifikat MUI, Kementrian Agama atau Universitas yang kompeten dan lain-lain
4. Kebijakan pengembangan harmonisasi struktur yang suportif dan membangun sistem pengelolaan informasi)	4.1. Program pengembangan harmonisasi struktur yang suportif dan membangun sisitem pengelolaan informasi 1) Program konsolidasi internal organisasi (bulanan, 3 bulanan dan 6 bulanan) 2) Program pengembangan advokasi dan kemitraan dengan pemerintah 3) Program pengembangan percepatan pertumbuhan ekonomi/kesejahteraan umat 4) Program pengembangan kesepakatan *service level agreement* dengan pemerintah 5) Program pengembangan ekonomi mandiri dengan koperasi sebagai *trading house* yang profesional. 6) Program pengembangan/ pembenahan kurikulum pesantren, pelatihan Da'i bersertifikat.	1) Mengembangkan harmonisasi kegiatan dengan konsolidasi internal orgasnisasi bulanan, tiga bulanan dan enam bulanan bagi seluruh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW): memonitor dan mengevaluasi pengembangan aktivitas dakwah melalui program konsolidasi internal organisasi (Bulanan, 3 bulanan dan 6 bulanan) 2) Mengembangkan advokasi dan kemitraan dengan pemerintah untuk mendorong pembentukan dan penerapan Undang-Undang Keormasan yang lebih pro-keadilan dan pro-HAM 3) Mengembangkan percepatan pertumbuhan kesejahteraan umat, eradikasi tingkat kesenjangan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kompetisi kualitas SDM yang sehat, kreatif dan produktif melalui pengembangan ekonomi mandiri umat 4) Mengembangkan kesepakatan *service level agreement* dengan pemerintah untuk pelayanan usaha kecil dan menengah melalui kredit modal kerja dengan model ekonomi syariah) 5) Mengembangkan ekonomi mandiri dengan Inisiasi pemberdayakan UB/koperasi ekonomi mandiri umat dan sebagai *trading house* yang profesional 6) Mengembangkan advokasi dan program aksi : pembenahan kurikulum pesantren, pelatihan Da'i bersertifikat MUI, Kemdiknas, atau Kementrian Agama 7) Mengembangkan pelaksanaan konsep dakwah dengan konsentrasi pembinaan kepada sosok ibu (*mother funtionality education centered*) dalam rangka pembangunan karakter bangsa yang baik dan umat Islam yang taqwa, cerdas, kreatif dan produktif 8) Mengembangkan program aksi penanganan bencana yang baik pada setiap tahapan penanganan bencana 9) Mengembangkan program pembangunan SIM (sistem informasi manajemen dan penyelenggaraan rumah produksi (*production house*) untuk berbagai kegiatan dakwah

MATRIKS 2.
(Lanjutan)

Kebijakan	Program	Tujuan Program
	7) Program pengembangan dan pelaksanaan konsep dakwah dengan konsentrasi pembinaan kepada sosok ibu. 8) Program pengembangan penanganan bencana yang baik (program aksi) 9) Mengembangkan program pembangunan SIM (sistem informasi manajemen	
	4.2. Program penerapan ICT dalam hal pengembangan intensitas dan kualitas dakwah (penggunaan Internet sehat)	Mengembangkan penerapan ICT dalam hal-hal sebagai berikut: (1) Penggunaan ICT untuk berbagai kegiatan dakwah dan komunikasi organisasi (2) Penggunaan ICT dalam promosi kegiatan pengabdian kepada masyarakat : promosi kisah sukses dalam penyusunan dan pelaksanaan MOU kerjasama pelaksanaan dakwah *bil-hal* (poskestren, gelar/tebar qurban, LDII *Go Green*, dan kegiatan dakwah *bil-hal* lainnya (3) Penggunaan ICT untuk promosi pengembangan ekonomi umat (usaha UB/koperasi ekonomi mandiri umat) dan kegiatan pemberdayaan masyarakat (4) Peningkatan sistem informasi manajemen di dalam komunikasi dan konsolidasi organisasi dakwah LDII (5) Promosi melalui ICT untuk penerapan konsep yang lebih maju (moderen) dalam konsep konsentrasi pembinaan sosok ibu (6) Pembentukan rumah produksi (*production house*) dan pemanfaatannnya
	4.3. Program pengembangan komunikasi dan informasi dengan media masa (surat kabar dan elektronik) melalui kegiatan:	Mengembangkan kegiatan komunikasi dan informasi : *media gathering*, pelatihan pengembangan *blogger* dan pembinaanya, pembuatan film (dokumentasi, lokakarya penerapan interner sehat dan pembuatan leaflet profile LDII

MATRIKS 3
(Lanjutan)

Kebijakan	Program	Tujuan Program
5. Kebijakan peningkatan kerukunan hidup inter dan antar umat beragama	5.1. Program Peningkatan ukhuwah Islamiah, wathoniah dan insaniah/basyariah	5.1. Meningkatkan kerukunan inter dan antar umat beragama dan ada upaya penyelesaian masalah yang baik 5.2. Meningkatkan sosialisasi kesamaan Visi dan Misi dalam bela negara mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dan mempertahankan keutuhan NKRI dan adanya harmonisasi dalam kontek *taswi-yatul manhaj* dan *tansiqul harokah* (kesamaan dalam pandangan dakwah seperti yang dianjurkan dan diarahkan Majelis Ulama Indonesia [2006], dengan konsep dakwah yang memperhatikan : Ijtima' Ulama Tahun 2006 di Ponorogo dengan Sub Tema "Peneguhan bentuk dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harmonisasi kerangka berfikir dalam kontek Kebangsaan, *taswiyatul manhaj* (penyamaan berfikir dalam masalah-masalah keagamaan) dan *tansiqul harokah* (koordinasi langkah strategis dalam masalah-masalah keagamaan), dan pada butir 5 disebutkan agar keikutsertaan umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan andil yang maknawi dalam menciptakan kebersamaan perjuangan menuju masyarakat yang berkeadilan dan diridhoi Alloh SWT 5.3. Khusus dengan Pemerintah, LDII ikut mengamankan dan menjadi peserta Pemilu yang baik. Adanya andil LDII : i. dalam perwujudan demokrasi yang jujur dan adil ii. meningkatnya amal bakti kepada negara, bangsa dan agama dalam upaya mempertahankan NKRI dengan pelestarian esensi UUD 1945 dan pengamalan falsafah Pancasila iii. meningkatnya motivasi masyarakat berperanserta dalam penegakan demokrasi yang bermartabat dalam upaya penegakkan tata-pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan upaya mewujudkan sinergitas yang tinggi antar komponen bangsa dengan dialog, toleransi, keterbukaan, akuntabilitas, kejujuran dan keadilan iv. Meningkatnya solidaritas nasional dengan menggalakan kepedulian sosial: penanganan kesenjangan ekonomi masyarakat , pengembangan *disaster management* dalam penanganan korban bencana alam, bahaya narkotika, anti kejahatan kolusi korupsi dan nepotisme

MATRIKS 2.
(Lanjutan)

Kebijakan	Program	Tujuan Program
	5.2. Program Peningkatan kerjasama antar dan inter umat beragama	5.4 Adanya kerjasama dalam bentuk MOU tertulis maupun secara tidak tertulis dalam kepedulian sosial : menghadapi masalah kesenjangan ekonomi masyarakat , narkotika, bencana alam dan lain-lain.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 9 Maret 2011
4 Rabi'ul Tsani 1432

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc.
Ketua Merangkap Anggota

Prof. DR. Sc. Agr. Ir. H. Jamsari, MP.
Wakil Ketua Merangkap Anggota

Drs. H. Muh. Hidayat Nahwi Rasul
Sekretaris Merangkap Anggota

Prof. DR. H. Singgih Tri Sulistyono, M.Hum.
Wakil Sekretaris Merangkap Anggota

Ir. H. Muh. Yasaf Andi Koddang, M.S.
Anggota

Ir. H. Muhammad Nurchozim
Anggota

Ir. H. Abdullah A. Karim, M.Si.
Anggota

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
NOMOR : KEP-08/MUNAS VII LDII/III/2011

Tentang

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUSYAWARAH NASIONAL VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi memiliki tugas dan wewenang untuk mengubah dan menetapkan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
b. bahwa Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia menganggap perlu menetapkan Pengembangan Sumber

Daya Manusia seiring dengan perkembangan dan perubahan lingkungan strategis Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

c. bahwa dengan kemajuan yang telah dicapai Lembaga Dakwah Islam Indonesia diperlukan adanya rencana strategi penyesuaian dan perubahan sehingga peran aktif Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam pembangunan bangsa dan negara dapat dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan.
d. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan suatu keputusan tentang Pengembangan Sumber Daya manusia Lembaga Dakwah Islam Indonesia 2011 – 2016.

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan, Papan Nama dan Lambang Organisasi.
e. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia hasil Musyawarah Nasional VII LDII Tahun 2005 di Jakarta.
f. Hasil Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2000.
g. Hasil Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2004.
h. Keputusan Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: 01/MUNAS VII LDII/III/2011 tentang

Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Memperhatikan
1. Pidato Pengarahan dan pokok-pokok pikiran dari pembicara pada Rapat Paripurna pertama pada Musyawarah Nasional VII LDII Tahun 2011.
2. Pidato Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
3. Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2005 – 2010.
4. Hasil Sidang Komisi C Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang membahas tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
5. Pemandangan umum, usul serta saran peserta Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2011 – 2016.

KESATU Mengesahkan naskah Pengembangan Sumber Daya Manusia LDII.

KEDUA Naskah Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud diktum KESATU selengkapnya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini:

KETIGA Penyesuaian terhadap Pengembangan Sumber Daya Manusia dilaksanakan secara penuh selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 9 Maret 2011
4 Rabi'ul Tsani 1432

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc.
Ketua Merangkap Anggota

Prof. DR. Sc. Agr. Ir. H. Jamsari, MP.
Wakil Ketua Merangkap Anggota

Drs. H. Muh. Hidayat Nahwi Rasul
Sekretaris Merangkap Anggota

Prof. DR. H. Singgih Tri Sulistyono, M.Hum.
Wakil Sekretaris Merangkap Anggota

Ir. H. Muh. Yasaf Andi Koddang, M.S.
Anggota

Ir. H. Muhammad Nurchozim
Anggota

Ir. H. Abdullah A. Karim, M.Si.
Anggota

Lampiran : **KEPUTUSAN MUNAS VII LDII TAHUN 2011**
Nomor : **KEP-08/MUNAS VII LDII/III/2011**
Tanggal : 9 Maret 2011
4 Rabi'ul Tsani 1432

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

A. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, para *founding fathers* telah menentukan visi negara yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Mereka juga menyadari sepenuhnya bahwa untuk mewujudkan kondisi ini dibutuhkan peranan sumberdaya manusia yang unggul. Oleh karena itu, salah satu misi negara yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas merupakan prasyarat untuk mencapai visi negara tersebut.

Sudah menjadi kebenaran umum bahwa dalam suatu komunitas mulai dari lingkup kecil seperti keluarga, organisasi sosial kemasyarakatan, perusahaan kecil/menengah/besar, sampai pada lingkup organisasi negara termasuk organisasi internasional, sumberdaya manusia (SDM) mempunyai peran yang sangat strategis. Sumberdaya inilah yang mampu menghadirkan kenyataan, sedangkan sumberdaya lainnya seperti sumberdaya alam, finansial, materil, mesin bahkan sumberdaya waktu hanyalah mampu menghadirkan kemungkinan-kemungkinan. Tanpa SDM, sumberdaya lain tersebut tidak lebih dari sekedar potensi yang tidak akan pernah berwujud menjadi kinerja.

Fakta tentang peran sentral SDM tersebut dapat ditelusuri pada penyebab utama kejayaan suatu bangsa. Sejarah telah mencatat bahwa kemajuan suatu bangsa tidak ditentukan oleh

umurnya. Ada negara yang telah terbentuk lebih dari 2000 tahun yang lalu, kenyataannya masih jauh tertinggal dari negara yang usianya masih di bawah 150 tahun. Begitu pula, kemajuan suatu bangsa juga tidak ditentukan oleh melimpahnya sumberdaya alam yang dimilikinya. Ada suatu negara yang 80 % wilayahnya terdiri atas pegunungan yang tidak kondusif untuk pertanian dan peternakan, tetapi berhasil menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terkuat kedua di dunia. Bahkan, kemajuan suatu negara tidak ditentukan juga oleh ras dan warna kulit. Para imigran dengan ras dan warna kulit yang di negara asalnya dijuluki pemalas dan miskin, ternyata mampu berkinerja tinggi di negara-negara maju tempat mereka bermukim sekarang .

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa di belakang kemajuan suatu organisasi terdapat sumberdaya yang sangat menentukan, yaitu SDM. SDM yang handal, yang diindikasikan oleh tingginya kualitas fisik dan non-fisik yang dimiliki oleh mayoritas anggotanya akan menentukan kemajuan suatu organisasi. Kualitas fisik meliputi kualitas kesehatan yang mewujud dalam kuatnya stamina berkarya. Sedangkan kualitas non-fisik meliputi tingginya kualitas religius (iman dan takwa), *ethos* (kredibilitas), *logos* (berpikir logis), dan *pathos* (dengan perasaan/empati).

Kehadiran dan sinergi dari keempat dimensi SDM ini pada gilirannya akan menghasilkan keunikan tersendiri bagi sumberdaya lainnya, seperti sarana/prasarana, keuangan, waktu dan lain-lain. Keunikan SDM terletak pada daya kreativitasnya dalam artian mampu menciptakan pengetahuan serta mampu memanfaatkannya untuk menghasilkan inovasi, yang pada gilirannya mendatangkan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Keunggulan ini sulit ditiru oleh organisasi dan sumberdaya lain karena kemampuan tersebut melekat pada benak dan pengalaman SDM yang bersangkutan.

Dalam manajemen moderen, keunikan SDM tersebut diakomodasikan melalui pengelolaan yang spesifik dan terfokus dalam disiplin Manajemen Sumber Daya Manusia

(*Human Resource Management*), tidak lagi dengan Manajemen Personalia (*Personnel Management*) yang tradisional. Memiliki SDM yang unggul yang mampu mendatangkan keunggulan kompetitif merupakan dambaan setiap organisasi termasuk Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Menyadari pentingnya hal tersebut, maka pengembangan SDM merupakan suatu kebutuhan mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. SDM yang unggul diperlukan untuk menggerakkan roda organisasi agar organisasi dapat berjalan bukan hanya sekedar efektif, efisien dan inovatif, tetapi juga agar organisasi tetap dapat memimpin (*leading*).

Di samping itu, SDM unggul juga diperlukan untuk menghasilkan SDM unggul lainnya baik internal LDII maupun eksternal. Oleh karena itu, diperlukan suatu program yang sistematis dan terpadu, sehingga dapat mewujudkan kualitas SDM yang profesional dan mempunyai landasan agama yang mantap (profesional religius), sebagai kontribusi Lembaga Dakwah Islam Indonesia terhadap misi mencerdaskan kehidupan bangsa agar visi negara dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dapat terwujud.

B. Permasalahan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Menghasilkan SDM dengan empat dimensi keunggulan seperti diuraikan di atas tentunya memerlukan upaya yang sungguh-sungguh. Dalam prakteknya, pengembangan sumberdaya ini tidak berada pada ruang hampa, melainkan berjalan pada suatu konteks yang nyata, yang memiliki dimensi ruang dan waktu beserta keseluruhan variabel-nya, yang lazim disebut dengan lingkungan strategis. Salah satu ciri utama dari konteks ini adalah adanya perubahan yang berlangsung secara terus menerus, baik global, regional, nasional, maupun lokal. Perubahan memang merupakan fenomena universal yang sulit dibendung. Setiap saat seluruh dimensi kehidupan mengalami perubahan baik secara perlahan maupun drastis.

Perubahan juga terjadi pada lingkungan strategis dimana Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) berkarya dan

berkontribusi. Dalam lingkup global dan regional, paling tidak terdapat beberapa jenis perubahan yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan SDM-nya, diantaranya isu-isu demokratisasi, hak asasi manusia, teknologi informasi dan komunikasi, lingkungan hidup dan globalisasi. Sementara itu, dalam konteks nasional, isu kesenjangan ekonomi, bencana alam, kebinekaan, dan lain-lain tetap merupakan faktor signifikan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan arah pengembangan SDM. Keunggulan SDM diindikasikan dengan kemampuannya mengatasi berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh isu-isu strategis tersebut di atas.

Menyongsong pelaksanaan Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia, beberapa isu perubahan lingkungan strategis yang diuraikan di atas menuntut LDII untuk menyesuaikan strategi dan program pengembangan SDM. Mengadaptasikan diri agar dapat lebih menyesuaikan diri dengan arus perubahan tersebut adalah penting untuk mengkontekstualkan pengembangan dimensi fisik (kesehatan dan stamina berkarya) dan non-fisik (*religious, ethos, logos, dan pathos*) SDM LDII. Beradaptasi adalah hal yang mutlak, karena organisasi yang dapat bertahan dalam gelombang perubahan bukanlah yang lebih kuat, melainkan yang lebih adaptif.

C. Arah Pengembangan Sumber Daya Manusia

Hidup di lingkungan demokratis yang masih diwarnai dengan problematika ekonomi, bencana alam, kemajemukan dan termasuk hidup di alam globalisasi ini tentu berbeda dengan hidup di masa-masa sebelumnya. Kehidupan demokratis dan global termasuk tantangan mengatasi kesenjangan ekonomi dan dampak musibah nasional menuntut SDM yang unggul.

Pemerintah tentu tidak tinggal diam dalam bidang ini. Sejumlah program yang bertujuan untuk mendidik dan melatih masyarakat telah dilakukan. Untuk melaksanakan program tersebut, sejumlah institusi juga telah dibentuk oleh pemerintah. Namun institusi dan aransemen dari pemerintah

saja nampaknya belum cukup untuk mempercepat pembangunan SDM unggul ini. Diperlukan partisipasi masyarakat dan kemitraan antara berbagai lembaga yang menangani masalah demokrasi, globalisasi, kesenjangan ekonomi, termasuk masalah yang ditimbulkan oleh musibah alam, agar terwujud sinergi antara ketiga aktor pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Tanpa partisipasi masyarakat dan kemitraan antar lembaga, sinergi yang akan mewujudkan *emergent property*[1] berupa SDM unggul tersebut sulit kunjung terwujud.

Seperti apa sosok SDM unggul tersebut? Dalam terminologi Lembaga Dakwah Islam Indonesia, sosok SDM unggul ini dikenal dengan istilah SDM yang profesional religius. Adapun yang dimaksud profesional religius yaitu SDM yang memiliki: (i) ilmu dan kefahaman yang mendalam terhadap ajaran-ajaran Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits, dan menjadikannya sebagai tuntunan dalam berpikir, bertutur kata, berinteraksi, mengambil keputusan dan bertindak; (ii) akhlaqul karimah; dan (iii) kemampuan profesional dan mandiri.

SDM profesional religius ini sejalan dan berkontribusi terhadap arah pembangunan jangka panjang Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ditetapkan sejumlah misi pembangunan SDM antara lain adalah mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; dan mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.

Terdapat tiga indikator utama yang harus dimiliki oleh seseorang yang disebut profesional religius, yaitu:

i. Memahami Al-Qur'an dan Al-Hadits, yang memungkinkannya mampu menginternalisasi ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya dan mengaktualisasikannya dalam segala kondisi.

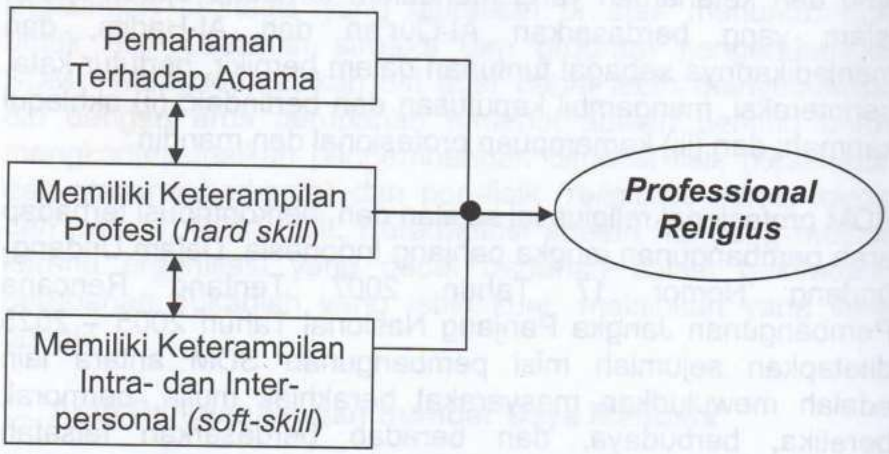
---

[1] Hasil sinergi antar aktor pembangunan (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha)

ii. memiliki ketrampilan profesi (*hard skills*) yang memungkinkannya mampu membangun kehidupan dunianya secara halal, wajar, bertanggungjawab dan bermartabat; dan

iii. memiliki keterampilan intra- dan interpersonal (*soft skills*) yang memungkinkannya mampu membangun akhlaqul karimah dan mempermudah membangun hubungan yang harmonis, rukun, kompak dengan orang lain dan lingkungannya.

Ketiga indikator SDM profesional religius akan lebih bermakna apabila SDM bersangkutan memiliki kualitas fisik yang prima yang ditandai dengan kesehatan jasmani dan rohani yang baik. Secara diagram, sosok SDM profesional religius tersebut dapat disajikan pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1: Sosok SDM Profesional Religius LDII

Semua potensi itu akan terwujud dengan baik manakala dalam diri seseorang terdapat cara pandang (paradigma) yang benar, dimana hal tersebut sebenarnya merupakan pekerjaan hati. Sabda Rasulallah SAW:

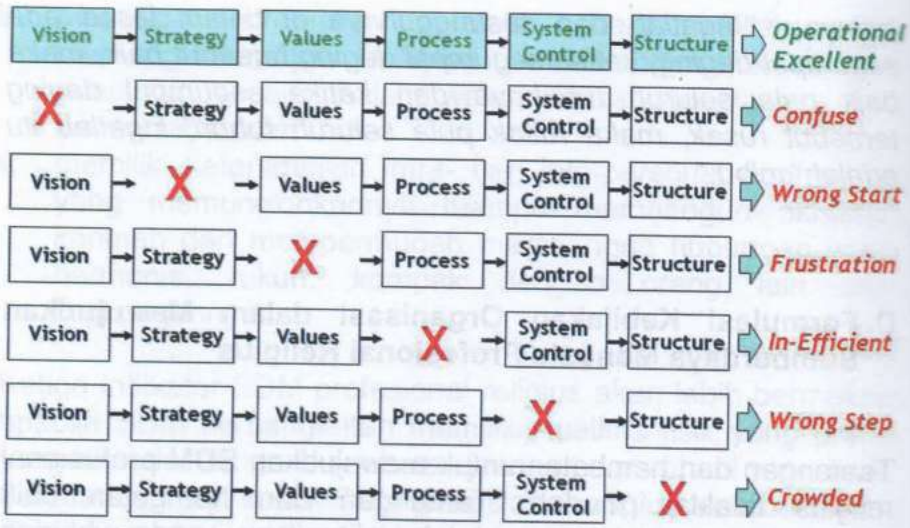
...أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ * رواه البخاري في كتاب الإيمان

Artinya: *" Ingatlah dan sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging, ketika segumpal daging tersebut baik, maka baik pula seluruh tubuhnya dan ketika segumpal daging tersebut rusak, maka rusak pula seluruh tubuh, ingatlah itu adalah qolbu."*

D. Formulasi Kebijakan Organisasi dalam Mewujudkan Sumberdaya Manusia Profesional Religius

Tantangan dan hambatan untuk mewujudkan SDM profesional religius tidaklah mudah. Tantangan dan hambatan baik eksternal seperti yang telah diuraikan pada bagian permasalahan di atas, termasuk juga yang bersifat internal seperti kapasitas organisasi dengan segala keterbatasan sumberdaya, senantiasa akan menyertai organisasi ini dalam mengelola SDM profesional religius. Oleh karena itu, strategi dalam tataran formulasi kebijakan organisasi harus komprehensif guna menopang implementasi dengan dokumen-dokumen perencanaan yang terarah.

Terdapat enam komponen organisasi yang perlu disinergikan dalam mengelola SDM ini, yaitu: visi, strategi, nilai-nilai, proses, sistem kontrol dan struktur. Visi akan menentukan kondisi ideal masa depan SDM yang diharapkan; sedangkan strategi adalah cara yang ditempuh untuk mewujudkan visi tersebut. Nilai-nilai, proses, sistem kontrol dan struktur adalah komponen organisasi yang mendukung agar strategi organisasi dapat berjalan dengan baik. Dengan kesiapan terhadap enam komponen organisasi tersebut, terdapat jaminan yang kuat bahwa SDM profesional religius dapat diwujudkan karena organisasi berada pada kondisi kerja yang baik dan benar (*operational excellent*), tidak membingungkan (*confuse*), tidak salah langkah awal (*wrong start*), tidak frustasi (*frustration*), tidak efisien (*in-efisien*), tidak salah langkah (*wrong step*) dan tidak semrawut (*crowded*), seperti yang diilustrasikan pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2: Kesiapan Komponen Organisasi

Dengan kesiapan keenam komponen organisasi di atas barulah terdapat jaminan untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan organisasi yang relevan dengan tiga indikator: (1) kepahaman terhadap ajaran Islam, (2) keterampilan profesi, dan (3) keterampilan intra- dan interpersonal.

1. Sumberdaya Manusia yang Memiliki Kefahaman Tinggi terhadap Ajaran Islam.

Al-Qur'an dan Al-Hadits yang merupakan sumber utama ajaran Islam berisikan tentang aqidah (keyakinan-keyakinan), syariah dan akhlak. Kekuatan pemahaman agama yang sudah berada dalam benak seseorang, sangatlah dahsyat, karena memiliki potensi yang memampukannya untuk bertindak. Dengan pemahaman terhadap ajaran Islam yang kuat, seseorang dapat berperilaku *sholih*, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, infak, shodaqoh, berpuasa, menunaikan ibadah haji, bahkan rela mengorbankan harta benda, jiwa dan raganya.

Karena pentingnya pemahaman ini, maka proses alih pemahaman (*transfer knowledge*) kepada individu lain harus

dikelola dengan baik agar keakuratan tetap terjaga. Dalam teori pendidikan, diperlukan kesungguhan untuk menjaga keakuratan pemahaman dalam proses alih pemahaman ini. Fenomena *lost knowledge*[2] atau hilangnya pemahaman adalah hal yang lazim dalam teori dan praktek pendidikan. Sedikit atau banyak, selalu ada elemen dalam pemahaman tersebut yang berubah, entah bertambah atau berkurang selama proses alih pemahaman, yang mengancam keakuratan pemahaman itu. Dalam ilmu komunikasi, berbedanya pesan yang disampaikan dengan pesan yang diterima, disebut mis-komunikasi. Mis-komunikasi dapat berakibat fatal, karena dapat melahirkan tindakan yang berbeda, yang apabila dibiarkan berkelanjutan dapat mengakibatkan tindakan yang sangat berbeda sekali dari aslinya tindakan itu.

Dalam prakteknya, unsur pemahaman yang sulit dipindahkan adalah aspek *tacit knowledge*[3]. Menurut Nonaka dan Takeuchi[4], *tacit knowledge* sulit untuk diartikulasikan dan dinotikulasikan. Dengan demikian, *tacit knowledge* tidak dapat ditulis sehingga tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dengan metode membaca. Untuk mendapatkannya, *tacit knowledge* ini harus dilihat, disaksikan dan bahkan dipraktekkan secara langsung dari ahli yang juga telah mendapatkan *tacit knowledge* tersebut dengan metode yang sama.

Untuk menjaga agar dimensi *tacit* dan *explisit* yang terkandung dalam ajaran-ajaran Islam dapat terjaga keakuratannya dengan baik, maka perlu diterapkan *Total Quality Management*, dengan empat program utama yaitu penetapan standar kualitas (*quality standard*), pelaksanaan jaminan kualitas (*quality assurance*), pengontrolan kualitas (*quality control*), dan peningkatan kualitas yang berkesinambungan (*continuous quality improvement*). Melalui penetapan standar kualitas, maka perlu ditetapkan sarana dan prasarana termasuk kualitas SDM yang difungsikan dalam pengajian dan

---

[2] David W. Delong, Lost Knowledge, Oxford, Oxford University Press.
[3] Pemahaman yang bersumber dari pengalaman (*learning by doing*)
[4] Ikujiro Nonaka dan Hirotaka Takeuchi, *The Knowledge Creating Company*, Oxford, Oxford University Press, 1995, h.viii.

dakwah serta proses pembelajaran lainnya. Prasarana meliputi tempat pelaksanaan kegiatan seperti masjid, mushola, surau, majelis ta'lim, pondok pesantren, rumah-rumah dan lain-lain; sedangkan sarana meliputi Al-Quran, Al-Hadits, kitab-kitab pendukung dan materi-materi pembelajaran, termasuk sarana belajar lain. Begitu pula dengan tenaga pengajar dan dakwah seperti mubaligh dan mubalighot, da'i dan da'iyat, ustadz dan ustadzah, tenaga administrasi dan tenaga pendukung lainnya juga perlu ditetapkan standar kualitasnya.

Kegiatan penjaminan kualitas dilakukan dalam bentuk sosialisasi, pembimbingan, pendidikan, pelatihan dan pembinaan kepada seluruh jajaran organisasi LDII dan mitra LDII untuk mengarahkan agar SDM, sarana, dan prasarana yang dipergunakan dalam kegiatan pengajian, dakwah dan proses pembelajaran mampu memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan pengontrolan kualitas dilakukan untuk menilai apakah sarana, prasarana dan SDM yang dipergunakan dalam pengajian, dakwah dan proses pembelajaran lainnya masih sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Terakhir, melalui program peningkatan kualitas berkesinambungan, maka standar-standar yang telah dicapai perlu ditinjau ulang lagi untuk kemudian ditingkatkan standarnya. Keempat program tersebut merupakan sistem yang terus berproses dan bersiklus menyempurnakan obyek garapannya sehingga tetap adaptif dan bahkan *leading* dilingkungannya.

2. Sumberdaya Manusia yang Memiliki Keterampilan Profesi.

Sebagai lembaga dakwah, LDII memerlukan SDM yang memiliki keterampilan ganda (*multi-skills*) agar tingkat *employability* dan/atau *entrepreneurship*-nya tinggi. Adalah sangat riskan hidup di dunia moderen dengan mengandalkan satu keterampilan profesi saja. Dengan *multi skill*, ketika satu keterampilan profesinya tidak dibutuhkan lagi, maka harapan untuk memiliki pekerjaan dan/atau usaha masih ada karena masih memiliki keterampilan profesi cadangan yang lain.

Multi-skill tersebut diperlukan guna mengatasi keterbatasan dalam kontribusinya terhadap dimensi SDM yang berupa keterampilan profesi atau *hard skill* tunggal ini. Keterbatasan ini menjadi semakin signifikan untuk disadari karena keterampilan profesi cepat usang atau kadaluwarsa sehingga suatu saat tidak memiliki nilai jual lagi, sebagai akibat cepatnya laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Guna mengatasi keterbatasan tersebut, LDII perlu menempuh dua strategi. Pertama, mendorong SDM-nya supaya secara mandiri memenuhi kebutuhannya akan keterampilan profesi. Dalam konteks ini, LDII selain menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing SDM juga dituntut untuk melakukan tindakan kongkrit terutama kepada SDM yang memiliki keterbatasan untuk berkompetisi di pasar bebas. Kedua, LDII perlu melakukan intervensi melalui strategi kolaborasi dan jejaring kerja dengan pihak lain terutama dunia usaha. Strategi kolaborasi diartikan sebagai proses kerjasama dengan berbagai pihak yang dibangun di atas prinsip saling percaya dan integritas sehingga dapat menghasilkan terobosan baru yang saling menguntungkan masing-masing pihak. Sedangkan strategi jejaring kerja bertujuan mendorong jajaran LDII agar terus menggali potensi dan talenta organisasi lain dan menyeleksinya secara cermat untuk kemudian secara sistematis membangun aliansi strategis. Kedua strategi ini pada akhirnya diharapkan mengantar LDII untuk memiliki jejaring kerja yang luas dan dalam dengan dunia usaha.

3. Sumberdaya Manusia yang Memiliki Keterampilan Intra dan Interpersonal.

Pentingnya keterampilan intra dan interpersonal yang lazim disebut *soft skill* sudah tidak diragukan lagi. Bahkan jika dibandingkan dengan keterampilan profesi yang bersifat *hard skill, soft skill* memiliki kontribusi 80 % terhadap keberhasilan karir dan profesi seseorang. *Soft skill* bergerak bagaikan minyak pelumas dalam meluncurkan *hard skill* yang sudah dimiliki seseorang.

Dalam bahasa umum *soft skill* adalah sikap, tabiat atau karakter. Disebut *soft* karena unsur ini sulit terlihat secara kasat mata dan entitasnya yang mudah berubah sesuai dengan tekanan yang diterima dari lingkungannya. Seseorang yang memiliki *soft skill* yang mantap, maka *soft skill* tersebut tidak akan berubah meskipun mendapat tekanan dan pengaruh yang luar biasa dari lingkungannya, begitu pula sebaliknya.

Secara garis besar *soft skill* bisa digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu yang bersifat intrapersonal yang juga disebut dengan *self-management*; dan yang bersifat interpersonal atau disebut juga *managing others*. Intrapersonal skill adalah segala tabiat yang mengarah pada diri individu yang bersangkutan, tanpa melihat hubungannya dengan orang lain. Dengan intrapersonal skill, seseorang akan memiliki kualitas pribadi yang baik. Ia dapat menjadi tauladan. Rasa percaya diri, kemampuan kontrol emosi, jujur, berani, bersungguh-sungguh adalah beberapa contoh tabiat intrapersonal. Sedangkan interpersonal adalah keterampilan mengelola hubungan dengan orang lain. Dengan keterampilan interpersonal, seseorang dapat dengan mudah menjalin kerjasama, menjadi kompak dengan orang lain. Empati, berjiwa sosial, memahami dan menerima perbedaan, mau bekerjasama adalah beberapa contoh keterampilan interpersonal.

Adalah tugas utama LDII sebagai lembaga dakwah untuk membangun *soft skill* ini, sebagai kontribusi dan wujud kepedulian dalam membangun nilai publik yang positif (*creating public value*). Untuk membangun *soft skill* ini, LDII memandang perlu membangun *soft skill* ini dengan mengacu pada *soft skill* yang idealnya dimiliki oleh seorang pemimpin.

Dalam ajaran Islam, setiap individu dituntut untuk bertanggungjawab terhadap segala yang dipimpinnya. Setiap individu adalah seorang pemimpin (*ro'in*) sebagaimana sabda Rasulallah SAW, sebagai berikut:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ...الحديث *رواه البخاري في كتاب النكاح

Artinya: *"Masing-masing dari kalian adalah penggembala (pemimpin), dan masing-masing dari kalian akan ditanya (mempertanggungjawabkan) tentang apa yang digembalanya (dipimpinnya)...."*

Penelusuran terhadap *soft skill* yang dimiliki oleh seorang pemimpin pada umumnya menekankan bahwa kompetensi untuk mempengaruhi atau kemampuan mempengaruhi lingkungan atau mengajak orang untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan adalah esensi kompetensi kepemimpinan. Penguraian tentang kompetensi kepemimpinan telah dilakukan oleh banyak pihak baik dari dalam maupun luar negeri. Dari dalam negeri misalnya, Ki Hajar Dewantara mengemukakan adanya sebelas peran yang perlu dimainkan oleh seorang pemimpin, yaitu (i) *Taqwa* (ii) *Hing ngarso sung tulodo* (di muka memberi suri teladan); (iii) *Hing madyo mangun karso*; (di tengah-tengah membangun motivasi); (iv) *Tut wuri handayani* (dari belakang menumbuhkan daya gerak); (v) *Waspodo purbowaseso* (selalu waspada, mengawasi serta sanggup dan berani memberi koreksi dan dikoreksi); (vi) *Ambeg paramarta* (dapat menetapkan skala prioritas); (vii) *Prasojo* (sederhana); (viii) *Satya* (mempunyai sikap loyal/setia); (ix) *Gemi nastiti* (pola hidup hemat, kerja keras sampai berhasil/*mujhid muzhid*); (x) *Beloko* (terus terang, transparan & keterbukaan); (xi) *Legowo* (siap untuk proses regenerasi). Sedangkan Dr. Roeslan Abdul Gani[5] berargumentasi bahwa agar seorang pemimpin dapat menjalankan tugas kepemimpinannya secara efektif, maka ia harus memiliki kelebihan dalam empat aspek, yaitu (i) kelebihan dalam moral dan akhlak; (ii) kelebihan dalam jiwa dan semangat (iii) kelebihan dalam ketajaman intelek dan persepsi; dan (iv) kelebihan dalam ketekunan dan keuletan jasmani.

Sejalan dengan kedua pakar dalam negeri di atas, pakar dari luar negeri seperti Rusell (2005)[6] menyebutkan bahwa kompetensi kepemimpinan meliputi: (i) *dealing with complexity*

[5] Ruslan Abdul Gani lahir 24 November 1914 dan meninggal 29 Juni 2005.
[6] Leadership Styles Models and Culture, Bahan Kursus Akuntabilitas, Monash University, Melbourne.

(mampu mengatasi persoalan kompleks), (ii) *external focus* (memperhatikan lingkungannya) (iii) *visioning* (berpandangan jauh ke depan), (iv) *managing change* (mampu mengelola perubahan), (v) *balancing priorities* (mampu menyeimbangkan prioritas), (vi) *inspiring people* (mampu menyemangati orang), (vii) *behaving ethically* (berperilaku etis). Meskipun varian kompetensi kepemimpinan cukup banyak seperti yang diuraikan di atas, namun jika dianalisa secara cermat sebenarnya secara garis besar *soft skill* yang menyebabkannya menjadi pemimpin yang efektif dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian besar, yaitu: kompetensi yang bersifat *self-management* dan kompetensi yang bersifat *managing others*. *Self-management* berkaitan dengan kemampuan seorang pemimpin dalam mengendalikan, memotivasi dan mengembangkan kapasitas dirinya, sedangkan *managing others* lebih berkaitan dengan *pathos* atau peningkatan kemampuan dalam mempengaruhi dan menjadi role model atau teladan termasuk hubungannya dengan lingkungan sehingga mereka mampu mempengaruhi dan menggerakkan orang lain sebagai dasar dalam membangun kerjasama dan kekompakan.

Sebagai kesimpulan, maka *soft skill* seorang pemimpin lebih diarahkan pada pembentukan pemimpin kharismatik, yang berdasarkan sintesa dari kompetensi kepemimpinan yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut :

> Kepemimpinan = mengelola kualitas pribadi (*self management*)
> + mengelola kualitas hubungan dengan orang lain dan lingkungannya (*managing others*).

Untuk operasionalisasi yang lebih kontekstual dengan lingkungan strategis seperti yang diuraikan pada bagian latar belakang, kemampuan mengelola kualitas pribadi (*self management*) dapat ditunjukkan dengan tabiat untuk

berperilaku jujur, amanah dan tabiat untuk bekerja secara sungguh-sungguh dan membiasakan diri menghemat penggunaan sumberdaya dalam bekerja.

Sedangkan kemampuan mengelola kualitas hubungan dengan orang lain diindikasikan dengan tabiat untuk hidup bersama dengan orang lain sekalipun dengan orang miskin sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW yaitu Khalifah Umar Bin Khattab yang sangat peduli terhadap kaum dhuafa dan bahkan budak, demi keutuhan dan soliditas komunitas Islam pada jamannya. Untuk mewujudkan tabiat ini, individu perlu memiliki tabiat hidup rukun, kompak, dan kerjasama yang baik, bukan saja dalam lingkup internal tetapi juga eksternal organisasi.

Masing-masing tabiat ini diuraikan sebagai berikut:

a. **Jujur** adalah tabiat bersikap dan berkata yang benar atau apa adanya meskipun dalam situasi yang sulit.
b. **Amanah** adalah tabiat melaksanakan tugas secara efektif dan mempertanggungjawabkannya sesuai kaidah-kaidah etika, moralitas dan profesionalisme bidang pekerjaan.
c. **Kerja keras sampai berhasil dan pola hidup hemat** adalah tabiat menunjukkan kesungguhan, keseriusan dan komitmen dalam pelaksanaan tugas dan tabiat efisien/sederhana atau menghemat pemakaian sumberdaya tanpa mengurangi efektifitas tugas tersebut. Harus mengukur kemauan sesuai dengan kemampuan.
d. **Rukun** adalah tabiat berhati bersih, tidak berprasangka jelek, saling mengasihi, saling menjaga, saling memperhatikan dan bantu membantu dalam kebaikan pada suatu komunitas guna saling memperkuat.
e. **Kompak** adalah tabiat berempati, berkorban guna meleburkan diri dan menyatu dengan komunitas untuk mencapai tujuan bersama.
f. **Kerjasama yang baik** adalah tabiat bekerja dengan orang lain dalam suasana harmonis dan sinergis guna mewujudkan tujuan dan manfaat yang saling menguntungkan.



Gambar 3: *Soft Skill* Seorang Pemimpin Efektif

Secara konseptual, hubungan keenam *soft skill* di atas dengan kompetensi kepemimpinan dapat dilihat pada Gambar 3. Tiga dimensi SDM yakni pemahaman yang tinggi terhadap ajaran agama Islam, penguasaan keterampilan profesi dan keterampilan intra dan interpersonal (*soft skills*) menjadi kurang bermakna apabila kualitas fisik berada pada kondisi yang tidak prima. Dengan kesehatan jasmani dan rohani yang prima, tingkat produktivitas individu akan optimal. Sebagaimana pepatah bahasa Arab:

اَلْعَقْلُ السَّلِيْمُ فِي الْجِسْمِ السَّلِيْمِ. (التربية الإسلامية لمحمد منير مرسي)

Artinya: "*Akal yang sehat berada di dalam tubuh yang sehat.*"

Sebagai lembaga dakwah, LDII perlu mengupayakan agar dimensi SDM ini juga perlu diprogramkan secara sistemetis dan terpadu. Oleh karena itu, LDII perlu menggali potensinya untuk merintis dan mendorong program-program yang bertujuan mengembangkan dimensi pengembangan SDM yang bersifat fisik ini, seperti program-program olah raga, seni beladiri, Cinta Alam Indonesia, dan program-program sejenisnya. Bahkan harus gencar mensosialisasikan kebiasaan-kebiasaan hidup yang mudah dilakukan tetapi mampu menghasilkan kehidupan jasmani yang sehat seperti pola makan yang seimbang, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup termasuk melakukan relaksasi agar beban pikiran menjadi lebih ringan.

Di samping itu, program kolaborasi dan jejaring kerja dengan dunia olah raga perlu terus dikembangkan, hingga ke jenjang internasional. Dengan demikian, jejaring kerja LDII ke depan menjadi lebih luas, termasuk dengan dunia olah raga.

E. Kesimpulan dan Rekomendasi

MUNAS VII LDII ini menuntut adanya perubahan dalam mengelola SDM. Mencermati lingkungan strategis internal maupun eksternal yang mengalami perubahan drastis khususnya pada aspek demokrasi, masih tingginya kesenjangan ekonomi, dan belum tertangani masalah-masalah yang ditimbulkan oleh musibah nasional termasuk tantangan globalisasi, LDII perlu mengambil jalan untuk berubah, melakukan pergeseran paradigma dalam mengembangkan SDM di lingkungan organisasinya, yaitu melalui peran dakwahnya. LDII perlu mengoptimalkan potensinya untuk membangun SDM unggul yang mengarah pada teruwujudnya SDM profesional religius yang ditandai dengan pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Al-Hadits, memiliki ketrampilan profesi (*hard skills*), memiliki keterampilan intra dan interpersonal (*soft skills*), serta memiliki kualitas fisik yang prima.

Mewujudkan SDM Profesional Religius merupakan manifestasi dari kontribusi dan karya LDII sebagai bagian bangsa Indonesia. Sebagai salah satu komponen bangsa, LDII

terpanggil untuk berkontribusi dalam menyukseskan pembangunan sumberdaya manusia seperti yang telah digariskan dalam salah satu misi negara pada Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdasakan kehidupan bangsa, yang kemudian dijabarkan ke dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

Untuk mewujudkan SDM profesional religius, maka MUNAS VII LDII merekomendasikan agar:

1. LDII perlu menjadikan program pengembangan SDM Profesional Religius sebagai salah satu keputusan MUNAS VII sehingga bersifat imperatif terhadap kepengurusan LDII mendatang.
2. LDII perlu mengarahkan visi, strategi, nilai-nilai, proses, sistem kontrol dan struktur organisasi pada pengembangan SDM Profesional Religius baik di lingkungan internal maupun eksternal.
3. LDII perlu menyusun *road map* pengembangan SDM Profesional Religius dan mengoperasionalkannya secara tuntas.

Glossary

Explicit knowledge	:	Pengetahuan yang tertulis dalam kitab, buku, jurnal, surat kabar, dan lain-lain
Professional	:	Ahli di bidang pekerjaan dan/atau usahanya
Formulasi Kebijakan	:	Dokumen organisasi yang memuat tujuan organisasi dan cara mencapai tujuan tersebut.
Hard skill	:	Keterampilan yang dimiliki oleh seseorang seperti terampil menjahit, mengaji, mengajar dan lain-lain

Pemahaman agama	:	Mengetahui dan melaksanakan ajaran agama.
Prasarana	:	Barang tidak dapat dapat dipindahkan seperti masjid, pondok pesantren, rumah-rumah warga
Proses	:	Langkah dan prosedur yang ditempuh untuk menghasilkan sesuatu.
Religius	:	Memahami dan melaksanakan ajaran Islam.
Sarana	:	Barang dapat dipindahkan seperti meja, kursi, kitab, dan lain-lain.
Sistem kontrol	:	Langkah-langkah yang ditempuh untuk mengetahui apakah kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.
Soft skill	:	Karakteristik yang dimiliki oleh seseorang seperti jujur, berani, sosial dan lain-lain.
Strategi	:	Cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan.
Struktur	:	Susunan yang memperlihatkan hubungan bagaimana anggota organisasi bekerja, berinteraksi, berkoordinasi, menerima dan memberikan kewenangan.
Tacit knowledege	:	Pengetahuan diperoleh dari pengalaman langsung, sulit untuk dialihkan.
Visi	:	Kondisi masa depan yang ideal.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 9 Maret 2011
4 Rabi'ul Tsani 1432

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc.
Ketua Merangkap Anggota

Prof. DR. Sc. Agr. Ir. H. Jamsari, MP.
Wakil Ketua Merangkap Anggota

Drs. H. Muh. Hidayat Nahwi Rasul
Sekretaris Merangkap Anggota

Prof. DR. H. Singgih Tri Sulistyono, M.Hum.
Wakil Sekretaris Merangkap Anggota

Ir. H. Muh. Yasaf Andi Koddang, M.S.
Anggota

Ir. H. Muhammad Nurchozim
Anggota

Ir. H. Abdullah A. Karim, M.Si.
Anggota

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

NOMOR : KEP-09/MUNAS VII LDII/III/2011

Tentang:

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
MASA BAKTI 2005 - 2011

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUSYAWARAH NASIONAL VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Menimbang:

a. bahwa Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai pengemban amanat tertinggi organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, berkewajiban memberi laporan pertanggungjawaban pada akhir masa baktinya.
b. bahwa Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2005-

2011 telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada paripuma MUNAS VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia pada tangal 9 Maret 2011.

c. bahwa dipandang perlu memberi tanggapan dan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban tersebut.
d. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan suatu keputusan tentang laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2005-2011.

Mengingat:

1. Undang–undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Undang–undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.
3. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan 208epada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDII hasil MUNAS VI LDII Tahun 2005 di Jakarta.
6. Hasil Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) LDII Tahun 2009.
7. Hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) LDII Tahun 2010.
8. Hasil Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) LDII Tahun 2000.
9. Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LDII Tahun 2007.
10. Keputusan MUNAS VII LDII Nomor: 01/MUNAS VII LDII/III/2011 tanggal 9

Maret 2011 tentang Peraturan Tata Tertib MUNAS VII LDII.

11. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-077/DPP LDII/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 tentang Penyelenggaraan MUNAS VII LDII.

Memperhatikan:

1. Pemandangan Umum dalam MUNAS VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang membahas tentang Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2005-2011.
2. Laporan Hasil Sidang Komisi D yang membahas Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2005 – 2011.

Menetapkan: KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA MASA BAKTI 2005-2011.

KESATU: Menerima sepenuhnya laporan pertanggung-jawaban Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2005 - 2011 yang disampaikan pada sidang paripurna Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia pada tanggal 9 Maret 2011.

KEDUA: Menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2005 - 2011 atas segala amal bakti dan pengabdiannya.

KETIGA: Naskah laporan tentang pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2005 – 2011

adalah seperti tercantum di dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 9 Maret 2011
4 Rabi'ul Tsani 1432

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc.
Ketua Merangkap Anggota

Prof. DR. Sc. Agr. Ir. H. Jamsari, MP.
Wakil Ketua Merangkap Anggota

Drs. H. Muh. Hidayat Nahwi Rasul
Sekretaris Merangkap Anggota

Prof. DR. H. Singgih Tri Sulistyono, M.Hum.
Wakil Sekretaris Merangkap Anggota

Ir. H. Muh. Yasaf Andi Koddang, M.S.
Anggota

Ir. H. Muhammad Nurchozim
Anggota

Ir. H. Abdullah A. Karim, M.Si.
Anggota

Lampiran : **KEPUTUSAN MUNAS VII LDII TAHUN 2011**
Nomor : **KEP-09/MUNAS VII LDII/III/2011**
Tanggal : 9 Maret 2011
4 Rabi'ul Tsani 1432

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA MASA BAKTI 2005 - 2011

السَّلاَمُ عَلَيكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

بسم الله الرحمن الرحيم

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ بَعْدُ:

Saudara pimpinan, Peserta MUNAS VII LDII Tahun 2011 dan hadirin yang kami hormati,

Pada hari yang berbahagia ini marilah kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmatNya terutama nikmat yang kita miliki hari ini yaitu berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga atas perkenanNYa kita dapat bersama hadir pada acara MUNAS VII di Hotel Sangrilla ini. Pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII) Periode 2005-2011 yang sistematikanya sebagai berikut:

Bab 1 : Pendahuluan
Bab 2 : Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Bab 3 : Lingkungan Strategis dan Permasalahan saat ini
Bab 4 : Kesimpulan
Bab 5 : Rekomendasi

BAB I. PENDAHULUAN

Para peserta MUNAS VII yang berbahagia.

Sekali lagi, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan kalimat syukur *Alhamdulillahi Rabbil Aalamin* dan juga shalawat serta salamnya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad *SholIAllahu Alaihi Wassalam*, para sahabat para tabi'in serta para ulama sebagai *waroshatil ambiya*. Karena perkenan-Nya jualah kita semua diberikan hidayah berupa keimanan, diberikan kesehatan, pertolongan, kekuatan dan perlindungan yang tak ternilai, sehingga dengan dasar iman dan taqwa maka kita bisa hadir mengikuti rangkaian acara MUNAS VII LDII dengan tema yang disepakati bersama yaitu:

"Meningkatkan Pengembangan SDM Profesional Religius Menuju Indonesia Sejahtera, Demokratis, Berkeadilan dan Bermartabat"

Tema ini dipilih melihat pada kenyataan ada erosi dari akhlaq bangsa yang secara kasat mata terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kita. LDII sebagai suatu organisasi kemasyarakatan keagamaan memandang perubahan masyarakat Islam harus mampu kembali kepada khitah karakter bangsa yang berakhlakul karimah dengan tetap menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa yang berfalsafah Pancasila dan berdasarkan kepada Undang-undang Dasar 1945 dan tetap mempertahankan Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kondisi keyakinan kumulatif bangsa seperti itulah Indonesia berjuang untuk meraih negara yang sejahtera, demokratis, berkeadilan dan bermartabat. Pengembangan SDM Profesional Religius

adalah pengembangan SDM sehingga memiliki tiga indikator utama yaitu:

i. memahami Al-Qur'an dan Al-Hadits, yang memungkinkannya mampu menginternalisasi ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya dan mengaktualisasikannya dalam segala kondisi.
ii. memiliki ketrampilan profesi (*hard skills*) yang memungkinkannya mampu membangun kehidupan dunianya secara halal, wajar, bertanggungjawab dan bermartabat; dan
iii. memiliki keterampilan intra- dan interpersonal (*soft skills*) yang memungkinnya mampu membangun akhlaqul karimah dan mempermudah membangun hubungan yang harmonis, rukun, kompak dengan orang lain dan lingkungannya.

Para hadirin peserta MUNAS VII yang berbahagia,

Sesuai dengan agenda acara MUNAS VII yang telah ditetapkan maka DPP LDII berdasarkan Bab IV Pasal 16 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga LDII berkewajiban menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Musyawarah Nasional, sebagai indikator dari tuntasnya tugas memimpin dan menyelenggarakan organisasi tingkat nasional. Dengan segala kesungguhan dan kerendahan hati yang didorong oleh rasa tanggungjawab, kami sampaikan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2005-2011, dengan harapan semoga dapat kiranya pertanggungjawaban ini memenuhi harapan kita semua.

BAB II. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA

Perjalanan Organisasi LDII sejak tahun 2005 sampai sekarang, penuh dengan tantangan dan rintangan. Berkat pertolongan Allah jualah kita bisa sampai pada akhir masa bakti dengan selamat, tetap dalam keimanan dan ketaqwaan pada Allah Yang Maha Kuasa, dengan membawa beberapa keberhasilan, disamping hal-hal lain yang belum dapat kita selesaikan. Untuk

semua pertolongan dan segala pemberian Allah, tidak ada kata yang paling pantas, kecuali bersyukur dengan ucapan syukur *Alhamdulillaahi Robbil 'Aalamiin.*

Keputusan MUNAS VI No. KEP-05/MUNAS VI LDII/2005, tentang Rencana Strategi Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2005-2010 beserta lampirannya dan Keputusan MUNAS VI No. KEP-06/MUNAS VI LDII/2005 tentang Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia beserta lampirannya, merupakan amanat MUNAS VI yang selama 5 tahun 10 bulan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Evaluasi tehadap amanat MUNAS telah dilakukan dan hasil evaluasi tersebut disajikan pada Lampiran 1 Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LPJ ini.

Secara singkat dari hasil evaluasi itu dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program yang tertulis dalam Renstra LDII (2005-2011) telah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin sehingga secara umum tujuan dari program-program yang telah dapat dicapai secara kualitatif antara lain peningkatkan kualitas peradaban, hidup, harkat dan martabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta turut dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa untuk menuju terwujudnya masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila, yang diridhoi Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*
2. Adapun secara kuantitatif dapat diperoleh data dan fakta pada Hasil Evaluasi Amanat MUNAS 2005 tersebut antara lain dijelaskan bahwa selama periode 5 tahun (2004-2009) tersebut menengarai adanya:

(i) Peningkatan kegiatan dakwah Islam secara merata di seluruh tanah air.
(ii) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Islam secara merata.
(iii) Peningkatan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Islam yang bersumber dari ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.
(iv) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia masyarakat Islami.
(v) Peningkatan partisipasi dari kemitrraan masyarakat Islam dalam berbagai program pembangunan bangsa dan negara.
(vi) Peningkatan kerukunan antar ummat beragama dan ukhuwah Islamiyah serta kesetiakawanan sosial.

Hadirin para peserta MUNAS VII yang berbahagia.

Kegiatan yang cukup banyak tersebut di atas belum menggambarkan keseluruhan kegiatan yang masih banyak mewarnai kegiatan Dewan Pimpinan Pusat LDII periode 2005-2011 . Banyak kegiatan yang juga bagian dari pelaksanaan amanat MUNAS 2005 antara lain:

1. **Kegiatan pelaksanaan tatap muka** dengan melakukan *kunjungan langsung ke seluruh DPD LDII Provinsi* dalam rangka pembinaan manajemen organisasi dan pembinaan tata cara pemecahan permasalahan yang ada di lapangan.

2. **Kegiatan penegakan hukum (*law enforcement*)** dalam rangka mencari keadilan dan kesetaraan perlakuan hukum dan HAM bagi warga LDII khususnya dan umumnya bagi kelancaran jalannya roda organisasi LDII. *Success story* dalam penegakan hukum tentunya tidak perlu diungkapkan dengan secara detail namun bagi *stakeholder* yang ingin mengetahui secara lebih lengkap informasi tersebut kiranya dapat menghubungi Lembaga Bantuan Hukum LDII yang program-programnya telah berjalan dengan baik.

3. **Kegiatan Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2007** antara lain telah mengesahkan **Pernyataan Klarifikasi LDII** yang dikenal sebagai paradigma baru LDII, sebagai berikut: (i) LDII sebagai organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan telah memiliki paradigma baru, (ii) LDII bukan penerus/kelanjutan dari gerakan Islam Jamaah serta tidak menggunakan ataupun mengajarkan Islam Jama'ah, (iii) LDII tidak menggunakan ataupun menganut sistem keamiran, (iv) LDII tidak menganggap ummat Islam di luar LDII sebagai kafir atau najis, (v) Masjid LDII terbuka untuk umum dan mengingat bahwa (a) menjaga kesucian maasjid ada pahala/ganjaran yang besar, dan (b) bahwa dalam sholat perlu dijaga kesucian diri, pakaian, dan tempatnya; (vi) LDII dalam pengayaan ilmu tidak hanya dari alumni pondok LDII yang berkapasitas ustadz atau ulama, tetapi juga guru-guru pondok dan pengurus organisasi khususnya di bidang dakwah ditangani oleh para guru/ulama yang alumni Institut Agama Islam Negeri (IAIN), perguruan tinggi swasta, dan pondok pesantren lainnya; (vii) LDII tidak pernah mengajarkan kepada warganya untuk menolak diimami oleh orang di luar warga LDII, (viii) LDII bersedia, bersama dengan ormas-ormas Islam lainnya, mengikuti landasan berfikir keagamaan sebagaimana ditetapkan MUI yang meliputi metode berfikir yang dinamakan *Taswiyah al Manhaj* yang mentolerir adanya perbedaan sepanjang masih dalam koridor *ma ana 'alaihi wa ashhabi* yaitu *faham keagamaan ahlusunnah wal jama'ah* dalam pengertian luas, dan (b) penyamaan metode gerakan yang dinamakan *Tansiq al Harokah* – yang mensinkronisasi, mengkoordinasi, dan mensinergikan gerakan ummat Islam di Indonesia di bawah payung MUI.
4. **Kegiatan pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) Tahun 2009** cukup menggembirakan hasilnya dan telah didokumentasikan di dalam Buku Laporan RAPIMNAS Tahun 2009. RAPIMNAS LDII 2009 juga merupakan jawaban atas amanat MUI Pusat tentang penyebarluasan informasi tentang paradigma baru LDII sebagaimana telah diuraikan pada amar 7 di atas.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LDII telah melaporkan hasil RAPIMNAS kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Dr Susilo Bambang Yudonono. Pada saat itu beliau memberikan tanggapan positip terhadap 11 butir hasil RAPIMNAS LDII Tahun 2009, sebagai berikut:

1) Dalam hal tiga pilar mewujudkan *good government* (Pemerintahan yang baik) yaitu (i) *State* (Negara), (ii) *Financial/Private Sector* (sektor swasta/keuangan), dan (iii) *Civil Society* (masyarakat madani), sesungguhnya *main actor*-nya adalah negara, dan pemerintah adalah bagian dari negara, yang semuanya diatur dalam konstitusi kita. Saya senang dengan istilah *equillibrium* (keseimbangan), tidak statis namun dinamis. Demikian juga soal ekonomi, memang GBHN tidak ada tapi ada RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional).

   Saya senang dengan 11 butir Pernyataan RAPIMNAS dan rasanya klop betul dengan apa yang saya pikirkan. Ini juga yang menjadi isu global. Dari berbagai pertemuan saya dengan pimpinan dunia, saya makin memahami dimama letak Indonesia dalam dunia yang sedang berubah ini. Kalau kita tidak tahu dimana posisi kita maka kita akan banyak kesulitan. Maka pemerintahan harus bersih, *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dan *Clean Government* (pemerintahan yang bersih).

2) Kita sedang melakukan transformasi/konsolidasi demokrasi. Saya suka dengan istilah basis moral dan basis rasional, sebab bila irrasional dan emosional itu kepemimpinan bisa *"dangerous"* (berbahaya). Kecuali *climate change* (perubahan iklim) ini kesalahan manusia. Kalau gempa bumi itu alam. Jangan dilarikan ke mistik. Sebab saya sering dikritik setiap ada bencana dihubung-hubungkan dengan keberadaan saya sebagai Presiden. Padahal lempengan Australia dan Asia sudah mulai terjadi keretakan 5 juta tahun yang lampau dan kita semua belum ada waktu itu.

3) Cocok dengan pilihan rakyat, bagi yang berhasil dengan yang tidak berhasil juga diterima dan jangan dicari-cari kesalahan. Saya mohon kepada LDII mari kontrol sama-sama. Saya pernah kalah dalam pemuilihan Wapres 2001 tapi saya terima, lalu saya evaluasi dan berikutnya saya maju Presiden. Ini sebaiknya menjadi seruan bagi kita semua.

4) Demokrasi substansial: kekuatan LDII sangat dahsyat maka jauhkan fitnah dan kekerasan, mari kita cari cara yang halal.

5) Kedaulatan: mengapa ekonomi kita selamat? Karena kita punya keuangan, berbagai lembaga keuangan yang tidak *fully connected* (sepenuhnya berhubungan) dengan lembaga keuangan dunia sehingga kita tidak kena dampak krisis. Selain itu kita punya pengalaman menghadapi krisis ekonomi sehinga secara internal kita memiliki kemampuan mengatasi krisis. Persoalan alih teknologi, pangan dari nomor urut 5 negara pengekspor pangan dunia menjadi nomor urut 3 (kita sudah ekspor beras dan kedelai, tinggal daging dan tepung). Kalau persoalan teritorial kita komitmen bahwa tidak sejengkal tanahpun boleh diambil oleh bangsa lain. Namun untuk mempertahankan tidak harus dengan perang. Ambalat bukan pulau melainkan hanya lautan yang didalamnya banyak kandungan minyak. Kalau perang, kita siapkah dengan belasan trilyun perbulan?, belum peralatan yang rusak, belum korban sipil. Pada Perang Dunia I dan II, itu terjadi oleh karena pemimpin dunia ingin dibilang hebat.

6) Soal etika politik: cocok. Harus ada *the rule of the game* (aturan main). Kata orang-orang, debat capres waktu lalu kurang seru, suruh hantam-hantaman. Harus diketahui bahwa budaya kita berbeda dengan budaya barat. Yang penting masing-masing tahu pandangan masing-masing. Kalau saya ngotot-ngototan, diluar bisa hantam-hantaman. Ada kesepakatan dengan Jusuf Kalla untuk tidak saling menyerang.

7) Kita sepakat 2020-2025 *energy mix* (energi campuran) atau diversifikasi energi. Kalu panas bumi dimajukan, subsidi BBM akan dicabut, dan ini akan menjadi dilema bagi saya. Baiknya BBM bukan subsidi harga.

Nuklir: rakyat kita belum banyak tahu sementara rakyat juga belum rasional. Undang-undang tentang nuklir tidak akan dicabut agar bangsa Indonesia ada pilihan. Hanya karena sekarang musim Pilpres maka rasanya kurang baik bicara soal nuklir sebab nanti akan bikin ribut lagi.

8) *Reformasi pendidikan sudah bagus.* Kita ingin menyiapkan satu lapis masyarakat yang cerdas dan menguasai IPTEK. Gaji peneliti/profesor dinaikkan Rp 12 juta. Yang kedua pendidikan bagi orang miskin yaitu pendidikan gratis bagi yang miskin.

9) Masalah ICT *(Informatiopn Communication Technology)*: baru saja saya menghadiri *Green Technology Exhibition* di Korea, kita perlu membangun dan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Mari menyelamatkan moral bangsa dengan membuat *policy* atau kebijakan yang baik tentang ICT.

10) Saya setuju agar masyarakat dihimbau untuk tidak golput.

11) Warga LDII mengawal Pilpres dan menyerahkan aspirasi masing-masing warganya kepada Putra Terbaik Bangsa. Bagus ini, Pemilu akan selesai pada saatnya. Tentu LDII memiliki kewajiban mopral, bukan hanya melihat konteks dakwah tapi juga holistik (menyeluruh). Saya senang sekali dengan pimpinan LDII yang konstruktif. Pemuli 2004 berjalan dengan baik dan insyaAllah Pemilu 2009 juga berjalan dengan baik dan bisa tercapai demokrasi yang *well consolidated* (terkonsolidasi dengan baik), sebab negara lain mengalami defisit demokrasi, misal Iran, Singapura, Thailand dan Malaysia.

Bebepara catatan keberhasilan dalam Program, sebagai berikut (Catatan: untuk indikator keberhasilan berupa fakta di lapangan dapat dilihat pada Lampiran 1)

1. Peningkatan Kegiatan Dakwah Islam secara Merata di Seluruh Tanah Air.

1.1. Terbentuknya Organisasi LDII yang *legitimate* dan terakreditasi dengan baik diberbagai level pemerintahan di seluruh Indonesia (Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa).

1.2. Terbangunnya mekanisme dan prosedur kerja organisasi pada seluruh tingkatan organisasi (DPP, DPD Provinsi, DPD Kabupaten/Kota, PC dan PAC).

1.3. Tersedianya SDM organisasi yang handal untuk memutar roda orgasisasi moderen LDII.

1.4. Tersedianya prasarana dan sarana kerja organisasi yang lebih memadai.

1.5. Tersedianya dana dari sumber resmi yang tidak mengikat.

1.6. Terlaksananya advokasi dan sosialisasi melalui kegiatan penerangan dan publikasi (media cetak dan elektronik) tentang tugas pokok dan fungsi serta program kerja organisasi.

1.7. Adanya peningkatan jumlah dan penyebaran program pendidikan formal dan non-formal yang berkualitas untuk menyangga calon peserta didik yang tidak mampu secara fisik maupun ekonomi terhadap fasilitas pendidikan pemerintah.

1.8. Tertatanya Sistem Informasi Managemen LDII melalui pembangunan jejaring komunikasi dan informasi (*hardware and sofware*) yang mampu mengkondisikan persepsi masyarakat secara luas secara positif dan

kondusif sebagai pengungkit (*leverage*) kinerja organisasi

2. Kebijakan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

2.1. Adanya sistem penyelenggaraan pendidikan keagamaan secara baik berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadits.

2.2. Adanya peningkatan kuantitas dan kualitas dakwah Islam untuk masyarakat Islam di seluruh pelosok tanah air Indonesia, sehingga masyarakat lebih mampu meningkatkan aksessibilitas terhadap materi dakwah.

2.3. Adanya peningkatan jumlah dan penyebaran program pendidikan formal dan non-formal yang berkualitas untuk menyangga calon peserta didik yang tidak mampu secara fisik maupun ekonomi terhadap fasilitas pendidikan pemerintah.

2.4. Adanya peningkatan jumlah (kuantitas) dan kualitas pelatihan dan penyebarannya sehingga dapat menghasilkan kelompok angkatan kerja yang terampil, handal dan siap pakai.

2.5. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang ahli (*specialist*) dan profesional yang mempunyai keunggulan kompetitif sehingga mampu mengakses ke pasar kerja yang semakin berkembang dan berubah setiap saat.

2.6. Tersedianya sarana dan prasarana dakwah, pendidikan, pelatihan dan pengembangan SDM yang memadai dan *up to date*.

2.7. Tingkat Kesehatan keluarga yang meningkat: 1) adanya peningkatan kesehatan ibu hamil (*pregnant mother*) dan ibu yang menyusui (*lactation mother*) dan bayi, 2) adanya peningkatan pengetahuan msyarakat tentang gizi (pangan beragam, bergizi berimbang atau

3B, pola pangan harapan atau PPH, dan pangan aman, sehat, utuh dan halal (ASUH); 3) khusus untuk di daerah rawan pangan, kumuh dan miskin (*dhuafa*) adanya peningkatan aksessibilitas terhadap kartu sehat, cadangan pangan masyarakat dan pemerintah melalui program padat karya (*food for work and food for aset*) dan program-program pemberdayaan (*capacity building*) lainnya.

3. Kebijakan Pemberdayaan Potensi LDII.

3.1. Semakin meningkatnya kemampuan SDM warga LDII yang profesional dan mempunyai kemampuan (berdaya) dalam kesadaran berkonstitusi sehingga mampu berkontribusi secara positif dalam menggerakkan roda reformasi pemerintahan dalam dinamika mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.

3.2. Semakin meningkatnya kemampuan SDM warga LDII yang berkiprah dalam peningkatan ketahanan nasional sehingga mampu berkontribusi dalam peningkatan daya saing bangsa.

3.3. Semakin meningkatnya potensi SDM warga LDII yang mampu berkiprah dalam peningkatan kesadaran hukum dan HAM.

3.4. Semakin berkembangnya berbagai upaya peningkatan ekonomi umat yang dilakukan oleh SDM LDII dengan bergandengan tangan bersama pemerintah dan lembaga masyarakat lainnya, antara lain dalam program mengatasi gizi buruk untuk mengurangi kemiskinan (*Fight for hunger to reduce poverty*).

4. Peningkatan Peranserta Sosial dan Kemasyarakatan.

4.1. Terselenggaranya kerjasama yang saling menguntungkan dan terbangunnya pola kemitraan melalui berbagai upaya peningkatan pemanfaatan

sumberdaya LDII dan mitra kerja secara bersinergi dengan baik untuk meningkatkan kinerja organisasi.

4.2. Adanya manfaat yang diambil dari penerapan konsep pemberdayaan perempuan atau pengarus-utamaan gender sehingga ada peningkatan kontribusi yang setara dan berkeadilan bagi wanita Islam (muslimah) dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan nasional.

4.3. Adanya peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial terhadap masyarakat miskin, korban bencana alam dan masyarakat yang kurang beruntung lainnya.

4.4. Terbangunnya peranserta masyarakat dalam peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat.

4.5. Adanya kepedulian terhadap peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup baik itu lingkungan hidup buatan maupun lingkungan hidup alami.

5. Kebijakan Peningkatan Kerukunan Hidup Inter dan Antar Ummat Beragama.

5.1. Terbangunnya berbagai program kerjasama dan persaudaraan, program peningkatan wawasan kebangsaan dan rasa kebanggaan nasional, dan program peningkatan kesadaran, kepekaan dan kesetia-kawanan sosial secara berencana dan berkelanjutan dalam peningkatan ukhuwah Islamiah, wathoniah dan insaniah/basyariah.

5.2. Terselenggaranya kehidupan beragama yang baik terutama 1) dalam hal kerukunan diantara sesama umat beragama dan pemerintah (tri-kerukunan umat beragama) dan 2) pemberdayaan kehidupan beragama untuk membangun masyarakat madani yang maju, berkeadilan, maju dan sejahtera yang diridhoi oleh Allah SWT.

Selanjutnya kami sampaikan hasil evaluasi tehadap Rekomendasi MUNAS VI Tahun 2005 yaitu tentang rekomendasi bidang moral dan bidang penalaran. Bagaimana penerapan rekomendasi ini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan dalam kebijakan pemerintah yang relevan dengan amanat MUNAS

Ada beberapa kesimpulan dari kegiatan evaluasi kami adalah sebagai berikut:

A. **Bidang Moral: s**etiap butir rekomendasi pada Bidang Moral dalam mempengaruhi terwujudnya citra LDII yang baik dan setiap butir rekomendasi nomor 1 sampai 6 mempunyai andil pengaruh berbeda seperti digambarkan dalam prosentase kontribusi andil, berturut-turut sebagai berikut:

(1) Membangun akhlak yang berbudi luhur (19,9%),

(2) Menghargai karya sebagai manivestasi dari kemampuan SDM dalam pengembangan potensi (21,9%),

(3) Mengembangkan upaya penegakan sistem nilai moral sebagai instrumen kehidupan pada tempat pertama dan terdepan (20,9 %),

(4) Membangun SDM yang berakhlak mulia (27,2 %).

(5) Mengembangkan mentalitas produktif untuk membangun sinergi positif untuk mampu membedakan antara waspada, curiga dan prasangka (5,02%)

(6) Meningkat kesadaran masyarakat untuk menghindari friksi-friksi (gesekan) di masyarakat ke arah penciptaan moralitas seperti apa yang terkandung dalam falsafah Pancasila (5.02 %).

Kualitas moral dapat secara signifikan ditingkatkan dengan berbagai aktifitas pada pembangunan akhlak yang mulia,

menghargai karya SDM dengan mengembangkan potensi, mengembangkan sistem nilai dalam tahapan yang prioritas, dan berupaya membangun SDM yang berakhlak mulia.

B. **Bidang Penalaran:** Setelah melalui analisis dengan Skala Likert dan dibuat persentase kontribusi setiap kegiatan penalaran terhadap pembentukan Citra LDII maka pengaruh per kegiatan dapat disampaikan dalam Matrik berikut:

Matriks Kontribusi Kegiatan Penalaran terhadap peningkatan Citra LDII

No	Kegiatan Penalaran	% Kontribusi*)
1.	Meningkatkan budaya kerja keras dan upaya menabung dalam membangun produktivitas bangsa yang semakin tinggi.	9,81%
2.	Membangun sistem demokratisasi di Indonesia dengan mengembangkan partisipasi masyarakat yang tinggi.	1,26%
3.	Meningkatkan semangat Bhineka Tunggal Ika dengan mewujudkan sinergi nasional antar komponen masyarakat melalui semangat toleransi, dialog dan keterbukaan.	11.89%
4.	Menumbuhkan iklim sinergi nasional dalam menghadapi lingkungan strategis baik lingkup nasional dan internasional.	5,47%
5.	Meningkatkan kualitas Pemilukada akan menghasilkan pemimpin yang *legitimate* dan berkualitas.	6,04%

6.	Meningkatkan efisiensi Sumber Daya Pembangunan sehingga lebih meningkatkan *lifetime* seluruh instrumen fisik penunjang kehidupan baik *private* maupun *public good*.	11,89%
7.	Meningkatkan solidaritas nasional dengan menggalakkan kepedulian sosial dalam penanganan berbagai musibah bencana alam.	13,21%
8.	Meningkatkan kualitas SDM bangsa melalui peningkatan pendidikan generasi penerus bangsa sehingga menjadi generasi yang befungsi sebagai *problem solver* yang baik dan kompeten.	13,02%
9.	Membangun dan meningkatkan sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak dalam membangun kesehatan generus bangsa agar menjadi SDM yang berkualitas.	7,36%
10.	Membangun keluarga yang taat mengamalkan perintah agama yang terkait dengan kebersihan fisik, bersih dari pornograi dan pornoaksi.	9,06%
	Pembentukan CITRA LDII	100%

*) Persentase kontribusi setiap kegiatan terhadap perwujudan citra LDII.

Dapat disampaikan bahwa kontribusi kegiatan diatas 10% menggambarkan andil yang nyata di lapangan dan merupakan kegiatan yang memang menjadi pengungkit (*leverage*) citra LDII di masyarakat yaitu: (1) Ormas LDII telah mampu memberikan motivasi kepada warganya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan keterlibatannya dalam penyelenggaraan demokratisasi di Indonesia, (2) Ormas LDII selalu konsen dengan kesatuan dan persatuan, jujur, amanah,

rukun, kompak dan kerjasama yang baik dan menghormati kebhinekaan (keragaman) dengan upaya mewujudkan sinergitas yang tinggi antar komponen bangsa dengan dialog, toleransi dan keterbukaan, (3) Ormas LDII telah berhasil dalam meningkatkan solidaritas nasional dengan menggalakkan kepedulian sosial dalam penanganan berbagai musibah bencana alam, (4) Ormas LDII selalu berupaya meningkatkan kualitas SDM bangsa melalui peningkatan pendidikan generasi penerus bangsa sehingga menjadi generasi yang befungsi sebagai *problem solver.* Sensitifitas terhadap penalaran kegiatan lainnya sudah baik namun kiranya perlu ditingkatkan.

Adapun dimensi citra LDII yang dirumuskan dalam 5 (lima) katagori dimensi yaitu dimensi Komunikasi, Produk/Karya, Kontribusi, Pengembangan Kelembagaan, dan Peningkatan SDM mempunyai tingkat responsivitas yang relatif sama terhadap pengaruh rekomendasi bidang moral. Sehinga kita dapat menyimpulkan bahwa setelah ada pelaksanaan rekomendasi moral dan penalarannya maka dimensi-dimensi Citra LDII dapat berkembang secara paralel.

BAB III. LINGKUNGAN STRATEGIS DAN PERMASALAHAN SAAT INI.

LDII harus secara tajam mencermati perubahan lingkungan strategis yang lajunya sangat dinamis saat, sebelum LDII menetapkan strategi dakwah dan program-program penunjang lainnya ke depan. Kecermatan ini diperlukan untuk mengungkap esensi persoalan yang sebenarnya. Tanpa kecermatan maka kemungkinan besar LDII kurang mampu mendapatkan substansi isi masalah dari setiap fenomena yang berkembang, yang pada gilirannya dapat mengantarkan LDII pada suatu pengambilan keputusan yang keliru termasuk dalam menentukan strategi dakwah dan program kerja lainnya ke depan.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan bagian integral dari penerapan *good governance* atau tata kelola pemerintahan mendorong pemerintah untuk terbuka dan mendorong keterbukaan informasi publik. Pada konteks ini,

LDII diuntungkan karena dapat mendapatkan informasi yang akurat dan obyektif. Kebebasan pers dijamin begitu pula kebebasan menyampaikan pendapat difasilitasi. Tekad kuat pemerintah untuk transparan dan akuntabel bukannya tanpa resiko, karena berbagai skandal, kebobrokan atau berbagai *uneg-uneg dapat terungkap secara gamblang*, baik kebobrokan itu dilakukan oleh masyarakat, pengusaha maupun aparatur negara itu sendiri. Hal-hal yang terungkap berkait tekad pemerintah untuk transparan antara lain:

i. Berbagai kasus di bidang ekonomi maupun politik sebagai kasus2 yang besar yang terungkap menjadi salah satu penyebab.

ii. Kasus saling curiga intra dan antar pemeluk agama sedang terjadi.

iii. Perdebatan tentang seberapa besar kewenangan negara dalam mengatur masyarakat telah menjadi aktivitas pada ranah ideologis maupun politis (misal : antara neolib vs Pancasila vs negara sekuler vs negara islam)

iv. Wacana khilafah, pengelolaan zakat vs pajak dan hal ini perlu diluruskan dengan menggali ilmunya yang mendukung kebenaran tentang pelaksanaan zakat dan tentang pemerintah yang mengutip pajak.

v. Politik pencitraan, yang berkembang saat awal reformasi dan dengan dilaksanakan pemilu langsung telah menjadi sorotan kritis, seolah di dalam hal ini sifat jujur dan amanah merupakan sifat-sifat yang mulai tererosi dari sistem nilai atau dari sistem yang mendasar dari karakter bangsa.

vi. Perkembangan aktivitas terorisme yang terjadi, yang terlalu mudah dikaitkan dengan persoalan agama Islam.

vii. Tererosinya pengamalan nilai – nilai Pancasila beserta segenap aktualisasinya, menyebabkan terjadinya pengenalan-pengenalan berbagai pendekatan ideologi

alternatif, maupun pendekatan no-ideologi yang artinya liberalisasi penuh seperti yg dirasakan terjadi saat ini.

Pengungkapan uneg-uneg, kebobrokan dan bahkan skandal-skandal adalah penting bagi LDII agar dapat lebih tepat dalam menentukan arah dan program kerjanya ke depan. Karena tanpa pengungkapan tersebut, LDII tidak akan pernah memahaminya dan memberikan sejumlah perspektif dari berbagai dimensi. Dengan menutup-nutupi uneg-uneg, kebobrokan dan skandal maka kelak akan menjadi '*api dalam sekam*' yang justru dampaknya sangat berbahaya.

Selain hal di atas, masih terdapat sejumlah pengungkapan fakta yang terkait dengan kondisi nyata tentang kemiskinan yang terlihat pada tataran internasional: (i) 1.4 milyar manusia dalam keadaan miskin dan tidak ada kejelasan peluang kedepannya; (ii) 9 juta balita meninggal setiap tahun; (iii) 69 juta anak usia sekolah tidak bisa sekolah, (iv) 884 juta orang tidak punya akses ke air bersih, (v) 2.6 milyar tidak berada dalam akses sanitasi bersih (misal : membiasakan cuci tangan sebelum makan akan mengurangi 40% peluang diare, ventilasi dan lain-lain).

Kemiskinan kentara maupun tidak kentara akibat dari adanya hak-hak dasar warga yang belum terpenuhi secara optimal, adil, dan merata: (i) terbatasnya kecukupan dan mutu pangan; (ii) terbatasnya akses dan mutu layanan kesehatan, (iii) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan, (iv) terbatasnya kesempatan kerja produktif dan berusaha, (v) terbatasnya akses pelayananan perumahan, (vi) terbatasnya akses terhadap air bersih dan sanitasi; (vii) lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, (viii) memburuknya kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, (ix) lemahnya perlindungan/jaminan hak atas rasa aman; dan (x) lemahnya akses partisipasi masyarakat miskin.

Terjadinya sejumlah kasus konflik dengan berbagai motif dan bentuk perilaku baik dalam lingkup nasional, lingkup daerah, maupun antar warga masyarakat menunjukkan betapa besar

bahaya yang dihadapi oleh bangsa dan negara dan betapa jauh akibat malapetaka yang harus diderita rakyat. Oleh karena itu kewaspadaan nasional harus ditingkatkan, dengan sejak dini mengupayakan agar peristiwa-peristiwa konflik yang membawa penderitaan dan kesengsaraan bagi rakyat jangan terulang kembali atau paling tidak dapat diminimalisir. Perlu disadari bahwa bangsa Indonesia memiliki latar belakang ras, etnik, agama, budaya, golongan satu sama lain yang berbeda. Hal ini perlu disatukan untuk mencapai tujuan bersama (sebagai ciri sebuah nation). Terjadinya integrasi nasional akan dapat dilihat dari beberapa indikasi. Beberapa indikasi adanya integrasi nasional adalah: (1) adanya rasa aman dan sejahtera pada level minimal yang terukur, (2) berjalannya fungsi-fungsi layanan masyarakat, bangsa, dan negara, komunikasi dan solidaritas dalam masyarakat, dan kemampuan menangkap peluang global secara dinamis.

Oleh karena itu, LDII perlu terus mendorong pemerintah untuk mempertahankan tingkat keterbukaan, transparansi dan akuntabilitasnya, bahkan meningkatkannya pada masa-masa mendatang, agar lebih banyak lagi uneg-uneg, kebobrokan dan skandal yang terungkap, yang pada gilirannya memudahkan LDII untuk mendapatkan data dan informasi yang obyektif, serta tidak ditutup-tutupi. Dalam keadaan demikian, maka perumusan strategik termasuk strategi dakwah LDII dapat dirumuskan secara lebih sesuai dengan keadaan.

Oleh karena itu , dalam menyusun program kegiatan MUNAS VII LDII Tahun 2011 ini hendaknya:

(1) Lebih cermat dan cerdas mempelajari lingkungan strategis dan permasalahan yang berkembang saat ini di negara kita maupun perkembangan situasi global. Dengan memahami perubahan-perubahan strategis yang terjadi dalam masyarakat baik infrastruktur maupun suprastruktur akan menjadi bahan pertimbangan secara antisipatif dan pro-aktif dalam menyusun rencana strategis, program kerja dan kegiatan LDII periode yang akan datang.

(2) Memperhatikan hasil evaluasi pencapaian amanat MUNAS VI LDII Tahun 2005 agar dapat mengetahui kegiatan apakah kiranya yang belum sepenuhnya dapat dicapai dengan baik, dilihat kembali masih belum dilakukan untuk mencapai VISI dan MISI LDII dan kiranya masih banyak yang harus dilakukan.

(3) Memperhatikan rekomendasi RAPIMNAS Tahun 2009 dan kemungkinan tindak-lanjutnya dalam Program Kerja LDII 2011-2016.

BAB IV. KESIMPULAN

(1) Pengurus LDII periode 2005-2011 telah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan Program Kerja sesuai dengan Rencana Strateji sesuai dengan amanat MUNAS LDII VI.

(2) Pencapaian sasaran program dakwah LDII Periode 2005-2011 adalah karena adanya komitmen dari seluruh Pengurus LDII pada semua level organisasi yaitu Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota bahkan sampai pada level pimpinan cabang dan pimpinan anak cabang di seluruh Indonesia.

(3) Kerja keras yang menciptakan berbagai keberhasilan dalam menorehkan hasil pengabdian berupa kontribusi LDII dalam pembangunan bangsa terutama dalam pembentukan karakter bangsa melalui kegiatan Dakwah tentunya masih banyak kekurangannya. Maka dengan ini tentunya kami mengetuk pintu maaf dari semua peserta MUNAS VII LDII, semoga amal bakti kita semua sebagai pengurus LDII pada semua tingkatan mendapat pahala yang tinggi dari Allah SWT dan kita selalu berdoa untuk terus memohon petunjukNya untuk mampu berkontribusi dengan yang lebih baik ke depan.

BAB V. REKOMENDASI

1. Sebagai organisasi kemasyarakatan/masyarakat madani *civil society*, LDII melalui kegiatan Dakwah. LDII hendaknya berusaha keras agar mampu menjalankan fungsi-fungsi pemberdayaan individu dan masyarakat secara sendiri-sendiri atau gotong-royong, mendorong aktivitas-aktivitas pemanduan (voluntaritas), meningkatkan kapasitas produktif bangsa dalam kondisi keberagaman, penegakan nilai-nilai netralitas aktif dalam politik demokrasi dan ikut menumbuhkembangkan semangat politik kenegarawanan dalam memecahkan berbagai persoalan bangsa dengan prinsip "*sepi ing pamrih, rame ing gawe*."

2. Dalam upaya meningkatkan kinerja kehidupan beragama, LDII mengharapkan kepada berbagai faktor-faktor penentu legitimasi dalam penegakan hukum atas kebebasan untuk menjalankan peribadahan sesuai keyakinan masing-masing umat asalkan masih dalam koridor *ahlu sunnah wah jama'ah* dan menjalankan konsep *Taswiyah al Manhaj* dan *Tansiq al Harokah*."

3. Dalam peransertanya ikut menyukseskan program pembangunan bangsa Indonesia, dengan merujuk pada RPJMN 2009-2014, maka LDII mendorong agar seluruh komponen bangsa ikut serta melakukan upaya – upaya sebagai berikut:

   a. Meningkatkan upaya – upaya penyediaan sarana/pelayanan kesehatan, agar biaya kesehatan bagi rakyat kecil dapat terbantu, dengan keyakinan menjaga kesehatan termasuk kebersihan termasuk pangkal dari iman. Dengan kesehatan pulalah kita akan memperoleh peluang untuk mengabdi kepada lingkungan dan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

   b. Meningkatkan kualitas pendidikan anak dan remaja dengan jalan mengembangkan dan melaksanakan pendidikan non-formal di bidang *soft skill*, pemahaman

agama dan budi pekerti, agar nantinya dapat terwujud SDM profesional yang berdaya saing dan berstandar moral tinggi.

c. Dalam menangani isu-isu global yang sedang berkembang akhir-akhir ini di bidang lingkungan hidup, agar turut melaksanakan partisipasi aktif khususnya dalam peningkatan dan rehabilitasi kualitas lingkungan hidup di wilayah dan di bidangnya masing-masing, meneruskan kegiatan penghijauan nasional LDII Go Green dan pemanfaatan internet sehat.

d. Berupaya meningkatkan penguasan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam proses penguatan sistem produksi nasional guna menaikkan produktivitas dan daya saing bangsa.

4. Dalam era kebebasan informasi, yang juga mempunyai dampak negatif dalam mudahnya memperoleh situs pornografi, rekomendasi agar LDII selaku ormas keagamaan menggiatkan aktivitas butir *amar ma'ruf nahi munkar* guna mendorong motivasi para remaja untuk lebih mampu menggali dan mendayagunakan informasi positif dan produktif (*valueable information*), sehingga para remaja dapat semakin siap dalam menghadapi era global dan dapat terhindar dari perangkap dekadensi moral.

5. Dalam mewujudkan cita-cita bangsa maka agar LDII sebagai komponen bangsa dalam mempraktekkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan tetap mengindahkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945.

6. Agar LDII sebagai komponen bangsa harus berada di depan dalam meningkatkan rasa solidaritas nasional dalam membantu menyelesaikan berbagai jenis musibah, dalam kondisi yang masih sering terjadi berbagai bencana alam seperti gempa dan banjir. Hal ini sebagai konsekuensi logis posisi geografis Indonesia dan telah terjadinya degradasi berbagai fungsi lingkungan.

BAB VI. PENUTUP

Demikianlah Laporan Pertanggungjawaban ini kami sampaikan dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih. Semoga Allah SWT memberikan manfaat dan barokah bagi kita semua. Selanjutnya kami mengharapkan MUNAS VII LDII Tahun 2011 ini dapat berjalan lancar, aman dan sukses sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Kepada segenap Panitia MUNAS VII Tahun 2011 serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah mempersiapkan, mengorganisir dan membantu baik moril maupun material, sehingga MUNAS VII ini dapat terselenggara dengan baik, kami mengucapkan terimakasih, mudah-mudahan Allah SWT. memberi pahala yang berlimpah. Amien.

Surabaya, 9 Maret 2011
Dewan Pimpinan Pusat,
Lembaga Dakwah Islam Indonesia

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
DEWAN PIMPINAN PUSAT
L D I I

Prof. DR. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc.
Ketua Umum

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

NOMOR : KEP-10/MUNAS VII LDII/III/2011

Tentang:

PERNYATAAN MUSYAWARAH NASIONAL VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUSYAWARAH NASIONAL VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia telah mencermati dan mengamati dengan sungguh gerak dan dinamika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta sebagai perwujudan dari kepedulian dan konstribusi LDII dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan, mempererat persatuan dan kesatuan sebagai bagian bangsa Indonesia.

b. bahwa telah berkembang saran dan masukan dari nara sumber dan peserta

MUNAS VII LDII yang menyikapi perkembangan lingkungan strategis akhir-akhir ini, maka MUNAS VII LDII merasa perlu menentukan sikap.

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas MUNAS VII LDII perlu merumuskan dan menetapkan pernyataan dalam suatu keputusan MUNAS VII LDII.

Mengingat :

1. Undang–undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Undang–undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.
3. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan.
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDII hasil MUNAS VI LDII Tahun 2005 di Jakarta.
6. Hasil Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) LDII Tahun 2009.
7. Hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) LDII Tahun 2010.
8. Hasil Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) LDII Tahun 2000.
9. Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LDII Tahun 2007.

10. Keputusan MUNAS VII LDII Nomor: 01/MUNAS VII LDII/III/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Peraturan Tata Tertib MUNAS VII LDII.
11. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor : KEP-077/DPP LDII/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 tentang Penyelenggaraan MUNAS VII LDII.

Memperhatikan:
1. Laporan Pemandangan umum, usul serta saran peserta MUNAS VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
2. Hasil Sidang Komisi E MUNAS VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang membahas tentang Pernyataan MUNAS Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011.

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PERNYATAAN MUSYAWARAH NASIONAL VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA.

KESATU : Pernyataan MUNAS VII LDII adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pernyataan MUNAS VII LDII merupakan penyampaian aspirasi dari warga LDII dalam koridor/bingkai NKRI.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 9 Maret 2011
4 Rabi'ul Tsani 1432

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc.
Ketua Merangkap Anggota

Prof. DR. Sc. Agr. Ir. H. Jamsari, MP.
Wakil Ketua Merangkap Anggota

Drs. H. Muh. Hidayat Nahwi Rasul
Sekretaris Merangkap Anggota

Prof. DR. H. Singgih Tri Sulistyono, M.Hum.
Wakil Sekretaris Merangkap Anggota

Ir. H. Muh. Yasaf Andi Koddang, M.S.
Anggota

Ir. H. Muhammad Nurchozim
Anggota

Ir. H. Abdullah A. Karim, M.Si.
Anggota

Lampiran : KEPUTUSAN MUNAS VII LDII TAHUN 2011
Nomor : KEP-10/MUNAS VII LDII/III/2011
Tanggal : 9 Maret 2011
4 Rabi'ul Tsani 1432

PERNYATAAN MUSYAWARAH NASIONAL VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

A. Pendahuluan

Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, para pendiri Negara (*the founding fathers*) telah menyadari sepenuhnya bahwa untuk kesejahteraan rakyat-lah, Negara Republik Indonesia ini didirikan. Empat kewajiban dan tanggungjawab atau misi bernegara yang mereka cantumkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yakni melindungi tumpah darah rakyat, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, kesemuanya menempatkan rakyat pada posisi sentral dan yang menjadi penerima manfaat utama pendirian Negara ini. Didalam pemikiran para *founding fathers* bangsa Indonesia, negara adalah sebuah instrumen untuk melayani rakyat, melindungi tumpah darah mereka, memajukan kesejahteraan mereka, mencerdaskan mereka, dan menjaga keamanan mereka.

Bahwa berdasarkan pembukaan UUD 1945, maka tujuan kehidupan berbangsa selanjutnya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Bahwa dalam amanat pembukaan UUD 1945 telah mengamanatkan, bahwa dalam cara menyelesaikan berbagai persoalan adalah dengan atau melalui penemuan hikmat kebijaksanaan melalui proses musyawarah. Maka dalam hal

ini, LDII menghimbau agar seluruh elemen bangsa dalam menyelesaikan berbagai persoalan di berbagai tingkatan kerumitan, agar tetap menggunakan prinsip-prinsip menggali hikmat kebijaksanaan dalam proses musyawarah.

B. Pernyataan

Berangkat dari uraian di atas yang merupakan agregasi aspirasi warga LDII dalam MUNAS VII LDII 2011 yang berlangsung selama dua hari, pada tanggal 8 – 9 Maret 2011, maka LDII sebagai salah satu organisasi sosial kemasyarakatan (*civil society*) yang mempunyai kepedulian terhadap terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bermartabat dan sejahtera, dalam sikapnya menyampaikan kesimpulan Musyawarah Nasional sebagai berikut :

1. LDII mencermati, bahwa kondisi keterbukaan informasi sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, telah terjadi tarik menarik dalam menentukan rujukan sistim nilai pada berbagai aspek kehidupan. Keadaan ini perlu difahami oleh bangsa Indonesia untuk semakin mampu **menggali kearifan** yang semakin tinggi dan berkualitas pada berbagai pembentukan peraturan-perundangan serta pada berbagai tingkatan dan jenis kepemimpinan, agar tekad untuk **hidup bersama sebagai suatu bangsa** dapat terjaga pada tujuan semula, sesuai yang telah tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Untuk itu 4 pilar: Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI harus menjadi rujukan utama dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang harmonis.

2. LDII mencermati, bahwa kinerja bangsa akan dipengaruhi pula oleh keadaan sistim global, yang terdiri atas berbagai lembaga internasional yang berpengaruh dalam periode abad XXI ini, yang seringkali tidak berfungsi sebagaimana

seharusnya. Sehingga terjadilah apa yang dikenal sebagai *Global Financial Crisis*, *Energy Crisis* dan *Food Crisis* dan sebagainya yang cukup berdampak negatif pada tingkat nasional dan lokal. Memperhatikan keadaan tersebut, mengharuskan agar bangsa Indonesia **semakin menemukan jati dirinya dalam cara-cara memecahkan persoalannya** dan tidak harus selalu mengikuti paradigma-paradigma yang justru terbukti telah menimbulkan masalah global sebagaimana contoh-contoh diatas.

3. LDII mencermati, bahwa berbagai praktek demokrasi dalam bentuk pemilihan, baik legislatif, eksekutif ataupun pemilihan personil komisioner-komisioner lembaga independen, hendaknya diarahkan pada terwujudnya tiga *key leverage* demokrasi, yaitu terpenuhinya syarat (i) **moral**, (ii) **kompetensi** penggiat demokrasi dan (iii) **keseimbangan peran** dalam suatu negara. Pengertian negara yang dimaksud adalah berbagai lembaga negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif), lembaga ekonomi-finansial dan lembaga kemasyarakatan (*civil society*) dan disertai terjadinya proses pendalaman makna demokrasi itu sendiri, melalui **pendidikan demokrasi** pada berbagai lapisan masyarakat, serta dilaksanakannya proses *partisipatory planning* dalam perencanaan pembangunan nasional. Dalam semangat ini, hendaknya berbagai ormas dan parpol serta organisasi yang penting seperti KPU dapat menyusun dan melaksanakan program pendidikan demokrasi pada berbagai tingkatan dan tidak hanya sekedar sosialisasi praktek pelaksanaan pemilu saja.

4. LDII mencermati, bahwa dalam berbagai bentuk krisis finansial, menunjukkan bahwa ekonomi kerakyatan dan sistim usaha yang berbasis syariah, terbukti menunjukkan ketahanan relatif yang lebih baik bagi para pengguna sistim tersebut. Untuk itu LDII menghimbau agar ekonomi kerakyatan dan sistim usaha berbasis syariah, perlu mendapat pendalaman lebih lanjut, baik dari sisi akademis maupun dari sisi praktis.

5. LDII mencermati, bahwa dalam menyongsong era keterbukaan ekonomi-finansial antar negara yang menimbulkan kondisi hiperkompetitif di satu segi, dan di segi lain terjadi tarik-menarik sistim nilai dalam rujukan gaya hidup (*life style*), maka LDII menganggap perlu agar SDM Indonesia dapat meningkatkan kapasitas profesionalisme yang kompetitif sekaligus menjaga jati diri bangsa sebagai bangsa religius, sehingga dapat terbentuk SDM Indonesia yang profesional religius.

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

NOMOR : KEP-11/MUNAS VII LDII/III/2011

Tentang:

PEMILIHAN LANGSUNG
KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUSYAWARAH NASIONAL VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Menimbang

a. bahwa Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam salah satu fungsinya adalah melakukan suksesi kepemimpinan.
b. bahwa Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi, berwenang menetapkan komposisi Dewan Penasihat dan Dewan

Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2011-2016.

c. bahwa untuk jabatan Ketua Umum, atas kehendak permusyawaratan yang berkembang dalam MUNAS VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia menghendaki pemilihan langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) masa bakti 2011-2016.

d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan suatu keputusan MUNAS VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia tentang pemilihan langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2011-2016.

Mengingat

1. Undang–undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Undang–undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.
3. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan.
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia hasil MUNAS VI LDII Tahun 2005 di Jakarta.
6. Hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) LDII Tahun 2009.
7. Hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) LDII Tahun 2010.
8. Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LDII Tahun 2000.

9. Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LDII Tahun 2007.
10. Keputusan MUNAS VII LDII No. 01/MUNAS VII LDII/III/2011 tentang Peraturan Tata Tertib MUNAS VII LDII Tahun 2011.
11. Keputusan MUNAS VII LDII No. 04/MUNAS VII LDII/III/2011 tentang Peraturan Tata Tertib dan Tata Cara Pemilihan Langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2011 – 2016 Dan Pembentukan Formatur Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
12. Surat Keputusan DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-077/DPP LDII/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 tentang penyelenggaraan MUNAS LDII.

Memperhatikan

1. Pemandangan umum daerah, usul serta saran peserta MUNAS VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
2. Hasil pemilihan Ketua Umum secara langsung dalam Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia tanggal 9 Maret 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PEMILIHAN KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA MASA BAKTI 2011-2016 DILAKUKAN SECARA LANGSUNG.

PERTAMA

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2011-2016 adalah seperti tersebut

dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA Menugaskan kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII) terpilih sebagai Ketua Formatur bersama-sama dengan Anggota Formatur lainnya untuk menyusun Komposisi dan Personalia Dewan Penasihat dan Pengurus DPP LDII masa bakti 2011-2016.

KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 9 Maret 2011
4 Rabi'ul Tsani 1432

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc.
Ketua Merangkap Anggota

Prof. DR. Sc. Agr. Ir. H. Jamsari, MP.
Wakil Ketua Merangkap Anggota

Drs. H. Muh. Hidayat Nahwi Rasul
Sekretaris Merangkap Anggota

Prof. DR. H. Singgih Tri Sulistyono, M.Hum.
Wakil Sekretaris Merangkap Anggota

Ir. H. Muh. Yasaf Andi Koddang, M.S.
Anggota

Ir. H. Muhammad Nurchozim
Anggota

Ir. H. Abdullah A. Karim, M.Si.
Anggota

Lampiran : KEPUTUSAN MUNAS VII LDII TAHUN 2011
Nomor : KEP-11/MUNAS VII LDII/III/2011
Tanggal : 9 Maret 2011
4 Rabi'ul Tsani 1432

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
MASA BAKTI 2011 – 2016
KETUA UMUM TERPILIH

Prof. DR. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 9 Maret 2011
4 Rabi'ul Tsani 1432

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc.
Ketua Merangkap Anggota

Prof. DR. Sc. Agr. Ir. H. Jamsari, MP.
Wakil Ketua Merangkap Anggota

Drs. H. Muh. Hidayat Nahwi Rasul
Sekretaris Merangkap Anggota

Prof. DR. H. Singgih Tri Sulistyono, M.Hum.
Wakil Sekretaris Merangkap Anggota

Ir. H. Muh. Yasaf Andi Koddang, M.S.
Anggota

Ir. H. Muhammad Nurchozim
Anggota

Ir. H. Abdullah A. Karim, M.Si.
Anggota

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

NOMOR : KEP-12/MUNAS VII LDII/III/2011

Tentang:

PEMBENTUKAN FORMATUR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUSYAWARAH NASIONAL VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa MUNAS VII LDII sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi, berwenang menetapkan komposisi Dewan Penasihat dan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2011-2016 dengan membentuk Formatur.
b. bahwa untuk jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, atas kehendak permusyawaratan yang berkembang dalam MUNAS VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia menghendaki pemilihan

langsung dan telah berhasil memilih Ketua Umum masa bakti 2011-2016 sekaligus bertindak sebagai Ketua Formatur.

c. bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Formatur senantiasa memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011, sehingga tersusun kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang mampu bekerja sama secara serasi, kompak, kuat, berwibawa serta penuh semangat pengabdian dan perjuangan dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi.

d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan suatu keputusan Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011 tentang Pembentukan Formatur.

Mengingat :

1. Undang–undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Undang–undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.
3. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan.
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia hasil MUNAS VI LDII Tahun 2005 di Jakarta.
6. Hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) LDII Tahun 2009.

7. Hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) LDII Tahun 2010.
8. Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LDII Tahun 2000.
9. Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LDII Tahun 2007.
10. Keputusan MUNAS VII LDII No. 01/MUNAS VII LDII/III/2011 tentang Peraturan Tata Tertib MUNAS VII LDII Tahun 2011.
11. Keputusan MUNAS VII LDII No. 04/MUNAS VII LDII/III/2011 tentang Peraturan Tata Tertib dan Tata Cara Pemilihan Langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2011 – 2016 Dan Pembentukan Formatur Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
12. Surat Keputusan DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-077/DPP LDII/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 tentang penyelenggaraan MUNAS LDII.

Memperhatikan:
1. Hasil pemilihan Ketua Umum DPP LDII secara langsung dalam Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia tanggal 9 Maret 2011.
2. Usulan dan saran yang berkembang dalam sidang paripurna Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia tanggal 9 Maret 2011, tentang personalia Formatur

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN FORMATUR.

KESATU: Membentuk Formatur yang terdiri atas 7 (tujuh) orang dengan komposisi dan

personalia sebagai berikut:

1. Ketua : Prof. DR. Ir. KH. A. Syam, M.Sc.
2. Sekretaris : Prof. DR. Ir. H. Jamsari, MP.
3. Anggota : KH. K. Asshidqi, SE, M.Ak.
4. Anggota : KH. A. Hakim Mulyono, Bc.TT.
5. Anggota : Ir. H. M. Y. Andi Koddang, M.S.
6. Anggota : dr. H. Sutiman Sutiyono, Sp.A.
7. Anggota : Drs. H. Winoto, M.Pd.

KEDUA: Dalam melaksanakan tugasnya, Formatur diberi mandat penuh untuk dan atas nama Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011 untuk memilih, menyusun dan menetapkan susunan dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2011–2016.

KETIGA: Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Formatur wajib berpegang teguh pada AD/ART Lembaga Dakwah Islam Indonesia serta memperhatikan persyaratan-persyaratan bagi personalia Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

KEEMPAT: Formatur melaporkan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, kepada Rapat Paripurna MUNAS VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011 untuk disahkan sebagai Keputusan MUNAS VII LDII.

KELIMA: Tugas formatur berakhir setelah tersusun komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia

masa bakti 2011 – 2016.

KEENAM: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 9 Maret 2011
4 Rabi'ul Tsani 1432

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc.
Ketua Merangkap Anggota

Prof. DR. Sc. Agr. Ir. H. Jamsari, MP.
Wakil Ketua Merangkap Anggota

Drs. H. Muh. Hidayat Nahwi Rasul
Sekretaris Merangkap Anggota

Prof. DR. H. Singgih Tri Sulistyono, M.Hum.
Wakil Sekretaris Merangkap Anggota

Ir. H. Muh. Yasaf Andi Koddang, M.S.
Anggota

Ir. H. Muhammad Nurchozim
Anggota

Ir. H. Abdullah A. Karim, M.Si.
Anggota

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

NOMOR : KEP-13/MUNAS VII LDII/III/2011

Tentang:

PENGESAHAN KOMPOSISI DAN PERSONALIA
DEWAN PENASIHAT DAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
MASA BAKTI 2011 – 2016

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUSYAWARAH NASIONAL VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi, berwenang menetapkan komposisi dan personalia Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2011-2016 melalui Formatur.
b. bahwa Formatur sebagaimana termaktub

dalam huruf (a) telah berhasil melaksanakan sebagian tugasnya menyusun komposisi dan personalia Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2011-2016.

c. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan suatu keputusan tentang komposisi dan personalia Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2011-2016.

Mengingat :

1. Undang–undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Undang–undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.
3. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan.
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia hasil MUNAS VI LDII Tahun 2005 di Jakarta.
6. Hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) LDII Tahun 2009.
7. Hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) LDII Tahun 2010.
8. Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LDII Tahun 2000.
9. Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LDII Tahun 2007.
10. Keputusan MUNAS VII LDII No. 01/MUNAS VII LDII/III/2011 tentang

Peraturan Tata Tertib MUNAS VII LDII Tahun 2011.

11. Keputusan MUNAS VII LDII No. 04/MUNAS VII LDII/III/2011 tentang Peraturan Tata Tertib dan Tata Cara Pemilihan Langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2011 – 2016 Dan Pembentukan Formatur Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
12. Surat Keputusan DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-077/DPP LDII/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 tentang penyelenggaraan MUNAS LDII.

Memperhatikan: Hasil Rapat Formatur Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia tanggal 9 Maret 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PENGESAHAN KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PENASIHAT DAN DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA MASA BAKTI 2011-2016.

KESATU : Komposisi dan personalia Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2011-2016 adalah seperti tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Masa bakti Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia adalah lima tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini.

KETIGA : Menugaskan Tim Formatur untuk menyelesaikan penyusunan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2011 –

2016 dalam waktu 14 hari dan untuk selanjutnya disahkan melalui Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 9 Maret 2011
4 Rabi'ul Tsani 1432

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc.
Ketua Merangkap Anggota

Prof. DR. Sc. Agr. Ir. H. Jamsari, MP.
Wakil Ketua Merangkap Anggota

Drs. H. Muh. Hidayat Nahwi Rasul
Sekretaris Merangkap Anggota

Prof. DR. H. Singgih Tri Sulistyono, M.Hum.
Wakil Sekretaris Merangkap Anggota

Ir. H. Muh. Yasaf Andi Koddang, M.S.
Anggota

Ir. H. Muhammad Nurchozim
Anggota

Ir. H. Abdullah A. Karim, M.Si.
Anggota

Lampiran : KEPUTUSAN MUNAS VII LDII TAHUN 2011
Nomor : KEP-13/MUNAS VII LDII/III/2011
Tanggal : 9 Maret 2011
4 Rabi'ul Tsani 1432

KOMPOSISI DAN PERSONALIA
DEWAN PENASIHAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
MASA BAKTI 2011 – 2016

Ketua :	KH. Kasmudi Ashshidqi, SE., M.Ak.
Wakil Ketua :	DR. H. Bambang Kusumanto, MA.
Wakil Ketua :	Ir. H. K. Mertohadidjojo, MBA., M.Sc.
Sekretaris :	H. Ahmad Alfurqon Ngaino, SH., M.M.
Wakil Sekretaris :	KH. Edy Suparto, S.Pdi.
Anggota :	1. KH. Abdul Syukur
	2. KH. Abdul Hakim Mulyono, Bc.TT.
	3. KH. Sholihun
	4. Ir. H. Musyanif
	5. Drs. H. RBM Rofik K., SH., M.M.

KOMPOSISI DAN PERSONALIA
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
MASA BAKTI 2011 – 2016

Ketua Umum :	Prof. DR. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc.
Ketua :	Ir. H. Prasetyo Sunaryo, MT.
Ketua :	Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc.
Ketua :	Ir. H. Teddy Suratmadji, M.Sc.
Ketua :	H. Achmad Kuntjoro, SE., MBA.
Ketua :	Ir. H. Rathoyo Rasdan, MBA.
Ketua :	DR. Ir. H. S. Wiganda, M.Agr.Sc.
Ketua :	H. Ashar Budiman, SE.
Ketua :	Drs. H. M. Hidayat Nahwi Rasul
Ketua :	Prof. DR. Ir. H. Sudarsono, M.Sc.
Ketua :	H. Supriasto, SH., M.H.
Ketua :	H. Edwin Sumiroza

Sekretaris Umum :	H. Dody Taufiq Wijaya, Ak., M.Com.
Wk. Sek. Umum :	Drs. H. Iskandar Siregar, M.Si.
Wk. Sek. Umum :	H. Eddy Supriady, S.Kom., M.M.
Wk. Sek. Umum :	Drs. H. Basseng, M.Ed.
Wk. Sek. Umum :	H. Hasim Nasution, SE., SH.
Wk. Sek. Umum :	Drs. H. Bashori, M.M.
Wk. Sek. Umum :	B. Raditya Purnomo, SE., SS., M.M.
Wk. Sek. Umum :	Ibnu Anwarudin, SH., M.H.
Bendahara Umum :	H. Moch. Sidik Waskito, B.Sc.
Wk. Bend.Umum :	H. Ide Kusnadi, BA.
Wk. Bend.Umum :	H. A. A. N.B. Samudra Aryawan, SE.
Wk. Bend.Umum :	H. Jerry, SE.

TIM FORMATUR

1.	Ketua :	Prof. DR. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc.	1.
2.	Sekretaris	Prof. DR. Sc. Agr. Ir. H. Jamsari, MP.	2.
3.	Anggota	KH. Kasmudi Asshidqi, SE, M.Ak.	3.
4.	Anggota	KH. Abdul Hakim Mulyono, Bc.TT.	4.
5.	Anggota	Ir. H. Muh. Yasaf Andi Koddang, M.S.	5.
6.	Anggota	dr. H. Sutiman Sutiyono, Sp.A.	6.
7.	Anggota	Drs. H. Winoto, M.Pd.	7.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 9 Maret 2011
4 Rabi'ul Tsani 1432

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc.
Ketua Merangkap Anggota

Prof. DR. Sc. Agr. Ir. H. Jamsari, MP.
Wakil Ketua Merangkap Anggota

Drs. H. Muh. Hidayat Nahwi Rasul
Sekretaris Merangkap Anggota

Prof. DR. H. Singgih Tri Sulistyono, M.Hum.
Wakil Sekretaris Merangkap Anggota

Ir. H. Muh. Yasaf Andi Koddang, M.S.
Anggota

Ir. H. Muhammad Nurchozim
Anggota

Ir. H. Abdullah A. Karim, M.Si.
Anggota

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

1. Nomor KEP-001/DPP LDII/III/2011 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2011 – 2016

2. Nomor KEP-077/DPP LDII/XII/2010 Tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011

3. Nomor KEP-078/DPP LDII/XII/2010 Tentang Susunan Personalia Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011

4. Nomor KEP-081/DPP LDII/I/2011 Perubahan Atas Tema dan Tanggal Penyelenggaraan Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

NOMOR : KEP-001/DPP LDII/III/2011

TENTANG

PENGESAHAN KOMPOSISI DAN PERSONALIA
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
MASA BAKTI 2011 – 2016

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 8 – 9 Maret 2011 telah mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia untuk melaksanakan konsolidasi dan penyesuaian struktur organisasi di seluruh jajaran Lembaga Dakwah Islam Indonesia sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Rencana Strategi dan keputusan lainnya yang ditetapkan oleh Musyawarah

Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011.

b. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada butir a di atas perlu dibentuk komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang solid dan dapat bekerja secara kolegial, serta bersedia melaksanakan tugas-tugas organisasi secara maksimal.

c. bahwa personil yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas-tugas organisasi yang harus dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2011 - 2016.

d. bahwa susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir b di atas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat : a. Keputusan Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-06/MUNAS VII LDII/III/2011, tanggal 9 Maret 2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

b. Keputusan Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-11/MUNAS VII LDII/III/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemilihan Langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

c. Keputusan Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-12/MUNAS VII LDII/III/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pembentukan Formatur.

d. Keputusan Formatur tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2011 – 2016.
e. Keputusan Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-13/MUNAS VII LDII/III/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2011 – 2016.

Memperhatikan:

a. Rapat Formatur Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia tanggal 11 dan 12 Maret 2011.
b. Saran dan pendapat yang dikemukakan dalam rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia tanggal 12 Maret 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PENGESAHAN KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA MASA BAKTI 2011 – 2016.

Pertama : Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2011 – 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Memberikan amanat, tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada seluruh jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Pusat

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) masa bakti 2011 – 2016 untuk melakukan konsolidasi serta melaksanakan program dan kegiatan sesuai fungsinya masing – masing.

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Maret 2011

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Ketua Umum, **Sekretaris Jenderal,**

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
DEWAN PIMPINAN PUSAT
L D I

Prof. DR. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc. **H. Dody T. Wijaya, Ak.M.Com**

Lampiran : Keputusan DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Nomor : KEP-001/DPP LDII/III/2011
Tanggal : 13 Maret 2011

KOMPOSISI DAN PERSONALIA
DEWAN PENASIHAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
MASA BAKTI 2011 – 2016

Ketua : KH. K. Ashshidqi, SE., M.Ak.
Wakil Ketua : DR. H. Bambang Kusumanto, MA.
Wakil Ketua : Ir. H. Kemal Mertohadidjojo, MBA., M.Sc.
Sekretaris : H. Ahmad Alfurqon Ngaino, SH., M.M.
Wakil Sekretaris : KH. Edy Suparto, S.Pdi.
Anggota :
1. KH. Abdul Syukur
2. KH. Abdul Hakim Mulyono, Bc.TT.
3. KH. Sholihun
4. Ir. H. Musyanif
5. Drs. H. RBM Rofik K., SH., M.M.

KOMPOSISI DAN PERSONALIA
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
MASA BAKTI 2011 – 2016

Ketua Umum : Prof. DR. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc.
Ketua : Ir. H. Prasetyo Sunaryo, MT.
Ketua : Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc.
Ketua : Ir. H. Teddy Suratmadji, M.Sc.
Ketua : H. Achmad Kuntjoro, SE., MBA.
Ketua : Ir. H. Rathoyo Rasdan, MBA.
Ketua : DR. Ir. H. Shobar Wiganda, M.Agr.Sc.
Ketua : H. Ashar Budiman, SE.
Ketua : Drs. H. M. Hidayat Nahwi Rasul
Ketua : Prof. DR. Ir. H. Sudarsono, M.Sc.
Ketua : H. Supriasto, SH., M.H.
Ketua : H. Edwin Sumiroza

Sekretaris Umum : H. Dody Taufiq Wijaya, Ak., M.Com.
Wk. Sek. Umum : Drs. H. Iskandar Siregar, M.Si.
Wk. Sek. Umum : H. Eddy Supriady, S.Kom., M.M.

Wk. Sek. Umum	: Drs. H. Basseng, M.Ed.
Wk. Sek. Umum	: H. Hasim Nasution, SE., SH.
Wk. Sek. Umum	: Drs. H. Bashori, M.M.
Wk. Sek. Umum	: Bambang R. Purnomo, SE., SS., M.M.
Wk. Sek. Umum	: Ibnu Anwarudin, SH., M.H.
	:
Bendahara Umum	: H. Moch. Sidik Waskito, B.Sc.
Wk. Bend. Umum	: H. Ide Kusnadi, BA.
Wk. Bend. Umum	: H. A. A. N. B. Samudra Aryawan, SE.
Wk. Bend. Umum	: H. Jerry, SE.

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN:

I. Departemen Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan :

Ketua	1. H. Rully Kuswahyudi, S.Sos.
Anggota	2. H. Didik Tondo Susilo, SH., M.Si.
Anggota	3. Rioberto Sidauruk, SH.
Anggota	4. H. Nurasid, SH.
Anggota	5. H. Bayu Afiudin, SE.
Anggota	6. Ir. H. Paidjo
Anggota	7. Drs. H. Teteng Jumara, M.M.

II. Departemen Pendidikan Agama dan Dakwah :

Ketua	1. KH. Aceng Karimullah, BE., SE.
Anggota	2. KH. Dawam Habibullah
Anggota	3. KH. Abdul Azis Ridwan
Anggota	4. KH. Hafiludin
Anggota	5. KH. Abdusshobur
Anggota	6. KH. Muhammad Taufiqurrahman
Anggota	7. KH. A. R. Amirudin, BA
Anggota	8. KH. Ubaidillah Alhasaniy
Anggota	9. KH. Muhammad Irsyad Rosyidi
Anggota	10.H. Dwi Pramono, A.Md.
Anggota	11.H. Wilnan Fatahilah, S.Hi.
Anggota	12.H. Moh. Rois Udin
Anggota	13.H. Dave Ariant Yusuf Wicaksono, S.Pd.I

III. Departemen Pendidikan Umum dan Pelatihan :

Ketua	1. Drs. Sarji, SH., M.Pd.

Anggota	2. DR. Ir. H. Rorim Pandey
Anggota	3. Dra. Hj. Nana Maznah, M.Psi.
Anggota	4. Drs. H. Budiyono, M.Si.
Anggota	5. Drs. H. Bambang Purnomo, M.M.
Anggota	6. Drs. H. Edi Rachman, M.Kes.
Anggota	7. H. Budi Susila Shobariyadi, Bc.Kom.
Anggota	8. Thonang Efendi, S.TP.

IV. Departemen Pengabdian Masyarakat :

Ketua	1. H. Ruly Siswa Bernaputra
Anggota	2. H. Ponco Budiman, S.Sos.
Anggota	3. Joko Susilo, ST.
Anggota	4. dr. Romadona Triada
Anggota	5. H. Hasan Yuswadi, SH.
Anggota	6. H. Purwadi, SH.
Anggota	7. Dra. Hj. Ernawati
Anggota	8. Ir. H. Darwis Haji Ali

V. Departemen Pemuda, Kepanduan, Olahraga, dan Seni Budaya :

Ketua	1. Ir. H. Adityo Handoko, M.M.
Anggota	2. H. Herlan M. Muhammad, S.Sos,. M.Si.
Anggota	3. H. Semoga Jaya MS, Bc.KU.
Anggota	4. Ridwan Ika Purwoko, S.Kom.
Anggota	5. Yusuf Wibisono, S.Kom.
Anggota	6. Riaman Oesman, SH.
Anggota	7. M. Rosyid Setiadi, A.Md.

VI. Departemen Hubungan antar Lembaga dan Hubungan Luar Negeri :

Ketua	1. H. Tri Gunawan Hadi, S.Sos., S.Pd.I
Anggota	2. Hj. Ida Daniar Royani
Anggota	3. M. Noerwahyudin, ST.
Anggota	4. H. Satya Trisna Jaya, SE., MBA.
Anggota	5. H. Agus Mundjahit, BA.
Anggota	6. DR. Ir. H. Rajab Tampubolon
Anggota	7. H. Roys Sulistyo, ST., M.M.
Anggota	8. H. Anto Juma'in, SE., S.Pd.I
Anggota	9. Hj. Pretty Surya Wardhani

VII. Departemen Komunikasi, Informasi dan Media:

Ketua	1. H. Muhammad Ied, SE.
Anggota	2. Hj. Aselina Endang Triastuti, MBA.
Anggota	3. Ludhy Cahyana, S.Sos.
Anggota	4. H. Joko Haryanto, SE.
Anggota	5. Ir. H. Wahyu Dirgantoro
Anggota	6. H. Lukman Abdul Fatah, S.Si.
Anggota	7. Arifin Rusdi, S.Ag.
Anggota	8. Eko Mugiyanto

VIII. Departemen Litbang, IPTEK, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup:

Ketua	1. Ir. H. Budirama
Anggota	2. DR. H. Amir Musadad, M.Sc.
Anggota	3. Ir. H. Kemal Pasya
Anggota	4. Ahmad Fauzi Abdillah, S.Kom
Anggota	5. Ir. H. Joy Nugroho, M.Eng.
Anggota	6. Pahala Sibuea, S.Kom.
Anggota	7. Mohammad Ilham Siddiq, S.Kom.
Anggota	8. Dra. Hj. Erni Suhaina Ilham Fadzry

IX. Departemen Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat.

Ketua	1. DR. H. Ardito Binadi, SE.
Anggota	2. H. Muhammad Taufik Darmansyah, SE.
Anggota	3. H. Andri Krisnanto, SE., MSM.
Anggota	4. Ir. H. Wildy Istimror
Anggota	5. H. Wira Supardi, SE.
Anggota	6. Ir. H. Nasrul Fatah, MT.
Anggota	7. H. Arie Wibisono, Ak., MBA.
Anggota	8. H. Samsul Bakhtiar Ramadhan, A.Md.
Anggota	9. H. Dawud Abdurrahman, ST.

X. Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Ketua	1. Drs. H. Subiyanto, SH., M.Hum., M.Kn.
Anggota	2. H. Rusman Hidayat, SH.
Anggota	3. Hj. Wa Ode Nur Zainab, SH.
Anggota	4. H. Hari Sumiarto, SH.
Anggota	5. H. Rizon Alisyahbana, SH.
Anggota	6. Hery Kurniadhy, SH.
Anggota	7. Subatriyah, SH., M.Kn.

XI. Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga.

Ketua	1. Ir. Hj. Sri Tresnahati Ashar, M.Si.
Anggota	2. Hj. Andi Datja Pattoppoi, SH., MH.
Anggota	3. Prof. DR. drg. Hj. Sri Oktawati, Sp. Perio.
Anggota	4. DR. Hj. Ade Ariyanto, P.hD., Psikolog
Anggota	5. Hj. Suzana Rudi Setiabudy
Anggota	6. Ir. Hj. Titi Amantari
Anggota	7. Dewi Ilma Antawati, S.Psi., M.Psi.
Anggota	8. DR. Ir. Dedin Finatsyiatul Rosida, M.Kes.
Anggota	9. Hj. Etty Sabariah Wuryanto, S.Psi.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Maret 2011

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Ketua Umum, **Sekretaris Jenderal,**

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
DEWAN PIMPINAN PUSAT
L D I

Prof. DR. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc. **H. Dody T. Wijaya, Ak.M.Com**

KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

NOMOR : KEP - 077/DPP LDII/XII/2010

Tentang

Penyelenggaraan Musyawarah Nasional VII
Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Menimbang :

a. bahwa masa bakti Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Periode 2005-2010 yang telah diperpanjang dengan keputusan Rapimnas Tahun 2010 selama satu Tahun dan berakhir bulan Mei 2011.

b. bahwa untuk itu diperlukan adanya penyelenggaraan Musyawarah Nasional LDII VII, seterusnya disingkat MUNAS VII LDII Tahun 2011 sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi.

c. bahwa untuk penyelenggaraan MUNAS VII

LDII Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan, Papan Nama dan Lambang Organisasi.

d. Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Nomor : KEP-04/MUNAS VI LDII/2005 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

e. Keputusan Musyawarah Nasional Nomor : KEP-05/MUNAS VI LDII/2005 tentang Rencana Strategi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Tahun 2005 – 2010.

f. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Nomor: 001/DPP LDII/V/2005 tentang Susunan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

g. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Nomor: 059/DPP LDII/III/2010 tentang Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

Memperhatikan

1. Usul saran dan masukan dalam rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) tanggal 13 Desember 2010 di Sekretariat Jalan Tentara Pelajar No. 28, Arteri Patal

Senayan, Jakarta Selatan 12210.

2. Pendapat dan masukan Dewan Penasehat dan atau Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).
3. Masukan dan usulan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) TENTANG PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH NASIONAL VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) TAHUN 2011.

Pasal 1

Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Tahun 2011 selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat MUNAS VII LDII Tahun 2011, diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 08 s/d 09 Februari 2011.

Pasal 2

(1) Tema Musyawarah Nasional VII LDII Tahun 2011 : Membangun Bangsa Yang Berakhlaqul Karimah Menuju Indonesia Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan
(2) Sub tema MUNAS VII LDII Tahun 2011
    a. Pengembangan Kepemimpinan berkarakter
    b. Peningkatan Akhlaqul karimah
    c. Pembinaan Generasi Penerus
    d. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dalam Partisipasi Pembangunan

Pasal 3

Dalam MUNAS VII LDII Tahun 2011 akan dibahas :
(1) Bidang Organisasi :

a. Menyesuaikan AD/ART LDII sesuai dengan perkembangan organisasi.
b. Struktur dan Pimpinan Organisasi untuk periode 2011-2016.

(2) Bidang Program :
Program Kerja Tahunan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Tahun 2011 sampai 2016 meliputi program-program:
a. Pengembangan kepemimpinan berkarakter
b. Peningkatan akhlaqul karimah
c. Pembinaan generasi Penerus
d. Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam partisipasi pembangunan

(3) Bidang Pertanggungjawaban :
Pertanggungjawaban Ketua Umum DPP LDII Periode 2005 – 2011

(4) Bidang Khusus :
Pernyataan dan Rekomendasi MUNAS VII LDII Tahun 2011

Pasal 4

(1) Peserta MUNAS VII LDII Tahun 2011 :
a. Unsur Dewan Penasehat DPP LDII
b. Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Pusat LDII .
c. Unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Seluruh Indonesia.
d. Unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.

(2) Peninjau
a. Unsur Dewan Penasihat Daerah.
b. Unsur Badan dan/atau Lembaga, dan Organisasi Otonom di lingkungan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

c. Unsur perwakilan Pondok Pesantren yang diundang oleh Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia. (LDII)
d. Perseorangan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

Pasal 5

(1) Penanggung jawab MUNAS VII LDII Tahun 2011 adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).
(2) Untuk persiapan dan pelaksanaan MUNAS VII LDII Tahun 2011 dibentuk panitia yang susunan dan personalianya ditetapkan dengan Keputusan DPP LDII secara terpisah.

Pasal 6

Biaya penyelenggaraan MUNAS VII LDII Tahun 2011 ditanggung oleh DPP LDII.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh DPP LDII.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Desember 2010

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Ketua Umum,	Sekretaris Jenderal,
Prof. DR. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc.	**H. Muhamad Sirot, S.H.**

KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

No. KEP-078/DPP LDII/XII/2010

Tentang:

Susunan Personalia
Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana
Musyawarah Nasional VII
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Tahun 2011

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Menimbang :

a. bahwa masa bakti Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Periode 2005-2010 yang telah diperpanjang pada Rapimnas LDII Tahun 2010 selama satu tahun, akan berakhir bulan Mei 2011.

b. bahwa sebelum masa perpanjangan waktu tersebut pada amar 1 selesai maka perlu diselenggarakan Musyawarah Nasional (MUNAS) VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Tahun 2011,

karena MUNAS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi untuk menetapkan menetapkan pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) pada periode 2011-2016, program kerja, pengembangan SDM dan penyesuaian AD/ART.

c. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Tahun 2011 sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam peraturan organisasi maka ditetapkan Panitia Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011 dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan, Papan Nama dan Lambang Organisasi.

d. Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Nomor : KEP-04/MUNAS VI LDII/2005. Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

e. Keputusan Musyawarah Nasional Nomor : KEP-05/MUNAS VI LDII/2005 tentang Rencana Strategi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Tahun 2005 – 2010.

f. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Nomor:

001/DPP LDII/V/2005 Tentang Susunan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

g. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat LDII Nomor: 059/DPP LDII/III/2010 Tentang Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

h. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat LDII Nomor: 077/DPP LDII/XII/2011 Tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Tahun 2011.

Memperhatikan:

1. Usul saran dan masukan dalam rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) tanggal 3 November 2010 di Sekretariat Jalan Tentara Pelajar No. 28, Arteri Patal Senayan, Jakarta Selatan 12210.

2. Pendapat dan masukan Dewan Penasehat dan atau Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

3. Masukan dan usulan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENGARAH DAN PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH NASIONAL VII (MUNAS VII) LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2011.

PERTAMA : Membentuk kepanitiaan Musyawarah Nasional Lembaga VII Dakwah Islam Indonesia yang terdiri atas Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dan Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*).

KEDUA : Tugas Panitia Pengarah (SC) adalah menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan materi MUNAS VII LDII, sedangkan tugas Panitia Pelaksana (OC) adalah melaksanakan penyelenggaraan MUNAS VII LDII dengan sebaik-baiknya.

KETIGA : Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC) bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LDII.

KEEMPAT : Komposisi dan personalia Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC) Musyawarah Nasional VII LDII adalah seperti tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Uraian tugas dan kegiatan Panitia Pelaksana (OC) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, seperti tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM : Hal-hal yang belum tercantum dalam keputusan ini dan sifatnya teknis pelaksanaan Musyawarah Nasional dapat diatur selanjutnya oleh Panitia dengan konsultasi pada DPP LDII.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Desember 2010

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Ketua Umum, **Sekretaris Jenderal,**

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
DEWAN PIMPINAN PUSAT
L D I

Prof. DR. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc. **H. Muhamad Sirot, S.H.**

Lampiran 1
Keputusan Dewan Pimpinan Pusat
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Nomor : KEP- 078/DPP LDII/XII/2010
Tanggal 14 Desember 2010

SUSUNAN PERSONALIA
PANITIA PENGARAH DAN PANITIA PELAKSANA
MUSYAWARAH NASIONAL VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2011

Penanggung Jawab	:	Ketua Umum DPP LDII Prof. Dr. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc.
Penasehat	:	KH. Kasmudi Ashidiqy, SE., M.Ak. H. Ahmad Alfurqon Ngaino, SH., MM. Drs. H. A. Suarno, MM., PhD. KH. Abdul Syukur KH. Mulyono, Bc.TT. Ir. H. Kemal Abusyaifan, M.Sc. Letkol TNI (Purn) Hasan Bisri Dr. H. Bambang Kusumanto, M.Sc. Dr. H. Bambang Sukamto, SE., MM. Laksma (TNI) Purn.Suroso LW, SIP. Drs. H. Rofiq Kusumodilogo, S.H.

Panitia Pengarah (*Steering Committee*)

Ketua merangkap anggota	:	Ir. H. Prasetyo Sunaryo, MT.
Sekretaris merangkap anggota	:	Dr. Ir. H. Shobar Wiganda, M.Agr.Sc.
Wakil Sekretaris	:	Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc.
Anggota	:	HR. Soenaryo Adhiwardoyo, SH., MM. Ir. H. Zaenal Asyikin Abbas Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc. Ir. H. Rathoyo Rasdan, MBA. Ir. H. Teddy Suratmadji, M.Sc. H. Suhartono Rijadi, BA. H. Ashar Budiman, SE. H. Achmad Kuntjoro, SE., MBA. H. Muhamad Sirot, SH.

K.H. Aceng Karimullah, B.E., S.E
H. Edy Supriyadi, S.Kom., MM.
Drs. Iskandar Siregar
Drs. H. Hidayat Nahwi Rosul
H. Dody Taufik Wijaya, AK. M.Comm
Dr. H. Basseng, SE
H. Rioberto Sidauruk, S.H
Drs. Sardji Faisal, SH, MPd.
H. Hasyim Nasution, SE.
H. Samudra Aryawan SE
Ir. H. Adityo Handoko, MM
H. Tri Gunawan Hadi, S. Sos
H. Muhammad Ied, SE

Panitia Pelaksana

Ketua	: Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc.
Wakil Ketua	: Ir. H. Samiyono, MM.
Wakil Ketua	: H. Didik Tondo Susilo, SH, M.Si.
Wakil Ketua	: H. Supriasto, SH, MH.
Wakil Ketua	: Drs. H. Sumarman, M.Pd.
Sekretaris	: Ir. H. Dedid Cahya Happyanto, MT.
Wakil Sekretaris	: Raditya B Purnomo, SS, SE, MM.
Wakil Sekretaris	: Samsul Bakhtiar Ramadhan, A.Md
Wakil Sekretaris	: H. Bayu Afiudin, SE.
Wakil Sekretaris	: H. Eddy Supriyadi, S.Kom.
Bendahara	: H. Moch. Sidik Waskito, B.Sc.
Wakil Bendahara	: H. Ali Zuhdi, SH
Wakil Bendahara	: Ir. H. Ma'un, MT.
Wakil Bendahara	: Tommy Hendrawan, SE, M.Si.
Wakil Bendahara	: H. Purwadi, SH.
Koordinator Bidang 1	**: H. Supriasto, SH, MH.**
Wakil Koordinator Bidang 1	: Raditya Purnomo, SE, SS.

Sie Kesekretariatan
Koordinator Seksi : Ir. H. Yunar Jumarma

1. Ir. H. Maulanasani
2. Ir. Joko Santoso
3. H. Didik Eko Putro, ST.
4. Eko Budiono
5. Syaifudin
6. Rizal Fahmi Firdaus, A.Md.
7. Rohmad Sekretariat

Sie Protokoler
Koordinator Seksi : H. Djoko Sajono, SE, SH, MH.

1. Ir. H. Djoko Purwono, MT.
2. H. M. Amroji, SE.
3. H. Ali Rachmad, ST.
4. H. Jemmy Hariyanto
5. Dra. Hj. Sri Kartini
6. Ir. Hj. Emie Santoso, MT.
7. DR. Drh. Hj. Hani Plumeriastuti, M.Kes.
8. DR. Ir. Hj. Dedin Finatsyiatul Rosida, M.Kes
9. Subatriyah, SH.

Sie Acara & Persidangan
Koordinator Seksi : Veby Andre Wardhana, ST.

1. Drs. H. Dicky Sunaryo
2. Drs. H. Misdi, MMa.
3. Supriyadi, SH.
4. H. Rusman Hidayat, SH.
5. Ir. H. Bambang Wahyu Wijonarko, MT.
6. Agung Pangaribowo, S.Farm, APT

Koordinator Bidang 2 : Ir. H. Samiyono, MM.

Wakil Koordinator Bidang 2 : Drs. H. Budiyono, M.Si.

Sie Materi
Koordinator : Drs. H. Bambang Purnomo, MM.

1 Drs. H. Sutrisno
2 Moch. Syafaen Syafi'i, S.Pd.
3 Isfandi Sofi'i
4 Rizqi Angga Vahlevi
5 M. Faqih, S.Or.
6 Reza Nugroho

Sie IT
Koordinator : Drs. H. Fitriyanto, M.Si.

1. Hariman Dana Sasmita, ST.
2. Wahyu Qomarudin,
3. Firdaus Nurdiansyah
4. Agus Rifai

5. Heriyanto Lantabur
6. Raka Eko Galih
7. Abdillah

Sie Dokumentasi
Koordinator : H. Suroso Rasyidin, SE, MBA.
1. Ir. H. Musdiq Ali Suhudi, MT.
2. H. Suhartono
3. Drs. H. Hendi Wibowo
4. H. Imam Gangsar Jaya
5. Moh. Nurdin Purwoko, S.Pt.
6. Yusuf Khoir

Koordinator Bidang 3 : Drs. H. Sumarman, M.Pd.

Wakil Koordinator Bidang : Drs. H. Bashori, MM.

Sie Akomodasi dan
Konsumsi
Koordinator : Drs. Ec. H. M. Amien Adhy.
1. H. M. Fauzan, S.Pd.
2. Hj. Endah Retnowati
3. Dewi Ilma Antawati, S.Psi., M.Psi
4. Misbahul Jannah, SE
5. Togik Hidayat
6. Dewi Ratih Ratnasari, SS.

Sie Perlengkapan dan
Lokasi Sholat
Koordinator : Drs. H. Ec. M. Romli Rozaq
1. Ir. H. Juhari Emnur
2. Al Furqon, S.Th.I, M.Th.I.
3. Uddy Suherman, ST.
4. Aditya Prana Iswara
5. Relanggih Pratama Andisia
6. Winoto Redi Nugroho

Sie Dekorasi
Koordinator : Drs. H. Isbudi Siyono
1. H. Rully Kuswahyudi S.Sos
2. Agus Faisol, ST.
3. Sahri Romadhon
4. Agus Sulistyawan
5. Abdul Yoni
6. Januar Agung Hudiana

Sie Humas dan Publikasi
Koordinator : Ludhy Cahyana, S.Sos.
1. H. Joko Hariyanto, SE
2. Ibnu Anwarudin, SH.
3. Widi Yunani, S.Sos
4. Khomsa Mutiara Murni Sovia Sahid, S.Psi.
5. Fajar Sidik Rofikoh, SH
6. Nur Adi Wijaya, S.Sos.

Koordinator Bidang 4 : **H. Didik Tondo Susilo, SH, M.Si.**
Wakil Koordinator Bidang 4 : H. Hasan Yuswadi, SH.

Sie Kesehatan
Koordinator : dr. H. Agus Sukisno
1. dr. Rio Azadi
2. dr. Riko Lazuardi
3. Heris Setyawan, S.Ked.
4. H. Sumardi, SKM.
5. Fachriza Haqi Ramadhan, S.Ked.

Sie Transportasi
Koordinator : Ir. H. Triot Kartiko
1. Mubin Junaedi Salman, SE.
2. Maskun Bukhori, SH.
3. Drs. H. Nur Hidayat, ST.
4. Achemad Yunus, SH.
5. H. Djoko Purnomo
6. Rizal Aris Laksono
7. Imam Satriawan
8. Suparno
9. H. Masturo

Sie Perijinan dan Keamanan
Koordinator : H. Semoga Jaya, MS.
1. Chudori, SH (SENKOM Kota Surabaya)
2. Drs. H Subianto SH, MH, M.Kn.
3. Eko Hari Santoso
4. H. Markuat
5. Security Gedung DPD LDII Jatim

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 14 Desember 2010

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Ketua Umum,	Sekretaris Jenderal,
Prof. DR. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc	**H. Muhamad Sirot, S.H.**

Lampiran : 2
Keputusan Dewan Pimpinan Pusat
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Nomor : KEP- 078./DPP LDII/.XII/2010
Tanggal 14 Desember 2010

URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH NASIONAL VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2011

I Koordinator Bidang 1

Mempunyai tugas:

01 Mengkoordinasikan tugas dan atau pelaksanaan tugas Sie Kesekretariatan, Sie Protokoler, serta Sie Acara dan Persidangan sebelum, selama dan sesudah acara MUNAS VII LDII.

02 Mengkoordinasikan dan merencanakan kegiatan musyawarah persiapan kegiatan MUNAS bagi Sie Kesekretariatan, Sie Protokoler, serta Sie Acara dan Persidangan sebelum, selama dan sesudah acara MUNAS VII LDII.

03 Mengkoordinasikan penyusunan RAB untuk Sie kesekretariatan, Sie Protokoler, serta Sie Acara dan Persidangan sebelum acara MUNAS VII LDII serta laporan pertanggung jawaban pemanfaatan dananya selama dan sesudah acara MUNAS VII LDII.

04 Mengontrol pelaksanaan tugas Sie Kesekretariatan, Sie Protokoler, serta Sie Acara dan Persidangan sebelum, selama dan sesudah acara MUNAS VII LDII.

05 Melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh penanggung jawab, *Steering Committee* dan atau *Organizing Committee*.

II Koordinator Bidang 2

Mempunyai tugas:

01 Mengkoordinasikan Sie Materi, Sie IT, dan Sie Dokumentasi sebelum, selama dan sesudah acara MUNAS VII LDII.

02 Mengkoordinasikan dan merencanakan kegiatan musyawarah persiapan kegiatan MUNAS bagi Sie Materi, Sie IT, dan Sie Dokumentasi sebelum, selama dan sesudah acara MUNAS VII LDII.

03 Mengkoordinasikan penyusunan RAB untuk Sie Materi, Sie IT, dan Sie Dokumentasi sebelum MUNAS serta laporan pertanggung jawaban pemanfaatan dananya selama dan sesudah acara MUNAS VII LDII.

04 Mengontrol pelaksanaan tugas Sie Materi , Sie IT, dan Sie Dokumentasi sebelum, selama dan sesudah acara Munas VII LDII.

05 Melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh penanggung jawab, *Steering Committee* dan atau *Organizing Committee*.

III Koordinator Bidang 3

Mempunyai tugas:

01 Mempunyai tugas mengkoordinasikan Sie Akomodasi dan Konsumsi, Sie Perlengkapan dan Lokasi Sholat, serta Sie Dekorasi sebelum, selama dan sesudah acara MUNAS VII LDII.

02 Mengkoordinasikan dan merencanakan kegiatan musyawarah persiapan kegiatan MUNAS bagi Sie Akomodasi dan Konsumsi, Sie Perlengkapan dan Lokasi Sholat, serta Sie Dekorasi sebelum, selama dan sesudah acara MUNAS VII LDII.

03 Mengkoordinasikan penyusunan RAB untuk Sie Akomodasi dan Konsumsi, Sie Perlengkapan dan Lokasi Sholat, serta Sie Dekorasi sebelum MUNAS serta laporan pertanggung jawaban pemanfaatan dananya selama dan sesudah acara MUNAS VII LDII.

04 Mengontrol pelaksanaan tugas Sie Akomodasi dan Konsumsi, Sie Perlengkapan dan Lokasi Sholat, serta Sie Dekorasi sebelum, selama, dan sesudah acara MUNAS VII LDII.

05 Melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh penanggung jawab, *Steering Committee*, dan atau *Organizing Committee*.

IV Koordinator Bidang 4

Mempunyai tugas:

01 Mempunyai tugas mengkoordinasikan Sie Kesehatan, Sie Transportasi, serta Sie Perijinan dan Keamanan sebelum, selama dan sesudah acara MUNAS VII LDII.

02 Mengkoordinasikan dan merencanakan kegiatan musyawarah persiapan kegiatan MUNAS bagi Sie Kesehatan, Sie Transportasi, serta Sie Perijinan dan Keamanan sebelum, selama dan sesudah acara MUNAS VII LDII.

03 Mengkoordinasikan penyusunan RAB untuk Sie Kesehatan, Sie Transportasi, serta Sie Perijinan dan Keamanan sebelum MUNAS serta laporan pertanggung jawaban pemanfaatan dananya selama dan sesudah acara MUNAS VII LDII.

04 Mengontrol pelaksanaan tugas Sie Kesehatan, Sie Transportasi, serta Sie Perijinan dan Keamanan sebelum, selama dan sesudah acara MUNAS VII LDII.

05 Melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh penanggung jawab, Steering Committee, dan atau Organizing Committee.

V Rincian Tugas dan Fungsi Seksi-seksi :

1 Seksi Kesekretariatan

No.	Kegiatan	Ceklis
1.	Menyiapkan penggandaan materi: materi rantus, jadwal acara dan panduan peserta dari SC, serta materi lain dari pembicara	
2.	Menyiapkan Keplek (kertas dan plastiknya)	
3.	Menyiapkan *Block note*	
4.	Menyiapkan tas plastik/map tempat materi	
5.	Menyiapkan alat tulis untuk peserta	
6.	Koordinasi kepastian jumlah peserta	
8.	Dalam undangan disebutkan pakaian yang harus dipakai dan membawa pas foto	
10.	Menselaraskan materi	
11.	Lampiran biodata pada undangan	
12.	Menyiapkan tenaga sekretariat sebelum dan saat pelaksanaan	
13.	*Standby* di sekretariat saat pelaksanaan	
14.	Menyiapkan petugas untuk fotocopi	
15.	Membantu menyiapkan laporan ketua panitia	
16.	Menyiapkan daftar hadir peserta pada acara pembukaan, acara sidang paripurna dan sidang komisi selama MUNAS VII LDII	
17.	Menyiapkan pembagian anggota komisi	
18.	Menyiapkan komputer di ruang sekeretariat hotel lengkap dengan printer	
19.	Menyiapkan daftar penerima transport peserta	
20.	Menyiapkan daftar penerima transport panitia	
21.	Menyiapkan daftar penerima transport nara sumber	
22.	Menyiapkan daftar penerima transport penyusun materi	
23.	Menyiapkan anggaran seksi	
24.	Membuat laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan MUNAS	
25	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh penanggung jawáb, SC dan atau OC	

2 Seksi Protokoler

No.	Kegiatan	Ceklis
1.	Menyiapkan personil penerima tamu	
2.	Menyiapkan ruang *lobby* untuk tamu	
3.	Menyiapkan daftar hasir Undangan VIP	
4.	Mengkoordinasikan dan Mengatur tentang kedatangan Pejabat dan DPP	
5.	Mengatur tempat duduk tamu VIP bersama dengan Sie Perlengkapan	
6.	Jika diperlukan menyiapkan dan menambah tenaga penerima tamu	
7.	Mengatur posisi penerima tamu	
8.	Menyiapkan Petugas Absensi	
9.	Menyiapkan Lebel kursi VIP / undangan kehormatan	
10.	Mengkoordinasikan kegiatan pejabat dengan Protokol kenegaraan	
11.	Menyiapkan ruang transit bila ada Tamu / yang menurut prosedur protokol harus melakukan transit.	
12.	Menyiapkan uang saku/transport untuk tim protokoler resmi.	
13.	Menyiapkan anggaran seksi	
14.	Membuat laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan MUNAS	
15	Melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh penanggung jawab, Steering Committee dan atau Organizing Committee	

3 Seksi Acara & Persidangan

No.	Kegiatan	Ceklis
1.	Menyiapkan bendera Merah Putih dan Bendera LDII, panji-panji, foto Presiden dan Wapres, dan Garuda Pancasila di ruangan	
2.	*Name Board* untuk Pimpinan Sidang & Tamu	
3.	*Name board* dari mika untuk peserta disiapkan	
4.	Siapkan backdrop yang baik	
5.	Bunga di meja ruang sidang	
6.	Siapkan Palu sidang di setiap ruang sidang	
7.	Bersama Sie Perlengkapan, cek meja dan kursi persidangan di ruang sidang	
8.	Cek dan siapkan kursi peserta sidang di ruang utama dan ruang sidang komisi bersama sie Perlengkapan	
9.	Menyiapkan podium	
10.	Menyiapkan petugas qiroat yang baik.	
11.	Menyiapkan derigen Indonesia Raya yang baik	
12.	Menyiapkan petugas do'a jangan panjang panjang	
13.	Siapkan MC	
14.	Mengatur acara foto bersama pejabat	
15.	Menyiapkan petugas menyerahkan Pemukul Gong, Cindramata, dan lain-lain.	
16.	Menyiapkan ruang Rapat Komisi - jika ada pembahasan Komisi	
17.	Menyiapkan ruangan sidang khusus atau sidang terbatas untuk hal yang mendesak	
18.	Menyiapkan ruang koordinasi bagi Pimpinan Sidang	
19.	Menyiapkan sarana Peridangan Komisi.	
20.	Menyiapkan anggaran seksi	
21.	Membuat laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan MUNAS	
22.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh penanggung jawab, Stering Comitte , organising Comitte	

4 Seksi Materi

No.	Kegiatan	Ceklis
1.	Berkoordinasi dengan SC untuk mengidentifikasi materi MUNAS	
2.	Menghubungi pemateri untuk mendapatkan materi MUNAS	
3.	Menyampaikan materi ke Sie Sekretariat untuk digandakan	
4.	Menghimpun materi dari pemateri	
5.	Menyiapkan materi rantus dan makalah pemateri untuk peserta	
6.	Mengumpulkan dokumentasi foto, audio dan video	
7.	Membuat draft Buku MUNAS	
8.	Mentashehkan Buku MUNAS	
9.	Memfinalisasi Buku MUNAS	
10.	Menyerahkan Buku MUNAS untuk digandakan dan didistribusikan	

5 Seksi IT

No.	Kegiatan	Ceklis
1.	Berkoordinasi dengan SC untuk mendapatkan gambaran tentang acara MUNAS yang akan di*broadcast*	
2.	Menyiapkan konsep *broadcasting* media	
3.	Mempresentasikan konsep *broadcasting* untuk mendapatkan persetujuan	
4.	Menyiapkan peralatan IT	
5.	Membroadcast acara MUNAS	
6.	Mendokumentasi acara acara MUNAS	
7.	Berkoordinasi dengan Sie Materi untuk penyusunan CD MUNAS	
8	Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan seksi.	

6 Seksi Dokumentasi

No.	Kegiatan	Ceklis
1.	Mengidentifikasi tugas-tugas sie Dokumentasi	
2.	Mempresentasikan konsep kegiatan dokumentasi	
3.	Mengidentifikasi provider untuk dokumentasi foto dan video	
4.	Menyeleksi provider untuk dokumentasi foto dan video	
5.	Menugaskan provider untuk dokumentasi foto dan video	
6.	Mengusulkan anggaran dokumentasi foto dan video	
7.	Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan seksi	

7 Seksi Akomodasi dan Konsumsi

No.	Kegiatan	Ceklis
1.	Mengidentifikasi dan mengkoordinasikan Tim untuk melaksanakan tugas konsumsi (*catering*) selama MUNAS	
2.	Cek kesiapan makanan dan snack (2 kali makan dan 3 kali snack)	
3.	Penyajian makan dan snack dikaitkan dengan waktu ISHOMA dan acara pada saat itu.	
4.	Menyiapkan snack pagi bersama kedatangan tamu	
5.	Menyiapkan konsumsi tamu sebelum ke hotel	
6.	Konsumsi ringan untuk ruang *lobby*	
7.	Menyiapkan tenaga pembersih pasca makan	
8.	Menyiapkan konsumsi rapat persiapan panitia	
9.	Menyiapkan konsumsi seusai Pembukaan khusus untuk undangan VIP di ruang *lobby*	
10.	Melakukan pengaturan penyediaan akomodasi bagi peserta MUNAS dan Tamu VIP/ Pemateri dari Jakarta.	
11.	Melakukan pengaturan penyediaan konsumsi bagi peserta MUNAS dengan pihak *catering* di lokasi MUNAS	

12.	Mengkoordinasikan petugas agar ruang konsumsi selalu bersih /rapi	
13.	Mengontrol cadangan/persediaan serta pemasokan makanan di meja konsumsi saat acara makan berlangsung	
14.	Menyiapkan anggaran seksi	
15	Membuat laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan MUNAS	
16	Melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh penanggung jawab, *Steering Comitte* dan *Organising Committee*	

8 Seksi Perlengkapan dan Lokasi Sholat

No.	Kegiatan	Ceklis
1	Mengidentifikasi dan mengkoordinasikan Tim untuk melaksanakan tugas sie perlengkapan	
2	Cek kesiapan listrik	
3	Cek *sound system* (di 3 tempat ruang sidang)	
4	Siapkan Bendera LDII dan cagaknya di luar +-20 Bendera dan tenaga pemasangan	
5	Siapkan spanduk paling tidak 6 buah spanduk dan tenaga pemasangan	
6	Jumlah *microphone* harus cukup untuk pimpinan minim 2 buah dan untuk peserta paling tidak 2 buah wireless, dan di podium, juga untuk MC, serta 1 buah cadangan	
7	menyiapkan taman di ruang sidang Utama dg Seksi Perlengkapan	
8	Cek meja dan kursi persidangan di ruang utama dan di ruang sidang komisi bersama Sie Acara dan Persidangan	
9	Cek dan siapkan kursi peserta sidang di ruang utama dan ruang sidang komisi bersama Sie Acara dan Persidangan	
10	Disiapkan Infocus (LCD), Notebook, OHP dan kelengkapannya	
11	White Board dan Spidol di ruang sidang utama dan ruang sidang komisi	

12	Menyiapkan acara pelantikan & pengukuhan Pengurus baru/jika ada	
13	Menyiapkan Meja Petugas pendaftaran dan Absensi	
14	Pengadaan Cindra mata (Pesan Trenggalek)	
15	Menyiapkan Gong	
16	Mengidentifikasi kebutuhan perlengkapan dan dekorasi Munas yang tidak dapat disiapkan oleh Hotel.	
17	Mengidentifikasi dan menyiapkan tempat sholat serta peralatan pendukungnya, berupa karpet, sendal, lokasi tempat bersuci/wudlu dan lain-lain dilokasi MUNAS	
18	Mengkoordinasikan pendekorasian ruangan MUNAS dengan Tim Dekorasi, dan Pihak Pengelola Hotel/Gedung.	
19	Mencari dan menetapkan lokasi sholat	
20	Menyiapkan perlengkapan sholat	
21	Melakukan kontrol rutin selama tanggung jawab seksi selama kegiatan berlangsung.	
22	Menyiapkan anggaran seksi	
23	Membuat laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan MUNAS	
24	Melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh penanggung jawab, Steering Committee dan Organizing Committee	

9 Seksi Dekorasi

No.	Kegiatan	Ceklis
1	Mengidentifikasi dan mengkoordinasikan Tim untuk melaksanakan tugas sie Dekorasi.	
2	Mempresentasikan konsep dekorasi	
3	Siapkan bendera LDII dan cagaknya di luar +- 20 bendera dan tenaga pemasangan	
4	menyiapkan taman di ruang sidang utama dengan Seksi Perlengkapan	
5	Pengadaan cindra mata	

6	Mengkoordinasikan pendekorasian ruangan MUNAS dengan Tim Dekorasi, dan Pihak Pengelola Hotel / Gedung.	
7	Menyiapkan anggaran seksi	
8	Membuat laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan MUNAS	
9	Melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh penanggung jawab, Steering Committee dan Organizing Committee	

10 Seksi Humas dan Publikasi

No.	Kegiatan	Ceklis
1.	Mengundang wartawan saat Pembukaan (cetak dan elektronik)	
2.	Undangan wartawan dikoordinasikan dengan sekretariat	
3.	Wartawan hanya ikut saat pembukaan	
4.	Siap siap menghadapi wartawan Bodrex agar tidak mengganggu ketua dan tamu	
5.	Menyiapkan petugas khusus dokumentasi foto dan juru photo	
6.	Menyiapkan pers room jika diperlukan	
7.	*Statement* keluar hanya diberikan oleh Ketua atau Ketua Umum.	
9.	Menyiapkan naskah siaran pers MUNAS bersama dengan sekretariat	
10.	Menyiapkan uang tranport / uang saku untuk petugas liputan berita	
11.	Memfasilitasi wartawan dan penanggung jawab kegiatan saat dilakukan siaran pers MUNAS	
12.	Menyiapkan anggaran seksi	
13.	Membuat laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan MUNAS	

11 Seksi Kesehatan

No.	Kegiatan	Ceklis
1.	Menyiapkan tenaga medis dan obat biasa, serta menyiapkan tenaga untuk membantu peserta membeli obat	
2.	Menyiapkan kendaraan operasional untuk darurat (*Ambulance*)	
3.	Koordinasi dengan Sie Akomodasi untuk lokasi sie kesehatan	
4.	Menyiapkan buku catatan untuk medis	
5.	Menyiapkan tugas posko kesehatan dilokasi penginapan dan lokasi MUNAS	
6.	Melakukan tugas pemantauan kesehatan peserta MUNAS di lokasi penginapan maupun di lokasi MUNAS	
7.	Bersama personil pengamanan, melaksanakan patroli pengamanan lokasi MUNAS	
8.	Menyiapkan Kebutuhan sarana khusus bagi wanita bila ada peserta wanita.	
9.	Menyiapkan anggaran seksi	
10.	Membuat laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan MUNAS	
11	Melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh penanggung jawab, Steering Committee dan Organizing Committee	

12 Seksi Transportasi

No.	Kegiatans	Ceklis
1.	Menyiapkan penjemputan tamu DPP dan yang perlu dijemput	
2.	Koordinasi dengan SC tentang Jadwal kedatangan tamu	
3	Menyiapkan kendaraan operasional untuk keperluan Panitia	
4	Mengidentifikasi dan mengkoordinasikan personil driver (sopir) untuk melakukan giat transportasi penumpang selama MUNAS	

5	Menyiapkan sarana dan mengidentifikasi kendaraan operasioanl untuk melaksanakan tugas antar jemput dari lokasi MUNAS ke Lokasi penginapan.	
6	Melakukan pembagian tugas / Jadwal Sopir , konsumsi sopir dan anggaran uang operasional/BBM/Tol / Parkir dan lain-lain	
7	Menyiapkan tenaga montir/tambal ban *stand by* di lokasi parkir kendaraan.	
8	Menyiapkan anggaran seksi	
9	Membuat laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan MUNAS	
10	Melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh penanggung jawab, Steering Committee dan Organizing Committee	

13 Sie Perijinan dan Keamanan

No.	Kegiatan	Celkis
1.	Menyiapkan tenaga keamanan intern	
2.	Menyiapkan tenaga keamanan Kepolisian	
3.	Pemberitahuan kegiatan pada Kepolisian (Polwiltabes)	
4	Mengurus perijinan acara di tingkat dari nasional sampai kelurahan	
5	Pengamanan pada tamu pejabat	
6	Mengatur penjagaan pintu masuk ruang sidang	
7	Mengarahkan tamu intel dari Kepolisian dan Kodim/Kodam	
8	Mengkoordinasikan seluruh personil pengamanan intern agar dapat berintegrasi dengan personil pengamanan terkait.	
9	Memberikan tanda-tanda/peringatan agar pengamanan kendaraan dapat dikoordinasikan antara panitia, peserta atau undangan yang membawa kendaraan pribadi.	
10	Menyiapkan lebel kendaraan panitia agar mudah untuk melakukan pengawasan	
11	Menyusun rencana pemetakan / Denah lokasi pengamanan.	

12	Menyiapkan anggaran seksi	
13	Membuat laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan MUNAS	
14	Melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh penanggung jawab, Steering Committee dan Organizing Committee	

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 14 Desember 2010

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Ketua Umum, **Sekretaris Jenderal,**

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
DEWAN PIMPINAN PUSAT

Prof. DR. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc. **H. Muhamad Sirot, S.H.**

c. bahwa untuk penyelenggaraan MUNAS VII LDII Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan, Papan Nama dan Lambang Organisasi.

d. Keputusan Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Nomor: KEP-04/MUNAS VI LDII/2005 tentang Anggaran Dasar dan Aggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

e. Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Nomor : KEP-05/MUNAS VI LDII/2005 tentang Rencana Strategi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Tahun 2005 – 2010.

f. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Nomor: 001/DPP LDII/V/2005 tentang Susunan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII);

g. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Nomor: 059/DPP LDII/III/2010 tentang Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

Memperhatikan

1. Usul saran dan masukan dalam rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Dewan

Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) tanggal 7 Januari 2011 di Sekretariat Jalan Tentara Pelajar No. 28, Arteri Patal Senayan, Jakarta Selatan 12210.

2. Pendapat dan masukan Dewan Penasehat dan atau Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
3. Masukan dan usulan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LDII Provinsi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH NASIONAL LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) TAHUN 2011;

Pasal 1

Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011 selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat MUNAS VII LDII Tahun 2011, yang semula direncanakan diselenggarakan di Surabaya pada tanggal, 08 s/d 09 Februari 2011, dirubah menjadi tanggal 08 -09 Maret 2011;

Pasal 2

(1) Tema Musyawarah Nasional VII LDII Tahun 2011 yang semula : Membangun Bangsa Yang Berakhlaqul-karimah Menuju Indonesia Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan, dirubah menjadi **"MENINGKATKAN PENGEMBANGAN SDM PROFESIONAL RELEGIUS MENUJU INDONESIA SEJAHTERA, DEMOKRATIS, BERKEADILAN DAN BERMARTABAT"**

(2) Sub tema MUNAS VII LDII Tahun 2011
   a. Pengembangan Kepemimpinan berkarakter
   b. Peningkatan Akhlaqul karimah

c. Pembinaan Generasi Penerus
d. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dalam Partisipasi Pembangunan

Pasal 3

Dalam MUNAS VII Tahun 2011 akan dibahas :

(1) Bidang Organisasi :
   a. Menyesuaikan AD/ART LDII sesuai dengan perkembangan organisasi.
   b. Struktur dan Pimpinan Organisasi untuk periode 2011-2016.

(2) Bidang Program :
   Program Kerja Tahunan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Tahun 2011 sampai 2016 meliputi program-program:
   a. Pengembangan Kepemimpinan berkarakter
   b. Peningkatan Akhlaqul karimah
   c. Pembinaan Generasi Penerus
   d. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dalam Partisipasi Pembangunan

(3) Bidang Pertanggungjawaban :
   Pertanggungjawaban Ketua Umum DPP LDII Periode 2005 – 2011

(4) Bidang Khusus :
   Pernyataan dan Rekomendasi MUNAS VII LDII Tahun 2011

Pasal 4

(1) Peserta MUNAS VII LDII Tahun 2011 :
   a. Unsur Dewan Penasehat DPP LDII
   b. Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Pusat LDII .
   c. Unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Seluruh Indonesia.
   d. Unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.

(2) Peninjau
   a. Unsur Dewan Penasihat Daerah;
   b. Unsur Badan dan/atau Lembaga, dan Organisasi Otonom di lingkungan Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
   c. Unsur perwakilan Pondok Pesantren yang diundang oleh Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
   d. Perseorangan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

Pasal 5

(1) Penanggung jawab MUNAS VII LDII Tahun 2011 adalah DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
(2) Untuk persiapan dan pelaksanaan MUNAS VII LDII Tahun 2011 dibentuk panitia yang susunan dan personalianya ditetapkan dengan Keputusan DPP LDII secara terpisah.

Pasal 6

Biaya penyelenggaraan MUNAS VII LDII Tahun 2011 ditanggung oleh DPP LDII.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh DPP LDII.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Januari 2011

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Ketua Umum,	Sekretaris Jenderal,
Prof. DR. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc.	**H. Muhamad Sirot, S.H.**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Sambutan

1. Laporan Ketua Panitia Pelaksana MUNAS VII pada Upacara Pembukaan Musyawarah Nasional VII LDII Tahun 2011
2. Sambutan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia pada Upacara Pembukaan Musyawarah Nasional VII LDII Tahun 2011
3. Sambutan Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat pada Upacara Pembukaan Musyawarah Nasional VII LDII Tahun 2011
4. Sambutan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia pada Upacara Penutupan Musyawarah Nasional VII LDII Tahun 2011

Tausiah dan Pengarahan

1. Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat - Prof. DR Umar Shihab: "*Taswiyatul Manhaj'* dan *Tansiqul Harokah*"
2. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama - Prof. Dr. Said Agil Siraj: "*Tausiah*"
3. Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah - Prof.Dr. H.A. Malik Fajar: "*Dimensi Pendidikan Agama sebagai Penguat Solidaritas Sosial*"
4. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga - DR. Andi Alfian Malarangeng: "*Pengarahan*"
5. Wakil Gubernur Jawa Timur - H. Saifullah Yusuf: "*Pengarahan*"
6. Presiden Direktur Bank Mandiri Syariah - Yuslam Fauzi: "*Perbankan Syariah dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ummat*"
7. Deputi I/Poldagri Kemenkopolhukam - Mayjen TNI Amirrudin Ismail, S.IP. Mewakili Menkopolhukam: "*Persoalan Sosial yang Berdampak Gangguan pada Keamanan dan Ketertiban*"

8. Guru Besar, Universitas Airlangga - Prof. DR. Kacung Marijan: "*Peran Ormas dalam Peningkatan Kinerja Demokrasi*"
9. Ketua Departemen Kepemudaan dan Remaja, Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia: H. Daud Poliradja: "*Sambutan.*"

Lain-lain

1. Surat Tanda Terima Pemberitahuan dari Mabes Polri
2. Galeri Foto – MUNAS VII LDII Tahun 2011
3. Daftar Liputan Media tentang MUNAS VII LDII Tahun 2011
4. CD Video Dokumentasi Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011

Laporan
Ketua Panitia Pelaksana
MUNAS VII LDII 2011

Pada Upacara
Pembukaan Musyawarah Nasional VII
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Tahun 2011

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

اَلْحَمْدُ للهِ الذي هدانا لهذا, وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلاَ أَنْ هَدَانَا اللهُ, لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ, وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُوْرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَمَّا بَعْدُ:

Yang terhormat Bapak Ketua Umum DPP LDII Bapak Prof. Dr. Ir. KH. Abdullah Syam, M. Sc.
Yang sangat saya hormati Bapak Ketua MUI Prof. KH. Umar [illegible]ab.
Yang sangat saya hormati pula Bapak Prof. Ahmad Mubarok.

Yang saya hormati Bapak Darmanto dari Kemenkopolhukam, beliau sudah datang sejak kemarin dalam rangka menyiapkan presentasi dari Kemenkopolhukam.
Yang saya hormati pula dari Kementrian Negara Pemuda dan Olahraga Bapak H. Rathoyo Rasdan.
Yang saya hormati, hadir ditengah-tengah kita, saudara Fayakun dari DPR RI, Fraksi Partai Golkar dan Ibu Min dari Komisi VII, Fraksi Partai Hanura.
Yang saya hormati, hadir ditengah-tengah kita - Srikandi kota Surabaya, Ibu Walikota, Ibu Tri Risma Harini. Sugeng rawuh. Matur nuwun rawuhipun.
Yang saya hormati dan tentunya yang saya thoati, Bapak Ketua Umum MUI Jawa Timur, Bapak KH. Abdul Shomad Bukhori yang didampingi oleh sekretaris umum Bapak KH. Imam Tabrani.
Yang terhormat pula dari Kapolda atau yang mewakili, Pak Kusmidi. Matur nuwun.
Yang kami hormati dari Pangdam atau yang mewakili.
Terpaksa ini saya harus menyebut satu persatu, hadir di tengah-tengah kita Ketua DPD Golkar Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Mas Joko, teman dan rekan saya. Juga hadir ditengah-tengah kita Ketua Partai Hanura Jawa Timur dengan sekretaris, Mas Kus dan Mas Jatmiko.
Yang saya hormati pula dari kantor wilayah Kementrian Agama serta yang sangat saya hormati pula pimpinan ormas baik ditingkat pusat maupun di Jawa Timur.
Serta yang saya ta'dhimi para alim ulama, seluruh tokoh masyarakat dan tentunya seluruh peserta MUNAS VII LDII yang sangat saya cintai.

Perkenankan terlebih dahulu saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Karena hanya atas ijin Allah semata kita bisa menyelenggarakan sebuah peristiwa yang sangat besar dan sangat istimewa, yaitu MUNAS VII LDII di kota Surabaya ini. Sholawat serta salam juga saya haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rosulallah SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in dan ulama sholihin. Seiring dengan doa dan syukur saya: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ جَزَاهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا

Bapak Ketua Umum, para tamu undangan dan seluruh peserta MUNAS yang sangat saya hormati.

Saya perlu melaporkan beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan MUNAS VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Hotel Sangrila Surabaya ini. Peserta MUNAS VII LDII terdiri atas:

1. Seluruh perwakilan DPD LDII dari 33 provinsi di Indonesia, masing-masing dua orang utusan,
2. Seluruh perwakilan DPD LDII Kabupaten/Kota se-Indonesia, masing-masing satu orang utusan,
3. Seluruh perwakilan ulama di tingkat Kabupaten/Kota se-Indonesia, masing-masing satu orang utusan,
4. Perwakilan-perwakilan dari pondok-pondok pesantren di bawah pembinaan LDII,
5. Dan para Peninjau.

Jumlah total peserta MUNAS VII LDII saat ini lebih kurang 1.300 orang. Saya bisa mengatakan lebih kurang 1.300 orang, selain dari daftar hadir yang ada, jumlah keplek (kartu peserta) yang terbagikan mencapai 1.500 buah sudah termasuk panitia. Sehingga perkiraan 1.300 orang yang ikut hadir melaksanakan MUNAS VII LDII untuk menggodok bagaimana program LDII ke depan tidaklah terlalu meleset.

Perlu kami laporkan, dalam MUNAS VII LDII ini diambil sebuah tema yaitu "Meningkatkan Pengembangan SDM Profesional Religius Menuju Indonesia Sejahtera, Demokratis, Berkeadilan dan Bermartabat." Profesional Religius sengaja kita ambil sebagai tema MUNAS VII LDII karena ke depannya LDII mencoba untuk menciptakan dan meningkatkan SDM yang Profesional Religius. Maksud dari *Profesional Religius* adalah LDII menginginkan bahwa SDM Indonesia di masa yag akan datang tidak hanya memiliki kompetensi profesional tetapi juga dilingkupi dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai akhlakul karimah, sehingga *profesional* yang betul-betul didasari nilai-nilai religius

dan bisa betul-betul mengangkat Indonesia ke depan menjadi lebih sejahtera dan bermartabat.

Bapak Ketua Umum, para tamu undangan dan seluruh peserta MUNAS, yang sangat saya hormati.

MUNAS VII LDII ini menjadi sangat istimewa sekali. Saya mengatakan sangat istimewa karena LDII didirikan pada tanggal 1 Juli 1972 di kota Surabaya. Saat ini LDII kembali menyelenggarakan MUNAS, untuk pertama kali penyelenggaraannya dilakukan di luar kota Jakarta, dan di kota Surabaya sebagai tempat kelahiran LDII MUNAS VII dilaksanakan.

Selanjutnya perlu juga kami laporkan bahwa MUNAS VII LDII Insya Allah dilaksanakan selama dua hari, di Hotel Sangrila Surabaya, yaitu pada tanggal 8 – 9 Maret 2011. Diharapkan dengan fasilitas yang tersedia selama dua hari ini, peserta MUNAS VII LDII akan dapat menggarap dan menyelesaikan yang saya sebut program kerja substansial LDII.

Demikian sebagai laporan singkat yang bisa saya sampaikan, untuk selanjutnya kami mohon perkenan kepada Ketua Umum DPP LDII - Bapak Prof.Dr.Ir.KH. Abdullah Syam, MSc dalam memberikan sambutannya nanti sekaligus untuk membuka secara resmi MUNAS VII LDII.

Kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga terlaksananya MUNAS VII LDII ini kami mengucapkan terima kasih اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ جَزَاكُمُ اللّٰهُ خَيْرًا . Kepada seluruh peserta MUNAS VII LDII, selamat melaksanakan musyawarah nasional, semoga Allah memberikan ilham-ilham yang baik dan memberikan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan tugas-tugas organisasi secara tuntas.

Apabila dalam pelaksanaan MUNAS VII LDII ini ada kekurangan-kekurangan, saya selaku ketua pelaksana dan sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan, maka saya menyampaikan permohonan ma'af yang sebesar-besarnya. Terima Kasih

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ جَزَاكُمُ اللّٰهُ خَيْرًا - وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ

Surabaya, 08 Maret 2011

Ir.H. Chriswanto Santoso, MSc.
Ketua Panitia Pelaksana MUNAS VII LDII

Sambutan
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat
Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Pada Upacara
Pembukaan Musyawarah Nasional VII
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Tahun 2011

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ، أَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ ، اَمَّا بَعْدُ :

Yang kami homati:

1. Bpk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia atau yang mewakili.
2. Bpk Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia, Bapak Andi Alfian Mallarangeng.
3. Bpk. Gubernur Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili.
4. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur beserta anggota dewan yang hadir pada kesempatan ini.
5. Panglima Kodam V Brawijaya.
6. Kapolda Jawa Timur.
7. Kepala Pengadilan Tinggi Jawa Timur.
8. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

9. Bpk Pimpinan Partai Politik.
10. Bpk Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat: Bp. Prof. Umar Shihab.
11. Bpk Ketua Umum PB NU: Bpk Prof.Dr. KH. Said Agil Siroj, MA.
12. Bpk Ketua PP Muhamadiyah: Bpk Prof. Malik Fadjar.
13. Bpk Pimpinan MPU Provinsi Aceh.
14. Bpk Pimpinan Dewan Masjid Indonesia.
15. Bapak-bapak Pimpinan ORMAS lainnya atau yang mewakili.
16. Para Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat.
17. Pengurus DPP LDII.
18. Bapak-Ibu Narasumber Utama dalam MUNAS VII LDII Tahun 2011.
19. Bapak, Ibu, rekan-rekan media dan para undangan.
20. Bapak, Ibu dan Peserta MUNAS VII LDII 2011 yang berbahagia.

Alhamdullilahi robbil alamin, mengawali sambutan ini pertama – tama, perkenankan kami mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* karena pada hari ini, Selasa 8 Maret 2011, kita dapat berkumpul di tempat ini, dalam rangka melaksanakan Upacara Pembukaan Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011, dalam keadaan sehat wal 'afiat. Kami berharap bahwa kehadiran kita secara bersama-sama di ruangan ini, yang tujuannya untuk bermusyawarah akbar, bermusyawarah nasional untuk menggariskan arah LDII ke depan, mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Amien, *ya robbal alamin*.

Bapak Menteri dan Gubernur Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili serta hadirin yang kami hormati,
Perkenankan kami menyampaikan apresiasi seraya menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. H. Sukarwo, Gubernur Provinsi Jawa Timur beserta seluruh jajaran pimpinan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah memfasilitasi kami sehingga MUNAS VII LDII dapat berlangsung secara tertib, aman dan lancar. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Gubernur bahwa LDII dan Provinsi

Jawa Timur memiliki **Ikatan Historis** dan **Ikatan Perasaan** yang mendalam, karena di Provinsi Jawa Timur inilah, LDII yang dulunya bernama Lemkari didirikan 39 tahun yang lalu.

Untuk memperkuat ikatan historis dan perasaan itu, kali ini kami kembali memilih Provinsi Jawa Timur sebagai tempat penyelenggaraan MUNAS LDII yang **Pertama Kali** dilaksanakan di luar Ibu Kota Jakarta. Oleh karena itu, fasilitasi dari Bapak Gubernur Provinsi Jawa Timur akan terpatri selalu di hati seluruh warga LDII di seluruh Indonesia yang saat ini tersebar di 33 Provinsi, 491 Kabupaten dan Kota, bahkan ada juga alumni ponpes, yang kini tersebar di 9 Negara. Nama Bapak Gubernur dan Provinsi Jawa Timur akan selalu kami kenang dan menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah perjalanan LDII. Selanjutnya, pada kesempatan ini, perkenankan pula kami atas nama jajaran pimpinan Lembaga Dakwah Islam Indonesia mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sertinggi-tingginya kepada Pemerintah Pusat.

Melalui **Bapak Menkopolhukam atau yang mewakili dan *Bapak Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik* Indonesia** yang terhormat **Bapak Dr. Andi Mallarangeng**, kami sampaikan aspirasi warga LDII kepada Bapak dan kami mohon kepada Bapak kiranya berkenan menyampaikan kepada Bapak Presiden, bahwa dibawah kepemimpinan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama ini, kami merasakan bahwa Pemerintah Pusat tidak pernah berhenti menunjukkan kepedulian kepada Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Perlu kami laporkan kepada Bapak Menteri, bahwa Pemerintah Pusat telah aktif melibatkan LDII dalam pembangunan di berbagai sektor. Dengan **Kementerian Agama Republik Indonesia,** LDII telah diikutsertakan dalam pembahasan kerukunan antar ummat beragama. Dengan **Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,** LDII juga telah diminta berpartisipasi dalam pembahasan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. Demikian pula dengan Kementerian Pertahanan dan Keamanan, LDII juga telah diikutsertakan

dalam program dan *Workshop* Bela Negara. Begitu pula dengan pembangunan kesehatan, **Kementerian Kesehatan Republik Indonesia** telah kongkrit membantu LDII dalam mewujudkan Pos Kesehatan Pesantren dan Mushola Sehat. Demikian juga hal nya dengan **Kepolisian Republik Indonesia** yang telah mengikutsertakan LDII dalam penegakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Baru-baru ini, **Kementerian Kehutanan Republik Indonesia** termasuk **Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia** juga melibatkan LDII dalam gerakan penanaman pohon di seluruh Indonesia melalui program **LDII Go Green**.

Bapak Menteri dan Bapak Gubernur Provinsi Jawa Timur atau mewakili serta hadirin yang berbahagia,
Potensi LDII yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Pusat tidak terbatas pada pembangunan sektor-sektor yang telah kami sebutkan tadi. Dengan warga LDII yang tersebar relatif merata di seluruh penjuru Indonesia, LDII memiliki potensi untuk mendorong pembangunan berbagai sektor, termasuk sektor yang Bapak Menteri pimpin, yaitu Sektor Kepemudaan dan Olahraga. Ke depan, besar harapan kami sebagai warga LDII yang merupakan komponen bangsa, untuk turut berkontribusi secara optimal pada sektor kepemudaan dan Olahraga yang Bapak Menteri pimpin. Oleh karena itu, melalui ***Key Note Speech*** Bapak, kami berharap mendapatkan masukan-masukan dan isu-isu aktual kepemudaan dan Olahraga yang meliputi kewirausahaan, kepramukaan dan organisasi pemuda, yang dapat kami olah dalam MUNAS VII ini untuk menghasilkan program-program yang lebih kongkrit dan kontekstual dengan kondisi keIndonesiaan, sehingga kerjasama yang telah terbangun antara Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga selama ini terus terjalin dengan baik dan produktif dan bahkan dapat meningkat lagi pada masa masa mendatang.

Bapak Menteri dan Gubernur Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili serta Hadirin yang kami hormati,
Dari lubuk hati kami yang paling dalam, perkenankan kami menghaturkan terima kasih yang tak terhingga untuk bapak-ibu. Atas segala waktu dan tenaga yang bapak-ibu telah

luangkan untuk menghadiri acara ini, hanya Allah yang dapat memberi pahala yang berlimpah sebagai ganjaran atas niat tulus ikhlas dari bapak-ibu untuk membangun ukhuwah islamiyah yang merupakan fondasi dalam membangun negara ini menjadi negara yang penuh rahmat, *baldatun, thoyyibatun wa robbun ghofur.*

Perlu kami sampaikan bahwa di lingkungan LDII sendiri, untuk mendorong ukhuwah islamiah, telah kami kembangkan sebuah sistem dakwah yang kondusif, yang kami label dengan istilah **GREEN DAKWAH**. Kami sebut dengan **GREEN DAKWAH** karena esensinya adalah agar Dakwah Islam dilaksanakan dengan cara-cara menyejukkan, tidak menyalahkan orang dan pihak lain, dan harus bertujuan untuk membangun kebersamaan dan menguatnya ukhuwah islamiyah dengan cara lembut dan sejuk. Adapun yang dimaksud dengan **Green Dakwah LDII adalah dakwah yang terdiri atas 7 (tujuh) cara**, yaitu:

1. Dakwah yang berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadits.
2. Dakwah yang membawa kepada kesalehan sosial, jadi bukan hanya kesalehan individu.
3. Dakwah yang disampaikan dengan cara santun, sejuk, dan *tasamuh* (penuh dengan rasa toleransi).
4. Dakwah yang membawa kepada kemaslahatan ummat.
5. Dakwah yang berwawasan lingkungan.
6. Dakwah yang mengajak pada pola hidup sehat dan bersih. dan,
7. Dakwah yang dibawakan dengan kasih sayang .

Jika konsep GREEN DAKWAH ini diterapkan secara meluas di kalangan Ummat Islam, kami yakin rasa ukhuwah Islamiah akan semakin bertambah tebal. Dan inilah modal utama

Ummat Islam untuk tetap *survive* dan **mampu memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah – masalah sosial kemasyarakatan, baik di masa kini maupun di masa mendatang dalam bingkai NKRI** seperti yang dijelaskan di atas.

Bapak Menteri dan Gubernur Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili serta hadirin yang kami banggakan.
Perkenankan kami mengucapkan salam hangat dan selamat datang kepada peserta MUNAS VII LDII di Kota Surabaya, Kota Pahlawan. Kami paham bahwa sebagian besar dari saudara-saudara mungkin masih capek, lelah bahkan mungkin masih belum istirahat yang cukup. Karena saudara-saudara baru saja menempuh perjalanan jauh, meninggalkan Kabupaten, Kota dan Provinsi dimana saudara memimpin Dewan Perwakilan Daerah LDII masing-masing. Untuk semua pengorbanan saudara hingga dapat sampai ke tempat ini, kami ucapkan الحمد لله جزاكم لله خيرا Saya berharap semoga semangat heroik Kota Pahlawan, semangat arek-arek Suroboyo menyertai saudara-saudara dalam MUNAS VII LDII 2011 ini.

Perkenankan kami pada kesempatan ini meyakinkan bahwa kehadiran Saudara–Saudara dalam MUNAS VII ini adalah sangat penting dan berharga, karena pada MUNAS VII ini saudara-saudara akan mengambil keputusan yang akan menentukan arah organisasi LDII satu periode mendatang. Saudara-saudara akan memutuskan sejumlah hal yang merupakan ***key leverage*** atau pengungkit utama Organisasi LDII, seperti apa Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga LDII, Rencana Strategis Organisasi, Format Pengembangan Sumberdaya Manusia ke depan, termasuk yang paling strategis adalah menentukan pimpinan LDII untuk satu periode mendatang.

Oleh karena itu, kami berharap semoga Saudara dapat mengikuti MUNAS VII LDII 2011 ini dengan baik dan selalu dalam keadaan sehat sampai tiba saat penutupan nanti. Disamping itu juga kami berharap agar semua peserta dapat

mengikuti keseluruhan rangkaian acara dengan penuh semangat dan kesungguhan. Tumbuhkanlah semangat heroik dalam MUNAS VII LDII di Kota Pahlawan ini, agar kepentingan bersama, bukan kepentingan sepihak, selalu mewarnai suasana hati Saudara dalam mengambil keputusan. Kepuasan kerja seorang hero atau pahlawan tidaklah ditentukan oleh seberapa banyak kepentingan pribadinya terpenuhi, melainkan sejauh mana kepentingan orang banyak, kepentingan bersama dan kepentingan organisasi dapat diakomodir.

Bapak Menteri dan Bapak Gubernur Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili beserta hadirin yang kami muliakan,
Tepat saat ini, LDII telah berumur 39 tahun. Peserta MUNAS berkumpul di sini untuk melaksanakan MUNAS VII. Artinya, MUNAS pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam telah kita lewati dengan aman, dalam artian organisasi kita yang tercinta ini masih survive dan bahkan makin menunjukkan eksistensinya. Perlu Saudara camkan bahwa MUNAS II tidak mungkin berhasil apabila MUNAS I tidak sukses. Begitu pula, MUNAS VII ini tidak mungkin berhasil apabila MUNAS VI di Jakarta enam tahun yang lalu tidak berjalan efektif. Oleh karena itu, MUNAS VII ini juga harus sukses, agar kita bisa menjamin adanya MUNAS VIII lima tahun mendatang. Begitulah seterusnya sehingga LDII kita harapkan eksis terus dalam perkembangan dan dinamika bangsa dalam bingkai NKRI. Amien.

Para peserta MUNAS yang kami banggakan,
Kunci kesuksesan kita bersama dalam MUNAS-MUNAS sebelumnya adalah karena secara organisasi, kita telah mampu membangun *learning organization* atau pembelajaran bersama atau organisasi secara organisasi, bukan *individual learning* yang diwarnai dengan kepentingan pribadi. Dengan *learning organization*, kita telah bersinergi dan saling melengkapi dalam menghasilkan berbagai keputusan-keputusan MUNAS, dan secara *learning organization* pula kita dapat mengimplementasikan substansi keputusan-keputusan MUNAS tersebut yang tertuang dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Rencana Strategis dan lain-lain.

Selama satu periode, kita telah bergerak dalam formasi yang lebih tersusun, terstruktur secara sistematis mulai dari DPP, DPD Provinsi, DPD Kabupaten/Kota, PC sampai pada PAC. Alur pengambilan keputusan dan implementasinya berjalan dengan baik. Begitupula alur pengumpulan informasi untuk pengambilan keputusan dan penyempurnaan berkelanjutan terhadap program-program yang sedang berjalan juga berjalan tanpa menemui kendala yang berarti.

Pada MUNAS VII ini, kemampuan kita untuk melakukan *learning organization* kembali akan diuji. Mampukah kita membangun semangat *learning organization* sehingga kita dapat membaca perkembangan dan kecendrungan lingkungan strategis secara tepat? Mampukah kita menuangkan hasil pemahaman kita terhadap perkembangan lingkungan strategis tersebut ke dalam Keputusan-Keputusan MUNAS? Selanjutnya, mampukah semangat *learning organization* tersebut menyertai kita dalam menerapkan Keputusan-Keputusan MUNAS itu kelak? Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan tantangan kita bersama, tantangan yang dapat memicu semangat dan motivasi *learning organization* kita.

Hadirin dan Peserta MUNAS yang kami banggakan,
Learning organization yang telah kita terapkan selama ini seyogyanya tidaklah berhenti melainkan perlu terus dilanjutkan, dipupuk dan dikembangkan. Ke depan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh LDII semakin berat. Lingkungan strategis tempat LDII beroperasi sangat dinamis dan kerapkali secara tak terduga memunculkan anomali-anomali yang siapa pun dari kita tidak dapat memprediksi sebelumnya. Dalam hal demokratisasi misalnya, tidak satupun dari kita yang bisa menduga bahwa ternyata efek bola saljunya bergulir lebih cepat dan lebih dahsyat, merontokkan sejumlah kekuasaan, yang telah mengakar puluhan tahun. Kalau dulu di Asia kekuatan demokrasi hanya mampu menjatuhkan satu kekuasaan dalam satu tahun, tapi kini di timur tengah kekuatan itu mampu menjatuhkan kemungkinan tiga sampai lima kekuasaan dalam satu tahun.

Selanjutnya, dalam hal globalisasi, siapa yang bisa menduga kalau sekarang ini kerjasama dan kolaborasi lintas negara tidak lagi hanya bisa dilakukan oleh negara dan perusahan-perusahaan multi-nasional, tetapi juga sudah dapat dilakukan oleh individu secara langsung tanpa melalui negara dan perusahaan tersebut. Ke depan kerjasama dan kolaborasi individu lintas negara bukan lagi suatu hal yang mustahil, malah sebaliknya justeru semakin marak. Tetangga Saudara bisa mengajar matematika untuk anak-anak di benua lain seperti di Eropa misalnya dan mendapat bayaran dengan mata uang Euro. Semua ini dimungkinkan berkat perkembangan teknologi komunikasi informasi. Meskipun teknologi informasi memiliki sejumlah potensi, di forum ini perlu saya tekankan bahwa teknologi informasi juga memiliki dampak ikutan, berupa budaya-budaya negatif seperti pornografi, budaya bebas yang sangat bertentangan dengan karakter dan akhlak ummat Islam dan sangat urgen untuk kita antisipasi.

Begitupula dengan fenomena Global Warming yang menimbulkan anomali-anomali cuaca termasuk dampak ikutannya seperti banjir, longsor, tsunami dan gagal panen. Dampak ikutan ini pada gilirannya dapat menimbulkan cobaan berupa kesengsaraan dan kemiskinan pada warga masyarakat. Warga masyarakat kehilangan sumber mata pencaharian, sehingga kesenjangan ekonomi menjadi suatu hal yang tidak dapat dielakkan.

Hadirin dan Peserta MUNAS Yang Kami Banggakan,

Dengan anomali-anomali yang ditimbulkan oleh demokratisasi, globalisasi dan global warming, saya ingin meyakinkan kepada saudara-saudara peserta MUNAS VII, bahwa ke depan, kehidupan ummat Islam tidak mudah. Ummat Islam tidak bisa lagi hidup apalagi *leading* ditengah lingkungan strategis yang terus berubah secara dinamis. *Orang bijak bilang, kita tidak mampu lagi memecahkan masalah masa depan dengan logika dan cara berpikir masa lalu.* Untuk mengantisipasi hal ini, ummat Islam perlu membekali dirinya dengan kemampuan-kemampuan antisipatif agar dapat hidup bahkan dapat *leading the way* di masa mendatang. Ummat Islam perlu membekali

dirinya dengan pemahaman terhadap makna demokrasi substantial dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ummat Islam harus mampu menjauhkan diri dari demokrasi semu, struktural sehinga tidak melakukan *money politics,* jual beli suara dan sejenisnya. Ummat Islam perlu dibekali dengan kemampuan teknologi komunikasi informasi yang canggih agar mereka tidak menjadi penonton dan tidak menjadi korban teknologi informasi, melainkan mereka dapat meraih peluang-peluang yang terkandung di dalamnya. Selain itu, ummat Islam perlu dibekali dengan kemampuan *multi-skill* sehingga tingkat peluang untuk mendapat kesempatan kerja lebih tinggi. Ummat Islam seperti ini tidak mudah kehilangan sumber mata pencaharian karena memiliki banyak skill sehingga memiliki banyak sumber mata pencaharian.

Hadirin, dan Peserta MUNAS Yang Kami Cintai,
Sebagai Lembaga Dakwah Islam Indonesia, adalah tugas dan tanggungjawab kita bersama untuk membekali Ummat Islam dengan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk mengadaptasi kehidupannya dengan sejumlah anomali-anomali tersebut. Oleh karena itu, perkenankan saya selaku ketua umum mewakili seluruh warga LDII di seluruh nusantara menyampaikan hasil *learning organization* kita bersama, yaitu sosok ummat Islam seperti apa, yang mampu *survive* dan **mampu memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah – masalah sosial kemasyarakatan, baik di masa kini maupun di masa mendatang.** Maka jawabannya adalah sosok ummat Islam yang kita beri label **profesional religius**, sekali lagi **profesional religius.**

Hanya ummat Islam yang profesional religiuslah yang mampu bertahan di masa mendatang, karena sosok profesional religius memiliki tingkat adaptif yang tinggi. Mengapa demikian? Karena profesional religius adalah ummat Islam yang profesional. Artinya, ummat Islam seperti ini bukan saja memiliki keterampilan pada suatu bidang tertentu yang menjadi sumber mata pencaharian, tetapi dia juga ahli di bidang itu. Keahlian itu melekat pada dirinya sebagai individu sehingga menjadi keunggulan kompetitifnya yang sulit dan bahkan tidak dapat ditiru orang lain. Di samping itu, ummat Islam profesional

religius adalah ummat Islam yang religius. Artinya, ummat Islam seperti ini memiliki kepahaman yang tinggi terhadap ibadah-ibadah *mahdhoh* dan *ghoiru mahdhoh*, sehingga mampu menjadikan pemahaman tersebut sebagai tuntunan yang akan menjadikannya memiliki akhlakul kharimah.

Hadirin dan Peserta MUNAS VII yang kami hormati
Itulah sebabnya pada MUNAS VII ini kita mengangkat tema **"Meningkatkan Pengembangan SDM Profesional Religius Menuju Indonesia Sejahtera, Demokratis, Berkeadilan dan Bermartabat"**. Hasil *learning organization* kita menginginkan bahwa ke depan segala sumberdaya dan potensi yang dimiliki oleh LDII harus *all out* dialokasikan dan diarahkan untuk membangun ummat Islam yang profesional religius. Unsur-unsur yang terdapat dalam Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga mulai dari *vision, strategy, values, process, control system* hingga *structure* telah di desain sedemikian rupa sehingga jelas dan fokus mengarah pada pengembangan SDM ummat Islam ke arah profesional religius.

Oleh karena itu, besar harapan kepada saudara-saudara peserta MUNAS VII LDII 2011 ini, untuk secara cermat ikut membahas dan mengarahkan agar Rancangan-Rancangan Keputusan MUNAS VII LDII betul-betul tajam dalam membentuk profesional religius.

Bapak Menteri dan Gubernur Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili serta hadirin yang kami hormati,
Di penghujung sambutan ini, perkenankan kami menyampaikan kepada Pemerintah Pusat, bahwa dalam nomenklatur Lembaga Dakwah Islam Indonesia terdapat kata INDONESIA, artinya LDII adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada MUNAS VII LDII ini, melalui pengembangan ummat Islam yang profesional religus, LDII ingin mengambil bagian dalam salah satu misi negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan profesional religius, bangsa ini menjadi cerdas, tetapi tidak hanya pada bidang pekerjaannya saja tapi tak kalah pentingnya juga akan cerdas dalam agamanya, sehingga tujuan untuk membangun para

profesional yang berkarakter dan berakhlakul kharimah dapat secara bersama-sama kita wujudkan.

Akhirnya kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Poltik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia atau yang mewakili, Bapak Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Gubernur Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, Bapak Ketua Umum PB NU, Bapak Ketua PP Muhammadiyah, serta semua undangan dan peserta yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu kami haturkan terima kasih dengan mengucapkan kalimat syukur الحمد لله جزاكم لله خيرا.

Kami berharap agar kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini semoga dapat terus kita jaga, pelihara dan kembangkan di masa-masa mendatang.

Demikianlah sambutan kami, mohon maaf apabila ada ungkapan yang kurang berkenan, sekali lagi kami ucapkan terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya. Akhirnya, dengan mengucapkan *Bismillahirrohmanirrahim* Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia, secara resmi kami nyatakan DIBUKA.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Surabaya , 8 Maret 2011
Ketua Umum DPP LDII

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
DEWAN PIMPINAN PUSAT
★LDII★

Prof. Dr. Ir. K.H.Abdullah Syam, M.Sc

Sambutan
Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat

pada:
Upacara Pembukaan Musyawarah Nasional VII
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Tahun 2011

(MUNAS LDII 2011)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ.

Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia.

Berbicara tentang *taswiyatul manhaj* dan *tansiqul harakah* yang telah diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai dasar dan landasan dalam melaksanakan kegiatan keseharian adalah suatu metode atau cara di dalam melakukan kegiatan dalam memperjuangkan cita-cita kita semua ummat Islam di Indonesia yaitu *izzatul Islam wal muslimin*.

Memang di dalam kehidupan keseharian kita kadang-kadang bermacam-macam masalah. Ada masalah yang bersumber dari dalam diri kita sebagai individu, atau yang bersumber dari

dalam kelompok kita dan yang kedua masalah yang bersumber dari luar diri kita atau dari luar kelompok kita.

Yang bersumber dari dalam diri kita harus kita tanggulangi, harus kita atasi dengan cara menahan diri, malaksanakan instrospeksi, mawas diri sehingga tantangan yang bersumber dari dalam diri kita itu dapat kita atasi. Itulah sebabnya Allah perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebab dengan terbiasa melaksanakan berpuasa kita akan dapat menahan hawa nafsu, mampu menahan tantangan-tantangan dari dalam diri kita di luar bulan puasa. Adapun tantangan dari dalam kelompok, biasanya agak lebih mudah untuk kita hadapi dibandingkan tantangan yang berasal dari dalam diri kita.

Tantangan yang berasal dari luar diri kita misalnya anak dan isteri, terkadang mereka adalah tantangan dari kita. Anak dan istri yang tidak bisa kita bimbing sesuai dengan tuntunan agama adalah tantangan bagi diri kita. Istri yang demikian merupakan tantangan yang pertama setelah tantangan dari dalam diri kita.

Kemudian di dalam kelompok kita, misalnya orgasnisasi LDII, ada oknum dari anggota organisasi yang menyuarakan suara miring, suara negatif terhadap organisasi itu sendiri. Menurut saya tantangan ini tidak seberapa sulit dibandingkan dengan tantangan dari dalam diri kita sendiri.

Kemudian juga ada tantangan dari luar, jangan kita biarkan orang-orang dari luar menuduhkan hal-hal yang jelek terhadap organisasi kita yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jangan kita biarkan mereka membentuk suatu kekuatan untuk mengintimidasi organisasi kita. Misalnya adanya orang yang mengatakan bahwa LDII itu sama dengan Ahmadiyah, atau LDII itu sesat/menyimpang dari ajaran Islam. Jikalau dulu ada ajaran ingkar sunnah, maka sekarang ada yang menuduh bahwa LDII itu adalah reinkarnasi dari ingkar sunnah.

Maka menjadi hal penting adalah bagaimana kita menyatukan pendapat kita untuk menanggulangi sehingga tidak ada lagi suara-suara miring/negatif seperti itu. Dan memang menurut

firman Allah di dalam Al-Qur'an akan ada pengaruh-pengaruh negatif dari luar, cobaan yang datangnya dari luar. Sebagaimana Allah berfirman:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * سورة البقرة 155

Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar (QS. Al-Baqarah: 155).

Menurut ayat tersebut, kita pasti akan diuji oleh Allah dengan bermacam-macam ujian. Ujian berupa kelaparan, kekurangan harta, sakit, kematian anak, istri, suami, ayah, ibu dan sebagainya. Akan tetapi ada kabar gembira bagi orang-orang yang sabar yaitu orang-orang yang selalu meyerahkan segala persoalannya kepada Allah. Sebagaimana dalam istilah:

وَأُفَوِّضُ أَمْرِيْ إِلَى اللهِ *

"*Dan aku memasrahkan perkaraku terhadap Allah*"

Sebab Allah juga telah memerintahkan kepada kita untuk meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan tatap mengerjakan shalat. Allah berfirman:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ * سورة البقرة 45

Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan shalat (QS. Al-Baqarah: 45)

Jika tidak ada kesabaran barangkali kita sudah saling menghancurkan. Dan menurut saya pimpinan LDII dengan penuh kesabaran akan mampu membawa LDII ke arah yang

lebih maju dan insyaAllah akan mampu menjelaskan kepada ummat bahwa LDII itu berada di jalan yang benar.

Agama kita adalah satu yaitu kita percaya kepada Allah, percaya kepada Muhammad SAW, percaya kepada Al-Qur'an, tidak ada perbedaan diantara kita. Jika ada perbedaan itu adalah masalah *furu'iyah,* masalah *khilafiyah* dan perlu ada kedamaian diantara keduanya. Tidak perlu kita bersitegang bahwa ini yang benar, itu yang salah.

Kebenaran itu bisa lebih dari satu. Kesalahan juga bisa lebih dari satu. Adapun kebenaran yang absolut itu adalah aqidah yaitu kepercayaan kita bahwa Allah itu Esa, Muhammad SAW adalah utusan Allah yang akhir. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Masalah aqidah tidak bisa diganggu gugat. Adapun masalah-masalah yang lain, misalnya masalah *khilafiyah*, masalah *furu'iyah*, masalah kehidupan sosial jika terjadi perbedaan itu adalah hal yang wajar.

Hadirin sekalian, ada dua hal yang penting di dalam kita berorganisasi, yaitu perdamaian dan keadilan. Jika dua hal tersebut dapat diwujudkan maka tidak akan timbul perpecahan.

Beberapa waktu yang lalu, saya menghadiri acara seminar internasional. Setelah saya menyampaikan materi, ada yang berkata kepada saya bahwa antara sesama orang Islam tidak dapat mewujudkan perdamaian, misalnya antara yang pro-Presiden Khadafi dan yang kontra-Presiden Khadafi dan antara Sunni dan Syi'ah. Sesama orang Libya terjadi perang saudara. Sesama orang Tunisia terjadi perang saudara. Sesama orang Mesir juga terjadi perang saudara. Padahal itu adalah masalah *furu'iyah* dan masalah *khilafiyah* yang semestinya tidak harus sampai menimbulkan peperangan.

Contohnya saya pribadi dan keluarga. Beberapa saudara saya duduk menjadi anggota DPR dan DPRD melalui berbagai partai politik yang berbeda. Ada yang melalui GOLKAR, ada yang melalui Demokrat, dan sebagainya. Demikian pula terhadap organisasi kemasyarakatan. Jika ada orang yang

mau masuk LDII dipersilakan, mau masuk ke Muhammadiyah dipersilakan, dan masuk ke NU juga dipersilakan.

Lantas bagaimana sikap MUI terhadap Ahmadiyah? MUI menghukumi bahwa Ahmadiyah itu salah dan MUI meminta agar warga Ahmadiyah sadar. Kita bina mereka (Ahmadiyah) dan kita arahkan mereka (Ahmadiyah) kepada keyakinan yang benar. Jika sudah kita ajak tetapi tetap tidak mau, maka itu menjadi tanggung jawab diri mereka sendiri. Tugas kita hanya menyampaikan.

Sumbernya kedamaian itu dari Allah. Allah yang memiliki keselamatan dan yang memberikan keselamatan. Kesenangan itu perdamaian dan kesusahan itu adalah permusuhan.

Selanjutnya faktor yang kedua adalah keadilan. Yang dimaksud dengan keadilan di sini adalah sesuai menurut Allah dan Rasul-Nya, saling ridho diantara keduanya meskipun tidak sama. Sebab memang tidak akan mungkin bisa sama. Contohnya orang yang memiliki istri lebih dari satu. Meskipun kita menginginkan yang seadil-adilnya menurut Al-Qur'an kita tidak akan mampu. Allah berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ...الأية * سورة النساء **129**

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian (QS. An-Nisa': 129).

Demikian juga dengan anak. Memberikan secara adil kepada anak itu tidak harus sama. Tetapi disesuaikan dengan kebutuhan anak itu sendiri. Karena itu, keadilan di dalam Islam itu berwujud kesamaan kasih sayang dan kesamaan berfikir. Jika kita sudah tidak sayang berarti kita tidak adil. Maka keadilan perlu ditegakkan di dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat agar kita selamat dunia dan akhirat.

Dua hal tersebut yaitu kedamaian dan keadilan harus kita tegakkan. Dengan terwujudnya kedamaian, maka tidak akan

terjadi perpecahan. Ada pepatah mengatakan lebih baik kita punya satu orang teman dan tidak punya musuh dari pada memiliki banyak teman dan satu orang musuh. Dan dengan keadilan kita akan memiliki teman yang banyak. Tetapi jika tidak adil kita akan memiliki musuh sebanyak-banyaknya.

Kesimpulannya adalah: Pertama di dalam kita bekerja carilah keridho-an Allah, carilah teman yang sebanyak-banyaknya. Yang kedua di dalam kita bekerja harus kita niatkan bahwa ini kita lakukan semata-mata karena Allah dan Allah telah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik dan berbuat adil, carilah kedamaian.

Semoga Allah SWT menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa menegakkan panji perdamaian dan keadilan sehingga kita selalu mendapatkan keridhaan Allah SWT. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas kekurangannya kami mohon maaf.

بِاللهِ التَّوْفِيْقِ وَالْهِدَايَةِ

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Surabaya, 8 Maret 2011

Prof. DR. Umar Shihab
Ketua Majelis Ulama Indonesia

Sambutan
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat
Lembaga Dakwah Islam Indonesia

pada
Upacara Penutupan Musyawarah Nasional VII
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Tahun 2011

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ، أَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ ، اَمَّا بَعْدُ :

Yang kami homati:
1. Bapak alim ulama.
2. Bapak-bapak pimpinan tertinggi organisasi kemasyarakatan.
3. Para Dewan Penasehat LDII.
4. Para Ketua DPP LDII.
5. Bapak-ibu narasumber utama dalam MUNAS VII LDII Tahun 2011.

6. Bapak, ibu dan saudara tamu undangan yang kami banggakan dan cintai.
7. Bapak, ibu dan saudara peserta MUNAS VII LDII Tahun 2011 yang berbahagia.

Alhamdullilahi robbil 'alamin, mengawali sambutan ini, pertama – tama, perkenankan saya selaku Ketua Umum terpilih, mengajak seluruh hadirin untuk secara sungguh-sungguh dan penuh khidmat memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala,* karena berkat kesempatan, kesehatan yang prima, dan terutama ilham-ilham yang barokah yang dilimpahkanNya kepada kita semua dalam Musyawarah Nasional VII LDII selama dua hari penuh, kita dapat dengan sukses menunaikan tugas-tugas mulia dalam MUNAS VII LDII ini, yaitu:

Pertama, kita telah menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDII, sehingga kita sudah ada acuan dalam memastikan semua aturan main organisasi ke depan.

Kedua, kita juga telah menetapkan Arah Pengembangan Sumber Daya Manusia LDII ke depan, sehingga kita tidak perlu ragu lagi, tidak perlu mencari-cari bentuk lagi tentang sosok SDM LDII yang akan kita bentuk. Semuanya sudah jelas dan kita tinggal *all out* untuk mewujudkannya.

Ketiga, kita juga telah menetapkan Rencana Strategi yang memetakan program kerja selama lima tahun ke depan. Dengan kehadiran Rencana Strategi ini, maka selanjutnya kita tinggal menjabarkan kegiatan-kegiatan apa yang harus kita laksanakan dalam menjalankan program-program tersebut.

Selanjutnya, yang tak kalah pentingnya, yaitu yang **Keempat,** dimana kita juga, secara demokratis, telah memilih Ketua Umum dan Pimpinan Organisasi LDII selama satu periode ke depan. Kita telah memilih kader-kader terbaik LDII yang akan memikul tanggungjawab dan akan berakuntabel dalam menjalankan roda organisasi LDII selama satu periode mendatang.

Para Peserta MUNAS VII LDII dan Hadirin yang berbahagia,

Dalam menghasilkan output-output MUNAS VII LDII ini, kita telah berhutang budi pada banyak pihak, antara lain:

Pertama, kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada umumnya dan kepada Pemerintah Kota Surabaya khususnya beserta seluruh jajaran aparat keamanan, yang telah menjaga keamanan dan ketertiban Kota Surabaya selama MUNAS VII LDII ini berlangsung. Untuk itu, dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami ucapkan terima kasih dan menyampaikan appresiasi yang setinggi-tingginya.

Kedua, kami juga berterima kasih kepada jajaran pimpinan organisasi kemasyarakatan khususnya ormas-ormas Islam besar seperti NU dan Muhammadiyah, atas dukungan morilnya melalui kehadiran dan partisipasi aktifnya selama MUNAS VII ini berlangsung. Pada kesempatan ini, perkenankan kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya, karena kehadiran saudara-saudara dari ormas-ormas Islam adalah wujud nyata dari semakin menebalnya rasa persaudaraan antar sesama ummat Islam, dan semakin membaiknya ukhuwah Islamiah.

Ketiga kepada para Peserta MUNAS VII LDII. Saudara-saudara adalah peserta MUNAS VII LDII yang hebat. Tidak mudah menyatukan pikiran dan hati saudara-saudara dalam waktu yang relatif singkat, yaitu hanya 2 hari saja. Tapi karena saudara-saudara hebat dan profesional sehingga hal yang sulit itu bisa kita wujudkan. Dan hasilnya adalah arah dan sejumlah strategi untuk mengarahkan LDII yang kesemuanya telah saudara-saudara tuangkan ke dalam Keputusan-Keputusan MUNAS VII LDII Tahun 2011. Untuk itu semua, kami ucapkan الحمد لله جزا كم لله خيرا. Amien.

Para Peserta MUNAS VII LDII dan Hadirin yang berbahagia,

Momen sekarang ini adalah momen penutupan. Proses yang telah kita lewati sebelum tiba pada momen penutupan ini, merupakan momen-momen yang penuh dengan ketegangan,

penuh dengan olah pikiran, olah rasa, penuh dengan adu argumentasi, dan bahkan tidak sedikit diwarnai dengan adu urat leher. Tapi semua itu sudah berlalu, dan sekarang kita sedang menikmati buahnya momen-momen yang penuh ketegangan tadi.

Saudara-saudara sekalian, perkenankan saya meyakinkan saudara bahwa momen-momen seperti itu adalah biasa dan alami dalam perjalanan suatu proses. Bukankah kupu-kupu yang warnanya Indah itu, harus bersakit-sakit memecahkan kepompongnya terlebih dulu? Bukankah bunga yang indah warnyanya itu, harus berjuang keras memecahkan kelopak bunganya terlebih dahulu? Dan bukankah, mutiara yang indah itu, harus merekahkan cangkang tiramnya terlebih dahulu, sebelum keluar dan menjadi mutiara yang indah dipandang mata. Ada sakit, ada perih, ada ketersinggungan dalam momen-monen itu sebelum sebuah proses menghasilkan buah. Tapi mari kita lihat buahnya, mari kita lihat hasilnya. Dengan demikian, hati kita menjadi senang, menjadi bahagia, dan dapat melupakan momen-momen yang menegangkan itu.

Para Peserta MUNAS VII LDII dan Hadirin yang berbahagia,

Di depan mata kita, setelah MUNAS VII LDII ini berakhir, ada tugas berat menanti kita. Oleh karena itu, acara penutupan ini bukanlah penutupan dalam arti bahwa aktivitas kita sudah berakhir, melainkan justeru baru merupakan langkah awal kita dalam periode kepengurusan LDII 2011 – 2016. Saya tegaskan kembali, bahwa saat ini kita baru mulai.

Saudara-saudara sekalian, tentunya masih segar dalam ingatan kita semua, dimana dalam Sambutan Pembukaan MUNAS VII LDII kemarin, saudara Ketua Umum Periode 2005 – 2011 telah mencanangkan bahwa LDII ke depan seharusnya diarahkan untuk menghasilkan Profesional Religius sebanyak-banyaknya di muka bumi Indonesia ini, yaitu sosok ummat Islam yang selain profesional atau ahli pada bidang pekerjaannya, juga memiliki kepahaman yang tinggi terhadap ajaran-ajaran Islam.

Selanjutnya, strategi untuk menghasilkan sosok ummat Islam yang profesional religius tersebut, telah saudara-saudara tetapkan dan tuangkan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Program Kerja dan Pengembangan SDM LDII yang merupakan Keputusan-Keputusan MUNAS VII LDII ini. Inilah tantangan nyata kita ke depan, yaitu seberapa banyak profesional-religius yang dapat kita hasilkan dalam kepengurusan LDII Periode 2011 - 2016? 10 juta orang? 20 juta orang? Atau berapa? di antara kurang lebih 250 juta penduduk Indonesia.

Setelah kita tetapkan jumlah profesional religius yang akan kita hasilkan, lalu bagaimana cara menghasilkannya? Strategi dan cara-cara efektif apa yang dapat kita tempuh untuk menghasilkan jumlah profesional religius itu? Pasangan kata "berapa profesional religius" dan "bagaimana cara menghasilkannya" hendaknya menjadi "nyanyian" hati dan pikiran kita ke depan. Saya berharap pasangan kata tersebut selalu terngiang di telinga dan pikiran kita, sehingga kita selalu ada semangat dan ada motivasi untuk mencapainya.

Peserta MUNAS dan Hadirin yang saya hormati,

Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan empat rangkaian kiat yang dapat kita terapkan secara bersama-sama agar jawaban terhadap kedua pertanyaan pada pasangan kata tadi, dapat kita temukan sesuai konteks saudara-saudara masing-masing. Kiat pertama adalah rajinlah berbagi pengetahuan tentang topik-topik yang terkait dengan profesional religius. Bersosialisasilah dengan siapa saja yang relevan. Jangan sungkan-sungkan bertanya dan menyampaikan pendapat, bahkan termasuk orang-orang yang terpinggirkan sekalipun. Ingatlah bahwa setiap orang punya cerita untuk di dengar. Dalam kiat berbagi pengetahuan ini, Saudara akan menemukan makna, khidmat atau apa yang oleh orang asing disebut dengan *sense-making*.

Kiat kedua adalah pertajamlah makna, khidmat yang saudara sudah tangkap itu melalui pencarian terhadap teori dan konsep dalam buku-buku teks, pengalaman-pengalaman *best practice*.

Dengan demikian, makna, khidmat dan *sense making* yang dulunya sederhana, kini menjadi lengkap menyerupai sebuah rancangan kegiatan yang sudah sangat lengkap dan sudah sangat siap untuk dikerjakan.

Kiat ketiga adalah terapkan dan kerjakan rancangan kegiatan itu. Saudara harus berani, dan tidak usah ragu. Yakinkan diri saudara bahwa rancangan kegiatan itu sudah paripurna karena saudara sudah memperkayanya dengan teori, konsep dan pengalaman *best-practice*.

Kiat terakhir adalah pantau penerapannya dan sempurnakan secara berkesinambungan. Dengan mempraktekkan empat kiat tadi, saya yakin setiap kegiatan yang Saudara lakukan untuk menemukan jawaban terhadap dua pasang kata di atas, secara teori dan praktek dapat dipertanggungjawabkan.

Para peserta MUNAS yang Berbahagia,

Akhirnya, kami menyadari sepenuhnya bahwa kelancaran penyelenggaraan MUNAS VII LDII Tahun 2011 ini tidak lepas dari partisipasi aktif dari seluruh peserta dan kerja keras Panitia Pelaksana. Untuk itu pada kesempatan ini, kami baik selaku pribadi maupun sebagai Ketua Umum DPP LDII terpilih periode 2011-2016, menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh Panitia MUNAS VII LDII, mulai dari *Steering Commitee* sampai dengan *Organizing Commitee* yang telah bekerja jauh hari sebelum MUNAS VII ini dimulai dan masih akan terus bekerja dalam merampungkan hasil-hasil MUNAS VII LDII ini. Hanya Allah SWT yang mampu membalas tenaga, waktu dan pemikiran yang saudara-saudara telah berikan.

Pada acara MUNAS VII LDII ini ada banyak kelebihan dan kelemahan dalam pelaksanaannya. Maka pesan kami sebagai Ketua Umum DPP LDII, kelebihan-kelebihan yang ada supaya terus dipertahankan bahkan ditingkatkan pada pelaksanaan acara-acara serupa selanjutnya, sementara kelemahan-kelemahan supaya dicatat dan dijadikan sebagai bahan pembelajaran berharga dimasa yang akan datang. Dari lubuk

hati saya yang paling dalam, saya berdoa semoga apa yang saudara sekalian telah curahkan dapat bernilai ibadah disisi Allah *Subhanahu wa Ta'ala. Amien*.

Selanjutnya, sekali lagi kepada para peserta MUNAS VII LDII, atas nama DPP LDII, perkenankan kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-setulusnya atas partisipasi aktif bapak, ibu dan saudara-saudara selama dua hari penuh ini. Semoga daya dan upaya yang telah bapak, ibu dan saudara-saudara curahkan mendapat ganjaran pahala dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Amien.

Hadirin dan Peserta MUNAS yang berbahagia

Di penghujung sambutan ini, perkenankan saya menyampaikan selamat jalan kepada bapak, ibu, saudara-Saudara peserta MUNAS VII LDII Tahun 2011, dan semoga selamat tiba sampai tujuan. Kata sebuah pantun: Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata dan perilaku yang salah dari kami, jangan disimpan dalam hati. Begitu pula, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, Insya Allah kita akan bertemu lagi. Selamat jalan dan sampaikan salam kami kepada Gubernur, Bupati/Walikota, dan Ummat Islam serta keluarga saudara-saudara setibanya di daerah masing-masing. Akhirnya, dengan mengucapkan *alhamdullillahi robbil alamin*, MUNAS VII LDII Tahun 2011, secara resmi saya nyatakan ditutup.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Jakarta 9 Maret 2011
Ketua Umum DPP LDII

Prof. Dr. Ir. KH. Abdullah Syam, MSc.

Tausiah
Ketua Majelis Ulama Indonesia

pada:
Musyawarah Nasional VII
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Tahun 2011

TASWIYATUL MANHAJ DAN *TANSIQUL HAROKAH*

(تَسْوِيَةُ الْمَنْهَجِ وَتَنْسِيْقُ الْحَرَكَاتْ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ.

Yang kami hormati bapak Ketua Umum DPP LDII, bapak-bapak, Ibu-ibu serta hadirin sekalian yang berbahagia. Kami teringat akan salah satu ayat di dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ * سورة الحجرات 10

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat (QS. Al-Hujurot: 10).

Berdasarkan ayat tersebut maka difahami bahwa setiap mukmin yang berbeda-beda di dalam pemikirannya, di dalam kegiatannya, di dalam usahanya, tetapi tetap satu jua. Berbeda-beda di dalam kegiatan dan usaha karena ada yang menjadi petani, ada yang menjadi buruh, ada yang menjadi tentara, semua berbeda-beda tetapi mereka tetap satu yaitu di dalam persatuan Islam.

Selanjutnya di dalam ayat tersebut juga disebutkan *fa'ashlihu baina akhowaikum*. Jika terjadi perbedaan di dalam usaha, perkerjaan, kegiatan, kemudian terjadi perselisihan, percekcokan, permusuhan, maka menjadi wajib hukumnya bagi orang-orang Islam itu berusaha mewujudkan kembali kerukunan dan persatuan. LDII di dalam perjuangannya untuk meyakinkan masyarakat Islam pada umumnya bagaimana melakukan dakwah yang benar sebagai mana yang menjadi motto LDII yaitu "*Green Dakwah*." Itu adalah salah satu usaha untuk meyakinkan diri sendiri dan meyakinkan kepada orang lain bahwa LDII adalah Ormas Islam yang sesuai dan sama sekali tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Barangkali ada yang menuduh macam-macam atau mungkin jika terjadi kekhilafan dan kesalahan di masa lalu akan terbawa terus hingga saat ini.

Banyak cerita sejarah menunjukan kepada kita bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat yang salah, yang keliru, tetapi sebagai orang Islam janganlah kesalahan-kesalahan tersebut dibawa terus sampai akhir zaman. Dan jika itu memang salah, maka berusahalah untuk menunjukan yang benar. Di kalangan masyarakat kita ada banyak kelompok-kelompok Islam yang terbagi atas beberapa golongan.

Pertama ada kelompok Islam yang berbeda dengan prinsip Islam yang benar, misalnya Ahmadiyah, mereka dikatakan menyimpang karena mengatakan bahwa ada Nabi setelah nabi Muhammad SAW.

Yang kedua adalah kelompok-kelompok Islam yang berbeda secara *furu'iyah*, atau dalam hal *madzhab*. Perbedaan dalam hal *furu'iyah* dan *madzhab* ini jangan sampai kita biarkan menjadi kerusakan yang besar. Harus kita perbaiki (*fa'ashlihu baina akhowaikum*). Kita satukan kembali. Sebab jika timbul perpecahan maka akan rusak persatuanmu, akan hilang kekuatanmu, rugi di dunia dan akhirat.

Sedangkan kalompok-kelompok yang bertentangan dalam hal aqidah, maka mereka harus kita bina, kita tunjukan kepada mereka bahwa inilah yang benar. Jangan kita antipati dan memutuskan hubungan terhadap mereka. Jika demikian bagaimana kita bisa mengajak mereka pada kebenaran? Bagaimana kita bisa mengarahkan mereka pada kebenaran? jika kita antipati terhadap mereka.

Kami selaku ketua Majelis Ulama Indonesia yang membidangi ukhuwah Islamiyah, selalu kami katakan "Marilah kita mencari persamaan, jangan kita permasalahkan perbedaan."

Pada tahun 2009 yang lalu saya membaca sebuah majalah, ada sebuah berita terjadinya pembunuhan sebagai akibat masalah yang kecil, yaitu antara membaca *usholli* dan tidak membaca *usholli* di dalam sholat. Antara yang qunut dengan yang tidak qunut. Sering kami sampaikan bahwa jika ummat Islam bersatu maka kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan di masa mendatang.

Ada yang bertanya, jika kita mengakui semua madzhab, berarti kebenaran itu ada banyak. Kemudian saya jawab bahwa kebenaran yang hakiki, kebenaran yang absolut itu hanya satu yaitu Allah. Akan tetapi kebenaran di dalam kehidupan manusia bisa banyak. Karena itu marilah kita cari persamaan-persamaan, jangan kita besar-besarkan perbedaan. Kita galang persatuan dan kesatuan, kita hindari perpecahan. Dan

marilah kita kembali kepada ajaran Rosulallah SAW. Ada dua prinsip yang pokok, yang pertama adalah salam dan yang kedua adalah janji. Prinsip ini harus terus kita bawa ke mana saja. Saya teringat suatu tulisan, si penulis berkata bahwa Islam itu bukan suatu ajaran teori semata, bukan suatu ajaran aqidah semata, tetapi juga termasuk budaya di dalamnya. Apa yang dilahirkan oleh manusia, misalnya manusia melahirkan teori-teori baru atau suatu penemuan baru, maka janganlah kita langsung mengatakan bahwa itulah yang benar ataupun sebaliknya kita langsung mengatakan bahwa itu adalah salah. Tetapi harus kita uji terlebih dahulu. Jika itu masalah agama maka harus kita uji dengan ilmu agama yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Jika hal itu menyangkut teknologi, maka kita lihat dari sudut pandang teknologi. Setelah diuji dan ternyata itu benar, maka itulah kebenaran. Jika itu masalah agama dan setelah diuji ternyata itu salah, maka mereka harus mau mengakui bahwa itu salah dan mau bertaubat kepada Allah dan kembali ke jalan yang benar. Demikianlah orang yang selamat. Akan tetapi jika mereka salah, tidak mau mengakui kesalahannya dan tetap bersiteguh dengan pendapatnya yang salah, berarti mereka adalah orang yang rugi.

Majelis Ulama Indonesia berusaha untuk bagaimana agar Ahmadiyah kembali kepada kebenaran, sebab mereka telah melakukan kesalahan. Selanjutnya kita wajib untuk membina mereka, mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Tetapi sayang mereka tetap pada pendirian mereka, tidak berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan kebenaran. Meskipun demikian kita tetap berusaha untuk mencarikan jalan keluar tanpa menggunakan kekerasan. Kekerasan itu adalah wewenangnya aparat keamanan bukan wewenangnya Ormas Islam. Islam itu isinya adalah perdamaian. Allah tidak senang pada kekerasan.

Contohnya adalah sahabat Ali bin Abu Thalib ketika menghadapi musuhnya, pada saat pedang sudah dihunus, kemudian musuhnya meludahinya. Kemudian Ali sadar jika dia membunuh musuhnya karena kebenciannya, berarti saya salah, saya keliru. Contoh lain ketika Rosulallah SAW datang ke daerah Thaif. Mereka menyuruh anak-anak kecil mereka

untuk melempari batu kepada Rasulallah SAW. Sampai-sampai Rasulallah SAW berdarah. Kemudian malaikat Jibril datang kepada beliau dan berkata "Ya Muhammad, Jika engkau menghendaki, penduduk desa tersebut akan saya jatuhi gunung dari atas mereka agar mereka mati semuanya. Tetapi Rasulallah SAW justru menjawab "*Yaa Allah! Berikanlah petunjuk kepada kaumku. Sebab mereka tidak mengetahui*." Maka di dalam kita menghadapi orang-orang yang tidak tahu tentang Islam maka janganlah menggunakan kekerasan tetapi kita do'akan mereka agar mereka mendapatkan hidayah.

Hadirin sekalian yang kami hormati.

Semoga Allah SWT menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa berdakwah dengan penuh kesejukan dan perdamaian sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas kekurangannya kami mohon maaf.

بِاللهِ التَّوْفِيْقِ وَالْهِدَايَةِ

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Surabaya, 8 Maret 2011

Prof. DR. Umar Shihab
Ketua Majelis Ulama Indonesia



Tausyiah
Ketua Umum
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

pada:
Musyawarah Nasional
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Tahun 2011

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلَى أُمُوْرِ الدُّنْيَا وَالدِّيْنِ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ.

Puji dan syukur pertama-tama kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, taufiq dan hidayahNya yang masih dilimpahkan kepada kita semua. *Shalawat* dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, tabi'in, tabi'it tabi'in serta para pengikutnya hingga akhir zaman nanti.

Islam datang di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Di sebelah barat ada masyarakat jahiliyah, di sebelah timur juga ada masyarakat jahiliyah, yang sempurna jahiliyahnya. Mereka tidak memiliki agama, tidak mengenal apa itu kitab suci, mereka menyembah berhala yang jumlahnya ratusan berhala. Ketika mereka mempunyai anak perempuan, anak tersebut akan dikubur hidup-hidup. Jika ada seseorang yang mati, maka ibunya bisa diwaris oleh anak laki-laki kandungnya sendiri. Rata-rata mereka buta huruf. Tidak lebih dari 10 orang pada masa sebelum Islam yang memiliki kemampuan membaca dan menulis.

Di tengah-tengah masyarakat yang demikian itu lahirlah seseorang bernama Muhammad SAW. Ketika beliau masih berada di dalam kandungan ibunya, usia 2 bulan di dalam kandungan, ayah beliau yang bernama Abdullah wafat. Maka lahirlah beliau dalam keadaan yatim. Dipelihara oleh Ibunya hingga usia 6 tahun dan ibunya wafat. Kemudian beliau dipelihara oleh kakeknya Abu Thalib sampai usia 8 tahun dan kakeknya juga wafat. Allah menjadikan demikian dengan maksud agar Muhammad itu diramut dan dididik oleh Allah secara langsung. Sebagaimana sabda Rasulallah SAW:

أَدَّبَنِيْ رَبِّيْ فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبِيْ

Yang membentuk budi pekerti (karakterku) adalah Tuhanku. Maka Dia mendidikku dengan sebaik-baiknya.

Semenjak usia muda Muhammad SAW tidak pernah dikenal oleh bangsa Arab, Muhammad SAW tidak terkenal. Sebab masyarakat Arab pada saat itu hanya menghormati tiga macam orang, yaitu penyanyi (*Sya'ir*), Dukun tebak (*Kahin*) dan tukang sihir (*Sahir*).

Sedangkan Muhammad SAW itu bukan penyanyi, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam firmanNya. QS Yaasin ayat 69:

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِيْنٌ * سورة يس أية 69

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan Kitab yang memberi penerangan (QS. Yaasin: 69).

Maka dari itu Muhammad SAW tidak pernah dihormati orang lain. Sebab beliau bukan penyair atau penyanyi.

Dan yang kedua, masyarakat jahiliyah sangat menghormati para peramal/dukun tebak. Dan Muhammad SAW tidak pernah menjadi dukun tebak. Allah berfirman:

وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ * سورة الحاقة أية 42

Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. (QS Al-Haaqoh: 42).

Dan yang ketiga masyarakat jahiliyah sangat menghormati tukang sihir atau tukang santet. Sedangkan Muhammad SAW juga bukanlah seorang tukang sihir. Sehingga Muhammad SAW tidak terkenal.

Dalam keadaan demikian, tiba-tiba seorang yang tidak terkenal, anak yatim piatu, juga buta huruf itu menyampaikan kalam yang luar biasa. Kalam yang mengagumkan, yaitu Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hajj: 54

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * سورة الحج أية 54

Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, meyakini bahwasanya Al-Quran itulah yang haq dari Tuhan-mu lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus (QS. Al-Hajj: 54).

Kesimpulan ayat tersebut adalah hanya dengan ilmu kita bisa mendapatkan kebenaran yang hakiki. Berawal dari ayat ini selanjutnya bermunculan para ulama di kalangan ummat Islam yang tidak kalah cerdas dengan Aristoteles, Plato, Socrates, Phytagoras, dan sebagainya. Contohnya, setelah masa khulafaul rosyidin berakhir, orang-orang Arab sama sibuk berpolitik. Banyak partai-partai politik yang bermunculan, seperti Syi'ah, Jabariyah, Qodariyah, Mu'tazilah, Khowarij, dan sebagainya. Demikian juga dengan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, anak dari Ali bin Abi Tholib semua sibuk berpolitik. Padahal di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 122 Allah berfirman:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ...الأية * سورة البقرة 122

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya (QS Al-Baqarah:122).

Ayat tersebut juga mengandung pengertian bahwa jangan semuanya berpolitik, harus ada orang yang fokus dengan urusan agama. Mencari kefahaman dalam agama. Meningkatkan kualitas kefahaman agama. *Alhamdulillah* orang-orang yang berperan dalam hal ini justru orang-orang yang baru masuk Islam dan bukan dari bangsa Arab. Contohnya Imam Hasan Basri Ayahnya adalah seorang tahanan perang. Asalnya orang Majusi, menjadi tahanan perang, di bawa ke Madinah dan memiliki anak bernama Hasan. Juga ada Sufyan Ats-tsauri, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Bukhori, Imam Muslim, Imam Turmudzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Daruqutni, Imam Ad-Dharimi, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Baihaqi, dan sebagainya. Dan ternyata tidak satupun dari mereka yang merupakan orang Arab.

Juga ada tokoh-tokoh tafsir Al-Qur'an, diantaranya ada Ibnu Jarir Abu Ja'far At-Thobari. Mereka semua bukan orang Arab. Yang menggagas ilmu Mustolah hadits yaitu Shihabuddin Ahmad bin Idris Al-Qarafi juga bukan orang Arab. Belum lagi pencetus instrument ilmu matematika yang sangat penting yaitu Al-Jabar yaitu Jabir bin Hayyan bin Abdillah Al-Azdiy, beliau juga bukan orang Arab. Dokter pertama yang membicarakan penyakit cacar yaitu Abu Bakar An-Nazi juga bukan orang Arab. Penggagas pertama pembuatan peta Bumi yaitu Abu Abdillah Al-Idris. Mereka semua bukan orang Arab. Hanya sebagian kecil dari para ulama/ilmuwan Islam yang dari bangsa Arab, misalnya Imam Syafi'i, Imam Maliki dan sebagainya.

Demikian juga dengan keadaan negara kita, sementara banyak orang yang sibuk berpolitik, NU dan LDII supaya tetap *liyatafaqqohu fiddiin.* Menjaga/mendalami/mengaktualisasikan *liyatafaqqohu fiddiin.*

Contoh ada seorang gubernur yang bernama Abdurrahman Almahdi mengirim surat kepada Imam Syafi'i (Abdullah bin Idris bin Syafi'i), lahir tahun 150 H dan wafat tahun 204 H. Dalam suratnya dia bertanya: *"Saya membaca Al-Qur'an maupun Al-Hadits, tetapi saya belum mendapatkan pemahaman tentang Islam yang seutuhnya".* Kemudian Imam Syafi'i memanggil muridnya yang bernama Robi' bin Sulaiman bin Abdul Jabbar bin Kamil Al-Muroodi. Imam Syafi'i mendikte dan Robi' yang menulis semuanya berjumlah 300 halaman dan selanjutnya surat tersebut dikenal dengan nama Kitab Ar-Risalah yang merupakan cikal bakal ilmu *Ushulul Fiqh*.

Secara ringkas diterangkan jika anda ingin faham tentang agama Islam maka carilah di *Bayan Ilahi*/penjelasan Ilahi (Al-Qur'an). Tetapi kita harus tahu bahwa penjelasan Al-Qur'an itu bersifat global. Dan ayat-ayat Al-Qur'an juga terbagi atas beberapa bagian, yaitu: (1) Muhkamah, (2) Mutafadhilah, (3) 'Aam, (4) Khosy, (5) Mutlak, (6) Muqoyyad, (7) Nasikh, (8) Mansukh, (9) Hakikat, (10) Majas, dan sebagainya.

Jika kita tidak mendapatkan hukumnya di dalam Al-Qur'an maka carilah pada *Bayanun Nabawi*/Penjelasan dari Nabi (Al-Hadits). Dan supaya difahami juga bahwa hadits ada banyak tingkatannya, diantaranya: (1) Hadits Mutawatir, (2) Masyhur, (3) 'Aziz, dan (4) Ahad. Juga ada hadits yang shahih, hasan, shahih lighoirihi sampai dengan hadits yang dhoif dan hadits palsu.

Selanjutnya jika di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits tidak ditemukan maka gunakanlah *Bayanul 'Aqli* (penentuan hukum dengan akal). Jika beberapa ulama berkumpul kemudian mengeluarkan sebuah hukum namanya Ijma'. Jika hukum akal itu dari seorang ulama saja maka namanya Qiyas. Contohnya bab sholat yang di dalam Al-Qur'an hanya diterangkan secara global. Kemudian diperjelas lagi oleh Rasulallah SAW di dalam Al-Hadits dan selanjutnya beberapa hal yang belum diterangkan di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits, dikeluarkanlah hukum berdasarkan kesepakatan 'ulama yang disebut Ijma'. Misalnya Rukun shalat ada 14. Pertama berdiri, kedua niat, ketiga membaca do'a iftitah, keempat membaca surah Al-Fatihah dan seterusnya. Maka di dalam NU sumber hukum itu Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma' dan Qiyas. Sebab tanpa Ijma' dan Qiyas kita tidak akan tahu tentang petunjuk-petunjuk ibadah secara mendetail.

Di sisi lain, dengan perkembangan kemajuan teknologi dalam era globalisasi ini, di mana di satu sisi tekhnologi memberikan kemanfatan dan kebaikan akan tetapi di sisi lain tekhnologi juga mendatangkan kehancuran, maka LDII sebagai salah satu lembaga dakwah harus dapat menjawab tantangan tersebut pada masa kini dan di masa yang akan datang. Kita bekali diri, keluarga dan masyarakat kita dengan *liyatafaqqohu fiddiin*.

Hadirin yang kami hormati,

Setelahnya kita berilmu, menjadi ilmuwan, cendekiawan, sarjana, professor maka harus beriman, memiliki keimanan yang baik. Sebab jika seorang ilmuwan/cendekiawan tidak beriman maka dia akan menjadi penjahat. Jika sudah menjadi penjahat maka akan lebih jelek dari pada orang yang bodoh.

Orang bodoh menjadi penjahat mencuri sepatu di masjid, tetapi jika orang pintar yang menjadi penjahat, yang dicuri pabrik sepatunya sekalian. Orang bodoh mencuri uang di Bank, menggunakan pistol atau golok hanya memperoleh jutaan sampai puluhan juta, sedangkan orang pintar mencuri uang tanpa golok, tanpa pistol bisa dapat milyaran bahkan trilyunan rupiah. Oleh karena itu ilmuwan, cendekiawan, sarjana harus beriman kepada Allah.

Kita menerima warisan peninggalan Belanda. Ada dua sistem di dalam pendidikan. Belanda membagi ilmu menjadi dua, yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Keduanya tidak saling berkaitan. Misalnya ada dua orang Islam, bahkan keduanya keluarga, tetapi yang satu berpendidikan diniyah, tsanawiyah, 'aliyah dan IAIN kemudian ke pondok pesantren, pintar mengaji tetapi tidak mengerti teknologi sama sekali. Kemudian yang satu lagi SD, SMP, SMA/SMK, ITB kemudian jadi sarjana tetapi tidak bisa ngaji sama sekali. Itu adalah sistem pendidikan tinggalan Belanda. Maka marilah NU dan LDII mencari jalan keluar atas keadaan ini. Yaitu dengan memperkuat pondok pesantren. Di dalam pondok pesantren kita perkuat dengan mengaji, akhlak, amal, mandiri, persaudaraan, kesederhanaan plus teknologi. Itu akan jadi luar biasa.

Di Timur Tengah atau di Jazirah Arab, di setiap perguruan tinggi, jurusan/bidang keilmuan apa saja pasti akan mendapatkan materi agama yang wajib, diantaranya: Al-Qur'an 4 sks, *Taqofah Islamiyah* 4 sks, Bahasa Arab 2 sks dan Sirah Nabawiyyah 1 sks. Untuk di negara kita sebab keadaannya sudah sedemikian ini, marilah kita cari terobosan jangka pendek yang mudah misalnya dengan membangun SMK di dalam pesantren. Sekali lagi ilmu pengetahuan dengan tanpa iman, maka yang terjadi adalah seperti sekarang. Ilmu pengetahuan jika dipegang oleh orang yang tidak beriman maka akan membawa kehancuran.

Negara Barat, Amerika misalnya, yang mengembangkan senjata pemusnah massal yang bisa mendatangkan kehancuran. Mengembangkan teknologi untuk menguasai dunia. Akan tetapi pada akhirnya mereka terbebani dengan

produk teknologi mereka sendiri. Mereka menjadi budaknya mesin, budaknya sistem, budak tekhnologi yang mereka buat sendiri. Maka para ilmuwan dan cendekiawan harus beriman kepada Allah.

Setelah berilmu dan beriman, selanjutnya kita harus memiliki hati yang bersih, hati yang mulia. Percuma jika ada seseorang yang pintar, pandai, serta dia juga beriman kepada Allah; tetapi tiada hari tanpa memfitnah orang, tiada hari tanpa bohong, dan tiada hari tanpa kecurangan. Iman itu adanya di ruh dan akhlak adanya di dalam hati. Hal ini terbukti, di beberapa Negara Timur Tengah, seperti Yaman, Bahrain, Libya, Mesir dan sebagainya. Mereka berilmu, mereka beriman, dan mereka mengerjakan shalat, tetapi hati mereka rusak, moral mereka rusak, tidak lagi berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Bagaimana dengan negara kita? Menurut NU, negara kita Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika ini sudah pas, sudah benar, sehingga dalam istilah Islam disebut dengan *Daarus Salam* bukan *Daarul Islam.*

Perihal otonomi daerah juga demikian. Otonomi daerah jangan sampai kebablasan. Cukup otonomi daerah sampai dengan tingkat provinsi. Sebab jika kebablasan hingga tingkat kabupaten/kota, misalnya, maka akan banyak menimbulkan kerusakan. Sampai-sampai ada bupati yang mengeluarkan izin penambangan batu bara, atau Izin pemanfatan hutan seluas 1100 ha.

Hal tersebut sesuai dengan petunjuk Rasulallah SAW:

Ada tiga hal yang tidak boleh dimiliki oleh kelompok tertentu, harus dimiliki bersama/dimiliki oleh negara yaitu air, rerumputan (hutan) dan api (sumber energi).

Contoh lainnya air di Sukabumi, ratusan hektar tanah yang mengandung sumber air sudah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan air minum, sampai-sampai penduduk sekitar yang

mau memanfaatkan air itu kesulitan. Demikian juga dengan batu bara, 1100 ha batu bara yang selama 30 tahun dieksplorasi hingga saat ini, secara hakiki itu merupakan hak milik bersama. Belum lagi sumber daya mineral lainnya. Sebab dikuasi oleh kelompok sehingga merugikan negara dan masyarakat pada umumnya.

Maka dari itu dalam kesempatan yang baik ini marilah NU dan LDII membangun budaya mandiri, persaudaraan, sederhana dan ikhlas.

Dahulu, para Wali Songo mampu menyebarkan Islam di Indonesia ini berhadapan dengan Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Pajajaran yang jaya dengan tanpa kekerasan dan tanpa senjata. Akhirnya banyak yang simpati, akhirnya Islam tersebar luas sampai sekarang. Contohnya dahulu orang Jawa mengusir roh halus dengan menggunakan nasi sekepel, ditambah cabe, satu siung bawang diletakkan di pojok rumah. Kemudian Kyai berkata: *Kamu kan mampu, kamu potong kambing, masak gulai dan sate untuk 50 orang, kemudian undang tetangga, teman, berkumpul di rumahmu, kemudian bacalah:*

أَفْضَلُ الذِّكْرِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ...

Maka roh halusnya akan cepat pindahnya. Dan nasi yang sekepel itu biarkan saja. Tetapi tahlilnya jalan terus. Demikian itu contoh dakwah dengan *bil hikmati wal mauidzotil hasanah.*

Contoh lain orang hindu yang masuk Islam melihat sapi disembelih masih merasa sedih/tidak tega, sebab sapi sangat diagungkan oleh orang hindu. Pintarnya bagaimana saja seseorang jika akan membangun rumah, maka harus dicampur dengan kotoran sapi. Akhirnya dengan bijak, Sunan Kudus Ja'far Shodiq bin Ustman Al-Hamadani melarang masyarakat Kudus qurban dengan sapi, melaikan kerbau. Itu contoh lain dakwah dengan *bil hikmati wal mauidzotil hasanah.* Contoh lainnya, orang hindu itu paling malas mencuci kaki, sedangkan

kita orang Islam sehari semalam minimal 5 kali mencuci kaki. Kyai berkata buat saja musholla yang didepan pintu masuknya ada kolam air, sehingga mau tidak mau ketika dia masuk musholla dia akan cuci kaki dengan sendirinya.

Anak dari Raja Brawijaya V yang ibunya dari ras China, pada awalnya adalah seorang anak yang bernama Jin Bun. Sebab nakal dia diusir dari Istana. Kemudian dia berjalan kearah timur, 40 Km masuk ke Surabaya berjumpa dengan Sayyid Rahmatullah atau Sunan Ampel, kemudian Jin Bun masuk Islam kemudian berganti nama menjadi Abdul Fatah. Setelah belajar tentang Islam selama 5 tahun dianggap cukup, kemudian dia berkata: "*Pak Kyai!, saya ini anak raja, maka saya harus jadi anak raja.*" Singkat cerita Raden Fatah menjadi raja Islam pertama di Tanah Jawa. Dan pada akhirnya Raja Brawijaya V juga masuk Islam tanpa kekerasan, tanpa pedang dan tanpa senjata. Allah menyatakan dalam salah satu firmanNya:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ * سورة يونس 99

Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? (QS. Yunus: 99).

Nabi Muhammad SAW dilarang oleh Allah memaksa manusia dengan kekerasan agar mereka masuk ke dalam Islam. Allah tidak menghendaki semua manusia itu Islam. Maka kamu janganlah menggunakan kekerasan. Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 256:

لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ...الأية * سورة البقرة 256

Tidak ada pemaksaan di dalam agama... (QS. Al-Baqarah: 256)

Setelah Raja Brawijaya V masuk Islam maka hilanglah kerajaan Majapahit Hindu. Demikian juga Sunan Gunung Jati, yang berasal dari Samudra Pasai datang ke Demak kemudian menyebarkan Islam sampai ke Banten, selanjutnya masuk ke wilayah Jayakarta yang pada saat itu masih sedikit penduduknya. Setelah menyebarkan Islam di wilayah Jayakarta, kemudian melanjutkan dakwahnya ke Cirebon. Pada akhirnya Jawa Barat semuanya Islam berkat perjuangan Syeikh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati tanpa adanya kekerasan atau dengan menggunakan senjata. Akan tetapi dengan *bil hikmah wal mauidzotil hasanah.*

Maka dari itu kami dari NU mengajak kepada LDII marilah kita bekerja sama dalam menghadapi gerakan-gerakan Islam radikal. Perihal bencana alam, marilah kita tangani bersama-sama. Dakwah harus kita kembangkan dengan jalan *tafaqquh fiddiin*, mengembangkan pemahaman terhadap agama. Dakwah Islam itu bukan hanya dalam hal ibadah dan syariah saja, tetapi sesuai tema yang diangkat pada MUNAS VII kali ini, marilah kita bekerjasama bagaimana membangun generasi penerus yang profesional dan bermartabat sehingga dapat sejajar dengan bangsa-bangsa lain.

Hadirin sekalian, Demikianlah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan atas kekurangannya kami mohon maaf.

وَاللهُ الْمُوَفِّقِ إِلَى أَقْوَامِ الطَّرِيْقِ، وَالْعَفْوُ مِنْكُمْ

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Surabaya, 09 Maret 2011

Prof. Dr. Said Agil Siraj
Ketua Umum PB NU



Pengarahan
Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah.

Pada
Musyawarah Nasional VII
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Tahun 2011

Dimensi Pendidikan Agama sebagai Penguat Solidaritas Sosial

Pesan agama (ajaran agama Islam) yang sangat mendasar yang harus ditanamkan dalam kehidupan pemeluknya, baik dalam kehidupan pribadi maupun bersama, ialah:

Pertama: agar manusia memperkokoh ikatan hubungan dengan Tuhan (*hablum min Allah*) selaku wujud Maha Tinggi yang menguasai hidup mereka dengan alam sekitar. Glosari agama menyebut ikatan dengan Tuhan dengan kata iman.

Dengan kata ini maka manusia harus memperkokoh iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu: (1) memperkuat sikap hidup yang memandang Tuhan tempat menyandarkan diri dan menggantungkan harapan. (2) menjadikan Tuhan Yang Maha Esa satu-satunya arah dan tujuan kegiatan hidup. (3) memperkuat kesadaran bahwa hidup ini berasal dari Tuhan dan menuju kepada Tuhan. (4) berserah diri dengan sepenuh hati, tulus dan damai kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan beberapa dimensi ikatan hubungan manusia dengan Tuhan seperti itu, maka manifestasi hidup kesederajatan

(emansipatoris) akan tampak dalam pergaulan hidup manusia (Nurcholis Madjid, 2000).

Kedua: Agar manusia terus berusaha menumbuhkan kesadaran bahwa dirinya adalah ciptaan Tuhan terbaik di muka bumi ini. Kesadaran ini demikian penting, sehingga manusia termotivasi untuk: (1) senantiasa beriman kepada Tuhan. (2) beramal kebaikan (amal sholeh) di muka bumi untuk kepentingan dirinya, kepentingan bersama manusia, bahkan untuk kepentingan alam semesta. (3) saling menasehati di antara sesama manusia secara benar dan dengan sikap kesabaran (QS. 'Asr: 3).

Ketiga: Manusia perlu memahami dan menyadari bahwa mereka diciptakan Tuhan di bumi ini sebagai "*great kindship*" atau bahkan "*worldkindship*." Di antara mereka adalah sanak saudara. Sementara itu benar bahwa mereka diciptakan Tuhan dalam kelompok-kelompok (suku, ras, dan sebagainya), agar mereka menciptakan pergaulan hidup yang ramah dan penuh kasih sayang (QS. Al-Hujurat, 13).

Pendidikan agama pada hakekatnya lebih merupakan suatu upaya "membangkitkan intuisi agama dan kesiapan rohani dalam mencapai pengalaman transendental." Dengan demikian tujuan utamanya bukanlah sekedar mengalihkan pengetahuan dan ketrampilan (sebagai isi pendidikan), melainkan lebih merupakan suatu ikhtiar untuk "menggugah fitrah insaniyah" (*to stir up certain innate power*), sehingga peserta didik bisa menjadi penganut atau pemeluk agama yang taat dan baik. Lebih jauh pendidikan agama bukan merupakan kegiatan yang terpisah dari aspek-aspek kehidupan masyarakat luas yang berlangsung dalam konteks keselarasan maupun keseimbangan dengan kegiatan-kegiatan, baik perorangan maupun kelembagaannya, dan dalam posisi yang saling memperkokoh dan memperkuat antara yang satu dengan yang lain. Sekolah hanya merupakan salah satu kontributor dan bukan yang terutama. Di luar sekolah banyak pihak yang tidak kalah penting perannya, yang ikut memberikan kontribusi pelaksanaan pendidikan agama (seperti keluarga, kawan bermain, dan suasana kehidupan beragama

di masyarakat/lingkungannya). Dengan demikian keterlibatan fungsi-fungsi kemasyarakatan yang lain ikut memberikan andil bagi keberhasilannya baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Fungsi utama pendidikan agama di sekolah adalah memberikan landasan yang mampu menggugah kesadaran dan mendorong peserta didik melakukan perbuatan yang mendukung pembentukan pribadi muslim yang kuat (pemeluk agama yang taat). Landasan itu meliputi:

(1) landasan motivasional, yaitu merupakan sifat positif peserta didik, untuk menerima ajaran agamanya dan sekaligus bertanggung jawab terhadap pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari.
(2) landasan etik, yaitu tertanamnya norma-norma keagamaan peserta didik sehingga perbuatannya selalu diacu oleh isi, jiwa, dan semangat akhlakul karimah.
(3) landasan moral, yaitu tersusunnya tata nilai (*value system*) dalam diri peserta didik yang bersumber dari ajaran agamanya sehingga memiliki daya tahan dalam menghadapi setiap tantangan dan perubahan.

Pelaksanaan pendidikan agama di sekolah juga diperlukan suasana interaksi antara guru dan peserta didik yang sifatnya lebih mendalam lahir dan batin. Figur "guru agama" tidak sekedar sebagai "penyampai" materi pelajaran, tetapi lebih dari itu ia adalah sumber inspirasi "spiritual" dan sekaligus sebagai pembimbing, sehingga terjalin hubungan pribadi antara guru dan peserta didik yang cukup dekat dan mampu melahirkan keterpaduan bimbingan rohani dan akhlak dengan materi pelajarannya. Karena itu fungsi dan peran guru agama tidak cukup hanya bermodal "profesional" semata-mata tetapi perlu didukung oleh kekuatan moral.

Bertolak dari uraian tersebut di atas, maka mutu maupun pencapaian pendidikan agama perlu diorientasikan pada:

(1) tercapainya sasaran kualitas pribadi, baik sebagai muslim maupun sebagai manusia Indonesia yang ciri-cirinya dijadikan tujuan pendidikan nasional.
(2) intergrasi pendidikan agama dengan keseluruhan maupun institusi pendidikan yang lain.

(3) tercapainya internalisasi nilai-nilai dan norma keagamaan yang fungsional secara moral untuk mengembangkan keseluruhan sistem sosial budaya.
(4) penyadaran pribadi akan tuntutan hari depannya dan transformasi sosial budaya yang terus berlangsung.
(5) pembentukan wawasan *ijtihadiyah* (intelektual) disamping pengamalan dan penyerapan ajaran agama secara aktif.

Wallahu a'lam.

Surabaya, 08 Maret 2011

Prof. Dr. H.A. Malik Fajar
Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah

Pengarahan
Menteri Negara Pemuda dan Olahraga
Republik Indonesia

pada:
Penutupan Musyawarah Nasional
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Tahun 2011

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam. Bapak-bapak, ibu-ibu dan sahabat-sahabat sekalian.
Yang kami hormati Bapak Ketua Umum DPP LDII yang terpilih dan sudah disahkan dengan istilah *lama tapi terasa baru*, Bp. Prof.Dr.Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc.

Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur yang tadi pidatonya membuat kita tidak jadi mengantuk.

Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta dan hadirin sekalian. Kebahagian tersendiri bagi saya bisa hadir disini karena selama ini belum bisa hadir pada beberapa acara. *Alhamdulillah* saya akhirnya bisa hadir pada malam hari ini. Satu hal yang selalu saya mengagumi dari apa yang dilakukan oleh bapak-bapak, ibu-ibu anggota LDII yang ada dimana-mana. Saya katakan ada dimana-mana karena selama 5 tahun saya jadi Juru Bicara Presiden. Saya berkeliling Indonesia mendampingi Bapak Presiden, dipojok–pojok jalan banyak ditemui plang LDII. Saya juga bertanya dengan Bapak KH.

Abdullah Syam, peserta yang datang dari mana saja? Beliau menjawab peserta yang datang dari 33 Provinsi.

Saya mengagumi apa yang telah dilakukan oleh anggota LDII dalam hal dakwah di seluruh kalangan masyarakat. Baik kalangan atas, kalangan bawah maupun kaum profesional. Ini menunjukkan LDII selama ini bagaimanapun juga begitu aktif memberikan pencerahan pendidikan agama dan memberikan dakwah dengan cara-cara yang baik kepada seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh ummat Islam Indonesia. Ini hal positif dari LDII, karena banyak juga yang menganggap dan mengaku dirinya ulama tidak bicara dakwah tetapi banyak berbicara tentang politik.

Kita ingin ada orang-orang yang memang betul-betul fokus mendidik kita tentang apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits sehingga hidup kita tidak tersesat. Bila ada orang yang terus-menerus secara bersungguh-sungguh mendakwahkan Al-Qur'an dan Al-Hadits maka Insya Allah ummatnya tidak ada yang tersesat. Namun kalau yang mestinya mengajarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits lebih banyak berbicara tentang politik maka pastilah akan terganggu konsentrasinya.

Satu hal yang saya kagumi juga dari kawan-kawan, sahabat-sahabat LDII adalah kepeduliaannya terhadap orang-orang muda. Saya tahu di LDII ada pengajian muda-mudi, sehingga orang-orang muda di LDII mendapat perhatian dan kesempatan untuk saling bergaul. Bagi kami Kementrian Pemuda dan Olahraga, hal inilah merupakan pembinaan yang membangun karakter orang-orang muda sekarang. Saya tahu juga di LDII setiap hari minggu pagi juga ada latihan sepakbola. Semoga ada warga LDII yang nantinya bisa menjadi pemain nasional dan PSII juga sudah bisa di reformasi. Saya tahu juga ada perguruan silat yang dibina oleh LDII yaitu ASAD. Pada waktu MUNAS ASAD di Solo sebenarnya saya juga ingin hadir namun karena ada tugas dari Presiden saya tidak bisa hadir. Hal ini menunjukkan pada saya bahwa LDII selain dahwah tentang akhlak juga dakwah *bil hal* melalui pengajian muda-mudi, sepakbola maupun pencak silat.

Ini semua merupakan upaya yang sadar dalam rangka pembinaan karakter anak-anak muda agar anak-anak muda kita betul-betul bisa menjadi pilar bangsa di masa yang akan datang.

Berbicara tentang orang muda maka kita berbicara tentang kejayaan bangsa Indonesia di masa depan. Kami dari Kementrian Pemuda dan Olahraga selalu ingin bekerjasama dengan semua komponen-komponen masyarakat yang punya kepedulian kepada pemuda dan pembangunan karakter diri. Kami merasa senang sekali bila pesantren-pesantren yang dikelola LDII mengembangkan olahraga dan pramuka. Saya mendengar juga sekarang LDII sedang berpikir bagaimana membangun pramuka. Dengan adanya UU Pramuka yang baru memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok masyarakat bisa mengembangkan gugus depan pramuka berbasis komunitas. Bila dalam dua kecamatan ada dua gugus depan maka bisa membuat Sako di Kabupaten. Bila ada dua sako di dua kabupaten maka bisa membuat sako Provinsi. Bila ada dua sako di dua provinsi maka bisa membuat sako nasional. Bersama-sama dengan sako-sako yang lain dalam keluarga besar gerakan pramuka di seluruh Indonesia.

Saudara-saudara semua saat ini ada 10 juta anak-anak muda yang dibina di pesantren. Saya juga tahu di LDII mempunyai pesantren-pesantren yang menghasilkan mubaligh-mubalighot. Dari 10 juta anak-anak di pesantren sampai sekarang masih jarang yang bisa menjadi juara nasional di bidang olahraga. Memang pesantren bukan untuk mendidik calon juara nasional di bidang olahraga. Paling tidak bila mubaligh-mubalighotnya turut aktif dalam kegiatan olahraga, maka lulus dari pesantren menjadi tidak kuper (kurang pergaulan). Walau memang kegiatan pesantren hanya diisi ngaji saja itu baik. Namun alangkah baiknya bila juga ada kegiatan ekstra kurikuler seperti kegiatan olahraga. Bila tidak ada kegiatan ektra nanti setelah lulus dari pesantren dan harus berdakwah di masyarakat tidak bisa menjelaskan dakwah yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada.

Kami dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sangat mengapresiasi kegiatan kepemudaan dalam LDII seperti sepakbola, pencak silat, pramuka dan yang lainnya. Untuk itu kami siap bekerjasama dengan LDII dalam mewujudkan pembangunan lapangan sepakbola atau bangunan olahraga multi-fungsi di setiap kecamatan. Bila LDII mempunyai tempat-tempat yang bisa dijadikan lapangan sepakbola atau lapangan olahraga multi fungsi silakan sampaikan pada kami dan kami siap untuk bekerjasama. Hal ini bisa sebagai sarana pembinaan kepemudaan. Insya Allah kalau generasi muda LDII semakin berkembang dan juga aktif ditengah-tengah masyarakat dengan berbagai kegiatan kepemudaan maka dakwah yang dilakukan oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia yaitu *dakwah bil-hal* akan lebih mudah dilakukan. InsyaAllah hal ini akan membuat ummat kita semakin mempunyai arah yang jelas dalam melaksanakan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sebagaimana yang sering disampaikan dalam pengajian-pengajian LDII "telah aku tinggalkan dua perkara, bila kamu berpegang teguh pada keduanya maka tidak akan tersesat selamanya yaitu kitab Allah dan sunah RosulNya (Al-Qur'an dan Al-Hadist)."

Demikianlah. Semoga LDII bisa semakin maju lagi, da'i semakin banyak lagi, pojok-pojok jalan semakin banyak plang LDII 100 M.

Terima kasih. Sekali lagi selamat bagi Ketua Umum yang lama tapi baru dan seluruh pengurus formatur. InsyaAllah ke depan kita bisa bekerjasama yang lebih konkrit lagi. Mudah-mudahan dakwah LDII semakin berkembang membangun bangsa ini terutama gererasi mudanya bersama-sama dengan komponen bangsa yang lain.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Surabaya, 09 Maret 2011

Dr. Andi Alfian Malarangeng
Menegpora, Republik Indonesia



Pengarahan
Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur
Mewakili Gubernur Provinsi Jawa Timur

pada:
Penutupan Musyawarah Nasional
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Tahun 2011

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلَى أُمُوْرِ الدُّنْيَا وَالدِّيْنِ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ.

Para Kyai, kaum muslimin yang saya hormati.
Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga yang saya hormai.

Saya terus terang bergembira sekali karena malam ini ditakdirkan masih mendapatkan kesempatan untuk berbicara di depan forum yang sangat terhormat yaitu Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang diselenggarakan di Surabaya Jawa Timur ini.

Beberapa waktu yang lalu Bapak Gubernur memberikan mandat kepada saya untuk datang pada acara pembukaan tetapi karena saya dan Bapak Gubernur ada acara di Jakarta maka kami berdua tidak bisa datang. *Alhamdulillah* malam ini saya bisa datang langsung dari bandara. Dan ini sudah menjadi takdir, biasanya pesawat datang terlambat namun kali ini jadwal penerbangan dipercepat. Sampai di bandara saya mendapat informasi Pak Andi Malarangeng (Menegpora) baru saja berangkat dari bandara ke acara Penutupan MUNAS VII LDII, maka saya juga langsung berangkat ke sini.

Saya mewakili Bapak Gubernur untuk mengucapkan selamat atas selesainya agenda-agenda penting dalam MUNAS VII LDII ini. Kali ini saya dan Pak Menteri berkesempatan menyaksikan bagaimana piawainya pimpinan sidang MUNAS ini. Saya tertarik dengan tema yang diusung dalam Musyawarah Nasional ini yaitu "*Meningkatkan Pengembangan SDM yang Profesional Religius Menuju Indonesia Sejahtera, Demokratis, berkeadilan dan Bermartabat.*" Kita sudah pernah diingatkan oleh Rosulallah SAW "*segala urusan itu serahkan kepada ahlinya*." Karena kalau tidak diserahkan pada ahlinya maka akan rusak dan itu dosa. Di dalam Al-Qur'an juga sudah ditegaskan dengan jelas. ***Qul: Kuli yakmalu 'ala kuli sai'in qodir***. Bekerjalah semua itu sesuai dengan tugasnya, kemampuannya dan keahliannya.

Kemarin saya ikut pengajian, santrinya pintar-pintar dan banyak bertanya kalau gurunya atau kyainya tidak pintar menjawab bisa repot. Waktu itu Allah pernah melarang, pengikut Muhammad ikut perang semua. Harus ada yang tinggal untuk "*tafaqqohu fii diin.*" Harus ada sekelompok orang yang khusus tinggal dirumah untuk mempelajari agama. Bila nanti orang yang pulang dari perang ingin bertanya masalah agama bisa bertanya pada orang yang alim yang memang betul-betul mengerti tentang agama sehingga dia tidak kebablasan. Sebagai gambaran: ada santri yang bertanya kepada ustadz: Ustadz tentunya melihat perempuan telanjang dan bukan muhrim itu harom, nah yang ingin saya tanyakan apakah kalau melihat yang demikian itu perempuan telanjang dan bukan muhrim dengan memakai kacamata hitam, dosanya

diambil oleh si kacamata hitam? Nah kalau ustadz menjawabnya tidak pas maka akan menjadi fitnah. Untuk itu Allah meminta bertanya kepada yang betul-betul menguasai agama.

Alhamdulillah LDII dipimpin oleh seorang Kyai yang tentunya memiliki kapasitas untuk mengerti, memahami, dan bijak tentang "*Diinulloh*" agama Islam sehingga aqidah ummat kita selalu terjaga. Maka dari itulah bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, pengembangan SDM Profesional menjadi penting, yang merupakan bagian dari perintah Allah SWT kepada kita semua. Hal ini juga termasuk anjuran dari RosulAllah SAW, untuk itulah mari kita berbuat di tempat masing-masing sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Yang menjadi ulama bekerja dalam tataran keulamaannya, profesional di bidang tertentu bekerja dengan sungguh-sungguh, begitu juga yang di pemerintahan bekerja dengan profesional. Jadi mengerti betul apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Bila ini dijalankan dengan yakin insyaAllah kita akan mampu menghadapi masa depan. Masa dimana akan muncul generasi C (generasi *cyber*).

Generasi *cyber* merupakan generasi dimana interaksi sosialnya tidak lagi seperti jaman kita saat ini, yang masih bisa saling bertemu dan saling mengenal. Generasi C ini bisa belajar tanpa guru dengan media internet. Dimana kemajuan teknologi informatika sangat luar biasa pesat. Orang bisa mengakses berbagai informasi melalui dunia maya. Hal ini perlu dicermati sehingga dakwah kita bisa menyesuaikan situasi dan kondisi sekarang ini.

Walaupun dalam dakwah yang diajarkan adalah kitab-kitab *lama namun metode dan kurikulum pengajarannya harus* disesuaikan dengan situasi saat ini. Hal ini merupakan tantangan besar dan PR (pekerjaan rumah) bagi pimpinan-pimpinan Islam di berbagai lembaga untuk membuat pokok-pokok ajaran dan metode atau bungkus/kemasan yang tepat. Mungkin dulu cukup substansi yang diajarkan tanpa memperhatikan bungkus/kemasannnya. Sekarang ini

bungkus/kemasan harus dibuat semenarik mungkin yang disertai pokok-pokok ajaran yang benar.

Hal ini mengingat perkembangan teknologi informasi yang sangat luar biasa pesatnya. Dua faktor keberhasilan dakwah di era *cyber* yang perlu diperhatikan antara lain: (1) Kita harus memiliki kompetensi dan konsentrasi serta (2) Kita harus menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dengan baik.

Sebagai gambaran tentang Generasi *Cyber*, diceritakan dalam sebuah keluarga yang terdiri dari lima anggota, ada Ayah, Ibu dan 3 orang anak. Keluarga ini jarang bertemu. Suatu hari mereka sepakat janjian untuk mengadakan makan malam bersama keluarga di sebuah restoran. Setelah sampai di restoran yang dituju, segera memesan tempat. Masing-masing duduk dikursi yang sudah disediakan. Tidak berapa lama setelah duduk, masing-masing sibuk internetan, sms-an dengan teman-teman masing-masing di tempat lain. Mereka terlihat dekat dalam jarak namun jauh dalam hal komunikasi. Inilah tantangan bagi kita untuk melakukan pembinaan pada Generasi *Cyber*.

Sebagai penutup. Bapak Menteri yang saya hormati. Kita tahu LDII merupakan lembaga yang sudah punya kiprah dan banyak yang sudah dilakukan untuk ummat. Selanjutnya perlu kita pikirkan bagaimana perempuan muslim agar bisa tampil lebih baik lagi. Kedepannya mau tidak mau perempuan harus mendapatkan tempat yang lebih baik lagi dari sekarang. Hal ini bukan bermaksud perempuan ingin menyamai laki-laki namun karena perempuan bagian dari sumber kehidupan. Kita lahir juga dari seorang perempuan. Untuk itu program pemberdayaan perempuan harus terus dikembangkan. Perempuan muslim di masa yang akan datang mampu mengisi tempat-tempat strategis dalam pembangunan bangsa.

Dalam kesempatan yang baik dengan tema MUNAS seperti ini (Profesional Religius), saya ingin menyampaikan 3 hal yang bisa dijadikan inspirasi bagi kita semua yaitu: (1) Kompetensi

yang menjamin kita profesional, (2) Penguasaan terhadap teknologi, dan (3) Penguatan kaum perempuan.

Inilah yang bisa saya sampaikan dan apabila ada hal-hal yang tidak berkenan saya mohon ma'af yang sebesar-besarnya. Selamat kepada LDII. Maju terus. *Allahu Akbar*.

Pesan dari Bapak Gubernur, selamat datang dan selamat jalan para peserta MUNAS VII LDII di Kota Surabaya dengan selamat, aman dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga.

وَاللهُ الْمُوَفِّقِ إِلَى أَقْوَامِ الطَّرِيْقِ، وَالْعَفْوُ مِنْكُمْ

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Surabaya, 09 Maret 2011

H. Saifullah Yusuf
Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur

mandiri syariah

Pengarahan
Presiden Direktur Bank Syariah Mandiri

pada:
Musyawarah Nasional VII
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Tahun 2011

Perbankan Syariah dan Upaya
Peningkatan Kesejahteraan Ummat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ.

Yang saya hormati bapak-bapak Pengurus LDII,
Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-Ibu, hadirin-hadirot peserta MUNAS VII LDII.

Saya merasa mendapat kehormatan yang besar sekali diundang untuk membagi pengalaman tentang Perbankan Syariah pada acara MUNAS VII LDII kali ini. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada LDII dan panitia yang sudah mengundang kami untuk hadir. Saya sudah menyiapkan materi dalam power point kira-kira 58 slide. Agar waktu efisien dan pembicaraan tidak ngelantur kemana-mana maka saya akan memulai dari power point yang sudah kami persiapkan.

Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, saya diberi tugas untuk menyampaikan satu topik yang berat yaitu tentang "Perbankan Syariah dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ummat." Ada 3 *point* yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu:

1. Tentang makna dan tujuan syari'ah. Ini kita ingin menengok kembali, mengingat kembali tentang apa sesungguhnya makna syariah. Dari situ kemudian kita akan melihat bagaimana kita akan mengembangkan Perbankan Syariah di tanah air.

2. Tentang fakta-fakta mengenai tingkat kesejahteraan ummat Islam di seluruh dunia. Ini terkait dengan bagian yang pertama. Ketika bagian pertama berbicara mengenai makna dan tujuan syariah. Di situ kita lihat bahwa salah satu tujuan syariah yang diturunkan oleh Allah SWT pada kita adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kita semua. Oleh karena itu kita tengok bagaimana tingkat kesejahteraan ummat Islam di seluruh dunia.

3. Dibagian terakhir saya akan menyampaikan bagaimana Perbankan Syariah mestinya berperan untuk menjalankan syariah dengan potensial dan sekaligus menjalankan pesan dari syariah itu sendiri yaitu meningkatkan kesejahteraan ummat.

I. Makna dan Tujuan Syariah

Saya tahu disini banyak alim – ulama, banyak *asyadid-asyadidah*, banyak para juru dahwah, banyak para dai. Tentu tidak bermaksud untuk menggarami lautan atau mengajari ikan berenang kalau pada bagian ini saya menyampaikan tentang makna syariah, tujuannya untuk mengingatkan kita saja bahwa makna syariah itu sebetulnya apa? Sesuatu yang memungkinkan untuk kita fahami.

Bapak-bapak dan ibu-ibu di dalam pemahaman keseharian kita, syariah itu sering dimaknai sebagai aspek hukum atau praktek legal formal bagi ajaran Islam. Ketika orang bilang syariah biasanya dikaitkan dengan halal haram. "*Wa tan watau*

wahlul sunnah" yang dalam kontek ini syariah sering dipadankan dengan aqidah dan akhlak.

Dalam kitab-kitab besar membagi ajaran Islam menjadi 3 kelompok, syariah, aqidah dan akhlak. Dengan demikian seolah-olah Syariah merupakan sebagian dari ajaran Islam atau kurang lebih 1/3 dari ajaran Islam selain dari aqidah dan akhlak. Terus terang kami akan menyampaikan bahwa pemahaman syariah seperti ini yang umumnya difahami oleh masyarakat kita atau menjadi konotasi ketika orang berbicara tentang syariah.

Itu adalah pemahaman yang boleh dikatakan pemahaman yang terbatas, syariah dalam pengertian sempit. Syariah dalam pengertian partikular. Sementara yang perlu kita lihat dari pemahaman ini adalah bahwa syariah mempunyai makna yang jauh lebih luas dari itu. Syariah mempunyai makna yang universal yaitu sebagaimana saya kutip disini pendapat Dr. Abdul Karim Zaidan dalam bukunya *al madkhol lidirosatissyari'ah al-islamiyah*, beliau mengatakan bahwa syariah itu sebetulnya adalah "*Alhamuzaki syara'Allahu lil syari'il 'ibadi.*" Syariah itu adalah semua ketentuan Tuhan, semua hukum Tuhan, hukum Allah yang Allah berikan ke seluruh hambaNya. Nah, hamba Allah bukan hanya manusia, hamba Allah adalah seluruh alam semesta. Dengan kata lain syariah "*Alhamuzaki syara'Allahu lil syari'il 'ibadi.*"

Syariah itu semua ketentuan Allah yang Allah terapkan untuk seluruh alam semesta. Ini makna yang generik, makna yang umum tentang syariah dari Dr. Abdul Karim Zaidan. Oleh karena syariah seperti yang sudah kita pelajari dalam madrasah-madrasah jelas mempunyai makna. Karena dia merupakan hukum Allah yang diterapkan bagi alam semesta. Maka syariah itu bisa kita bagi menjadi dua yaitu: syariah *qouliyah* dan syariah *khauniyah*. Syariah *qouliyah* yang termasuk dalam kitab suci dan hadits Nabi SAW yang ada teksnya. Syariah *khauniyah* adalah hukum-hukum Allah yang tidak termasuk di dalam teks-teks keagamaan apakah itu kitab suci ataupun hadits Nabi SAW. Termasuk di dalam syariah *khauniyah* adalah hukum-hukum IPTEK dan hukum-hukum

IPA. Jadi kekuatan alam dan kekuatan sosial itu syariah Allah juga.

Contoh, dulu waktu di madrasah, guru saya mengatakan: kalau kamu menuangkan air dari gelas dan air itu turun ke tempat yang lebih rendah dan tumpah tercecer ke bumi, sebetulnya air itu sedang menjalankan syariatulloh. Karena air itu tunduk dengan hukum gravitasi bumi yang Allah ciptakan. Maka alam semesta ini menjalankan dan tunduk terhadap syariah Allah. Dan kalau syariah kita maknai dalam pengertian luas seperti itu, dalam konsep universal seperti itu, maka menjalankan syariah adalah menundukkan hidup kita ini pada semua hukum Allah. Baik itu yang tertuang dalam kitab suci maupun yang tidak tertuang dalam kitab suci atau syariah *khouniyah*.

Pemahaman seperti ini tentu akan berdampak kepada bagaimana kita memaknai perkembangan atau kehidupan perbankan syariah dan ekonomi syariah. Ternyata kalau bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan cara kita mengembangkan ekonomi syariahpun kelihatannya ada dua jenis topik. Pertama yaitu syariah yang dimaknai dalam pengertian terbatas, yang hanya merupakan hukum-hukum legal formal dalam agama. Bahkan dengan demikian bank syariah atau perbankan syariah dimaknai sebagai bank yang menjalankan hukum-hukum yang konkrit tentang aturan mengenai keuangan dan ekonomi. Dalam pemahaman yang terbatas dan sempit seperti ini ketika berbicara tentang ekonomi syariah dan perbankan syariah biasanya dimasukkan ke dalam ekonomi dan perbankan yang bebas dari 3 (tiga) hal utama yang dilarang oleh agama. Tiga hal utama itu adalah (1) *Maisyir* (perjudian atau spekulasi), (2) *Ghoror* yaitu penipuan, (3) *Riba*. Agar mudah diingat ketiga larangan ini disingkat "Maghrib" (*maisyir*, *ghoror* dan riba). Inilah yang menjadi konotasi ketika membicarakan perbankan dan ekonomi syariah. Dengan kata lain perbankan syariah atau ekonomi syariah adalah perbankan atau ekonomi yang bebas dari "Maghrib" (*maisyir*, *ghoror* dan riba).

Tetapi, kalau ini saja yang kita maksudkan mengembangkan ekonomi dan perbankan syariah tentu kita melupakan makna syariah yang luas. Sebetulnya diluar pemahaman itu, banyak

sekali pesan-pesan Rosulallah SAW yang harus kita lakukan. Oleh karena itu saya selalu mengajak dan berupaya mengembangkan bank yang sekarang saya pimpin yaitu Bank Syariah Mandiri.

Marilah kita memaknai syariah secara universal dan secara lebih luas sebagaimana pendapat Dr. Abdul Karim Zainan. Kita harus tundukkan diri kita pada syariah yaitu apa saja yang menjadi hukum Allah. Maka perbankan syariah, ekonomi syariah adalah perbankan dan ekonomi yang harus tunduk pada seluruh aturan Allah. Dengan demikian bukan hanya bebas dari "Maghrib" saja, tetapi perbankan syariah adalah bank yang harus mengembangkan teknologi yang canggih. Tidak boleh kalah dengan bank-bank yang lain. Kalau kalah berarti kalah syariah dari bank yang lain. Bank syariah adalah bank yang *service*-nya harus lebih baik dari bank yang lain. Karena *service* atau melayani itu ada dalam agama. Hal itu termasuk syariah dan ini juga bersifat universal.

Semua nasabah pasti suka juga dilayanai dengan cara yang baik. Bank syariah adalah bank yang harus menjalani *governance finance*, pengelolaannya juga harus sehat secara transparan dan *good governance finance*. Karena di dalamnya ada integritas, ada kejujuran dan moral yang tinggi. Itulah yang dimaksud dengan pemaknaan syariah secara luas dan universal. Salah satu yang terpenting yang menjadi perhatian kami ketika mengembangkan perbankan syariah adalah bahwa salah satu dari tujuan syariah itu meningkatkan kesejahteraan ummat manusia. Ini menurut imam As-Syatibi yang merupakan ulama besar yang wafat pada tahun 790 H/1338 M. Beliau terkenal sebagai ulama yang memelopori ilmu-ilmu tentang *Maqoshid As-syariah*. Sehingga ketika kita menyebut Imam Syatibi kita akan mengkonotasikan Imam ini dengan *trade mark* ahli di bidang *Maqoshid As-syariah*.

Maqoshid artinya tujuan atau maksud-maksud dari Tuhan. Beliau mengatakan di dalam bukunya, salah satu tujuan terpenting dari *Maqoshid As-syariah* tidak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ummat manusia. Jadi Allah

menurunkan aturan-aturan itu untuk membuat manusia sejahtera.

Sejalan dengan tujuan syariah dari Imam Syatibi ini, kami mencoba melihat bagaimana perhatian Al-Qur'an terhadap persoalan Allah meningkatkan kesejahteraan ummat manusia ini. Ternyata kami menemukan di dalam Al-Qur'an itu tidak kurang ada 69 ayat yang berisikan tentang: anak yatim, fakir miskin, kaum dhu'afa dan sebagainya yang perlu kita bantu dan kita tingkatkan kesejahteraannya. Belum lagi ada 42 ayat lain yang berbicara tentang zakat, suatu kewajiban bagi ummat Islam untuk kita penuhi dalam rangka membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung, untuk kita tingkatkan kesejahteraannya. Dengan kata lain di dalam Al-Qur'an ada 111 ayat yang berbicara tentang kesejahteraan ummat manusia. Kalau kita bandingkan dengan ayat tentang riba di dalam Al-Qur'an hanya ada 7 ayat. Ayat tentang *maisyir* ada 3 ayat. Ayat-ayat tentang g*horor* tidak ditemukan di Al-Qur'an namun ditemukan di beberapa hadits. Dengan demikian ayat-ayat tentang larangan "Maghrib" itu ada di dalam Al-Qur'an, hanya tentang *maisyir* dan riba saja. Sementara ayat yang meminta kita untuk meningkatkan kesejahteraan manusia itu ada 111 ayat. Bisa kita fahami dari sini alangkah naifnya, alangkah *absurb*nya kalau kita mengembangkan perbankan dan ekonomi syariah yang kita maksudkan hanya menghindarkan diri dari "Maghrib" saja, lupa pada pesan yang lebih esensial bahwa Al-Qur'an meminta kita untuk memperhatikan 69 ayat yang membicarakan fakir miskin dan anak yatim.

Ada dua ayat yang menarik sekali yang menegur kita ummat Islam kalau kita beragama hanya sibuk dengan urusan-urusan yang ritus tetapi lupa pada pesan-pesan yang berkaitan tentang kesejahteraan ummat manusia ini. Yaitu Surat Al-Baqarah: 177. Ayat ini turun karena pada waktu itu ummat Islam di Madinah gaduh, bahkan mendekati *chaos*, mendekati pertikaian sesama ummat Islam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW baru saja melakukan perubahan qiblat. Qiblat yang tadinya menghadap ke utara arah Baitul Maqdits oleh Nabi SAW di ubah menghadap ke selatan ke Baitulloh.

Sebagai *flash back* saya ingatkan kembali tentang apa yang terjadi sebelum Nabi SAW hijrah dari Mekkah ke Madinah.

Menurut sejarah ketika di Mekkah, Nabi SAW ketika melakukan sholat itu selalu berusaha berdiri di sisi selatan Ka'bah (rukun Yaman) dengan maksud ketika beliau menghadap ke Ka'bah maka beliau menghadap ke utara, menghadap ke Baitul Maqdits yang ada di Yerusalem. Dengan berada di selatan Ka'bah beliau menghadap dua qiblat sekaligus yaitu Ka'bah dan Baitul Maqdits. Ketika Beliau hijrah ke Yatsrip atau Madinah beliau tidak lagi melakukan hal yang seperti itu karena Madinah berada di tengah-tengah antara Mekkah dan Yerusalem. Artinya ketika beliau menghadap Baitul Maqdits maka beliau membelakangi Ka'bah. Di dalam catatan sejarah 17 bulan pertama Nabi SAW berada di Madinah beliau masih menghadap ke Baitul Maqdits dan membelakangi Ka'bah. Akan tetapi lama kelamaan beliau berdo'a kepada Allah, berpikir bahwa Mekkah atau Ka'bah itu lebih tua dari Baitul Maqdits. Baitul Maqdits dimulai dari zaman Nabi Ibrahim A.S. sedangkan Mekkah atau Baitulloh dimulai dari sejak Nabi Adam A.S. sehingga Beliau terus berdo'a kepada Allah untuk diijinkan pindah qiblat dari Yerusalem (Baitul Maqdits) Ke Mekkah (Ka'bah). Dan beliau diperintah oleh Allah untuk mengubah qiblat. Dan ini diabadikan dengan indah sekali dalam salah satu ayat di Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah: 144

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

Artinya: *Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan*

Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. (QS. Al Baqarah 144).

Ayat yang memerintahkan Nabi SAW untuk memindah Qiblat ini terjadi pada saat Nabi SAW sedang memimpin sholat Ashar di sebuah masjid di pinggiran Madinah yang sekarang terkenal dengan sebutan Masjid Qiblatain. Saat Nabi SAW memimpin sholat, ditengah-tengah sholat Nabi SAW diperintahkan memindah qiblat dan Beliau langsung berpindah qiblat. Beliau langsung pindah dari sisi utara jama'ah ke sisi sebelah selatan jama'ah. Beliau harus memutar dan jama'ah mengikutinya.

Peristiwa tersebut menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. orang Islam bertengkar, kenapa begini agama kita? orang Islam yang berasal dari orang Yahudi protes kepada Nabi SAW karena mereka sudah merasa senang qiblat menghadap Baitul Maqdits sebagai tempat suci ummat Yahudi. Sehingga ada orang Yahudi yang sudah masuk Islam akhirnya murtad kembali. Karena perdebatan dan *chaos* tidak berhenti beberapa hari setelah peristiwa itu maka turunlah Surat Al-Baqarah: 177 yang berbunyi:

۞ لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: *Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang*

miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 177).

Yang menarik dari ayat ini adalah ayat ini menegur kepada kita sebagai ummat Islam. Dalam Ayat ini Allah berfirman: *dan buktikan keimananmu itu dengan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya.* Itulah yang namanya الْبِرَّ di dalam agama dan itulah esensi di dalam beragama.

Yang menarik lagi, agama kita, agama yang sering menegur kita tidak hanya masalah ubudiyah kita saja. Kita tahu masalah qiblat merupakan masalah yang prinsip. Namun perlu juga kita ingat, dengan Al-Qur'an Allah selalu mengingatkan kita ada yang lebih prinsip lagi daripada gaduh urusan qiblat yaitu menyantuni orang-orang yang membutuhkan, meningkatkan kesejahteraan di lingkungan kita. Itulah pesan Islam. Maka dari itu Imam Syatibi begitu yakin mengatakan bahwa syariah ini diturunkan untuk meningkatkan kesejahteraan kita ummat manusia.

II. Fakta Kesejahteraan Dunia Islam

Berbicara kesejahteraan dunia Islam, intinya sangat memilukan. Memang tidak mudah untuk mengukur kesejahteraan manusia. Tetapi ada suatu ukuran yang di pakai di dunia ini, dipakai oleh PBB dan diteliti serta diumumkan setiap tahun oleh United Nation Development Program (UNDP). Baru saja akhir 2010 kemarin diumumkan angka kesejahteran manusia yang paling akhir yang disebut Human Development Index (HDI). Dalam bahasa Indonesia disebut

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Inilah barangkali satu-satunya ukuran tentang kesejahteraan manusia yang diukur, diteliti secara rutin oleh PBB dan diumumkan kepada dunia. Yang diukur dalam Human Development Index (HDI) ini ada 3 (tiga) hal:

1. Tingkat umur rata-rata masyarakat (*Life Expectancy Index*). Semakin panjang umur rata-rata masyarakat maka semakin baik, berarti masyarakat tersebut semakin sehat.
2. Tingkat pendidikan (*Education Index*). Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin baik.
3. Indeks pendapatan per kapita (*IDP Index*). Pendapatan per kapita masyarakat semakin tinggi semakin baik.

Tiga aspek inilah yang diukur dan hasilnya digabung menjadi Human Development Index (HDI).

Mari kita lihat beberapa data yang saya perhatikan tahun ke tahun dalam HDI. kami mencoba memilah-milah yang mana negara muslim yang mana non-muslim. Kalau suatu negara itu ada 60% lebih penduduknya muslim maka itu dikategorikan sebagai negara muslim. Kalau kita lihat ternyata dari HDI yang diumumkan akhir 2010 kemarin, dari 30 negara dengan HDI tertinggi di dunia, tidak terdapat satupun negara muslim. Kalau kita lihat dari 50 negara dengan HDI tertinggi di dunia, baru kita temukan 5 negara muslim di sini yaitu: Uni Emirat Arab, Brunei, Qatar, Bahrain dan Quwait. Kalau kita total jumlah penduduk di 5 negara tersebut hanya 8 juta jiwa. Bila dibandingkan dengan penduduk DKI lebih banyak DKI (12 juta jiwa). Karena hanya 8 juta jiwa maka ini mewakili 0.57% ummat muslim di dunia yang jumlahnya 1.5 Milyar. Seluruh dunia setiap tahun yang diukur HDI-nya ada 182 negara.

Kemudian kita lihat secara komponennya, kalau kita lihat dari sisi *education* dari 30 negara dengan *Education Index* tertinggi tidak ada negara muslim di sini. Kalau kita lihat dari 50 negara dengan *Education Index* tertinggi di dunia baru kita temukan ada satu negara muslim yaitu Bahrain. Jadi hanya Bahrain yang mewakili kita ummat Islam yang 1.5 Milyar untuk masuk

ke dalam 50 besar negara dengan *Education Index* tertinggi di dunia. Padahal di Bahrain hanya ada 625 orang muslim.

Kemudian kita lihat dari fakta lain yaitu tentang *Life Expectancy Index*, umur rata-rata masyarakat. Kalau kita pilih 30 negara tertinggi tingkat umur rata-rata di dunia, kita juga tidak menemukan satupun negara muslim. Kalau kita lihat dari 50 negara dengan *Life Expectancy Index* tertinggi di dunia, baru kita temukan ada empat negara muslim yaitu Quwait, Uni Emirat Arab, Brunei dan Albania. Empat negara tersebut penduduknya hanya berjumlah 9,24 juta, yang berarti hanya mewakili 0.6 % penduduk muslim di dunia.

Inilah fakta tentang kondisi dunia muslim bila dilihat dari *Human Development Index* dunia. Bagimana tidak ironis, agama kita yang menurut Imam Syatibi syariahnya diturunkan untuk mensejahterakan ummat manusia, tetapi dalam prakteknya dalam dunia Islam kita dijatuhkan kesejahteraannya. Sangat ironisnya agama kita, ayat pertama turun diperintahkan untuk belajar tetapi kita masih keteteran dalam *Education Index*. Itulah fakta yang harus kita hadapi.

Selanjutnya ada beberapa data yang kami olah di sini yaitu tentang 10 negara muslim yang HDI nya tertinggi. Ternyata kesepuluh negara muslim yang memiliki HDI tertinggi itu ekonominya berbasis minyak "*Natural Resources Base Economy*" atau "*Oil and Fuel Base Economy.*" Karena mereka kaya akan minyak akhirnya indeks pendapatan per kapita menjadi sangat tinggi maka HDI juga sangat tinggi. Sebaliknya kalau kita ranking 10 negara yang non-muslim yang HDI tertinggi di dunia hanya satu yang berbasis sumber alam yaitu Norwegia. Sementara 9 (sembilan) negara non-muslim yang HDI tertinggi di dunia itu berbasis *knowledge*, "*Knowledge Base Economy.*" Itulah fakta yang kita hadapi dalam dunia Islam saat ini. Karena itu, kalau kita tidak berpikir untuk membangun ekonomi dan perbankan syariah untuk meningkatkan kesejahteraan ummat itu ironis sekali. Kalau kita mengembangkan ekonomi dan perbankan syariah hanya berkutat anti "Maghrib" maka hal itu sangat naif sekali. Untuk

itu gerakan ekonomi syariah, gerakan perbankan syariah harus mempunyai tujuan yang konkrit yaitu terbangunnya *Human Development Index* bangsa Indonesia.

Kalau kita lihat khusus *Human Development Index* Indonesia, HDI kita masuk rangking 108 dari 182 negara di dunia. *Life Expectancy Index* masuk rangking 109, *Education Index* masuk rangking 113, dan *Income Index* kita masuk rangking 124. Dari data ini sebetulnya sangat jelas, bahwa kelemahan kita dari ukuran kesejahteraan masyarakat adalah *income* per kapita kita rendah dan *education* kita rendah. Karena itu mestinya fokus membangun kesejahteraan bangsa Indonesia harus pada dua hal tersebut. Pertama: harus membangun ekonomi ummat maka *income* per kapita akan meningkat. Kedua: kita membangun pendidikan, maka *Education Index* juga akan meningkat. Fakta menunjukkan untuk jangka panjang bila *Education Index* membaik maka tingkat ekonomi juga akan membaik. Kalau kita lihat negara-negara dengan HDI tertinggi di dunia itu tidak mengandalkan sumber alam tetapi mengandalkan sumber *knowledge*.

Jadi jelas sekali Indonesia membutuhkan perjuangan yang keras, kuat dan genius untuk membangun kesejahteraan lewat peningkatan *income* per kapita masyarakat. Kalau kita menggerakkan ekonomi Islam, perbankan Islam, dan kita tidak memikirkan bagian yang itu, maka ini ironis sekali. Yang namanya bank itu lembaga ekonomi yang mestinya arahnya adalah kesejahteraan ummat. Dengan demikian, siapapun yang akan menggerakkan ekonomi syariah, perbankan syariah, harus betul-betul terwujud dalam visi misinya untuk mensejahterakan ummat. Hal ini harus betul-betul terbukti di dalam neraca maupun gerakan ekonomi.

III. Peran Perbankan Syariah

Bagaimana perbankan syariah beroperasi dan bergerak untuk memenuhi pesan-pesan syariah yang sudah disebutkan dalam bagian I.

a. Flipping Up The Piramid

Bahwa piramid ekonomi di dunia itu yang di atas adalah orang-orang yang kaya dan makmur. Sedangkan yang di bawah adalah orang-orang yang susah. Dalam sejarah Islam pernah terjadi dalam pemerintahan Umar Bin Abdul Azis, piramidnya terbalik. Piramidnya kecil di bawah besar di atas. Yang banyak orang-orang kaya dan yang miskin sedikit sekali. Ketika ummat Islam sudah makmur, ingin membayar zakat saja susah sekali karena mencari orang miskin susah. Gerakan ekonomi syariah, gerakan perbankan syariah harus pelan-pelan mempunyai misi untuk membalik piramid sehingga yang besar yang di atas. Memperbanyak orang-orang kaya dan mengurangi orang-orang miskin. Kalau kita lihat di Indonesia piramidnya seperi piramidnya Fir'aun. Yang kaya dan makmur hanya 2.7% sedangkan kelompok menengah ke bawah 97.3 % (di dalamnya ada 97.3 juta angkatan kerja). Inilah yang harus menjadi garapan dari ekonomi dan perbankan syariah.

b. Keberpihakan Pada Sektor UMKM

Apa yang terjadi kenyataannya di perbankan syariah saat ini?. Tahun 2005 bisa kita lihat dalam berbagai indikator bahwa perbankan syariah ini sudah jauh menjalankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional. Sebagai ukuran, dapat dilihat dari berapa jumlah pembiayaan atau kredit yang diberikan kepada UMKM, yaitu sebanyak 77%. Sementara perbankan konvensional hanya 52%. Jadi bank syariah saat ini fokus kreditnya untuk UMKM. Ketika kita menggarap UMKM maka kita menyentuh sektor bawah yang jumlahnya sangat banyak untuk ditingkatkan kesejahteraannya.

Fakta lain yang bisa kita lihat misalnya tentang FDR (*financial deposit ratio*). Dalam perbankan, FDR bisa diukur sebagai perbandingan antara uang yang disalurkan dalam bentuk kredit dengan uang yang diambil dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito. Makin tinggi FDR itu artinya bank semakin aktif membangun ekonomi dengan menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam data yang bisa kita

lihat dari tahun ke tahun, total FDR dari perbankan syariah jauh lebih tinggi dari perbankan konvensional. Kalau di total FDR di bank syariah itu bisa lebih dari 104 - 105%. Sementara total FDR di bank konvensional berkisar 60 - 65%. Dalam hal ini bank syariah sangat aktif menyalurkan uang yang terhimpun untuk pembiayaan ekonomi yang didominasi oleh UMKM. Jadi sedikit banyak sekarang ini bank syariah sudah bergerak sesuai dengan tujuan syariah itu sendiri.

c. Peran Bank Syariah Mandiri dan Lokomotif Kesyariahan

Mengenai cabang-cabang dari bank syariah. Ini menceritakan tentang walaupun sampai saat ini bank syariah di Indonesia masih sangat kecil omsetnya, sekitar 3.3%. Namun hal ini memang tumbuh dari bawah (*buttom up*) selama 11 tahun, walaupun tidak ada dukungan serius dari pemerintah. Lain halnya dengan di Malaysia yang mewajibkan BUMN, departemen-departemen menyimpan uangnya di bank syariah. Walaupun kecil, bank syariah telah menjadi lokomotif bergeraknya bagi gerbong-gerbong syariah yang lain. Saat ini banyak orang membicarakan bank syariah. Perekonomian syariah sebenarnya motornya adalah Bank Syariah Mandiri.

Misalnya, ada perguruan tinggi yang menawarkan jurusan ekonomi syariah. Sekarang hampir universitas negeri maupun swasta yang besar-besar faktanya sudah ada jurusan ekonomi syariah, baik S1 maupun S2, seperti: UIN, UI, IPB, UGM, dan lain-lain. Bahkan S3 ekonomi syariah juga sudah banyak di perguruan tinggi swasta. Kenapa perguruan tinggi mewarkan jurusan itu? Karena peminatnya banyak. Siapa nanti yang menjadi *demand* dari sarjana-sarjana keuangan syariah? Tentunya perbankan syariah. Coba kita bayangkan 5, 10, 15 tahun ke depan kita akan memanen sarjana-sarjana yang lulus S1, S2, S3 keuangan syariah. Kalau sekarang kita menggerakkan perbankan syariah relatif belum mempunyai banyak ahli di bidang keuangan syariah karena kita belajar sambil bekerja. Harapannya ke depan di Indonesia ini akan banyak bermunculan ahli-ahli di bidang ekonomi syariah.

Contoh lain, sekarang ini ada Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Saat ini di 25 provinsi di Indonesia sudah mempunyai pengurus MES. Sedangkan di pusat, MES didirikan pada tahun 2001. Hal ini juga diikuti di luar negeri, misalnya: Singapura, Malaysia, Jepang, Jedah, UK dan sebagainya. Juga ada pengurus MES. Siapa yang menggerakkan kegiatan MES ini? Tidak lain adalah para tokoh masyarakat, akademisi yang biasanya disponsori oleh perbankan syariah. Sekarang ini pergerakan ekonomi syariah di masyarakat melalui lembaga-lembaga syariah dan yang menjadi lokomotif adalah perbankan syariah.

Contoh lain, tumbuhnya lembaga keuangan syariah yang lain seperti: asuransi syariah, pegadaian syariah, BPR syariah, usaha syariah, *multi finance* syariah, sekuritas syariah, modal ventura syariah. Banyak orang membuat usaha syariah seperti: hotel syariah, bengkel syariah. Semua itu digerakkan oleh perbankan syariah.

Dalam hal pelayanan hukum, saat ini pemerintah sudah mewajibkan peradilan negeri, peradilan agama harus mampu menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan keuangan syariah. Sekarang inipun pengadilan negeri juga sudah belajar tentang perbankan syariah. Kemudian tentang instrumen keuangan syariah, pemerintah kita menerbitkan sukuk retail, SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), persen plafon UMKM, dan obligasi syariah. Semua hal tersebut yang meggerakkan juga perbankan syariah.

Seiring pertumbuhan perbankan syariah, lembaga ekonomi syariah, maka dibentuklah DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang anggotanya adalah ulama. Sekarang ini masih kekurangan ulama yang duduk di DPS. Dimana ada satu ulama yang duduk di DPS untuk beberapa lembaga ekonomi syariah. Sehingga profesi sebagai DPS ini akan berkembang di kalangan ulama. Dengan demikian ulama perlu belajar tentang keuangan atau perbankan syariah.

Jadi walaupun perbankan syariah masih kecil dan bertumbuh namun terbukti telah menjadi lokomotif bagi pergerakan

gerbong-gerbong ekonomi syariah yang lain. Dengan catatan syarat yang saya kemukakan di bagian awal harus dikawal sedemikian rupa supaya pesan-pesan dalam syariah itu tidak terlupakan. Tidak hanya berjuang anti "Maghrib" saja tetapi berjuang untuk betul-betul meningkatkan kesejahteraan ummat.

Satu hal yang akan saya sampaikan, *Alhamdulillah* yang menggerakkan perbankan syariah, yang menjadi *leader* atau yang menjadi lokomotif bank syariah adalah Bank Syariah Mandiri. Yang saat ini menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dengan *market share* 37 – 39% dan tahun kemarin mendapatkan keuntungan hampir 50%, dengan pertumbuhan sekitar 47%. Itu semua antara lain berkat dukungan seluruh masyarakat Indonesia juga dukungan dari teman-teman di LDII.

Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.

بِاللهِ التَّوْفِيْقِ وَالْهِدَايَةِ

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Surabaya, 8 Maret 2011

Yuslam Fauzi
Presiden Direktur Bank Syariah Mandiri

Pengarahan
Deputi I/Poldagri, Kemenko Polhukam,

Mewakili Menkopolhukam,
Marsekal TNI AU Pur. Djoko Sujanto

Pada
Musyawarah Nasional VII
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Tahun 2011

Persoalan Sosial yang Berdampak Gangguan
pada Keamanan dan Ketertiban

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan YME atas karunia dan perkenanNya, bahwa pada saat ini kita diberi kesempatan dan kekuatan untuk bisa saling bertukar pikiran dan pandangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan NKRI.

Kondisi Faktual

- Seperti kita ketahui bersama, saat ini bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai masalah sosial yang cukup berat dengan timbulnya beberapa konflik horizontal baik

terkait perbedaan agama, suku, maupun kepentingan-kepentingan lain. Masalah-masalah sosial tersebut timbul karena beberapa faktor antara lain:

- Terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai-nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada.
- Proses dan interaksi sosial, serta bencana alam.
- Bentrokan antara unsur-unsur yang ada dalam masyarakat yang menimbulkan gangguan hubungan sosial.
- Distribusi dan pengelolaan sumber daya ekonomi.

❖ Beberapa masalah sosial yang timbul dalam beberapa tahun terakhir antara lain:
- Konflik dalam penyelenggaraan Pemilukada.
- Pemekaran wilayah.
- Sengketa pertanahan.
- Sengketa batas wilayah antar daerah.
- Penyalahgunaan narkoba.
- Konflik antar kelompok masyarakat dan antar ummat beragama.
- Penyampaian aspirasi dengan menggunakan cara-cara pemaksaan dan anarkis.

❖ Perkembangan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam bidang politik, kemerdekaan berserikat dan mengemukakan pendapat telah meningkatkan kesadaran hak politik rakyat. Namun sayangnya kesadaran tersebut belum diiringi dengan kesadaran tentang pemenuhan kewajiban dan penghormatan terhadap hak-hak orang atau kelompok lain. Ketidakseimbangan tersebut seringkali menyebabkan pelaksanaan hak politik oleh sekelompok warga diwujudkan secara berlebihan dan cenderung anarkis hingga melanggar hak orang atau kelompok masyarakat lain.

❖ Mobilisasi massa dalam menuntut hak-hak politik dan menyampaikan pendapat tak lepas dari peran kemajuan teknologi informasi, dimana pembentukan opini dan penyebaran isu dapat berlangsung dengan cepat melalui

media jaringan sosial. Penggunaan media jaringan sosial tentunya menuntut kedewasaan baik dalam penyebaran maupun dalam menyikapinya.

Arah dan Kebijakan Pembangunan Kabinet Indonesia Bersatu II

- Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Visi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II adalah mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan yang akan diupayakan melalui 3 (tiga) Misi yaitu
  - Mewujudkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera.
  - Memperkuat pilar-pilar demokrasi.
  - Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.

- Pencapaian Indonesia yang demokratis, adil, aman, dan damai dimaksudkan untuk lebih mendekatkan bangsa dan negara pada tujuan luhur nasional sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

- Sejalan dengan Visi dan Misi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II serta tugas pokok dan fungsi Kemenko Polhukam yang diselaraskan dengan tingkat capaian bidang politik, hukum, dan keamanan maka Kemenko Polhukam menetapkan Visi: *terwujudnya koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan yang efektif untuk mencapai Indonesia yang demokratis, adil, aman, dan damai.*

- Pada tahun ini bangsa Indonesia telah memasuki tahun ke 13 pelaksanaan reformasi. Reformasi yang merupakan gerakan murni untuk mewujudkan tata kehidupan yang lebih baik di segala bidang, serta yang lebih demokratis, dengan menghormati hukum dan hak asasi manusia pada hakekatnya, merupakan proses transisi terutama peralihan dari kehidupan monolistik yang cenderung otoritarian menuju kehidupan yang demokratis.

- Demokrasi mensyaratkan adanya pengakuan kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan partisipasi rakyat yang dikenal sebagai *civil society* untuk menjadi kekuatan penyeimbang kekuasaan dalam negara yang demokratis. Rakyat sebagai unsur utama *civil society* mendapatkan kedudukan strategis yang dijamin dalam konstitusi untuk menjalankan peran-perannya sebagai bentuk partisipasi aktif, termasuk melalui organisasi kemasyarakatan.
- Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, bahkan menjadi isu global, disisi lain penyelenggaraan pembangunan bangsa dan negara kita harus tetap berlangsung dengan tetap membuka ruang bagi kelangsungan proses demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai fundamental yang telah menjadi kesepakatan bangsa dan tertuang dalam Empat Konsensus Dasar yaitu: Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- Dalam kaitan itu, untuk menjamin kelangsungan pembangunan yang sedang kita kembangkan saat ini, diperlukan kondisionalitas berupa stabilitas politik dan keamanan, yang merupakan tanggungjawab dari seluruh komponen bangsa, serta memerlukan partisipasi aktif dari seluruh komponen bangsa untuk senantiasa bersama-sama menjaga dan memeliharanya.
- Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) sebagai salah satu komponen bangsa memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa, terutama dalam mewujudkan masyarakat yang ber*akhlaqul-karimah* sebagai salah satu prasyarat dalam mendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Pemilihan tema Musyawarah Nasional VII LDII untuk "Meningkatkan Pengembangan SDM Profesional Religius Menuju Indonesia Sejahtera, Demokratis, Berkeadilan dan Bermartabat", adalah sangat tepat dan telah sejalan dengan Visi dan Misi Pembangunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

- Berbagai permasalahan sosial yang dihadapi bangsa Indonesia akhir-akhir ini, sebagaimana telah diuraikan diatas tadi semuanya bermuara dan berdampak pada gangguan keamanan dan stabilitas politik yang apabila tidak dikelola secara tepat dan bijaksana dengan mempertimbangkan berbagai dampak yang dapat ditimbulkan, pada akhirnya akan menjadi kontraproduktif dan merugikan kita semua.

- Bagaimanapun, berbagai tindakan kekerasan yang masih sering mewarnai dinamika kehidupan masyarakat, akan menjadi antitesis bagi sistem demokrasi yang sedang kita bangun. Pluralitas yang menjadi salah satu pilar bagi tegaknya demokrasi akan tercerai berai dengan tindakan kekerasan massa apalagi dengan latar belakang perbedaan paham keagamaan. Selain mengancam pluralitas, kekerasan juga akan mengoyak bangunan toleransi yang selama ini menjadi pilar dan kekuatan keberagaman Indonesia.

Atensi dan Harapan ke Depan

- Segala upaya pemerintah yang sudah dituangkan dalam Visi dan Misi Pembangunan KIB II sebagaimana disebutkan tadi, tentunya tetap memerlukan dukungan dan komitmen bersama dari segenap komponen bangsa untuk dapat merealisasikannya. Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan dari kita semua. Partisipasi aktif dari organisasi kemasyarakatan seperti LDII sangat diharapkan dalam mendorong keberhasilan penanggulangan berbagai permasalahan sosial dalam rangka mewujudkan stabilitas politik dan keamanan, melalui upaya-upaya antara lain:

  Pertama, menanggapi berbagai isu yang provokatif dengan kearifan dan kedewasaan.
  Kedua, meningkatkan solidaritas baik antar anggota maupun dengan kelompok masyarakat lainnya, apapun golongan dan latar belakang sosialnya sehingga kerukunan dapat senantiasa terpelihara.

Ketiga, membuka ruang komunikasi dan dialog dengan semua pihak sebagai wujud toleransi dan kebersamaan.
Keempat, menumbuhkan kesadaran untuk selalu menyeimbangkan pemenuhan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kelima, membangun kehidupan demokrasi yang dilandasi nilai-nilai Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keutuhan NKRI, dan dilandasi semangat Bhinneka Tunggal Ika.

- Pemerintah tentunya berharap agar LDII sebagai organisasi besar dapat berperan aktif dalam penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan nasional dengan senantiasa menjaga dan memelihara harmonisasi sosial dalam semangat persatuan dan kesatuan.

Akhirnya, saya mengucapkan selamat atas pelaksanaan Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Semoga dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran positif dan konstruktif bagi kemajuan bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Surabaya, 8 Maret 2011

Mayjen TNI Amirrudin Usman S.IP.
Deputi I/Poldagri, Kemenko Polhukam

Pembekalan
Guru Besar Universitas Airlangga Surabaya

Pada
Musyawarah Nasional VII
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Tahun 2011

Civil Society dalam Proses Demokrasi

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ.

Bapak-bapak Ketua dan para Pengurus LDII yang saya hormati, *alhamdulillah* saya ucapan kehadirat Allah SWT atas izinNya saya diberi kesempatan untuk bersilaturahim dengan Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian ditempat yang sangat barokah ini.

Saya diminta menjadi ketua PB NU periode 2010-2012, semuanya saya niati ibadah dan saya berdo'a semoga ini akan membawa kemanfaatan bagi orang lain. Hidup ini tidak ada artinya jika tidak memberikan manfaat bagi orang lain.

Hadirin sekalian yang kami hormati!

Demokrasi adalah sebuah keniscayaan yang sekarang ini harus ada. Pada tahun 1991 ada sebuah buku berjudul "*The Third Wave of Democratization*" buah karya Samuel Phillips Huntington (April 18, 1927 – December 24, 2008). Buku ini menerangkan bahwa demokratisasi akan terjadi di banyak negara di dunia. Tujuh tahun kemudian terjadi reformasi di negara kita. Buku tersebut membantu bagaimana memahami proses demokratisasi di Indonesia.

Pertanyaannya adalah mengapa orang menginginkan demokrasi? Jawabannya adalah bahwa jutaan orang di dunia ini menderita kelaparan, jutaan orang meninggal karena kelaparan tetapi tidak ada satupun pemimpin yang lalim yang mati karena kelaparan. Di dalam negara demokrasi orang-orang yang lapar tadi dapat menghentikan pemimpin yang lalim. Artinya bahwa demokrasi memungkinkan adanya pemimpin yang *concern* terhadap rakyatnya, bukan pemimpin yang lalim.

Alasan kedua adalah demokrasi menginginkan seorang pemimpin mengetahui apa yang dialami oleh rakyat. Pada zaman orde baru saya juga yakin banyak orang yang kelaparan, orang miskin juga ada di mana-mana. Tetapi orang lain tidak mengetahui bahwa ada orang yang kelaparan, sebab tidak ada media yang memberitakan. Sekali memberitakan langsung akan dicegah. Sedangkan di masa demokrasi pemimpin itu mengetahui apa yang dialami oleh rakyatnya kemudian dia berusaha untuk memperbaiki.

Dan yang ketiga demokrasi itu memungkinkan adanya *public service* yang lebih baik. Karena dengan demokrasi akan menghasilkan kompetisi dan dengan kompetisi inilah akan muncul pemimpin-pemimpin yang bijak dan menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.

Indonesia sedang berupaya untuk mendapatkan pemimpin yang lebih baik dan sedang berupaya memberikan *public service* yang lebih baik dan kehidupan masyarakat yang lebih

makmur. Masalahnya adalah untuk menciptakan kerangka ideal demokrasi semacam itu bukan merupakan hal yang mudah untuk dilakukan.

Ada beberapa prasyarat bagi negara untuk membangun demokrasi. Pertama adanya kompetisi yang sehat di dalam memperebutkan jabatan-jabatan publik. Kalau pemimpin/ pejabat publik itu turun temurun maka itu tidak demokratis, sebab tidak ada persaingan. Di tubuh LDII saya yakin demokrasi berjalan, sehingga dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang lebih baik dari pada sebelumnya.

Yang kedua, adalah adanya partisipasi publik, bukan hanya dalam rangka PEMILU tetapi juga dalam hal pembuatan kebijakan publik. Sekarang kita pertanyakan, apakah publik di negara kita sudah dilibatkan dalam penyusunan rancangan pembangunan? BAPENAS belum pernah mengundang PB NU, Muhammadiyah, LDII ataupun yang lainnya dalam rangka menyusun rancangan pembangunan. Berarti dalam hal ini ada yang kurang. Sebab pembangunan itu menyangkut banyak aspek.

Negara itu memiliki tiga fungsi penting: Fungsi pertama adalah mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya (*resources*) yang dimiliki. Apakah pada bidang pertanian, industri, pertambangan dan sebagainya, kemudian mau didistribusikan untuk apa? Maka dalam negara demokrasi seharusnya melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam hal perencanaan pembangunan.

Fungsi kedua dari sebuah negara adalah untuk membuat regulasi. Negara itu mengatur, sebab dalam hal kompetisi jika tidak ada peraturan maka tidak akan berjalan. Misalnya urusan bisnis, jika tidak diatur maka tidak akan ada kompetisi yang sehat.

Fungsi yang ketiga adalah memberikan perlindungan. Misalnya ada banyak orang miskin di daerah pertambangan. Bagaimana mengatasi kemiskinan di daerah pertambangan yang kaya raya. Di suatu daerah di Mimika, Papua ada sebuah sungai

yang dipenuhi dengan limbah dari perusahaan penambangan. Kemudian saya masuk ke bandara dan kondisinya menyedihkan. Keadaan bandaranya seperti kandang ayam. Kemudian saya langsung berfikir, mungkin ini penyebabnya kenapa orang Papua ingin merdeka. Ini berarti negara tidak bisa memberikan proteksi dan tidak punya kemampuan yang serius dalam alokasi dan distribusi sumber daya (*resources*) yang adil kepada masyarakatnya. Termasuk membuat aturan (regulasi) yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang.

Hanya saja menciptakan demokrasi dalam kurun waktu 12 tahun ini tidak mudah. Saya ingat pada masa awal reformasi, orang-orang berfikir sederhana. Seolah-olah jika Pak Harto turun, maka semuanya beres. Dan baru sekarang kita menyadari bahwa persoalannya tidak sesederhana itu. Dalam hal politik, belakangan ini dipertanyakan, apakah untungnya dengan diselenggarakannya PILKADA secara langsung? Saya termasuk orang yang setuju PILKADA secara langsung, hanya saja PILKADA secara langsung ini tidak dibarengi dengan kualitas pemilih yang baik.

Pada masa lalu, orang memilih itu karena dua faktor: Pertama seseorang memilih karena ikatan ideologis. Anggota NU maka akan memilih partai NU, Anggota Muhammadiyah akan memilih partai MASYUMI. Jika dekat dengan Nasionalis maka akan memilih partai Nasionalis. Yang kedua seseorang dipilih itu karena faktor kepemimpinan (*leadership*). Jika mencintai pak Karno maka akan memilih PDIP. Jika mencintai Pak Amin Rais maka akan memilih partai PAN. Jika mencintai Gus Dur maka akan memilih PKB dan jika mencintai SBY akan memilih Demokrat. Nah dengan demokrasi, para pemilih menentukan pilihannya bukan didasarkan atas ideologis, bukan semata-mata karena pemimpin, tetapi karena berfikir rasional, dia memilih suatu partai karena menurutnya partai tersebut baik.

Pada masa Pemilu tahun 1999 dan tahun 2004, pemilih rasional kita cukup meningkat, hanya saja pada tahun 2009 pemilih rasional ini terbagi menjadi 2 kelompok. Pertama adalah pemilih rasional program dan yang kedua adalah

pemilih rasional material. Berapa uang dan modal yang dimiliki partai tersebut. Pada tahun 2005 ketika PILKADA langsung pertama kali digelar, pemilih yang memilih secara rasional berjumlah 10%. Pada tahun 2010 sudah mencapai sekitar 50%. Masih ada kemungkinan orang memilih dengan diberi uang dengan alasan *shadaqah* politik. Tetapi hal ini jelas membuat demokrasi kita berlangsung kurang sehat. Sebab yang terjadi adalah orang yang mempunyai uang banyak meskipun tidak aktif di partai, tetapi karena punya uang akhirnya dia terpilih.

Itu kenyataan yang harus kita hadapi, sebab kita akui bahwa masih banyak masyarakat kita yang masih miskin. Pendapatan per kapita kita setelah masa reformasi memang ada kenaikan. Tetapi jika kita *breakdown* maka GNP per kapita kita hanya dinikmati sekelompok kecil orang. Ketua BPN pernah mengatakan 56% aset Indonesia dikuasi oleh 0,2% penduduk Indonesia.

Maka dalam hal membangun demokrasi yang baik dan sehat, kiranya kami sangat setuju dengan jalan pengembangan ekonomi ummat. Mudah-mudahan NU juga bisa mencontoh kepada LDII. Menurut pandangan kami, dalam hal organisasi NU lebih dulu, sedangkan pengembangan organisasi LDII lebih baik. Maka yang penting pada saat ini dalam membangun demokrasi yang sehat, bagaimana agar ekonomi ummat ini menjadi semakin kuat. *Civil society* yang dikembangkan LDII berada di jalur yang benar.

Dan yang kedua adalah dari sisi politisi. Sebab saya yakin semua politisi juga tidak mau berpolitik dengan uang. Tetapi oleh karena kompetisinya luar biasa, akhirnya mereka terdorong untuk menggunakan politik uang. Di dunia ini tidak ada calon anggota DPR sebanyak di Indonesia, termasuk Amerika Serikat juga calon anggota legislatif tidak sebanyak Indonesia. Dan jika para politisi kita memiliki *akhlaqul karimah*, akhlak yang baik dan menyadari bahwa politik uang itu tidak baik, maka akan bisa meminimalisir politik uang itu sendiri. Berapapun *demand*-nya jika *supply*-nya tidak ada maka tidak

akan berjalan. Demikian juga sebaliknya berapapun *supply*-nya jika *demand*-nya tidak ada maka tidak akan terjadi.

Maka organisasi keagamaan seperti LDII, NU dan yang lainnya memiliki tugas diantaranya adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam hal pendidikan dan ekonomi, juga dalam hal dakwah. Menyadarkan pada masyarakat bahwa politik dengan menggunakan uang itu tidak sehat/tidak baik dunia dan akhirat.

Dari sisi dunia tidak sehat karena politik uang membuat biaya politik tinggi, akhirnya korupsi semakin tinggi. Sampai-sampai ada gubernur yang baru dilantik kemudian langsung menjadi terdakwa, yaitu Gubernur Bengkulu. Demikian juga dengan bupati. Dan jika angka korupsi besar maka rakyat juga yang dirugikan. Jadi rakyat dalam jangka pendek menerima uang saat berpolitik terlihat menyenangkan, tetapi jangka panjangnya justru merugikan rakyat itu sendiri. Maka perpolitikan di negara kita harus diatur dengan lebih baik misalnya dengan cara membatasi jumlah pengeluaran para politisi untuk pemilihan baik di dalam Pileg atau Pilkada.

Salah satu problema yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam hal kepemimpinan adalah masalah komitmen. Jika sudah menjadi komitmen bersama maka harus dijalankan bersama. Jangan sampai kelihatannya berpelukan, tangan kanan memeluk tetapi tangan kiri menusuk dari arah belakang. Itu tidak dikatakan memiliki komitmen.

Demikian juga masalah kepemimpinan (*leadership*). *Leadership* adalah suatu kemampuan untuk mengorganisir. Dalam 12 tahun terakhir, Indonesia mengalami perubahan besar, dari negara sentralistik/negara yang otoriter menjadi negara demokratis yang *fragmented.* Kita membutuhkan yang namanya *coordinated state* atau negara yang terkoordinasi bukan negara *fragmented*. Organisasi masyarakat memiliki peran yang sangat besar di dalam mendidik warganya termasuk juga dalam hal memberikan tausiah kepada para elit politiknya. Jika kemudian mental pejabat dan elit politik kita bagus maka negara akan menjadi semakin baik.

Juga merupakan hal yang baik jika ormas-ormas yang ada membangun *networking* dengan partai-partai politik dan organisasi pemerintahan. Meskipun tidak harus menjadi partai politik. Termasuk LDII, meskipun saya bukan warga LDII tetapi saya sangat tidak setuju jika LDII menjadi partai politik. Akan tetapi, menjadi sebuah hal yang normal jika organisasi kemasyarakatan membangun *networking* dengan partai politik dan organisasi pemerintah. Contohnya LDII memberikan saran kepada pemerintah bahwa jembatan di suatu daerah memerlukan perbaikan karena rusak, sehingga mengganggu jalannya roda perekonomian. Dan itu bukan semata-mata untuk warga LDII akan tetapi untuk masyarakat pada umumnya.

Selama ini ada yang salah, yaitu timbulnya kesan bahwa organisasi kemasyarakatan itu berhadapan/berseberangan dengan pemerintah. Apapun kata pemerintah menurut ormas salah dan ormas-lah yang paling benar. Di Amerika sendiri saja tidak demikian. Gereja-gereja sama membangun hubungan dengan Partai Republik.

Organisasi masyarakat di satu sisi bisa memberikan kritik dan di sisi lain bisa memberikan masukan dan dorongan kepada pemerintah. Jadi tidak sekedar menyalahkan atau sekedar ikut saja.

Ada sebuah pertanyaan yang dilontarkan kepada kami: manakah yang lebih baik antara kepala daerah dipilih oleh DPRD atau dipilih langsung oleh rakyat? Menurut kami keduanya bisa dijalankan, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Misalnya di daerah perkotaan yang masyarakatnya sudah terdidik, maka pemilihan langsung mungkin lebih baik. Akan tetapi bagi masyarakat pedalaman, masyarakatnya masih banyak yang buta huruf, geografisnya berat, di wilayah Papua misalnya, mungkin pemilihan kepala daerah melalui DPRD itu jauh lebih baik.

Dan yang terakhir saya sampaikan, di dalam demokrasi biasanya akan ditemukan 3 paradoks besar. Pertama adalah paradok antara konflik dan konsensus. Semua demokrasi pasti

ada konflik. Ada kompetisi pasti ada konflik. Tetapi konflik saja tidak bagus tanpa adanya konsensus. Kedua tingkat keterwakilan dan kemampuan pemerintahan (*representation*). Demokrasi pasti membutuhkan wakil yang banyak. Semakin banyak kelompok yang terwakili di DPR maka akan semakin bagus. Tetapi jika semua partai harus memiliki wakil, maka akan sangat sulit untuk menghasilkan keputusan, sehingga ada kesulitan di dalam menjalankan pemerintahan. Demikian juga koalisi, jika terlalu banyak maka akan banyak mengalami hambatan. Kurang mampu di dalam menjalankan roda pemerintahan (*capability*). Yang ketiga adalah bahwa semua keputusan-keputusan yang diambil haruslah mendapatkan dukungan dari rakyat.

Akan tetapi kita semua harus optimis, dengan membangun kerjasama dan komunikasi yang baik antara ormas-ormas yang ada dan pemerintah maupun partai politik. InsyaAllah ke depan, demokrasi di negara kita akan semakin baik.

Kiranya demikian yang dapat kami sampaikan. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan ucapan

بِاللهِ التَّوْفِيْقِ وَالْهِدَايَةِ

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Surabaya, 8 Maret 2011

Prof. Dr. Kacung Marijan
Guru Besar Universitas Airlangga, Surabaya



Sambutan
Ketua Departemen Kepemudaan dan Remaja
Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia

Pada
Musyawarah Nasional VII
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Tahun 2011

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yang terhormat:
Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Para peserta Musyawarah Nasional VII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
Segenap hadirin dan undangan yang berbahagia.

Diiringi puji dan syukur kehadirat Allah SWT, kami mengucapkan selamat dan turut berbahagia, berkenaan dengan diselenggarakannya Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia, yang diadakan pada tanggal 8-9 Maret 2011, di kota Surabaya dan dibuka oleh Prof. DR.Ir.KH. Abdullah Syam, MSc. - Ketua Umum DPP LDII, serta berlangsung secara lancar, tertib dan sukses.

Sesuai dengan tema Musyawaroh Nasional VII LDII, kami berharap pasca diselenggarakan MUNAS ini, Lembaga

Dakwah Islam Indonesia akan menjadi organisasi dakwah yang lebih eksis, berkembang dan bermanfaat bagi kemaslahatan ummat Islam, Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia khususnya Departemen Kepemudaan dan Remaja, membuka pintu seluas-luasnya bagi kerjasama organisasi terutama berkaitan dengan pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia yang Profesional Religius, kegiatan amal sholeh yang berorientasi pada kesejahteraan jama'ah dan kemakmuran masjid, serta kerja nyata nasionalisme sebagai perwujudan pengabdian dan rasa syukur kita pada Allah SWT.

Para Peserta Musyawarah yang Berbahagia.

Kami percaya Musyawarah Nasional VII LDII, dibawah kepemimpinan kepengurusan yang baru serta dengan ditetapkannya program kerja yang realistis, terukur dan bermanfaat, maka organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia akan dapat meningkatkan amal sholehnya bagi kemajuan ummat Islam pada khususnya dan seluruh Bangsa Indonesia pada umumnya.

Demikian sambutan kami, semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, rahmat dan perlindungan pada kita semua. Amin. *Wabillahi taufiq wal hidayah*,

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Surabaya, 8 Maret 2011

H. Daud Poliradja
Ketua Departemen Kepemudaan dan Remaja,
Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN INTELIJEN KEAMANAN
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN

Nomor : STTP/YANMAS/ 48 / III / 2011 / BAINTELKAM

Pertimbangan : Bahwa telah dipenuhinya segala persyaratan pemberitahuan kegiatan masyarakat tentang perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat.

Dasar :
1. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol. : JUKLAP/ 02 /XII/1995 tanggal 29 Desember 1995 tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.

Memperhatikan :
1. surat pemberitahuan Panitia Pelaksana Musyawarah Nasional VII Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor : SUM-51/DPP LDII/II/2011 tanggal 8 Pebruari 2011, perihal Pemberitahuan Kegiatan Munas.
2. Rekomendasi Izin Keramaian Kapolda Jawa Timur Nomor : Rek/ 35 / II / 2011/DITINTELKAM tanggal 23 Pebruari 2011 tentang pemberitahuan kegiatan Munas VII LDII Tahun 2011, tanggal 08-09 Maret 2011 di Hotel Shangri-La dan Pondok Sabilurrosyidin Surabaya yang akan diikuti peserta ± 1.000 orang.

MEMBERIKAN
SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN

Kepada :

1. Nama Organisasi / Kelompok/perorangan : **PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)**
2. Alamat / Telp. : Jl. Arteri Tentara Pelajar No.28 Senayan Jakarta Selatan. Telp. 021-57992547, Fax. 021-57992950
3. Nama Penanggung Jawab : - Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc (Ketua Panpel)
   - Ir. H. Dedid Cahya Hapyanto, MT (Sekteraris)

4. Dengan.....

4. Dengan kegiatan sebagai berikut :

a.	bentuk kegiatan	:	**MUNAS VII LDII**
b.	tanggal	:	8 – 9 Maret 2011
c.	tempat	:	1. Hotel Sangri-La Surabaya, Jl. Mayjen Sungkono Surabaya. 2. Pondok Sabilurrosyidin Jl. Gayungan VII/11 Surabaya
d.	jumlah peserta	:	± 1.000 orang
e.	pembicara	:	-
f.	maksud dan tujuan	:	membahas laporan pertanggung jawaban pengurus, menetapkan program kerja, memilih dan menetapkan pengurus pusat dan merumuskan rekomendasi Munas VII LDII.

Catatan :

1. Jumlah peserta kegiatan disesuaikan dengan kapasitas gedung / tempat.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan tidak membahas masalah diluar maksud dan tujuan kegiatan.
3. Menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
4. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Apabila kegiatan dilakukan tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka **STTP dinyatakan tidak berlaku.**

Jakarta, 02 Maret 2011
a.n. KEPALA BADAN INTELIJEN KEAMANAN
KABID YANMAS

KEPALA

KUSTONI SUMARDI, S.IP
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 58030807

Tembusan :

1. Dirjen Kesbang & Politik Kemendagri.
2. Dirjen Bimmas Islam Kemenag
3. Kabaintelkam.
4. Dirsosbud Baintelkam.
5. Kapolda Jawa Timur u.p. Dir Intelkam dan Karo Ops.
6. Kapolrestabes Surabaya.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR

REKOMENDASI IZIN KERAMAIAN

Nomor : Rek/ 35 /II/2011/DITINTELKAM

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR

Pertimbangan : berdasarkan surat permohonan pemberitahuan kegiatan Munas Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia No: SUM-51/DPP LDII/II/2011 tanggal 08 Pebruari 2011, tentang pemberitahuan kegiatan **Munas VII LDII Tahun 2011,** yang akan dihadiri oleh ± 1.000 orang peserta dan sebagai penanggung jawab Ir. H DEDID CAHYA HAPYANTO, MT (HP 08123027183), maka perlunya diberikan Rekomendasi Izin Keramaian dari Polri terhadap penyelenggaraan kegiatan dimaksud yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Selasa s/d Rabu;
Tgl : 08 s/d 09 Maret 2011, Pkl. 07.00 s/d 21.30 wib;
Tempat : 1. Hotel Shangri-La Jl. Mayjen sungkono Surabaya;
2. Pondok Sabilurrosyidin Jl. Gayungan VII/11 Surabaya;

Dasar :

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
2. Keppres Nomor 97 Tahun 2001 tanggal 2 Agustus 2001 tentang perubahan atas Keppres RI Nomor : 54 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Satuan-satuan Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Pertahanan dan Keamanan RI Nomor : 153 Tahun 1995 dan Nomor :Kep/12/XII/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perijinan sebagaimana diatur dalam pasal 510 KUHP dan Pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no 5 Pnps Tahun 1963 tentang Kegiatan Politik;
4. Juklak Kapolri No. Pol. : Juklak/02/XII/1995 tanggal 29 Desember 1995 tentang Penyelenggaraan Perijinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat;
5. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 perihal Organisasi dan Tata Kerja Baintelkam;
6. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 perihal Tata Kerja Kepolisian Daerah;
7. Surat Rekomendasi dari Kapolrestabes Surabaya No. Rek : 50/II/2011/Intelkam, tanggal 21 Pebruari 2011, menyatakan tidak keberatan dengan diselenggarakannya kegiatan tersebut.

Mengingat : Kegiatan dari segi keamanan dan ketertiban umum / masyarakat hingga dikeluarkan Rekomendasi ini tidak terdapat hal - hal yang menimbulkan kerawanan.

Bahwa dengan ini menyatakan tidak keberatan atas diselenggarakannya kegiatan tersebut.

Dikeluarkan di : Surabaya
pada tanggal : 23 Pebruari 2011

an. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR
DIRINTELKAM

KEPALA

Drs. ARIS NURHANDAYANI
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 59050981

Kepada Yth :

Kabaintelkam Polri U.p Kabid Yanmin

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT KOTA BESAR SURABAYA
Jalan Taman Sikatan 1, Surabaya 60175

REKOMENDASI
Nomor : Rek / 50 / II / 2011 / Intelkam

KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR SURABAYA

Pertimbangan : berdasarkan permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia / LDII .

tentang perlunya diberikan rekomendasi dari Polri terhadap penyelenggaraan kegiatan " MUNAS VII LDII Tahun 2011 " yang dilaksanakan pada hari SELASA - RABU, tanggal 08 - 09 Maret 2011 bertempat di Hotel Shangri-la Surabaya jalan Mayjen Sungkono Surabaya pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2011 Pukul 07.00 – 19.00 WIB dan di Pondok Pesantren Sabilurrosyidin Jalan Gayungan VII / 11 Surabaya pada harti Rabu, tanggal 09 maret 2011 Pukul 07.00 – 21.30 WIB .

Dasar :
1. UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R I .
2. KUHP Pasal 510.
3. Juklak Kapolri No.Pol : Juklak / 02 / XII / 1995 tentang Penyelenggaraan Perijinan
4. Surat permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia / LDII Nomor : SUM-51;/DPP LDII/II/2011, tanggal 08 Februari .
5. Surat Rekomendasi dari Kapolsek Sawahan Nomor : Rek / 02 / II / 2011, tanggal 14 Pebruari 2011
6. Surat Rekomendasi dari Kapolsek Gayungan Nomor : Rekom / 09 / II / 2011, tanggal 16 Februari 2011 .

Mengingat : kegiatan tersebut dari segi keamanan dan ketertiban umum / Masyarakat hingga dikeluarkannya Rekomendasi ini ~~terdapat~~ / tidak terdapat hal–hal yang menimbulkan kerawanan.

bahwa dengan ini menyatakan ~~keberatan~~ / tidak keberatan atas diselenggarakannya kegiatan tersebut.

Dengan catatan :
Panitia pelaksana wajib mengurus Surat Ijin / Rekomendasi ke Dir Intelkam Polda Jatim, menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan. Surat rekomendasi ini dapat dicabut kembali apabila situasi keamanan tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya kegiatan.

Kepada Yth :
Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur
u.p. Dir Intelkam
di-
Surabaya

Dikeluarkan di : Surabaya
Pada tanggal : 21 Pebruari 2011

an. KEPALA KEPOLISIAN RESTABES SURABAYA
KEPALA SATUAN INTELKAM

IMRAN EDWIN SIREGAR, SIK
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 69060424

Tembusan :
1. Kapolrestabes Surabaya.
2. Kabag Ops Polrestabes Sby.
3. Kapolsek Sawahan
4. Kapolsek Gayungan .

POLRI DAERAH JAWA TIMUR
ESORT KOTA BESAR SURABAYA
SEKTOR GAYUNGAN
Jl.Gayungsari VI No. 16-18 Surabaya

REKOMENDASI

Nomor : REKOM / 05 / II / 2011

Pertimbangan: Bahwa telah dipenuhi segala hal yang merupakan persyaratan formal, dalam permohonan izin kegiatan yang diajukan oleh pihak pemohon.

Dasar :

1. Undang-undang No.: 02 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-undang No.05/PNPS/1963, tentang kegiatan Politik
3. Juklak Kapolri No.Pol.: Juklak/02/XII/1985 tanggal 29 Desember 1995, tentang Perizinan Pemberitahuan kegiatan masyarakat.
4. Surat dari Ketua Panitia Pelaksanaan kegiatan, Nomor : SUM-51 / DPP I.DII/II/2011 Tanggal 08 Februari 2011, Perihal pemberitahuan Pelaksanaan Munas VII LDII Tahun 2011yang bertempat di Hotel Shangri-La Jl.May.Jend Sungkono dan di Pondok Sabilurrosyidin Jl. Gayungan VII/11 Surabaya.

1. Kegiatan dimaksud dilihat dari segi keamanan tidak terdapat hal – hal yang menimbulkan kerawanan, namun dari segi ketertiban umum dapat menimbulkan kerawanan khususnya kemacetan Lalu lintas, namun seyogyanya dapat ditinjau kembali oleh pengemban fungsi.
2. Bersama ini disampaikan kepada KA Rekomendasi dari Polsek Gayungan guna pertimbangan lebih lanjut.

Dikeluarkan di : Surabaya
Pada tanggal : 16 Pebruari 2010

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR GAYUNGAN

HUSEIN ABU BAKAR, SH
KOMISARIS POLISI NRP 58100716

POLRI DAERAH JAWA TIMUR
RESOR KOTA BESAR SURABAYA
SEKTOR SAWAHAN
Jalan Tidar 171 Surabaya 60252

REKOMENDASI
Nomor : Rek / 2 / II /2011 / INTELKAM

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SAWAHAN

Pertimbangan : Berdasarkan permintaan dari **Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)** tentang perlunya diberikan Rekomendasi dari Polri terhadap penyelenggaraan kegiatan Keramaian Umum dalam Rangka **MUNAS VII LDII TAHUN 2011 PADA HARI SELASA TANGGAL 08 MARET 2011 PUKUL 08.00 DI GRAND BALLROOM SHANGRI-LA HOTEL JALAN MAYJEN SUNGKONO 120 SURABAYA** dengan Penanggung Jawab **Ir.H Criswanto santoso M.Sc**

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Keppres Nomor 97 Tahun 2001 tanggal 2 Agustus 2001 tentang Perubahan atas Kepres RI Nomor 54 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Satuan-Satuan Oranisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Kep. Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Pertahanan dan Keamanan PI Nomor Kep / 12 / XII / 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perijinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.5 PnPs Tahun 1963 tentang Kegiatan Politik.
4. Juklak Kapolri No. Pol. : Juklak / 02 / XII / 1995 tanggal 29 Desember 1995 tentang Penyelenggaraan Perijinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.

Mengingat : Kegiatan tersebut dari segi keamanan dan ketertiban umum / masyarakat hingga dikeluarkannya Rekomendasi ini **tidak terdapat** hal-hal yang menimbulkan kerawanan.

Bahwa dengan ini menyatakan **tidak keberatan** atas diselenggarakannya kegiatan tersebut.

Dengan Catatan : -

Kepada Yth :
KAPOLRESTABES SURABAYA
U.P. KASAT INTEL POLRESTABES
Di –
Surabaya

Surabaya, 14 Pebruari 2011
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SAWAHAN

KEPALA

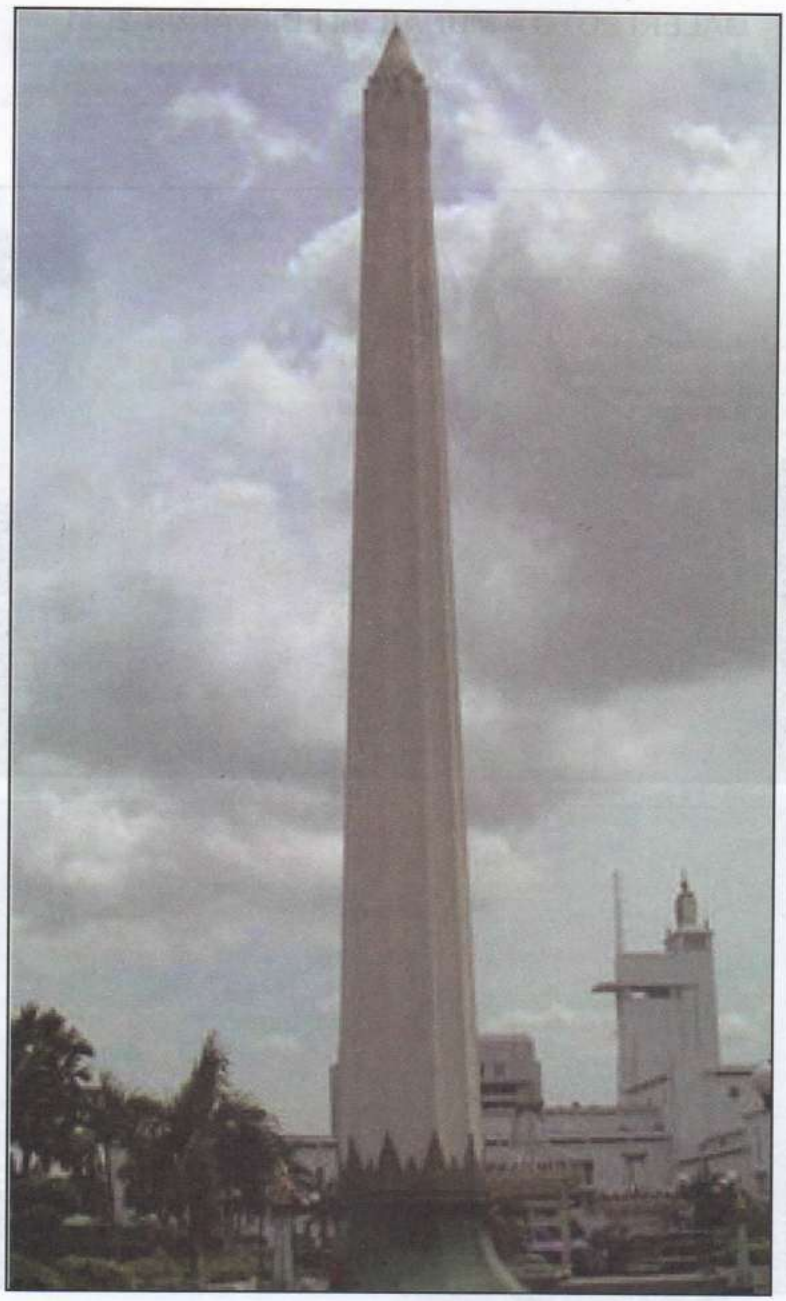
UTIH LEGAWA, SH. SIK
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 76010873

GALERI FOTO – MUNAS VII LDII TAHUN 2011





Gambar 1. Ikon Kota Surabaya - tempat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) didirikan 39 tahun lalu dan tempat pelaksanaan Musyawarah Nasional VII LDII pada tanggal 8-9 Maret 2011 yang bertempat di Hotel Shangri-La dan Grha LDII.



Gambar 2. Tugu Pahlawan yang ada di Kota Pahlawan – Surabaya, menjadi sumber motivasi peserta MUNAS VII LDII Tahun 2011 untuk memperjuangkan aspirasinya dalam acara MUNAS dengan penuh semangat kepahlawanan.





Gambar 3. Ucapan selamat dari mitra kerja di Gedung Grha LDII dan Hotel Shangri-La atas pelaksanaan Musyawarah Nasional VII (MUNAS VII) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Tahun 2011, dengan teriring doa semoga MUNAS VII LDII berlangsung dengan sukses.





Gambar 4. Peserta Musyawarah Nasional VII (MUNAS VII) LDII Tahun 2011, yang datang dari 33 Provinsi di Republik Indonesia, melakukan registrasi sebelum mengikuti Acara Pembukaan MUNAS VII LDII Tahun 2011.



Gambar 5. Sambutan Ketua MUI Pusat (atas), Pembacaan doa (tengah) dan Pemukulan gong sebagai tanda dimulainya Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia (MUNAS VII LDII) Tahun 2011 (bawah).



Gambar 6. Peserta Musyawarah Nasional VII (MUNAS VII) LDII Tahun 2011 menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya (atas), Laporan Ketua OC (tengah), dan sambutan Ketua Umum DPP LDII dalam pembukaan MUNAS VII LDII (bawah).



Gambar 7. Sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan serta tokoh politik yang ikut menghadiri Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia (MUNAS VII LDII) Tahun 2011.



Gambar 8. Menegpora, Dr. A.A. Mallarangeng dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, H. Saifullah Jusuf, berbincang-bincang dengan Ketum DPP LDII, Prof. Dr. KH. Abdullah Syam, M.Sc, menjelang pengarahan pada MUNAS VII LDII.





Gambar 9. Ketua Umum PP. Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Abdul Malik Fajar, M.Sc, berbincang-bincang dengan Ir. Chriswanto Santoso, M.Sc, Ketua Panitia Pelaksana MUNAS VII LDII Tahun 2011 menjelang acara pengarahan.



Gambar 10. Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama, Prof. Dr. K.H. Said Agiel Siraj, MA dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, Prof. Dr. K.H. Umar Shihab, memberikan tausiah kepada seluruh peserta MUNAS VII LDII Tahun 2011.



Gambar 11. Pengarahan oleh Menegpora Dr. A. Alfian Mallarangeng (atas), Deputi I. Kemenko Polhukam Mayjen TNI Amirrudin Usman S.Ip. mewakili Menko Polhukam (tengah), & Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, H. Saifullah Yusuf (bawah).



Gambar 12. Pengarahan dalam MUNAS VII LDII Tahun 2011: Ketua PP Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Abdul Malik Fajar, MSc; Direktur Utama Bank Syariah Mandiri, Yuslam Fauzi; dan Guru Besar Universitas Airlangga, Prof. Dr. Kacung Marijan.





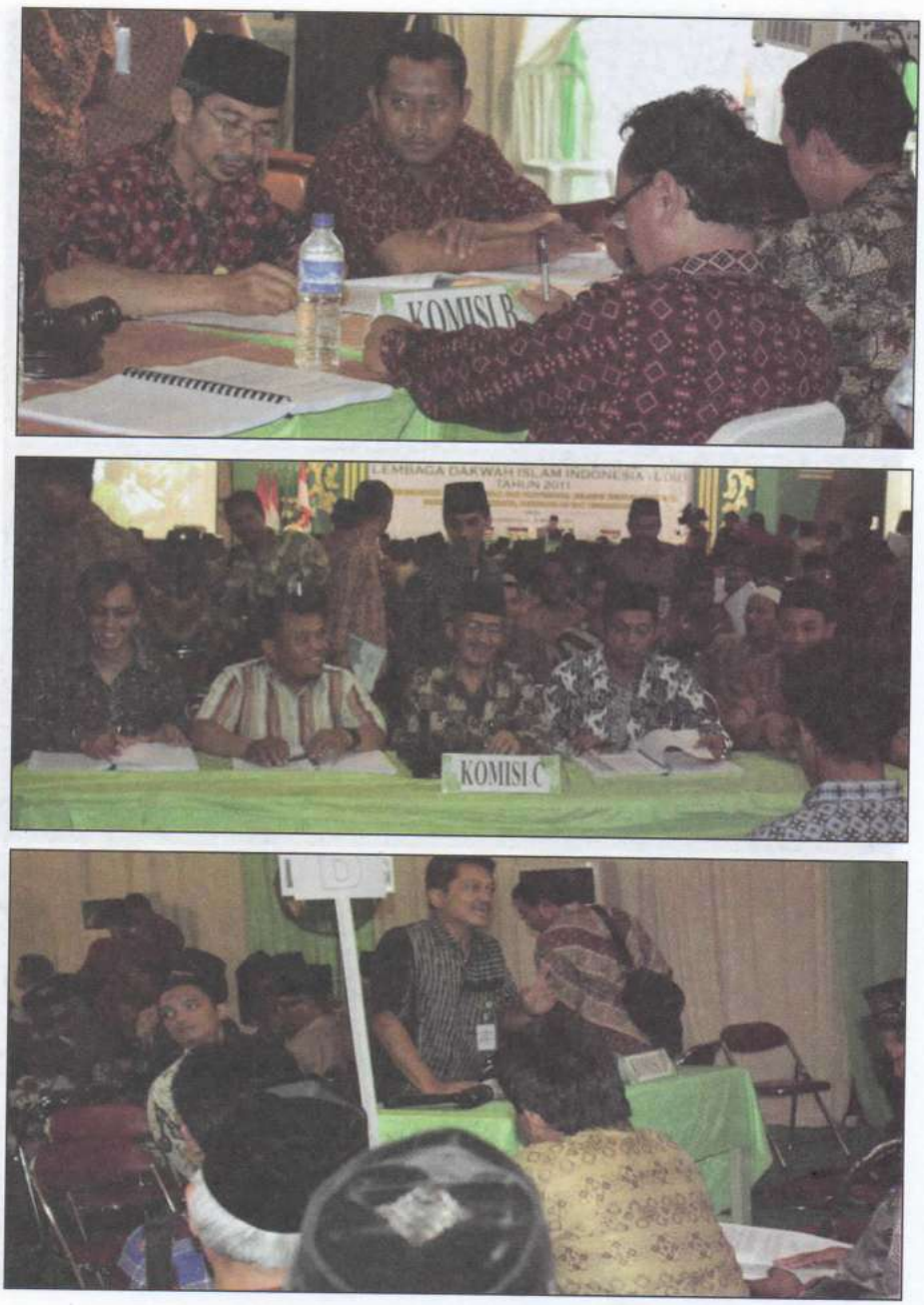
Gambar 13. Perwakilan DPD Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi menyampaikan pemandangan umum menanggapi Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum DPP LDII masa bakti 2005-2011 pada MUNAS VII LDII Tahun 2011.



Gambar 14. Perwakilan DPD Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi menyampaikan aspirasinya berkaitan dengan Usulan Calon Ketua Umum DPP LDII Masa Bakti 2011-2016 pada MUNAS VII LDII Tahun 2011.



Gambar 15. Representasi pimpinan berbagai persidangan (Rapat Pleno dan Rapat Pimpinan MUNAS) pada Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia (MUNAS VII LDII) Tahun 2011.



Gambar 16. Representasi suasana persidangan komisi (Rapat Komisi B, Komisi C, dan Komisi D) pada Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia (MUNAS VII LDII) Tahun 2011.



Gambar 17. Prof. Dr. K.H. Abdullah Syam, MSc yang terpilih menjadi Ketua Umum DPP LDII Periode 2011 – 2016, menerima Bendera Pataka LDII dan mendapatkan ucapan selamat dari Pimpinan Sidang MUNAS VII LDII Tahun 2011.



Gambar 18. Acara penutupan Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia (MUNAS VII LDII) Tahun 2011. Laporan Ketua OC (atas), Sambutan Ketua Umum DPP LDII periode 2011-2016 (tengah), Pembacaan doa (bawah).





Gambar 19. Keseluruhan rangkaian acara MUNAS VII LDII Tahun 2011 disiarkan melalui berbagai media massa dan melalui *video-streaming* sehingga dapat dibaca luas oleh masyarakat dan disaksikan oleh pemirsa dari mancanegara.





Gambar 20. Sarana penunjang mulai dari toko souvenir, agen perjalanan, dan warung makanan tempat peserta Musyawarah Nasional VII LDII Tahun 2011 menghalau rasa lelah dan jenuh selama mengikuti acara.

DAFTAR LIPUTAN MEDIA TENTANG MUNAS VII LDII TAHUN 2011

Media & Tanggal	Alamat dan Judul Liputan
Surya Online 8 Maret 2011	http://www.surya.co.id/2011/03/08/andi-malarangeng-buka-MUNAS-ldii 'Andi Malarangeng Buka MUNAS LDII'
Tempo Interaktif 8 Maret 2011	http://www.tempointeraktif.com/hg/surabaya/2011/03/08/brk,20110308-318385,id.html 'LDII selenggarakan MUNAS ke-7 di Surabaya'
Radar Yogya 8 Maret 2011	http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:i0mmESpBr3MJ:www.radarjogja.co.id/component/content/article/3-politika/14416-MUNAS-ldii-di-hotel-bintang-lima-.html+MUNAS+ldii&cd=28&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-a&source=www.google.co.id 'MUNAS LDII di Hotel Bintang Lima'
Surya Online 8 Maret 2011	http://www.surya.co.id/2011/03/08/mui-minta-pemerintah-larang-ahmadiyah 'MUI minta pemerintah larang Ahmadiyah'
KabarGres.com 8 Maret 2011	http://www.kabargres.com/index.php?mod=read&id=2789 'LDII gelar MUNAS VII di Surabaya'
Antara News 10 Maret 2011	http://www.antaranews.com/foto/14921/MUNAS-ldii-ke-vii MUNAS LDII KE – VII
BisnisJatim.com Bisnis Indonesia 11 Maret 2011	http://www.bisnis-jatim.com/?p=8582 MUNAS LDII KE – VII
Republika Online 14 Juni 2011	http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/11/03/10/168365-prof-abdullah-syam-pimpin-ldii-2011-2016 'Prof Abdullah Syam Pimpin LDII 2011-2016'

DAFTAR LIPUTAN MEDIA (LANJUTAN)

Media & Tanggal	Alamat dan Judul Liputan
Arsip Berita Indonesia 10 Maret 2011	http://arsipberita.com/show/prof-abdullah-syam-pimpin-ldii-20112016-177359.html 'Prof Abdullah Syam Pimpin LDII 2011-2016'
Antara News 9 Maret 2011	http://www.antaranews.com/berita/249287/prof-abdullah-syam-pimpin-ldii-2011-2016 'Prof Abdullah Syam pimpin LDII 2011-2016'
Antara News – Jawa Timur 9 Maret 2011	http://www.antarajatim.com/lihat/berita/57324/prof-abdullah-syam-pimpin-ldii-2011-2016 'Prof Abdullah Syam Pimpin LDII 2011-2016'
Web.detikpertama.com 10 Maret 2011	http://web.detikpertama.com/prof-abdullah-syam-pimpin-ldii-2011-2016 'Prof Abdullah Syam Pimpin LDII 2011-2016'
CyberSabili.com 10 Maret 2011	http://www.sabili.co.id/Indonesia-kita/prof-abdullah-syam-pimpin-ldii-2011-2016 'Prof Abdullah Syam Pimpin LDII 2011-2016'
AntaraNews 8 Maret 2011	http://www.antaranews.com/berita/249133/ldii--islam-tidak-radikal 'LDII: ISLAM TIDAK RADIKAL'
Arsip Berita Indonesia 10 Maret 2011	http://arsipberita.com/show/ldii-islam-tidak-radikal-176420.html 'LDII : Islam Tidak Radikal'
Antara News – Jawa Timur 8 Maret 2011	http://www.antarajatim.com/lihat/berita/57212/ldii-islam-tidak-radikal 'LDII: ISLAM TIDAK RADIKAL'
Republika Online 9 Maret 2011	http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/03/09/168105--islam-itu-

DAFTAR LIPUTAN MEDIA (LANJUTAN)

Media & Tanggal	Alamat dan Judul Liputan
	tidak-radikal-kecuali-dipolitisasi- 'Islam Itu Tidak Radikal Kecuali Dipolitisasi'
Tempo Interaktif 8 Maret 2011	http://www.tempointeraktif.com/hg/kesra/2011/03/08/brk,20110308-318389,id.html 'LDII : Islam Tidak Mengenal Radikalisme'
Surya Online 9 Maret 2011	http://www.surya.co.id/2011/03/09/ldii-bebaskan-anggotanya-pilih-partai-yang-disukai 'LDII Bebaskan Anggotanya Pilih Partai yang Disukai'
Tempo Interaktif 8 Maret 2011	http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2011/03/08/brk,20110308-318444,id.html 'Ahmadiyah Diminta Mencontoh LDII'
Republika Online 9 Maret 2011	http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/03/09/168252-soal-ahmadiyah-pemerintah-diminta-dengarkan-aspirasi-daerah 'Soal Ahmadiyah, Pemerintah Diminta Dengarkan Aspirasi Daerah'
Antara News – Jawa Timur 9 Maret 2011	http://www.antarajatim.com/lihat/berita/57273/said-aqiel-dengarkan-aspirasi-soal-ahmadiyah 'Said Aqiel: Dengarkan Aspirasi Soal Ahmadiyah'
Antara News – Jawa Timur 8 Maret 2011	http://www.antarajatim.com/lihat/berita/57195/mui-minta-pemerintah-larang-ahmadiyah 'MUI Minta Pemerintah Larang Ahmadiyah'
Republika Online 8 Maret 2011	http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/03/08/168051-mui-minta-pemerintah-tegas-larang-ahmadiyah 'MUI Minta Pemerintah Tegas Larang Ahmadiyah'

DAFTAR LIPUTAN MEDIA (LANJUTAN)

Media & Tanggal	Alamat dan Judul Liputan
Republika Online 8 Maret 2011	http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/03/08/167986-ulama-mengapa-pemerintah-tidak-bisa-membubarkan-ahmadiyah- 'Ulama: Mengapa Pemerintah Tidak Bisa Membubarkan Ahmadiyah?'
Antara News – Jawa Timur 9 Maret 2011	http://www.antarajatim.com/lihat/berita/57292/pbnu-minta-ormas-dilibatkan-dalam-perencanaan-pembangunan 'PBNU minta ormas dilibatkan dalam perencanaan pembangunan'